ISSN 2089-3531

PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2020

ISSN 2089-3531

PEMBANGUNAN MANUSIA **BERBASIS GENDER**

2020

TIM PENYUSUN

Pengarah	:	Pribudiarta Nur Sitepu
Penanggung Jawab	:	Fakih Usman Lies Rosdianty
Editor dan Penyelaras Akhir	:	Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah Sylvianti Angraini Indah Lukitasari
Penulis	:	Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah Yuliana Mahdiah Eva Fahmadia Indah Lukitasari
Pengolah Data	:	Indah Lukitasari Nurhayati Siska Ayu Tiara Dewi Nadhira Aulia

KATA SAMBUTAN

Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia telah menetapkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Sejumlah regulasi internasional sudah diratifikasi oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen di tingkat global. Norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya membangun kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta menegaskan bahwa setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktifitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar sehingga dapat merusak keseimbangan pembangunan.

Sementara itu, RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke depan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan pada tahun 2030. Kementerian PPPA telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender baik dari sisi regulasi, program maupun kebijakan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender.

Data IPG dan IDG telah tersedia sampai tingkat kabupaten/kota, sehingga sangat membantu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat mengurangi kesenjangan atau disparitas antar daerah. Koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah di tingkat pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk menjawab berbagai permasalahan terkait kesenjangan gender.

Akhir kata kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan ucapan terima kasih pada berbagai pihak yang telah mendampingi penyusunan Pembangunan Manusia

berbasis Gender Tahun 2020. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan buku ini. Semoga buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender ini dapat bermanfaat dalam mempercepat kesetaraan gender di Indonesia.

Jakarta,   Desember 2020
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

I Gusti Bintang Puspayoga

KATA PENGANTAR

Tujuan kelima pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan. Gender merupakan isu yang multidimensi dan tercantum di hampir seluruh TPB. Dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun, kita perlu perhatikan level pencapaian IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah yaitu apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah.

Selanjutnya, IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.

Pada tahun 2019, masih terdapat 19 provinsi dengan capaian IPG di bawah rata-rata nasional. Sedangkan untuk IDG hanya ada 5 provinsi yang pencapaiannya berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di banyak daerah.

Publikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan program, kegiatan, dan kebijakan serta bahan evaluasi dalam berbagai upaya peningkatan kesetaraan gender untuk dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Jakarta, Desember 2020

Sekretaris Kementerian

Pribudiarta Nur Sitepu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan sumber daya manusia di Indonesia mengalami peningkatan dalam sembilan tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menunjukkan peningkatan signifikan yang diukur melalui indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pada laki-laki dan perempuan. Secara nasional, sejak tahun 2016 Indonesia sudah mencapai status tinggi yaitu 70,18. Capaian ini terus meningkat dari tahun ke tahun hingga di tahun 2019, IPM Indonesia telah mencapai nilai 71,92 atau kategori tinggi. Capaian Indonesia pada IPM tahun 2019 ini mendudukkan Indonesia pada peringkat 107 dari 189 negara dan wilayah. Di tingkat ASEAN, Indonesia masih berada pada peringkat ke-6 dari 10 negara di ASEAN. Dengan demikian, posisi Indonesia berada di peringkat tengah, dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina; namun berada di atas Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, nilai IPM ini masih menunjukkan kesenjangan pada perempuan, karena IPM perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Sejak tahun 2010, IPM laki-laki telah berstatus tinggi dengan nilai IPM di atas 70, namun IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM di kisaran angka 60-an. Tahun 2019, IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM 69,18, tertinggal jauh dengan laki-laki yang telah mencapai nilai IPM 75,96.

Provinsi dengan IPM perempuan berstatus tinggi hanya terjadi di 9 provinsi dengan capaian tertinggi di DKI Jakarta yaitu 79,16, sedangkan IPM perempuan terendah terjadi di Papua dengan nilai IPM hanya 53,14 atau masih termasuk kategori rendah.

Tiga indikator yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 1) kesehatan yang dilihat pada Angka Harapan Hidup (AHH), 2) pendidikan dilihat melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan 3) pengeluaran pada laki-laki dan perempuan dilihat dari pengeluaran perkapita. Di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam sembilan tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat Indonesia. Data tahun 2010-2019 menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan derajat kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tahun 2019 angka harapan hidup perempuan adalah 73,33 tahun, atau lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 73,19. Demikian juga pada laki-laki, angka harapan hidup laki-laki adalah 69,44 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, namun masih lebih pendek dibandingkan dengan angka harapan hidup perempuan.

Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia mengalami peningkatan dengan capaian 91,07. Capaian di tahun 2019 ini telah mampu melampaui capaian IPG di tahun 2015 yaitu 91,03 yang sempat mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2016 menjadi 90,82. Namun sejak tahun 2017, IPG Indonesia terus meningkat hingga saat ini. IPG Indonesia tahun 2019 mengalami kenaikan 0,55 poin atau tumbuh 0,08 persen dibanding tahun 2018. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2018-2019. IPM perempuan tumbuh 0,80 persen, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki yang tumbuh 0,70 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun capaian IPG di tahun 2019 ini telah memulihkan capaian di tahun 2015, namun belum berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama Renstra Kementerian PPPA di tahun 2019 yang mentargetkan IPG telah mencapai 92,00.

Berdasarkan sebaran provinsi, terdapat 15 provinsi dengan nilai IPG di atas nilai nasional. Tiga provinsi dengan capaian IPG tertinggi masih berada di provinsi yang sama dengan tahun 2018, hanya berbeda peringkat. Jika di tahun 2018 Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan capaian IPG tertinggi, namun di tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menempati peringkat ketiga tertinggi setelah DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Di tahun 2019, DI Yogyakarta mencapai nilai IPG sebesar 94,77, DKI Jakarta mencapai 94,71 dan Sulawesi Utara mencapai 94,53. Tiga provinsi dengan IPG terendah masih berada di provinsi yang sama dengan tahun 2018, yaitu Provinsi Papua (80,05), Papua Barat (82,74) dan Kalimantan Timur (85,98). Secara keseluruhan, di tahun 2019, baru terdapat 11 provinsi yang telah mencapai target renstra KPPPA dengan capaian IPG sebesar 92,00.

Terdapat 44,81 persen kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai IPG di atas 90 dalam sebaran provinsi yang bervariasi. Persentase ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 46,81 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Meskipun demikian, capaian IPG suatu daerah tidak bermakna pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di daerah tersebut sudah tinggi. IPG diformulasikan sebagai rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang "sama-sama tinggi" dan "sama-sama rendah". Hal ini dapat dibuktikan melalui sejumlah kabupaten/kota yang telah mencapai IPG di atas 90 namun nilai IPMnya masih dibawah 60 pada keduanya atau salah satunya. Kabupaten/Kota yang dimaksudkan adalah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT dan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua dengan nilai IPM laki-laki dan perempuan sama-sama dibawah 60, serta Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Tengah, Nias dan Alor yang memiliki IPM rendah pada kelompok perempuan.

Hubungan antara IPM dan IPG dapat dilihat dari pemetaan kabupaten/kota dan provinsi berdasarkan level IPG dan IPM. Analisis kuadran digunakan dengan membagi Kabupaten/Kota dan provinsi dalam empat kelompok (kuadran). Kuadran I merupakan Kabupaten/

Kota dan provinsi dengan IPM dan IPG di atas angka nasional pada perempuan dan laki-laki. Kuadran II merupakan Kabupaten/Kota dan provinsi dengan kondisi IPM di atas angka nasional tetapi IPG di bawah angka nasional. Kuadran III adalah Kabupaten/Kota dan provinsi dengan IPM dan IPG di bawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah Kabupaten/Kota dan provinsi dengan kondisi IPM di bawah angka nasional tetapi IPG di atas angka nasional. Dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, terdapat 104 Kabupaten/Kota atau 21,36 persen yang masuk kuadran 1, yaitu IPG dan IPM pada laki-laki dan perempuan sudah sama-sama di atas angka nasional. Berdasarkan provinsi, hanya terdapat 5 provinsi yang masuk kuadran I atau provinsi dengan capaian IPG dan IPM pada perempuan dan laki-laki yang sama-sama diatas angka nasional, yaitu terjadi di provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, dan Sulawesi Utara.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang terus meningkat. IDG digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga professional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan. Dalam sembilan tahun terakhir, IDG Indonesia menunjukkan peningkatan dari angka 68,15 pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 75,24 pada tahun 2019. Nilai IDG yang dicapai pada tahun 2019 melesat secara signifikan dibandingkan tahun 2018 dengan peningkatan sebanyak 3,14 poin atau sebesar 4,35 persen. Pertumbuhan IDG pada periode 2018-2019 ini sangat cepat dibandingkan periode 2017-2018 yang hanya meningkat 0,36 poin atau 0,50 persen.

Tingginya pertumbuhan IDG ini disebabkan adanya peningkatan yang terlihat pada semua indikator pembentuk IDG, terutama pada keterlibatan perempuan di parlemen yang meningkat signifikan. Di tahun 2019, jumlah perempuan di parlemen meningkat menjadi 20,52 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang baru mencapai 17,32 persen. Hal inilah yang menyebabkan angka IDG meningkat tajam dan mengindikasikan pemberdayaan gender di Indonesia semakin nyata.

Berdasarkan sebaran provinsi, terdapat hanya lima provinsi yang mempunyai nilai IDG di atas angka nasional, yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku. Nilai IDG paling tinggi terjadi di provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian 83,2. Terdapat tiga provinsi yang nilai IDG masih kurang dari 60, yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat dengan nilai IDG terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 51,91. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan gender di Indonesia sudah meningkat secara signifikan, namun masih belum merata di seluruh provinsi, atau masih terdapat kesenjangan IDG yang signifikan di antara provinsi di Indonesia.

Disparitas capaian IDG masih terlihat belum merata di seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 85,29 persen provinsi yang masih mempunyai nilai pemberdayaan gender di bawah nilai nasional, dan hanya lima provinsi dengan nilai IDG di atas nilai nasional. Kelima provinsi dengan nilai IDG tertinggi ini berbeda dengan tahun 2018, kecuali Sulawesi Utara, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Dua provinsi yang berhasil mencapai nilai IDG dalam peringkat 5 terbaik adalah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Perubahan peringkat IDG ini terlihat dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan atau penurunan angka keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk komponen perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan, terlihat tidak terlalu berpengaruh karena perubahan capaian yang diperoleh tidak signifikan sehingga tidak terlalu bermakna dalam mempengaruhi peringkat IDG.

DAFTAR ISI

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Bab I

Kesetaraan Gender dan Pembangunan Manusia

A. Urgensi Kesetaraan Gender

Prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga (UNDP, 2015). Untuk mencapai prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Realitas pembangunan manusia di Indonesia masih terus diperjuangkan untuk mencapai harapan terbaiknya. Pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih terus menjadi prioritas utama. Kesenjangan capaian pada perempuan dan laki-laki yang masih dijumpai menjadi landasan arah pembangunan manusia ke depan. Tantangan pembangunan manusia di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural,

konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

Di bidang pendidikan, capaian pembangunan telah menunjukkan kesetaraan, terutama pada pendidikan yang ditamatkan perempuan di tingkat dasar dan menengah. Hal ini terlihat pada kepemilikan ijazah tertinggi, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni antara perempuan dan laki-laki yang sudah setara. Meskipun secara nasional sudah menunjukkan hasil yang diharapkan, namun kesenjangan berdasarkan wilayah kota dan desa masih menjadi persoalan pembangunan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, jika dilihat secara nasional, angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki telah setara, terutama pada penduduk usia 15-24 tahun, meskipun masih terjadi kesenjangan di wilayah perdesaan dan baru 21 provinsi yang telah mencapai angka melek huruf lebih dari target RPJMN tahun 2019 atau di atas 96,1 persen (Kemen. PPPA, 2020a). Hal ini menunjukkan agenda pembangunan manusia di bidang pendidikan belum selesai, terutama di wilayah perdesaan dan di provinsi yang belum mencapai target RPJMN.

Pembangunan manusia di bidang kesehatan masih perlu diperjuangkan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih jauh dari harapan target SDG's untuk sampai pada angka 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Meskipun persentase persalinan perempuan yang telah ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di tahun 2019 telah mencapai 94,71 persen, namun data

BPS menunjukkan perkawinan pertama pada perempuan usia di bawah 19 tahun masih sangat tinggi, yaitu usia 17-18 tahun sebesar 20,74 persen dan usia kurang dari 16 tahun sebanyak 15,48 persen (Kemen. PPPA, 2020a). Kepedulian terhadap kesehatan reproduksi perempuan masih sangat diperlukan karena kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang sangat tinggi, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya praktik perkawinan usia anak pada perempuan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan masih sangat rendahnya jumlah pengguna alat kontrasepsi pada laki-laki. Pada ibu hamil dan anak usia dibawah usia dua tahun, akses mendapatkan layanan kesehatan dasar juga sangat sulit, hal ini dapat meningkatkan kerentanan resiko pertumbuhan janin/bayi *stunting* (Bappenas, 2018).

Di bidang ekonomi kesenjangan gender masih terjadi terutama pada partisipasi angkatan kerja dan upah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki dan Dalam sepuluh tahun terakhir, TPAK perempuan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2019, TPAK perempuan hanya sebesar 51,89 persen, jauh tertinggal dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 83,13 persen. Diskriminasi pada upah pekerja perempuan masih terjadi. Perempuan yang bekerja masih menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun sama-sama dalam tingkat pendidikan yang setara. Rasio rata-rata antara upah perempuan dan laki-laki yang bekerja di tahun 2019 hanya sebesar 77,39 persen (Kemen. PPPA, 2020a). Diskriminasi upah pada perempuan juga terjadi di dunia global, dalam data UNDP, perempuan hanya mendapatkan 77 sen dari setiap dolar yang diperoleh laki-laki dalam pekerjaan yang sama (www.undp.org, 2020b).

Berbagai persoalan ketimpangan gender terjadi bukan hanya karena pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan masalah gender, namun tantangan pembangunan di Indonesia masih dihadapkan pada praktik budaya yang sebagian diantaranya

belum berpihak pada kesetaraan gender. Harapan sekolah pada perempuan yang cukup tinggi sulit dipenuhi karena masih terdapat budaya di masyarakat yang menganggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, mitos pendidikan menyebabkan perempuan menjadi perawan tua, tabunya Pendidikan tentang seksualitas, dan bahkan karena kondisi ekonomi dan sosial menyebabkan anak perempuan terpaksa harus menikah di usia sekolah. Kesehatan reproduksi perempuan juga masih banyak bergantung pada proses pengambilan keputusan pihak lain, akibatnya akses pada layanan kesehatan yang ada menjadi tidak bermakna, sementara tanggung jawab kesehatan keluarga secara budaya masih dibebankan sepenuhnya kepada perempuan.

Di bidang ekonomi, partisipasi angkatan kerja perempuan masih dihadapkan pada dilema antara tuntutan budaya untuk bertanggung jawab di ranah domestik (keluarga) atau pengembangan potensi diri untuk berperan di ruang publik atau pasar kerja. Konstruksi budaya yang masih menempatkan perempuan untuk bisa membagi waktu melakukan kerja-kerja reproduksi di rumah mempengaruhi pilihan pekerjaan yang tidak bisa seleluasa laki-laki. Data BPS menunjukkan menurut status pekerjaan utama antara perempuan dan laki-laki masih terjebak dengan cara pandang pada stereotip peran gender. Pada jenis pekerjaan yang berbasis pengasuhan dan perawatan masih didominasi oleh perempuan, sedangkan jenis pekerjaan yang dinilai maskulin menjadi ranah mayoritas laki-laki (Kemen. PPPA, 2020a). Sekelumit data ini menunjukkan konstruksi budaya yang belum berkesetaraan gender masih menjadi tantangan pembangunan manusia di Indonesia.

Perubahan cara pandang yang mengedepankan kesetaraan gender penting dilakukan dalam pembangunan manusia karena akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Upaya mengarusutamakan pembangunan manusia berbasis gender tidak dapat dihindari jika kemajuan bangsa dan keadilan sosial menjadi visi bangsa. Selain kualitas bangsa yang

berdaya saing, peningkatan sumber daya manusia berbasis gender juga diperlukan agar cara pandang dan perspektif seluruh elemen bangsa tidak lagi melihat perempuan sebagai sumber masalah dan obyek pembangunan, dan tidak lagi memposisikan perempuan secara subordinat dan marginal dalam sistem pembangunan. Cara pandang yang merendahkan perempuan ini dapat melanggengkan praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender, baik dalam bentuk pembatasan, pengurangan, maupun penghilangan hak-hak dasar perempuan sebagai warga negara. Kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuknya semakin beresiko. Jika tidak diintervensi, maka situasi ini menjadi hambatan nyata dalam pembangunan manusia di Indonesia.

Dalam pembangunan manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Kesenjangan gender yang masih terlihat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, harus direspon melalui langkah dan tindakan kongkrit dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Reformasi di bidang hukum, sistem dan budaya di masyarakat dilakukan secara simultan agar berbagai diskriminasi gender dapat dihentikan, terutama pada perempuan. Pembatasan atau pengurangan pada akses, peluang, dan pilihan pada perempuan berpengaruh pada tingkat partisipasi dan kontrol perempuan dalam memajukan kapasitas dan potensi dirinya. Akibatnya, kemajuan yang dicapai perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan tidak dapat memaksimalkan potensi dirinya dan menjalani kehidupan dengan standar hidup dan keberdayaan yang penting bagi perkembangan kemanusiaan dan pembangunan negara.

Kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan manusia telah terlihat dalam berbagai kebijakan dan regulasi di Indonesia. Selain melakukan ratifikasi terhadap sejumlah konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/*Convention*

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (*CEDAW*) dan *Beijing Declaration and Platform for Action* (BDPA), pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan sejumlah kebijakan dan undang-undang untuk penghapusan berbagai diskriminasi gender dan pembangunan manusia berbasis gender. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kesenjangan dan diskriminasi gender. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka memastikan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang setara dan adil gender.

B. Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan manusia Indonesia berbasis gender diperkuat melalui turut sertanya Negara Indonesia dalam memenuhi target pembangunan di tingkat global. Setelah *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015, saat ini Indonesia sedang menjalankan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan utama yang disepakati dalam SDGs yang lahir pada tahun 2012 melalui pertemuan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro. Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ini ditargetkan dapat tercapai dalam 15 tahun atau di tahun 2030 (www.undp.org, 2020a).

Melalui SDGs, PBB terus mendorong semua negara anggota mengarahkan tujuan pembangunan yang dapat diukur dan disepakati secara universal. Terdapat 17 SDGs yang disepakati dan disadari sebagai tujuan yang saling terintegrasi. Artinya, setiap bidang dalam tujuan pembangunan merupakan saling memengaruhi capaian pada bidang lainnya. Pembangunan

berkelanjutan harus menyeimbangkan keberlajutan sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga dapat memastikan semua orang menikmati hasil pembangunan secara merata. Dalam SDGs, prinsip *Leave No One Behind* (Jangan Meninggalkan Seorang-pun) mengarahkan percepatan pembangunan menuju nol kemiskinan, diskriminasi dan pengecualian, mengurangi ketidaksetaraan dan kerentanan yang dapat membuat orang tertinggal dan kehilangan potensinya (UNSDG, 2020).

Kotak 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), 2015-2030

1. **Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.**
2. **Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.**
3. **Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.**
4. **Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.**
5. **Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.**
6. **Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.**
7. **Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.**
8. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.**
9. **Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.**
10. **Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara.**

11. **Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.**
12. **Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.**
13. **Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.**
14. **Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya Kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan.**
15. **Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.**
16. **Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan**
17. **Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan**

SDGs memuat 17 tujuan yang terbagi ke dalam 169 target. Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak". Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa adanya kesetaraan gender. Hal ini tampak menjadi kesadaran seluruh bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Di dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender, yaitu (www.un.org, 2020):

1. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun
2. Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya
3. Menghapus kan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional

8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan

9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan

Selain secara eksplisit menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender juga terintegrasi secara implisit dalam sejumlah tujuan SDGs lainnya. Pada tujuan terkait penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, ekonomi, industri, dan lingkungan, isu gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sejumlah tujuan SDGs tersebut hanya dapat dicapai secara maksimal jika kesetaraan gender terimplementasi di dalamnya. Merujuk pada 17 tujuan SDGs, terdapat sembilan tujuan SDGs yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan ke-5, kesetaraan gender, yaitu:

1. **Tujuan 1: "Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat"** Pada tujuan 1 ini, target capaian yang terkait langsung dengan kesetaraan gender adalah: 1) mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, 2) menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, dan 3) Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin

dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

2. **Tujuan 2: "Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan".** Pada tujuan ke-2, kesetaraan gender terefleksi pada komitmen target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

3. **Tujuan 3: "Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia".** Pada tujuan ke-3, kesetaraan gender terfokus pada 2 target, yaitu 1) mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan 2) menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

4. **Tujuan 4: "Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua".** Pada tujuan ke-4, terdapat lima target yang terkait erat dengan kesetaraan gender, yaitu 1) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, 2) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, 3) menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, 4) menghilangkan disparitas gender dalam

pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan, dan 5) menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

5. **Tujuan 6: "Menjamin Ketersediaan Serta Pengolaan Air Bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan untuk semua".** Pada tujuan ke-6, penegasan pentingnya kesetaraan gender terlihat pada dua target, yaitu 1) populasi menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dan 2) Penduduk memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

6. **Tujuan 8: "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua".** Pada tujuan ke-8, perhatian terhadap kesenjangan ekonomi perempuan terefleksi pada 2 target capaian, yaitu 1) mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, dan 2) melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

7. **Tujuan 9: "Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi".** Target dari tujuan ke-9 yang terkait dengan kesetaraan gender terdapat pada target penduduk menggunakan telepon genggam dan internet (termasuk perempuan).

8. **Tujuan 10: "Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara".** Tujuan ke-10, kesetaraan gender terefleksi pada 2 target, yaitu 1) memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya, dan 2) menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

9. **Tujuan 11: "Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan".** Pada tujuan ke-11, kesetaraan gender secara tegas disebutkan dalam target untuk menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

Di Indonesia, kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan global ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017 dan kebijakan pendukungnya. Pada pasal 4 ditetapkan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemban amanat dalam Menyusun Peta Jalan Nasional RAN TPB dan RAN TPB (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2017). Untuk memastikan capaian SDGs, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Nasional SDGs yang bertugas memastikan upaya-upaya capaian SDGs dapat disinergikan dalam pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Tim ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pemerintah, pakar, dan pelaksana yang bekerja untuk empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata Kelola.

C. Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan dalam RPJMN 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 secara tegas menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu pertimbangan mendasar dalam penyusunan rencana pembangunan di Indonesia. Sumber Daya manusia (SDM) diposisikan sebagai modal utama dalam pembangunan nasional sehingga kualitas SDM menjadi prioritas utama pembangunan. Untuk mengukur capaian kesetaraan gender, RPJMN menggunakan tiga indicator yang telah disepakati secara global, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Penyusunan RPJMN ini merujuk pada Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita). Pemerintahan Presiden Jokowi periode tahun 2015-2019, pembangunan SDM dan pemberdayaan gender terdapat pada agenda pertama dan kesembilan dari Nawa Cita Pemerintah, yaitu: 1) Agenda 1. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pada sub-agenda ketiga berisi agenda "Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan"; 2) Agenda 9. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Pada sub-agenda keenam berisi agenda "Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal"

Kotak 2. Agenda Prioritas Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, 2015-2019

Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam mengimplementasikan komitmen pemerintah terhadap target yang ingin dicapai dalam SDGs, RPJMN Tahun 2015-2019 menfokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environment development*) secara berimbang dan terpadu. Oleh karena itu, di dalam RPJMN, SDGs menjadi bagian koheren dan terintegrasi dalam Agenda Pembangunan Paska-2015 yang diwujudkan dalam agenda pembangunan di tahun 2015-

2019. Fokus SDGs yang menjadi agenda prioritas dalam RPJMN Tahun 2015-2019 di antaranya adalah 1) pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, 2) akses terhadap air, sanitasi dan energi, 3) pembangunan ekonomi berkelanjutan 4) pembangunan lingkungan, mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati (Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, 2015).

Dalam memastikan kesetaraan gender terintegrasi dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah menyadari adanya sejumlah tantangan dalam pembangunan SDM. Secara khusus, dalam bidang kesetaraan gender, RPJMN menyebutkan adanya sejumlah tantangan yang diidentifikasi, yaitu:

1. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

2. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.

3. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan

4. Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi

Meskipun target capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tahun 2019 tidak disebutkan angkanya, namun RPJMN telah mentargetkan adanya peningkatan capaian IPG dari sebesar 69,6 di tahun 2013 dan IDG sebesar 70,5 di tahun 2013 menjadi meningkat di tahun 2019. Dalam memastikan target ini, di dalam Matriks Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama yang menjadi lanjutan dokumen RPJMN disebutkan adanya sembilan sasaran bidang yang lima diantaranya terkait langsung dengan kesetaraan gender, yaitu:

1. Meningkatnya kesertaan ber-KB dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;

2. Meningkatnya status gizi masyarakat, status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya pengendalian penyakit menular di lingkungan, dan meningkatnya perlindungan finansial;

3. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk;

4. Tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan insklusif bagi disabilitas dan lanjut usia, terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah derah, masyarakat dan swasta;
5. Meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus, meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

Selain secara eksplisit tercantum di dalam matriks RPJMN bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, kesetaraan gender telah menjadi program lintas/program/kegiatan prioritas nasional. Terdapat 12 (dua belas) program lintas/program/kegiatan prioritas yang menetapkan agenda kesetaraan dan pengarusutamaan gender yang termaktub di dalam Matriks Bidang Pembangunan, yaitu: 1) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 2) Pengarusutamaan Gender Bidang Hukum, 3) Pengarusutamaan Gender Bidang Infrasturktur, 4) Pengarusutamaan Gender Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 5) Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan, 6) Pengarusutamaan Gender Bidang Ketenagakerjaan, 7) Pengarusutamaan Gender Bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industry, dan perdagangan, 8) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, 9) Pengarusutamaan Gender Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan dan Agrobisnis, 10) Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan, 11) Pengarusutamaan Gender Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan 12) Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah.

Komitmen terhadap pembangunan berkesetaraan gender yang tertuang dalam RPJMN sejatinya merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam dokumen Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025, salah satu misi pembangunan Indonesia adalah "Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender" (Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025, 2005).

D. Kesetaraan Gender sebagai Tujuan dalam Rencana Strategis KEMEN PPPA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan kementerian yang secara khusus membidangi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Amanat utama yang diemban Kemen PPPA adalah memastikan penyelenggaran pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terintegrasi dalam seluruh bidang pembangunan di Indonesia. Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kemen PPPA mempromosikan PUG dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan sehingga tujuan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN dapat diimplementasikan secara terintegrasi antar-lembaga/kementerian.

Sebagai bagian dari Kabinet Kerja Periode 2015-2019, Kemen PPPA menyusun Rencana Strategisnya berdasarkan RPJMN 2015-2019. Dalam mewujudkan visi pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong rotong, Kemen PPPA mendorong terciptanya 4 kondisi pembangunan, yaitu 1) kesetaraan gender, 2) keadilan gender, 3) perlindungan perempuan, dan 4) pemenuhan hak anak. Dalam mewujudkan 7 misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Kemen PPPA secara khusus mewujudkan misi ke-4 pembangunan nasional, "Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera," dan Nawacita ke-5 "Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia".

Kotak 3. 7 Misi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Meningkatkan kesetaraan gender menjadi tujuan dan sasaran strategis Kemen PPPA dalam mencapai visi dan misi

pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan ini, Kemen PPPA menetapkan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target di tahun 2019 sebesar 92,00 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tahun 2019 mencapai angka 71,43. Indikator ini melengkapi target peningkatan IPG dan IDG yang belum disebutkan angka pastinya dalam RPJMN 2015-2019. Selain 1) meningkatkan kesetaraan gender, tujuan dan sasaran strategis Kemen PPPA juga mendukung pembangunan dalam bentuk 2) Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, 3) Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kemen PPPA, dan 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kemen. PPPA, 2015).

Berdasarkan dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 yang menetapkan arah kebijakan dan strategi nasional dalam upaya meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, dan melindungi perempuan, anak, serta kelompok marjinal, maka arah kebijakan dan strategi nasional Kemen PPPA terdiri dari 11 komponen utama, yaitu 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, 2) Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), 4) Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, 6) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal, 7) Pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik, 8) Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan, 9) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung

tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, 10) Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, dan 11) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak (Kemen. PPPA, 2015).

Sebagai langkah kongkrit, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Presiden RI, Kemen PPPA menekankan pada lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai wujud kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu 1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) penurunan pekerja anak dan 5) pencegahan perkawinan anak. Di seluruh kebijakan dan program yang diimplementasikan, terdapat prinsip dasar pembangunan manusia yang dikenal dengan Program *Three Ends* yaitu: 1) Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; 2) Akhiri Perdagangan Manusia; dan 3) Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi Untuk Perempuan.

Penguatan kelembagaan PUG menjadi salah satu komponen penting yang dapat mengawal proses pembangunan berkesetaraan gender. Kelembangaan PUG dibentuk di setiap tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, setiap kementerian memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang bertugas mengawal kebijakan, program dan kegiatan nya berkesetaraan gender, begitu juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dimana Pokja PUG yang diketuai oleh Kepala Bappeda. Di tingkat masyarakat, Kemen PPPA mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi serta mendukung upaya dan program untuk peningkatan kesetaraan gender. Partisipasi masyarakat dibagi dalam empat kelompok, yaitu 1) partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, 2) partisipasi media, 3) partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, akademisi dan lembaga riset. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat: 1) Mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi

dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. 2) Menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) Mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui fasilitasi dan kerjasama; dan 4) Menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2016, Kemen PPPA meluncurkan aplikasi PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) yang berbasis android. PUSPA memfasilitasi kebutuhan terhadap akses informasi, forum, dan partisipasi masyarakat dapat lebih maksimal. Kemen PPPA juga menyediakan Sistem Informasi data Perempuan dan Anak (SIGA) yang menyajikan berbagai data dan informasi terpilah terkait gender, di bidang kependudukan, kemiskinan, pendidikan, Kesehatan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, perhubungan, tenaga kerja, sumber daya air, cipta karya dan tata ruang, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, keuangan, pariwisata, koperasi usaha kecil dan menengah, pemberantasan narkoba, dan penanganan bencana (Kemen. PPPA, 2019). Untuk menfasilitasi pangkalan data kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan dan anak di Indonesia, Kemen PPPA memiliki aplikasi bernama Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Sistem ini mengkompilasi pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta bentuk-bentuk pelayanan yang sudah diberikan kepada korban, seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial (Kemen. PPPA, 2020b). Dengan sejumlah program dan langkah-langkah kongkrit dalam pembangunan, Kemen PPPA terus mewujudkan komitmennya dalam memastikan pembangunan manusia yang berbasis gender dapat diimplementasikan untuk kemajuan Indonesia yang setara gender.

Bab II
Pembangunan Manusia Indonesia dalam Konteks Global

A. Pembangunan Manusia di Indonesia Berada di Level Tinggi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan konsep yang dapat menjelaskan tentang bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan terutama dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Capaian IPM dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai indikator yang dirancang oleh UNDP dan digunakan sebagai standar global pada negara-negara anggota PBB, maka capaian IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu negara di tingkat global. Di tingkat nasional, IPM berguna sebagai data strategis dalam menilai kinerja pemerintah dan dasar penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2020).

Untuk mengukur IPM suatu negara, digunakan 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 1) Indikator kesehatan merujuk pada umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) dengan menggunakan data Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. 2) Indikator pendidikan mempertimbangkan pengetahuan (*knowledge*) dengan dua analisis data, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan jumlah rata-rata tahun yang dinikmati penduduk

dalam mengakses dan menjalani pendidikan formal/sekolah, sedangkan HLS menunjukkan perkiraan tahun sekolah untuk anak-anak usia masuk sekolah yang merupakan jumlah total tahun bersekolah yang dapat diharapkan oleh anak usia masuk sekolah. 3) Indikator ekonomi merujuk pada standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (GNI) perkapita yang disesuaikan (UNDP, 2020). Untuk Indonesia, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang diperoleh dari SUSENAS karena PNB per kapita tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota (Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, 2018).

Angka akhir IPM berada dalam kisaran nilai antara 0 sampai 100. Rentang nilai ini dibagi dalam 4 kategori nilai, yaitu kategori "Sangat tinggi" untuk nilai IPM ≥ 80; kategori "tinggi" untuk rentang nilai 70 ≤ IPM < 80, kategori "sedang" untuk rentang nilai 60 ≤ IPM < 70, dan kategori "rendah" untuk nilai IPM < 60. Dalam penghitungan nilai IPM, tiga indikator memiliki posisi yang sama dan sama-sama saling memengaruhi capaian angka IPM suatu negara. Dalam dokumen RPJMN 2015-2019, target capaian IPM Indonesia diharapkan meningkat menjadi 76,3 di tahun 2019 (Presiden RI, 2015).

Dalam 19 tahun terakhir, capaian IPM Indonesia menunjukkan trend yang terus meningkat. Di tahun 2010, capaian IPM Indonesia berada di angka 66,53 atau masuk kategori 'sedang'. Posisi ini terus mengalami peningkatan hingga terjadi perubahan status kategori 'sedang' menjadi kategori 'tinggi' yang terjadi di tahun 2016, yaitu mencapai angka 70,18. IPM Indonesia terus mengalami peningkatan, tahun 2019 IPM Indonesia mencapai angka 71,92. Dibandingkan dengan tahun 2018, IPM Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,73 persen (Gambar 2.1). Capaian IPM di tahun 2019 ini menunjukkan level IPM Indonesia tetap dalam kategori 'tinggi'.

Meskipun IPM Indonesia masuk kategori 'tinggi', namun penting mengingat bahwa target capaian IPM Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 masih belum tercapai yaitu 76,3. Walaupun angka target IPM ini memang masih berada dalam kategori 'tinggi', namun berada di tingkatan yang lebih mendekati kategori 'sangat tinggi' dengan rentang capaian di atas 80.
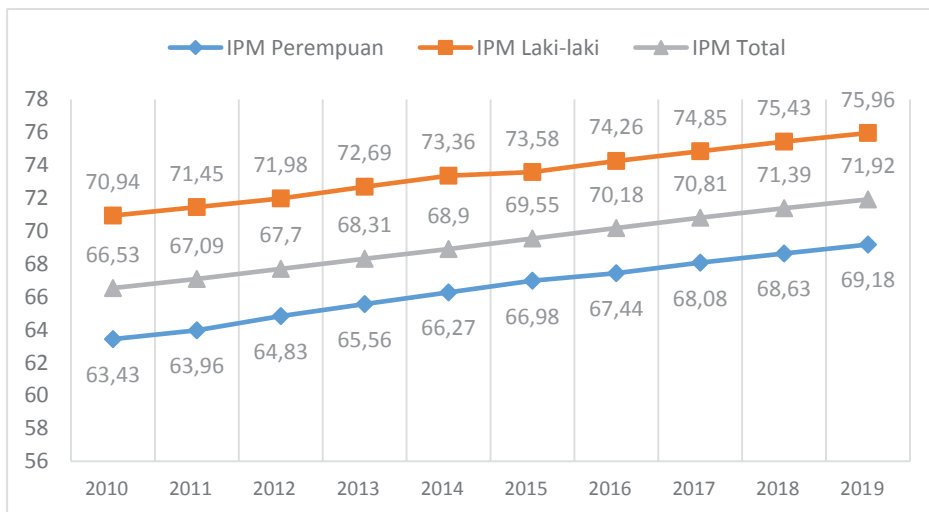
Gambar 2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) total dan menurut jenis kelamin tahun 2010-2019

Berdasarkan provinsi, pada tahun 2019 hanya terdapat 3 provinsi yang IPM melebihi target RPJMN, yaitu DKI Jakarta dengan capaian 80,76, DI Yogyakarta dengan capaian 79,99 dan Kalimantan Timur dengan capaian 76,61. Dari capaian yang ada, hanya DKI Jakarta yang telah mencapai IPM dengan kategori 'sangat tinggi'. Terdapat 10 provinsi dengan IPM di atas angka nasional, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Banten, Sumatera Barat dan Jawa Barat. Sedangkan provinsi dengan IPM terendah adalah Papua yaitu 60,84 (Gambar 2.2).

Terdapat 23 provinsi di Indonesia telah mencapai IPM dalam rentang nilai 70-80. Hal tersebut mengandung arti bahwa pembangunan manusia pada sebagian besar provinsi di Indonesia telah berada pada kategori 'tinggi'. Meskipun demikian, masih ada

11 provinsi dengan IPM kategori 'sedang', yaitu Lampung, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, papua Barat dan Papua. Ketertinggalan IPM yang dicapai oleh sebelas provinsi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia yang terjadi antar wilayah (Gambar 2.2).
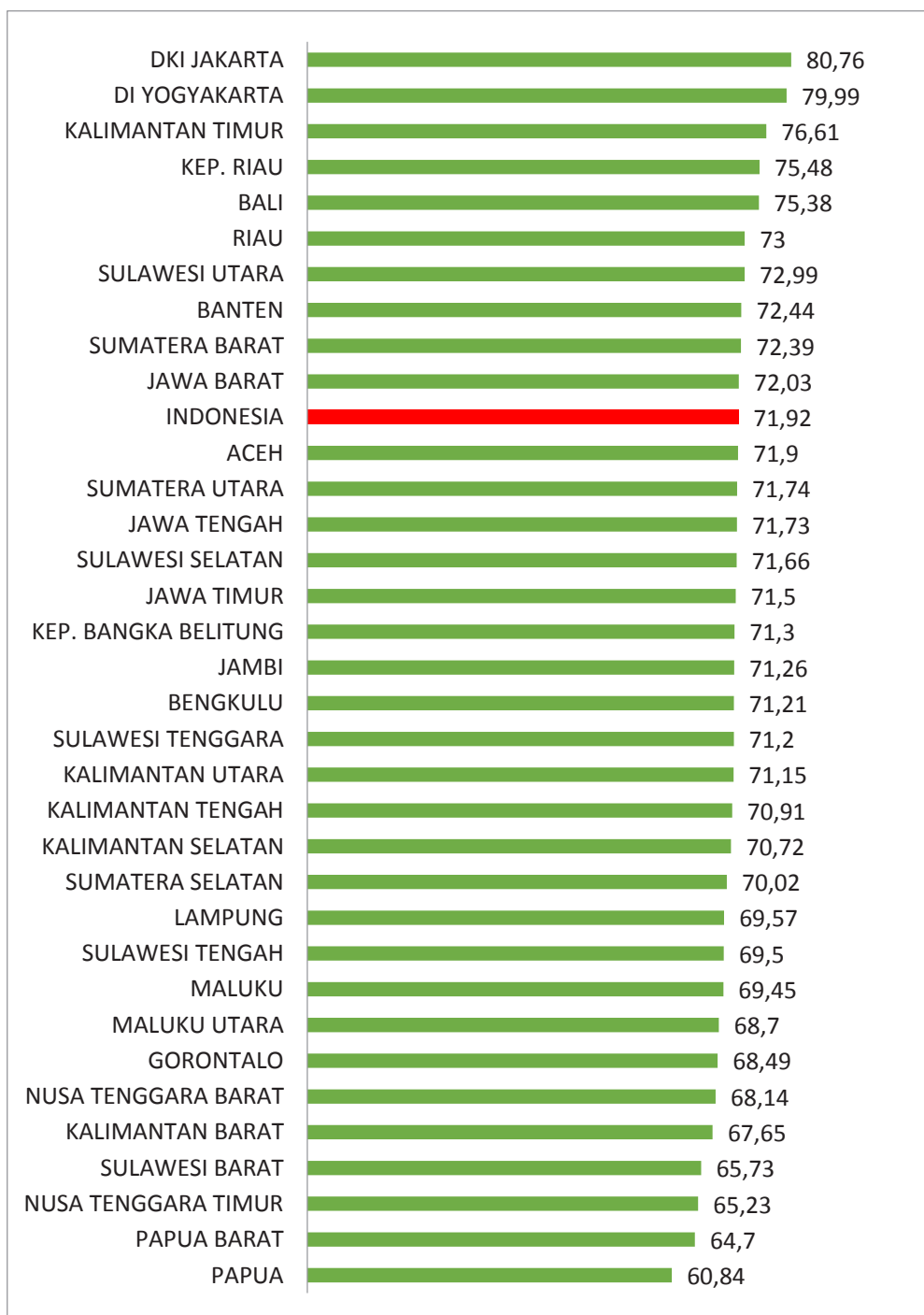
Gambar 2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2019.

Kemajuan pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2019 juga terlihat dari perubahan status kategori IPM di tingkat provinsi. Jumlah profvinsi yang masuk kategori IPM "sedang" berkurang dari 12 provinsi pada tahun 2018 menjadi 11 provinsi pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Selatan yang masuk kategori "sedang" pada tahun 2018 meningkat menjadi kategori "tinggi" pada tahun 2019. Hingga saat ini, terdapat 22 provinsi yang masuk dalam kategori IPM "tinggi", yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2018, tidak ada provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori IPM "rendah". Hal ini karena pada tahun 2018, kategori IPM di Provinsi Papua telah berada pada level "sedang" (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020)
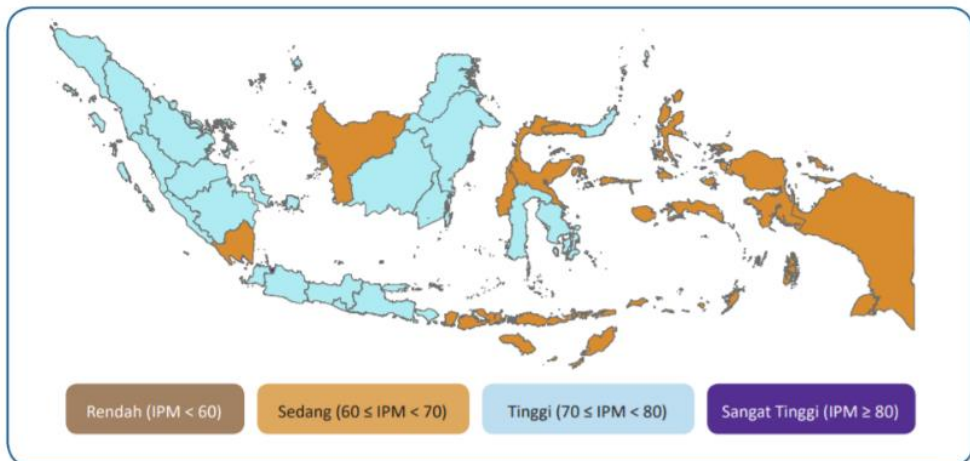
Sumber: (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020) hlm. 5.

Gambar 2.3. IPM Indonesia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia, 2019

Meskipun Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat telah berada pada IPM kategori ‘sedang’, namun empat provinsi ini secara nasional berada di peringkat paling bawah. Kesenjangan yang sangat lebar terlihat pada perbandingan capaian yang diperoleh sebagian besar provinsi di wilayah Indonesia timur. Untuk pembangunan manusia yang merata, intervensi pembangunan pada provinsi dengan capaian IPM dengan kategori ‘sedang’ penting terus dilakukan. Dengan demikian, sumber daya manusia Indonesia akan tumbuh berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

B. Pembangunan Gender di Indonesia Belum Mencapai Target

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan IPM, yaitu 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) 2) pengetahuan (*knowledge*); dan 3) standar hidup layak (*decent standard of living*). Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya unuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan ratio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 (Badan Pusat Statistik, 2020). dan menunjukkan ketimpangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan interpretasi bahwa ketika angka IPG makin mendekati 100, maka ketimpangan pembangunan gender semakin rendah. Pemaknaan sebaliknya dapat dilakukan dengan semakin menjauhnya nilai IPG dari angka 100, maka semakin lebar ketimpangan pembangunan gender menurut jenis kelamin (Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, 2018)

Penggunaan indikator pada IPG sama dengan IPM. Pada indikator angka harapan lama sekolah yang mengukur input dari

dimensi pengetahuan, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas, sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia 25 tahun ke atas. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder, kecuali pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan (Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, 2018).

Tahun 2019, IPG Indonesia telah mencapai angka 91,07 persen. Capaian ini meningkat sebanyak 0,08 poin dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan data tahun 2010-2019, IPG di Indonesia mengalami trend yang terus meningkat. Peningkatan ini mencapai puncak pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 91,03 persen, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2017, pembangunan gender di Indonesia kembali meningkat sampai tahun 2019 ini. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2018-2019. Dibandingkan tahun 2018, IPM perempuan tahun 2019 meningkat 0,55 poin, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki tahun 2019 yang meningkat 0,53 poin.
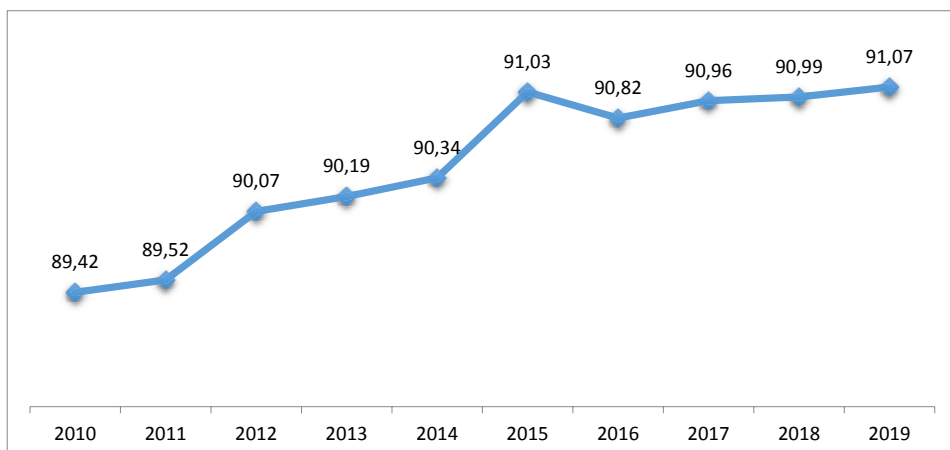
Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2010-2019

Walaupun IPG Indonesia tahun 2019 sudah melebihi capaian tertinggi sebelumnya yang diperoleh pada tahun 2015 namun masih belum berhasil mencapai target IPG yang tertuang dalam Rencana Strategis Kemen PPPA tahun 2015-2019 yang menargetkan capaian sebesar 92,00 pada tahun 2019. Ada banyak faktor yang penting dilihat, terutama pada tiga dimensi utama dalam pengukuran IPG. Capaian IPG yang secara nasional masih belum mencapai target Renstra Kemen PPPA ini juga dipengaruhi oleh capaian IPG tingkat provinsi. Semakin banyak provinsi dengan capaian IPG yang jauh dari target Renstra yaitu 92, maka semakin jauh capaian IPG nasional dari target yang diharapkan.

Merujuk pada target Renstra Kemen PPPA di tahun 2019, terdapat 11 provinsi yang telah mencapai target di atas 92,00, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah. DI Yogyakarta merupakan provinsi yang capaian IPG tertinggi yaitu 94,77., diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta (94,71) dan Sulawesi Utara (94,53). Berdasarkan capaian IPG pada tingkat nasional, terdapat 15 provinsi dengan nilai IPG di atas angka nasional yaitu 91,07. Dari ke 15 provinsi tersebut, 11 provinsi yang telah berhasil mencapai target Renstra Kemen PPPA, sedangkan keempat (4) provinsi belum mencapai target adalah Jawa Tengah, Aceh, Banten, dan Bengkulu (Gambar 2.5).

Gambar 2.5 juga menunjukkan sejumlah provinsi dengan IPG di bawah capaian nasional. Hampir separuh provinsi di Indonesia IPG di bawah angka 90. Provinsi dengan capaian IPG terendah terjadi di Provinsi Papua 80,05 dan Papua Barat 82,74. Beberapa provinsi juga sudah mencapai IPG pada rentang nilai 85-90. Artinya, meskipun belum ideal, namun pembangunan gender di Indonesia sudah menuju harapan yang adil gender dan merata.
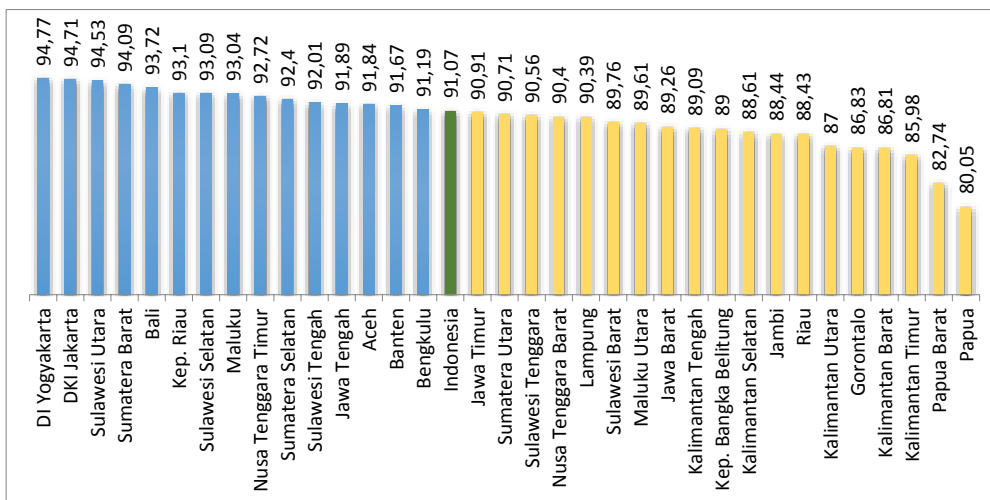
Gambar 2.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut provinsi tahun 2019

Indeks Pembangunan Gender dibentuk dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Pada tahun 2019, sebagian besar provinsi di Indonesia angka IPM Laki-laki sudah mencapai kategori "tinggi", bahkan terdapat 3 provinsi dengan kategori IPM "sangat tinggi", yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur; dan hanya 3 provinsi dengan kategori "sedang", yaitu Papua, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. Berbeda dengan laki-laki, pada tahun 2019 sebagian besar provinsi angka IPM perempuan masih di kategori "sedang" (23 provinsi), bahkan ada 2 provinsi di kategori "rendah" dan hanya 9 provinsi di kategori "tinggi". Dari 9 provinsi yang masuk dalam kategori IPM "tinggi" pada perempuan, terdapat lima provinsi dengan capaian IPM laki-laki sama-sama masuk pada kategori 'tinggi', yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan sedangkan sisanya masuk pada kategori "sangat tinggi". (Gambar 2.6). Meskipun posisi perempuan masih dibawah laki-laki, namun capaian IPG perempuan sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 (Tabel 2.1).
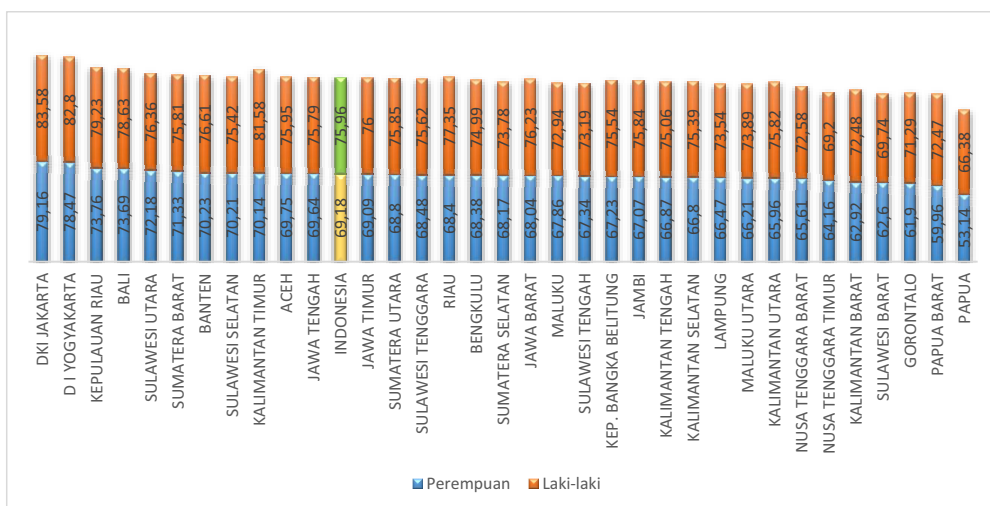
Gambar 2.6. **Nilai Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin dan provinsi, tahun 2019**

Pada tabel 2.1 terlihat perubahan struktur jumlah provinsi yang berada di kategori IPM ‘sedang’ dan ‘tinggi’ pada perempuan, namun tidak terjadi perubahan pada laki-laki. Pada perempuan, jumlah provinsi dengan kategori sedang di tahun 2018 sebanyak 26 provinsi, namun di tahun 2019 berkurang menjadi 23 provinsi. Untuk IPM perempuan kategori tinggi, di tahun 2018 berjumlah 6 provinsi namun bertambah menjadi 9 provinsi di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya perubahan status kategori ‘sedang’ menjadi ‘tinggi’ pada IPM perempuan yang terjadi di 3 provinsi.

Tabel 2.1 Jumlah Provinsi berdasarkan Kategori IPM dan Jenis Kelamin tahun 2018-2019.

Kategori IPM	2018		2019	
	Jumlah Provinsi dengan IPM Perempuan	Jumlah Provinsi dengan IPM Laki-laki	Jumlah Provinsi dengan IPM Perempuan	Jumlah Provinsi dengan IPM Laki-laki
Rendah	2	-	2	-
Sedang	26	3	23	3
Tinggi	6	28	9	28
Sangat tinggi	-	3	-	3

Untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dan gender serta hubungannya dengan capaian IPM dan IPG, pemetaan provinsi dilakukan melalui analisis kwadran. Dalam analisis ini, capaian IPM dan IPG di tingkat provinsi dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu kwadran I merupakan provinsi dengan IPM dan IPG di atas angka nasional. Kuadran II merupakan provinsi dengan kondisi IPM di atas angka nasional tetapi IPG di bawah angka nasional. Kuadran III adalah provinsi dengan IPM dan IPG di bawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah provinsi dengan kondisi IPM di bawah angka nasional tetapi IPG di atas angka nasional Tabel 2.2 menunjukkan hasil bahwa di tahun 2019, terdapat 16 provinsi atau 47,06 persen provinsi di Indonesia masih berada pada Kuadran III yaitu capaian IPM maupun IPG provinsi berada dibawah angka nasional. Persentase ini sedikit mengalami perubahan dengan capaian di tahun 2017, dimana pada tahun 2017 terdapat 17 provinsi yang berada di kwadran III.

Pada tahun 2019, provinsi yang telah berada di kuadran I dengan capaian IPM dan IPG pada level di atas nasional hanya terdapat di 7 provinsi dan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2015 dan 2017. Tujuh provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali dan Sulawesi Utara. Pada tahun 2019, provinsi yang berada di kwadran

II bertambah dari dua provinsi menjadi 3 provinsi terdiri dari Riau, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Perkembangan Capaian IPM dan IPG Berdasarkan provinsi Tahun 2015, 2017, dan 2019.

2015	2017	2019		2015	2017	2019
Riau	Riau	Riau	IPM Di Atas Nasional	Sumatra Barat	Sumatra Barat	Sumatra Barat
Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur		Kep. Riau	Kep. Riau	Kep. Riau
		Jawa Barat		DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
				DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta
				Banten	Banten	Banten
				Bali	Bali	Bali
				Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
Kwadran II				**Kwadran I**		
IPG di Bawah Nasional				**IPG di Atas Nasional**		
Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	IPM Di Bawah Nasional	Aceh	Aceh	Aceh
Jambi	Jambi	Jambi		Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
Lampung	Lampung	Lampung		Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu
Kep. Bangka Belitung	Kep. Bangka Belitung	Kep. Bangka Belitung		Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah
Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Timur		Jawa Timur	NTT	NTT
NTB	Jawa Barat	NTB		NTT	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat	NTB	Kalimantan Barat		Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah		Sulawesi Selatan	Maluku	Maluku
Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan		Maluku		
Kalimantan Utara	Kalimantan Selatan	Kalimantan Utara				
Sulawesi Tenggara	Kalimantan Utara	Sulawesi Tenggara				
Gorontalo	Sulawesi Tenggara	Gorontalo				
Sulawesi Barat	Gorontalo	Sulawesi Barat				
Maluku Utara	Sulawesi Barat	Maluku Utara				
Papua Barat	Maluku Utara	Papua Barat				
Papua	Papua Barat	Papua				
	Papua					
Kwadran III				**Kwadran IV**		

C. Pembangunan Berbasis Gender Indonesia di Antara Negara ASEAN

Dalam laporan UNDP tahun 2020, nilai HDI (*Human Development Index*) Indonesia di tahun 2019 adalah 0,718. Capaian ini menempatkan Indonesia pada kategori 'tinggi' dengan angka harapan hidup di usia 71,7, sedangkan usia harapan sekolah selama 13,6 tahun dengan rata-rata lama sekolah selama 8,2 tahun, dan GNI per kapita senilai $ 11,459. Meskipun HDI Indonesia termasuk kategori 'tinggi', namun masih berada jauh di bawah rata-rata untuk negara-negara lain dalam kelompok capaian HDI kategori 'tinggi' dan negara-negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik (Tabel 2.3).

Tabel 2.3. *Human Development Index* (HDI) Indonesia, Rata-rata HDI Kategori 'Tinggi' dan Komponen Indikatornya, Tahun 2019

Negara	IPM	Angka Harapan Hidup	Usia Harapan Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	GNI Per Kapita (2017 PPP US$)
Indonesia	0,718	71,7	13,6	8,2	11,459
Rata-rata Negara Asia Timur dan Pasific	0,747	75,4	13,6	8,1	14,710
Rata-rata HDI kategori 'tinggi'	0,753	75,3	14,0	8,4	14,255

Sumber: (UNDP, 2020), www.hdr.undp.org, data diolah

Dibandingkan dengan rata-rata yang dicapai di wilayah Asia Timur dan Pasifik, Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia lebih pendek 2,7 tahun. GNI Per Kapita Indonesia juga berada di bawah rata-rata negara-negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Untuk kategori pendidikan, usia harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia sudah berada di posisi yang sama dengan sejumlah negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik,

bahkan pada kategori rata-rata lama sekolah, Indonesia sedikit di atas rata-rata yang ada. Kondisi yang berbeda terlihat ketika melihat posisi Indonesia di antara negara-negara yang memiliki HDI dengan kategori 'tinggi'. Pada semua indikator yang dicapai, Indonesia berada di bawah rata-rata yang dicapai negara-negara dengan HDI kategori 'tinggi'.

Di tingkat dunia, capaian yang diperoleh Indonesia di tahun 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 107 dari 189 negara dan wilayah. Peringkat yang dicapai Indonesia sama dengan capaian yang diperoleh Philipina. Jika dibandingkan dengan negara lain dengan capaian HDI kategori 'tinggi' seperti China, Indonesia jauh berada di bawah China yang mendapatkan peringkat ke 85 dengan capaian HDI 0,761. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam, Indonesia berada jauh tertinggal. karena tiga negara tetangga Indonesia tersebut sudah mencapai HDI dengan kategori 'sangat tinggi' yaitu Singapura (0,938), Brunai Darussalam (0,838) dan Malaysia (0,810) (Tabel 2.4).

Tabel 2.4. Peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia dan Komponen Indikatornya Dibandingkan Negara Lain, Tahun 2019

Negara	HDI	Rangking/ Peringkat	Angka Harapan Hidup	Usia Harapan Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	GNI Per Kapita (2017 PPP US$)
Singapura	0,938	11	83,6	16,4	11,6	88,155
Brunai Darussalam	0,838	47	75,9	14,3	9,1	63,965
Malaysia	0,810	62	76,2	13,7	10,4	27,534
Thailand	0,777	79	77,2	15,0	7,9	17,781
China	0,761	85	76,9	14,0	8,1	16,057
Indonesia	0,718	107	71,7	13,6	8,2	11,459
Philipina	0,718	107	71,2	13,1	9,4	9,778

Sumber: (UNDP, 2020), www.hdr.undp.org, data diolah

Untuk *Gender Development Index* (GDI), penghitungan dilakukan untuk 167 negara. Dalam laporan UNDP tahun 2020, capaian nilai GDI Indonesia adalah 0,940 yang diperoleh berdasarkan nilai HDI perempuan 0,694 dan HDI laki-laki 0,738. Nilai GDI Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara di Asia Timur dan negara HDI yang berkategeri "tinggi" yang memiliki nilai rata-rata 0,961 (Tabel 2.5).

Tabel 2.5. *Gender Development Index* (GDI) Indonesia dan Rata-rata HDI Kategori 'Tinggi', Tahun 2019.

Negara/Wilayah	Rasio Perempuan-Laki-laki	Nilai HDI	
	Nilai GDI	Perempuan	Laki-laki
Indonesia	0,940	0,694	0,738
Rata-rata Negara Asia Timur dan Pasific	0,961	0,731	0,760
Rata-rata negara dengan HDI kategori 'tinggi'	0,961	0,736	0,766

Sumber: (UNDP, 2020), www.hdr.undp.org, data diolah

Capaian GDI Indonesia di tahun 2019 menempatkan Indonesia berada dalam kelompok GDI ketiga, setingkat dengan china yang memperoleh GDI 0,957. Meskipun China berada pada tingkat kelompok yang sama dengan Indonesia, namun HDI perempuan di China sudah berada di angka 0,744, sedangkan HDI perempuan Indonesia masih berada di angka 0,694. Capaian HDI perempuan Indonesia berada paling rendah dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga, yaitu Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina, Singapura, dan Thailand. HDI perempuan dari lima negara tetangga sudah mencapai angka di atas 0,700, bahkan Brunai Darussalam mencapai 0.830 dan Singapura mencapai 0,931. Hal ini menunjukkan urgensi pembangunan perempuan di Indonesia tetap menjadi prioritas agar meningkatkan kualitas pembangunan perempuan dan daya saing diantara negara-negara tetangga.

Tabel 2.6. Gender Development Index (GDI) Indonesia dibandingkan dengan Negara Lain, Tahun 2019

Negara	Rasio Perempuan-Laki-laki	Nilai HDI		Kelompok
	Nilai GDI	Perempuan	Laki-laki	
Brunai Darussalam	0,981	0,830	0,846	1
Singapura	0,985	0,931	0,945	1
Thailand	1,008	0,782	0,776	1
Malaysia	0,972	0,797	0,821	2
China	0.957	0,744	0,777	3
Indonesia	0,940	0,694	0,738	3
Philipina	1,007	0,720	0,715	1
Rata-rata Negara Asia Timur dan Pasific	0,961	0,731	0,760	
Rata-rata Negara dengan IPM kategori ‘tinggi’	0,961	0,736	0,766	
Rata-rata Negara dengan IPM kategori ‘sangat tinggi’	0,981	0,886	0,903	

Sumber: (UNDP, 2020), www.hdr.undp.org, data diolah

Bab III
PEMBANGUNAN GENDER DI INDONESIA

A. Pembangunan Perempuan Lebih Cepat Namun Masih Tertinggal

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pembangunan manusia Indonesia secara nasional terlihat terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional Indonesia sudah mencapai status tinggi dengan IPM 70,18. Nilai IPM Indonesia terus meningkat hingga di tahun 2019 dan telah mencapai nilai 71,92. Pada Gambar 3.1 menunjukkan adanya trend peningkatan capaian IPM yang sama-sama terjadi pada perempuan dan laki-laki. Pergerakan peningkatan IPM pada perempuan dan laki-laki terlihat sama-sama stabil meski tampak lambat. Dibandingkan capaian IPM di tahun 2010, IPM laki-laki meningkat sebanyak 5.02 pada tahun 2019. Capaian peningkatan ini lebih rendah dibandingkan perempuan sebanyak 5.75 poin dari tahun 2010 menuju tahun 2019.
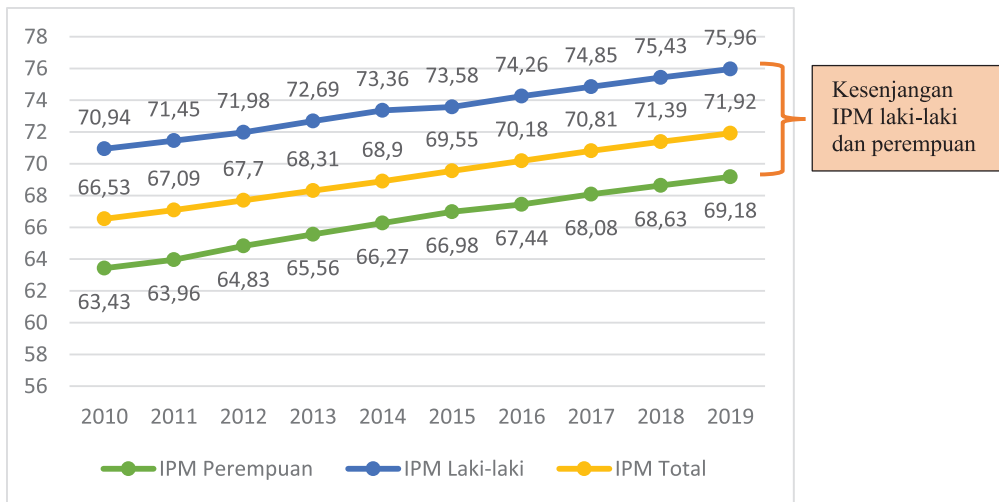
Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) total dan menurut jenis kelamin tahun 2010-2019

Dalam dua tahun terakhir, IPM perempuan juga meningkat sedikit lebih besar dibandingkan IPM laki-laki. Di tahun 2018, IPM laki-laki adalah 75,43 dan mengalami peningkatan menjadi 75,96 atau meningkat 0,53 di tahun 2019. Peningkatan yang sama juga terjadi pada IPM perempuan, dari 68,63 di tahun 2018 menjadi 69,18 atau meningkat sebanyak 0.55 di tahun 2019. Peningkatan IPM perempuan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki menunjukkan pembangunan sudah menuju keadilan gender (Gambar 3.1).

Sejak tahun 2010, skor peningkatan tertinggi pada IPM perempuan terjadi di tahun 2010-2011 sebesar 0,87 poin, sedangkan skor peningkatan IPM tertinggi pada laki-laki terjadi pada tahun 2012-2013 dengan kenaikan sebanyak 0,71 poin. Pada tahun 2014-2015, perempuan mengalami kenaikan capaian IPM terendah sepanjang 19 tahun dengan kenaikan IPM hanya 0,46, sedangkan kenaikan skor IPM laki-laki terendah terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013-2014 dengan kenaikan hanya 0,22 pada IPM perempuan (Gambar 3.2)
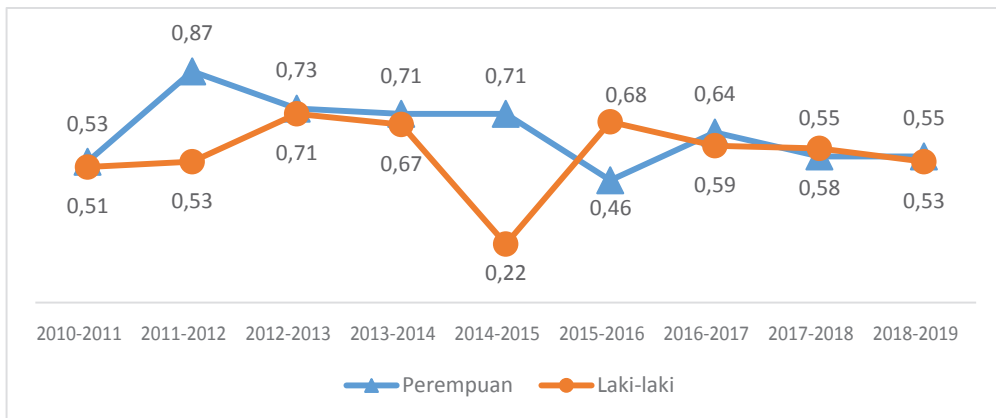
Gambar 3.2. Nilai Skor Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2010-2019

Berdasarkan tingkatan kategori, IPM laki-laki telah mencapai kategori 'tinggi' sejak tahun 2010 dengan capaian IPM di atas 70. Kondisi yang berbeda jika dilihat pada capaian IPM perempuan yang masih masuk kategori "sedang", hal ini menunjukkan kesenjangan pencapaian IPM perempuan yang cukup lebar dibandingkan laki-laki. Sampai dengan tahun 2019 status kategori IPM perempuan belum mengalami perubahan, atau masih tetap di tingkatan kategori 'sedang' dengan capaian di bawah 70. Hal ini bermakna pembangunan pada perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan pembangunan pada penduduk laki-laki (Gambar 3.3). Mempertimbangkan target IPM yang tertuang pada RPJMN 2015-2019 yaitu 76,3, meskipun sama-sama belum mencapai target, namun capaian IPM laki-laki sudah mendekati angka target yaitu 75,96, sedangkan IPM perempuan masih jauh dari target RPJMN 2015-2019 yaitu 69,18.
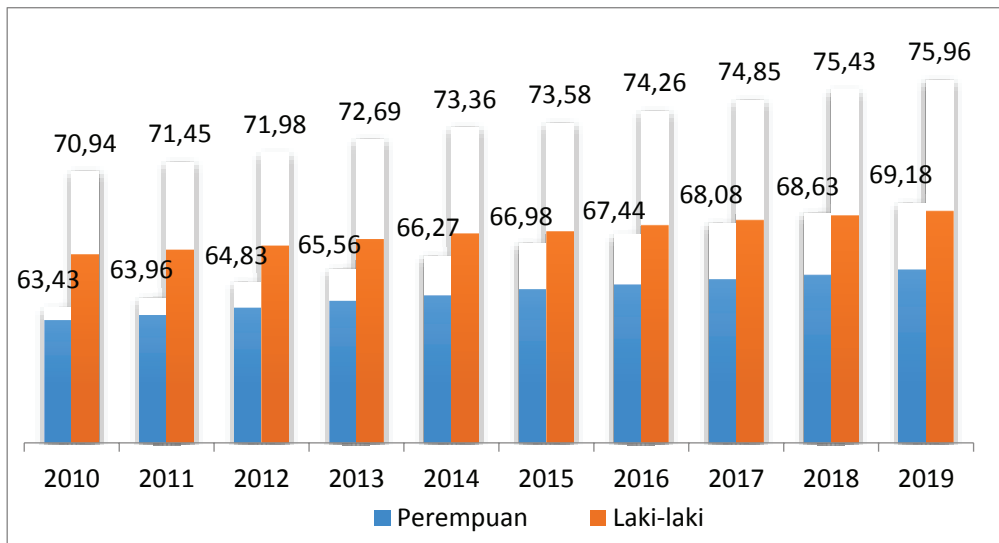
Gambar 3.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut jenis kelamin tahun 2010-2019

Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan capaian IPM perempuan secara nasional yang paling tinggi dengan nilai 79,16. Capaian yang diperoleh DKI Jakarta di tahun 2019 termasuk kategori tinggi. Di Indonesia hanya terdapat 9 provinsi yang status IPM perempuan sudah mencapai kategori "tinggi", yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. IPM perempuan dengan status kategori "sedang" terjadi di 23 provinsi dan dua provinsi yang menunjukkan status IPM perempuan kategori 'rendah" adalah Papua dengan nilai 53,14 dan Papua Barat dengan nilai 59,96 (Gambar 3.4).
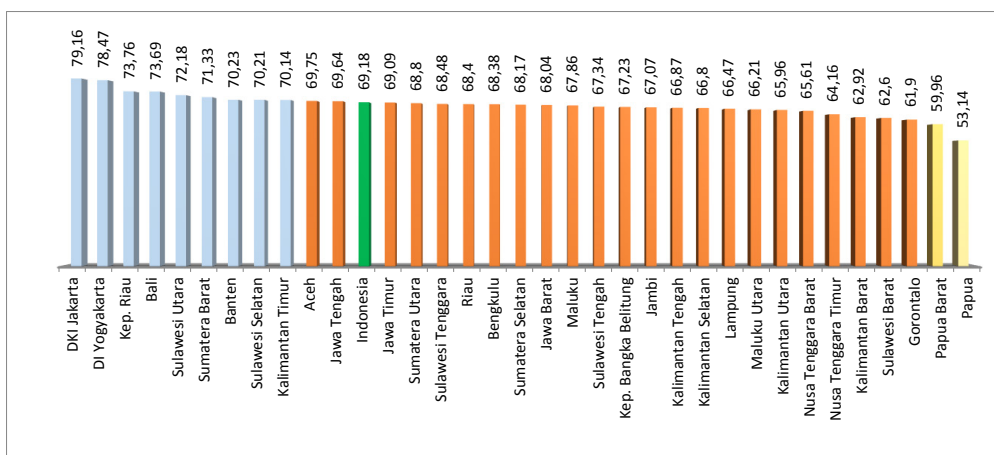
Gambar 3.4 **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan menurut provinsi tahun 2019**

Jika capaian IPM perempuan dengan kategori rendah masih dijumpai di 2 provinsi dan tidak ada provinsi yang mencapai kategori sangat tinggi, kondisi ini tidak terjadi pada IPM laki-laki. Terdapat 28 provinsi yang memiliki nilai IPM laki-laki dalam kategori "tinggi", sedangkan kategori "sedang" terjadi di 3 provinsi, yaitu Papua (66,38), Nusa Tenggara Timur (69,2), dan Sulawesi Barat (69,74). Tiga provinsi lainnya masuk kategori "sangat tinggi" yaitu DKI Jakarta (83,58), DI Yogyakarta (82,8) dan Kalimantan Timur (81,58) (Gambar 3.5).
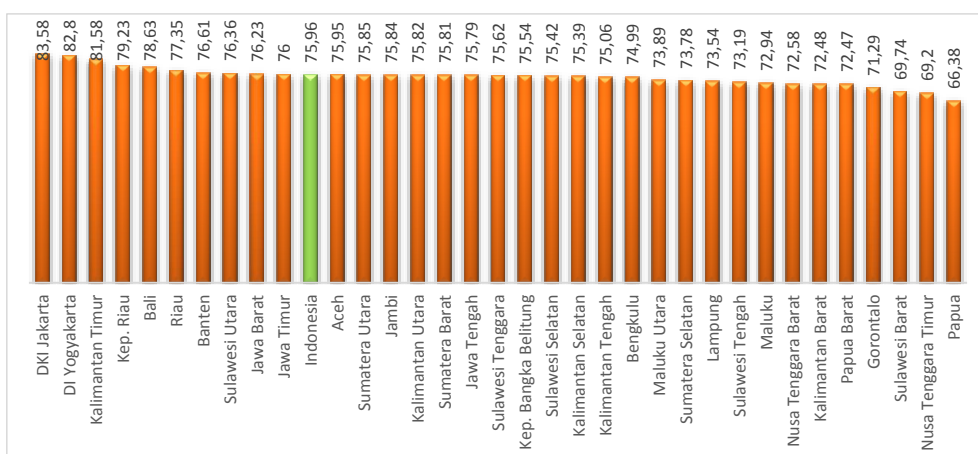
Gambar 3.5 **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki menurut provinsi tahun 2019**

Gambaran capaian IPM antar-provinsi pada perempuan dan laki-laki di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan berbasis gender yang merata terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tabel 3.1 menunjukkan jumlah provinsi dengan status IPM kategori rendah dan sangat tinggi tidak terjadi perubahan. Baik di tahun 2018 maupun 2019, Provinsi dengan IPM laki-laki terendah dengan kategori sedang terdapat di Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Provinsi dengan kategori rendah pada IPM perempuan terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat, baik di tahun 2018 maupun tahun 2019. Pada IPM laki-laki, tidak terjadi perubahan kategori yang dicapai oleh 28 provinsi di tahun 2018 dan tahun 2019. Situasi yang berbeda terlihat pada IPM perempuan, terjadi peningkatan jumlah provinsi dengan kategori tinggi sebanyak 3 provinsi, sehingga jumlah provinsi dengan kategori sedang berkurang dari 26 provinsi di tahun 2018 menjadi 23 provinsi di tahun 2019. Hal ini menunjukkan kemajuan pembangunan pada perempuan terjadi secara lebih baik dibandingkan laki-laki dengan adanya perubahan status kategori sedang meningkat menjadi kategori tinggi di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Banten.

Tabel 3.1. Jumlah Provinsi dengan Kategori Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2019.

Kategori IPM	Jumlah Provinsi			
	2018		2019	
	IPM Perempuan	IPM Laki-laki	IPM Perempuan	IPM Laki-laki
Sangat Tinggi	0	3	0	3
Tinggi	6	28	9	28
Sedang	26	3	23	3
Rendah	2	0	2	0
Jumlah	34	34	34	34

Kesenjangan pembangunan manusia pada penduduk perempuan yang masih terlihat pada tahun 2019 menunjukkan pembangunan manusia berbasis gender masih menyisakan agenda lanjutan. Pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan, terutama pada 3 indikator utama dalam IPM penting menjadi catatan dalam pembangunan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Kebijakan dan program yang bersifat afirmasi penting dipertimbangkan agar kesenjangan capaian IPM perempuan yang jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dapat diperkecil atau dihilangkan. Kebijakan dan program afirmasi juga penting dilakukan pada sejumlah provinsi yang masih berada dalam capaian IPM di bawah angka nasional, terutama pada provinsi dengan IPM kategori di bawah angka 70 baik berdasarkan capaian IPM secara netral gender maupun provinsi dengan IPM terpilah berdasarkan jenis kelamin. Dengan intervensi pembangunan yang bersifat afirmasi, kesenjangan pembangunan yang tidak merata dapat ditekan demi tercapainya pembangunan manusia seutuhnya yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

B. Perempuan Lebih Berumur Panjang

Salah satu elemen utama yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah usia panjang dan sehat (*a long and healthy life*). Indikator ini mengacu pada Angka Harapan Hidup (AHH) pada penduduk yang dihitung sejak kelahirannya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, AHH penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan jenis kelamin, AHH perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berarti bahwa perempuan lebih memiliki harapan berumur panjang dibandingkan laki-laki. Tahun 2019, AHH perempuan adalah 73,13 tahun, sedangkan laki-laki adalah 69,44 tahun. Hal ini berarti perempuan hidup 3,89 tahun lebih lama dibandingkan laki-laki (Gambar 3.6).

Lebih lamanya harapan hidup pada perempuan dipengaruhi oleh banyak factor. Selain faktor sosial yang menggambarkan perilaku hidup perempuan dinilai lebih sehat dibandingkan laki-laki, komponen lain yang turut mempengaruhi usia perempuan lebih lama dari laki-laki adalah faktor genetik atau *female advantages* (FA). Keberadaan *female advantages* ini terkait dengan kromosom X yang dimiliki perempuan yang tahan terhadap mutasi genetika dan mendukung sistem imun pada tubuh. Selain itu, adanya hormon estrogen yang kadarnya lebih tinggi pada perempuan dimana hormon estrogen memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko terjadinya berbagai penyakit. Sebagai contoh, laki-laki cenderung memiliki lebih banyak lemak di sekitar organ karena laki-laki lebih banyak memiliki lemak visceral dan kondisi ini meningkatkan kerentanan penyakit kardiovaskular. Berbeda dengan perempuan yang cenderung memiliki lebih banyak lemak yang berada di bawah kulit (lemak subkutan). Kecenderungan munculnya lemak di bagian tubuh yang berbeda pada perempuan dan laki-laki ini ditentukan oleh estrogen dan kromosom X (Beltekian, 2018).

Female advantages sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi AHH perempuan ini diperkuat dengan fakta bahwa di hampir semua populasi, usia perempuan dijumpai lebih lama ketimbang laki-laki. Bahkan, dalam kondisi ekstrem dengan tingkat resiko kematian yang sangat tinggi seperti kelaparan dan epidemi, perempuan dan bayi perempuan bertahan lebih baik dibandingkan laki-laki, kecuali sedikit berbeda di populasi budak (Virginia Zarulli, Julia A. Barthhold Jones, Anna Oksuzyan, Rune Lindahl-Jacobsen, Kaare Christensen, 2017). Informasi ini menegaskan bahwa usia harapan hidup lebih lama pada perempuan tidak dapat sepenuhnya merefleksikan perhatian dan kepedulian social budaya pada kesehatan perempuan, karena kemampuan bertahan hidup yang lebih baik dari laki-laki juga dijumpai pada perempuan yang tinggal dengan pembedaan perlakuan sosial budaya yang tidak menguntungkan perempuan (Zarulli, 2017).
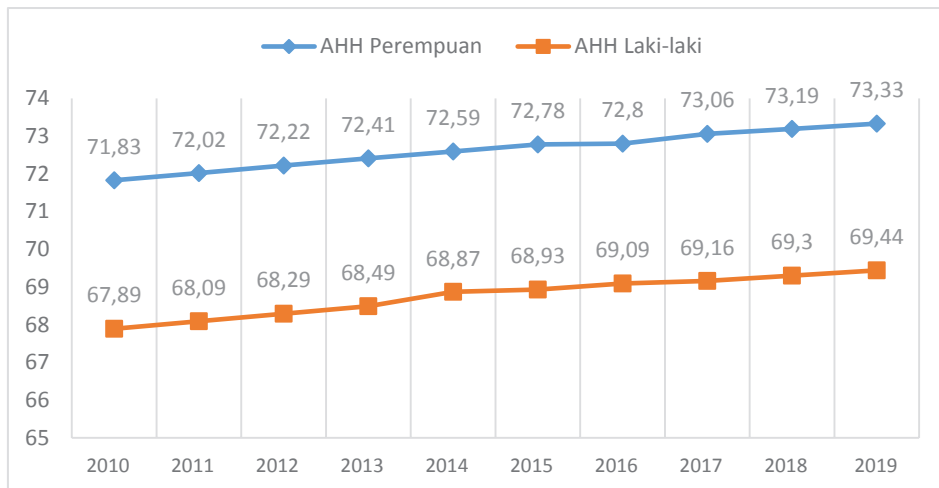
Gambar 3.6. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) menurut jenis kelamin tahun 2010-2019

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, usia harapan hidup perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami peningkatan yang lebih baik. Baik pada perempuan maupun laki-laki sama-sama mengalami usia harapan hidup yang lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2010 AHH laki-laki selama 67,89 tahun, maka di tahun 2019 AHH laki-laki meningkat menjadi 69,44 tahun atau lebih lama 1,55 tahun dibandingkan tahun 2010. Demikian juga dengan AHH perempuan yang mempunyai harapan hidup sampai usia 73,33 tahun atau lebih lama 1,5 tahun pada bayi perempuan yang lahir di tahun 2019 dibandingkan dengan bayi yang terlahir di tahun 2010.

Merujuk pada usia harapan hidup yang cenderung lebih lama pada perempuan dan laki-laki, maka kebijakan dan program pembangunan harus mempersiapkan fasilitas yang memadai pada kelompok lanjut usia (lansia) yang dapat diprediksi meningkat. Fasilitas bagi kaum lansia tidak hanya pada kesiapan sarana prasarana, namun program dan kebijakan yang berorientasi pada kemandirian lansia menjalani masa tuanya melalui kegiatan-kegiatan positif. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap bertambahnya populasi lansia, adalah bertujuan mengurangi

ketergantungan lansia sehingga. Mereka dapat tetap produktif dan dapat tetap berkarya mendukung proses-proses pembangunan dengan kapasitas yang memungkinkan dilakukan.

Selain genetik yang memengaruhi AHH perempuan, elemen lain yang penting dilihat sebagai komponen yang memengaruhi AHH perempuan adalah faktor kesehatan. Gambar 3.7 menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, namun persentase penduduk perempuan yang mengalami dan mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Situasi sebaliknya terjadi, bahwa persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak berobat jalan karena mengobati sendiri lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kepedulian dan kesadaran perempuan pada kesehatan yang lebih baik dibandingkan laki-laki.
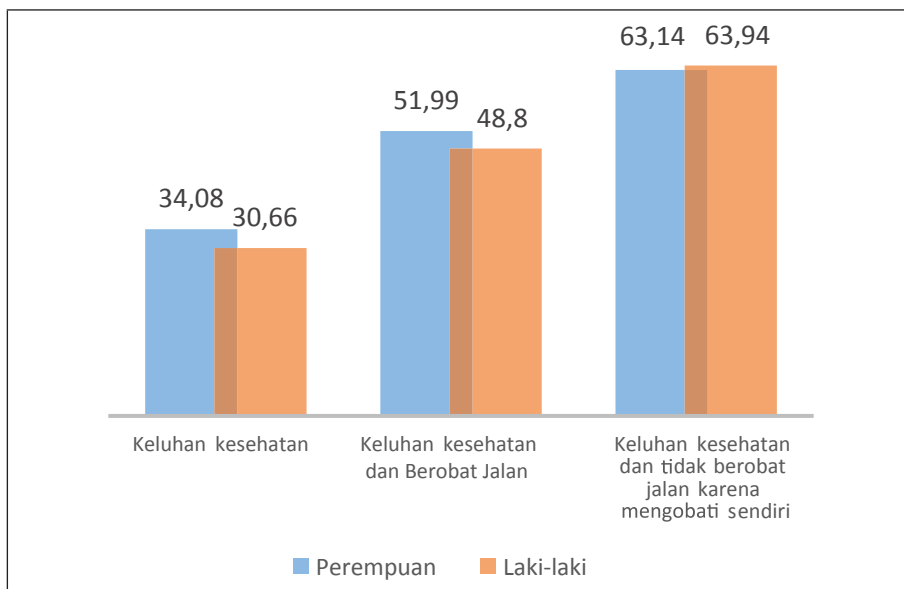
Gambar 3.7 Persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan, berobat jalan dan tidak berobat jalan menurut jenis kelamin tahun 2019

Berdasarkan sebaran provinsi dan jenis kelamin, gambar 3.8 menjelaskan terdapat sembilan (9) provinsi yang memiliki AHH perempuan lebih tinggi dibandingkan angka nasional AHH Perempuan dan gambar 3.9 menjelaskan juga terdapat Sembilan (9) provinsi yang memiliki AHH laki-laki lebih tinggi dari angka nasional AHH laki-laki, Kesembilan provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta dan Sulawesi Utara dan Riau. Secara nasional, provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan AHH tertinggi dengan AHH laki-laki 73,13 tahun dan AHH perempuan 76,76 tahun. DI Yogyakarta, AHH perempuan lebih lama 3,43 tahun dibandingkan laki-laki. Provinsi Papua dan Sulawesi Barat memiliki dengan AHH paling rendah di tingkat nasional baik laki-laki maupun perempuan Provinsi Papua dengan AHH perempuan selama 67,51 tahun dan ɄAHH laki-laki selama 63,87 tahun; dan provinsi Sulawesi Barat dengan AHH perempuan selama 66,78 tahun dan AHH laki-laki selama 62,96 tahun (Gambar 3.8, Gambar 3.9). Lebih tingginya AHH perempuan dibandingkan AHH laki-laki di Indonesia terjadi di semua provinsi dan hal ini menegaskan ketimpangan usia harapan hidup antara perempuan dan laki-laki terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.
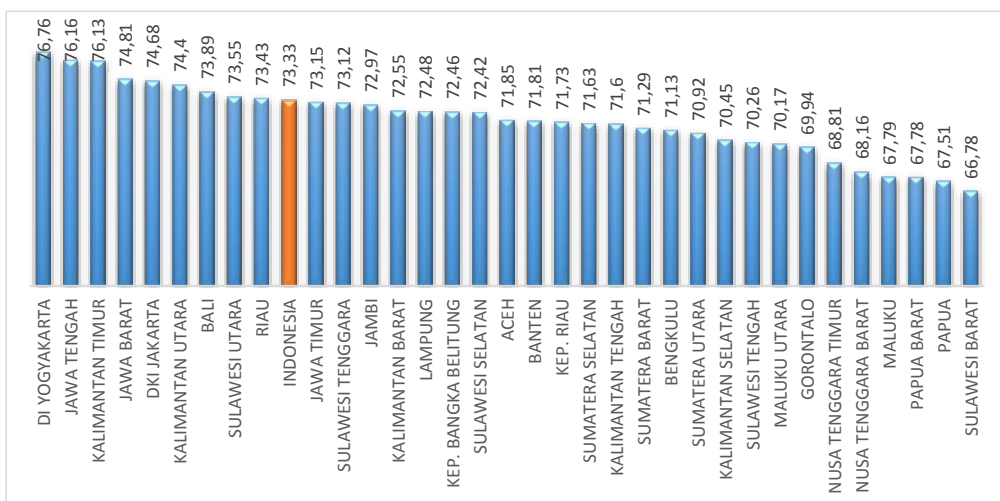
Gambar 3.8 Angka Harapan Hidup Perempuan menurut provinsi tahun 2019
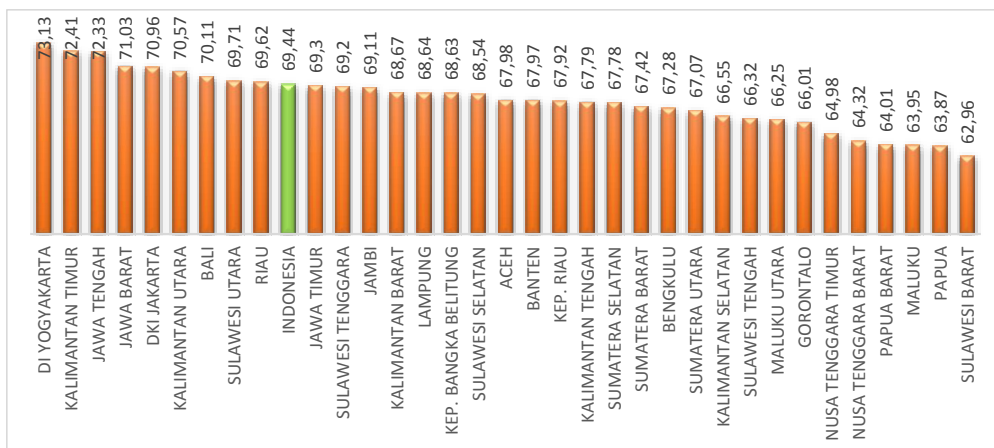
Gambar 3.9 Angka Harapan Hidup Laki-laki menurut provinsi tahun 2019

Konstruksi gender dapat menjadi salah satu aspek yang penting dilihat terkait AHH laki-laki lebih pendek dibandingkan perempuan. Faktor kebiasaan merokok yang lebih tinggi pada laki-laki, kemakluman atau penerimaan budaya pada laki-laki yang mengkonsumsi alkohol, begadang (pola tidur tidak teratur), tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, dan kurang gerak (kurang olah raga dan banyak dilayani) dapat menjadi factor pemicu harapan lama hidup pada laki-laki menjadi lebih rendah. Pada perempuan, konstruksi gender juga membuka peluang perempuan berperilaku lebih sehat, misalnya dengan adanya tugas pengasuhan pada perempuan yang membuka peluang perempuan mempelajari gizi keluarga dan menyadari pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Tuntutan budaya pada perempuan yang cantik, bersih, dan wangi mendorong perempuan lebih memperhatikan pola hidup bersih dan sehat.-Sejumlah kontruksi gender yang menjadi contoh di atas menyebabkan perempuan lebih sehat dibandingkan laki-laki yang berimplikasi pada harapan hidup perempuan yang lebih lama dibandingkan laki-laki.

Meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup lebih lama, namun kualitas hidup perempuan juga sangat bergantung pada perlakuan kebijakan, sosial, dan budaya terhadap diri perempuan.

Analisis gender pada anak-anak di Asia Selatan dan Pasifik antara lain menunjukkan adanya praktik ketidakadilan gender yang terjadi di wilayah India, Vietnam, dan China terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas telah menyebabkan resiko kematian yang tinggi pada anak perempuan. Jumlah perkawinan anak yang tinggi di Bangladesh, Nepal, dan Afganistan serta banyaknya perempuan yang mendapatkan kekerasan dari pasangan intim di wilayah Timor Leste, Afghanistan, Pakistan dan Myanmar meningkatkan angka kematian pada remaja perempuan. Situasi berbeda pada remaja laki-laki yang mengalami kematian yang lebih banyak disebabkan oleh cedera yang tidak disengaja, kekerasan fisik antarpribadi, alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, dan bunuh diri; dan prevalensi kematian lebih banyak disebabkan dari minuman keras dan merokok (Elissa Kennedy, Gerda Binder, Karen Humphries-Waa, Tom Tidhar, Karly Cini, Liz Comrie-Thomson, Cathy Vaughan, Kate Francis & Nisaa Wulan, George Patton, 2020). Informasi ini mengingatkan bahwa usia harapan hidup yang lebih lama pada perempuan tidak akan bermakna jika perlakuan diskriminasi gender masih terjadi baik pada usia anak, remaja dan dewasa.

C. Peluang Sekolah Perempuan Lebih Tinggi

Pembangunan manusia tidak bisa dilepas dari proses pendidikan. Tanpa pendidikan, pembangunan manusia hampir tidak mungkin terjadi. Dalam mengukur hasil pembangunan manusia, elemen pendidikan dilihat berdasarkan dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS)/*Expected years of schooling* (EYS) mengukur peluang penduduk di suatu daerah dapat menikmati pendidikan berdasarkan rasio penduduk yang bersekolah di usia yang sama saat itu. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal. Mengetahui HLS penduduk menginformasikan gambaran capaian pembangunan di bidang pendidikan yang dapat dinikmati atau dicapai setiap anak di daerah tertentu. Semakin tinggi peluang sekolah pada anak,

maka pembangunan di bidang pendidikan semakin menunjukkan keberhasilannya.
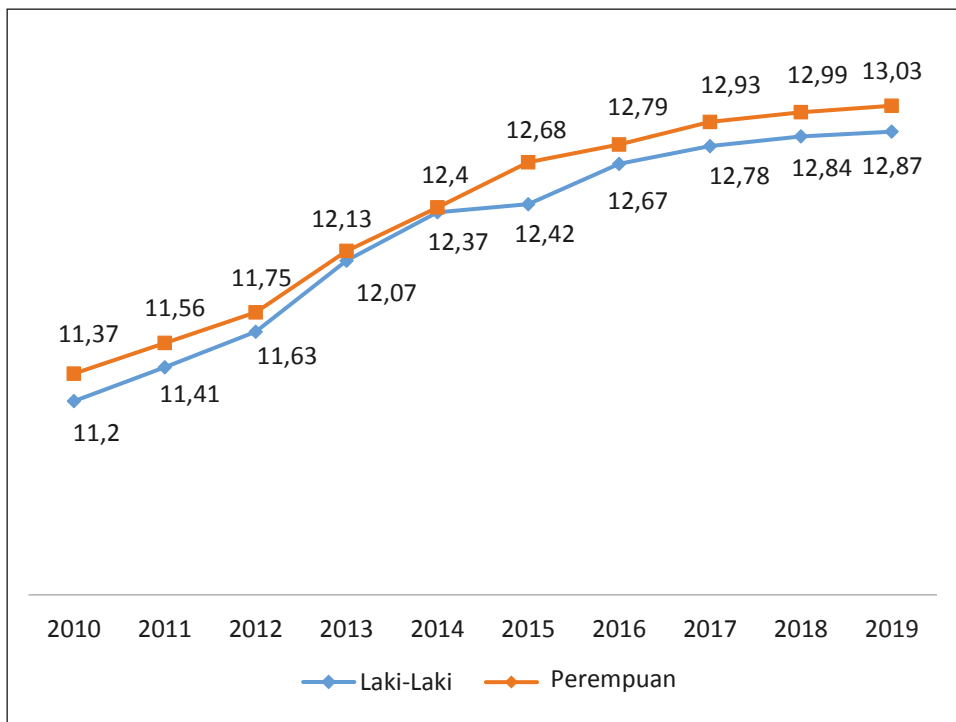
Sumber: BPS, Susenas 2010-2019.

Gambar 3.10 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2010-2019.

Pada periode 2010-2019, angka HLS laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Dalam periode waktu tersebut, HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang menunjukkan perempuan justru berpeluang lebih lama bersekolah dibandingkan laki-laki (Gambar 3.10). Tahun 2019, perempuan berpeluang mengenyam pendidikan selama 13,03 tahun, sedangkan laki-laki selama 12,87 tahun, atau lebih lama 0,16 tahun dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa peluang bersekolah di Indonesia sudah dapat menuntaskan wajib belajar

12 tahun atau sudah menyelesaikan jenjang SMA atau sederajat, baik pada perempuan maupun laki-laki.

Berdasarkan provinsi, HLS pada laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan tidak terjadi di seluruh provinsi. Terdapat sembilan (9) provinsi dengan peluang sekolah yang lebih lama pada laki-laki daripada perempuan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Papua Barat dan Papua. Selain kesembilan provinsi tersebut peluang sekolah lebih lama pada perempuan dengan tingkat perbedaan yang bervariasi (Gambar 3.11).
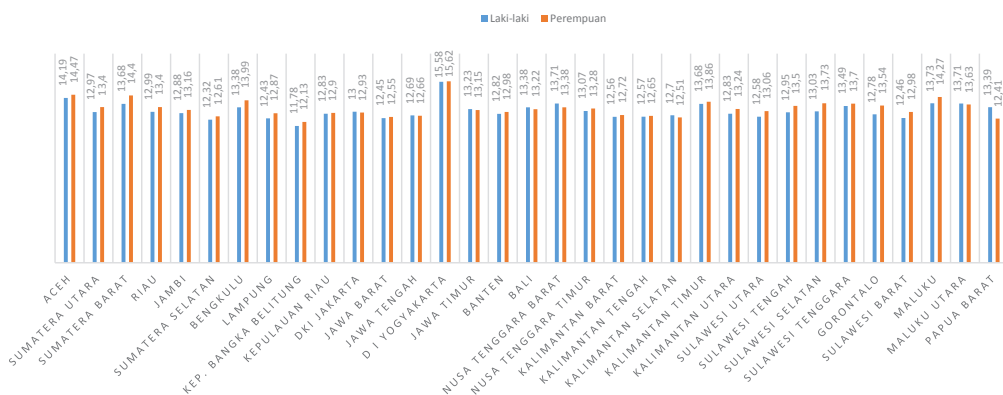
Gambar 3.11. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan HLS tertinggi di tingkat nasional, baik pada perempuan maupun laki-laki. Penduduk laki-laki dan perempuan di DI Yogyakarta memiliki peluang sekolah hingga mencapai bangku kuliah sekitar semester VII atau mendekati sarjana strata 1. Penduduk laki-laki DI Yogyakarta memiliki peluang sekolah selama 15,58 tahun dan perempuan berpeluang sekolah hingga 15,62 tahun. Provinsi dengan HLS terendah dialami penduduk di Papua dengan peluang sekolah selama 11,29 tahun untuk laki-laki dan HLS 10,72 tahun untuk perempuan. Dengan harapan lama sekolah tersebut, perempuan

dan laki-laki di Papua belum berpeluang menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA atau sederajat. Provinsi lain yang juga memiliki peluang sekolah tidak lebih dari 12 tahun adalah pada penduduk laki-laki di Kepulauan Bangka Belitung (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Provinsi, 2019

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tertinggi Tahun 2019			
Provinsi	Laki-laki	Provinsi	Perempuan
D I Yogyakarta	15,58	DI Yogyakarta	15,62
Aceh	14,19	Aceh	14,47
Maluku	13,73	Sumatera Barat	14,4
Nusa Tenggara Barat	13,71	Maluku	14,27
Maluku Utara	13,71	Bengkulu	13,99
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Terendah Tahun 2019			
Jawa Barat	12,45	Jawa Barat	12,55
Lampung	12,43	Kalimantan Selatan	12,51
Sumatera Selatan	12,32	Papua Barat	12,41
Kep. Bangka Belitung	11,78	Kep. Bangka Belitung	12,13
Papua	11,29	Papua	10,72
INDONESIA	12,87	INDONESIA	13,03

Perbedaan harapan bersekolah pada laki-laki yang mayoritas sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Di sejumlah daerah, anak laki-laki dituntut membantu orang tua bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga karena konstruksi budaya memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Situasi ini dapat berkontribusi pada tingkat partisipasi sekolah laki-laki yang lebih rendah ketimbang perempuan. Data 2019 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah

(APS) anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 3.12).
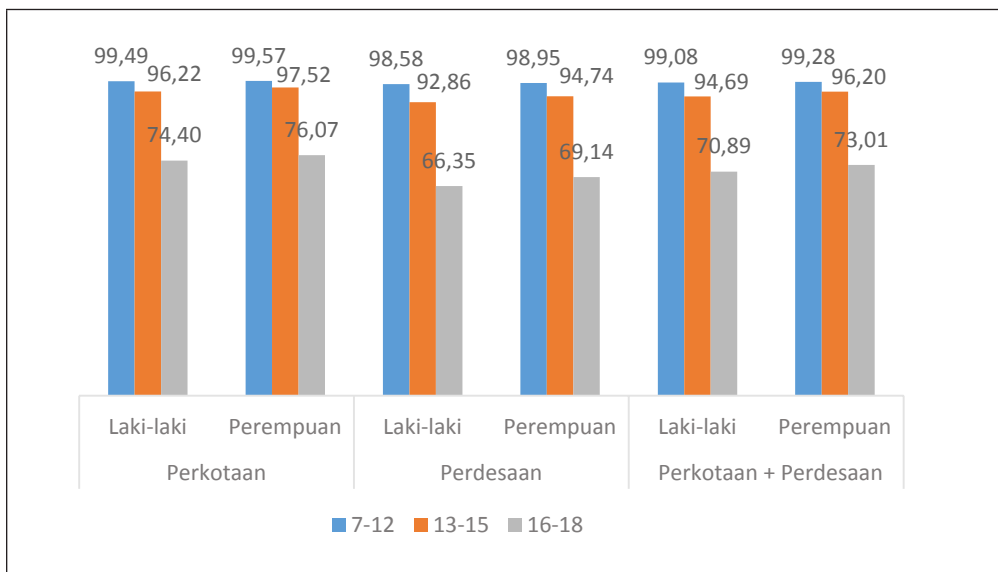
Sumber: BPS, Susenas 2019.

Gambar 3.12. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2019.

Pada kelompok usia 16-18 tahun APS laki-laki dan perempuan sama-sama lebih rendah dibandingkan kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Menurut jenis kelamin pada kelompok usia 16-18 tahun, APS laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan dengan perbandingan 70,89 pada laki-laki dan 73,01 pada perempuan, dan kondisi ini terjadi di perkotaan dan perdesaan, dengan tingkat kesenjangan di perdesaan lebih besar. Kondisi ini menginformasikan adanya hubungan antara APS yang lebih rendah berimplikasi pada HLS yang lebih rendah pada laki-laki dibandingkan perempuan (Gambar 3.13).
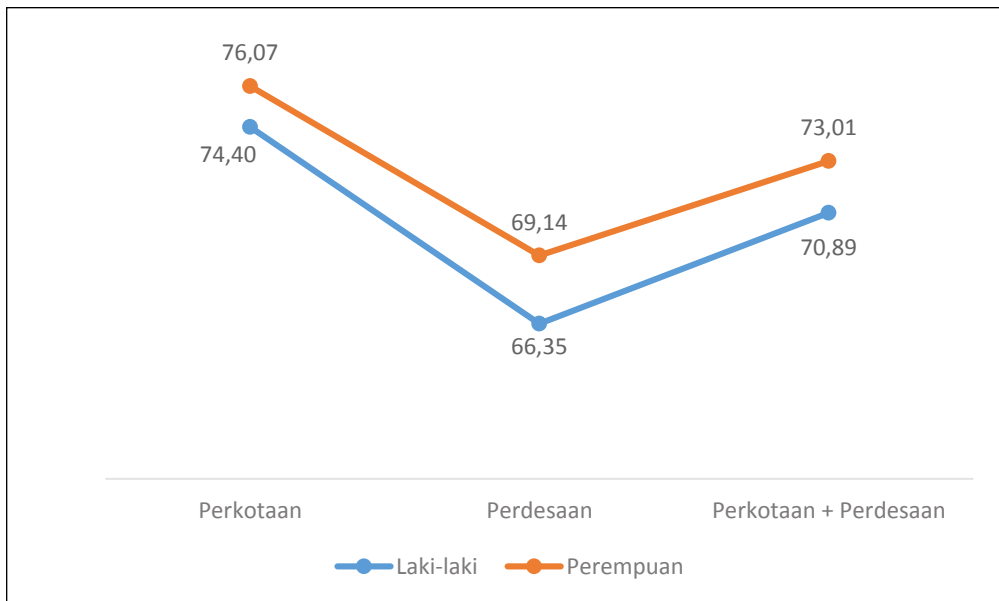
Sumber: BPS, Susenas 2019.

Gambar 3.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Jenis Kelamin, 2019.

Pada kelompok usia 16-18 tahun menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk di jenjang SMA/MA/SMK yang lebih tinggi diperoleh pada perempuan dibandingkan laki-laki. Gambar 3.13 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat kesenjangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada penduduk laki-laki dan perempuan di jenjang SMA/MA/SMK. Dari tahun 2015 sampai 2017, APK perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami peningkatan, namun di tahun 2018 sama-sama mengalami penurunan. Di tahun 2019, APK perempuan melesat cukup tinggi dari tahun 2018 dengan peningkatan sebanyak 5,02 dan telah berhasil melampaui capaian APK perempuan di tahun 2017. Kondisi ini tidak terlihat pada laki-laki, meskipun di tahun 2019 APK laki-laki mengalami kenaikan sebanyak 1,7 dibandingkan tahun 2018, namun ternyata belum berhasil memulihkan capaian APK di tahun 2017 yang telah mencapai angka 82,49 (Gambar 3.14).
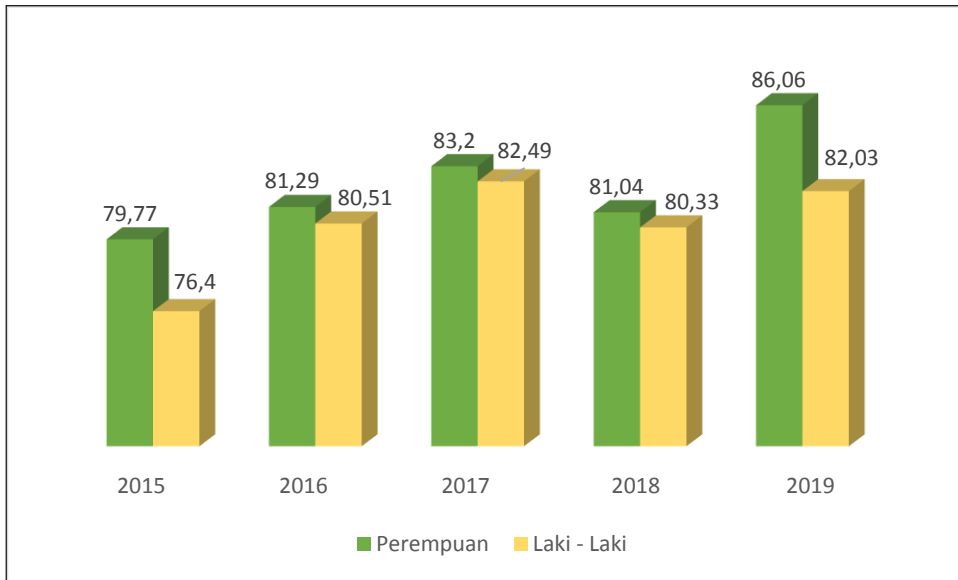
Gambar 3.14. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat menurut jenis kelamin tahun 2015-2019

Upaya menekan kesenjangan peluang sekolah penting dilakukan upaya melalui kebijakan dan program yang terintegrasi dan terfokus. Dengan kebijakan dan program yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, upaya meningkatkan HLS dapat dilakukan dengan menyinergikan pada program dan pemberdayaan yang terdapat di pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat. Kebijakan dan program dirancang dengan menfokuskan mengurangi kesenjangan yang terjadi pada jenis kelamin tertentu dan provinsi yang tertinggal, dan akhirnya peluang sekolah dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia secara adil dan merata.

D. Lama Sekolah Perempuan Perlu Ditingkatkan

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia berbasis gender di bidang pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years of Schooling* (MYS). Angka ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan

kebijakan pendidikan dalam jangka panjang. Mengetahui angka RLS dilakukan dengan menghitung jumlah tahun yang sudah ditempuh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam mengukur RLS dimulai pada penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi di usia ini proses pendidikan formal sudah selesai dilalui. Pendidikan dasar (SD) diperhitungkan selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA selama 3 tahun, atau 12 tahun untuk seluruh jenjang sekolah dasar dan menengah tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak (BPS, 2020). Penghitungan juga dilakukan pada penduduk yang pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi sesuai tingkatan diploma, sarjana, magister dan doktoral.

Jika HLS atau peluang bersekolah menunjukkan perempuan berpeluang lebih lama bersekolah dibandingkan laki-laki yang terlihat dari kurun waktu tahun 2010 hingga 2019, maka situasi sebaliknya terlihat pada data RLS. Gambar 3.15 menginformasikan periode waktu 2010-2019 menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, terdapat kesenjangan RLS dalam durasi hampir satu tahun antara laki-laki dan perempuan atau perempuan lama bersekolahnya lebih cepat hampir 1 tahun dibandingkan laki-laki. Secara rata-rata laki-laki sudah menikmati pendidikan selama 8,81 tahun atau hingga kelas VIII atau setingkat kelas 2 pada sekolah menengah pertama, sedangkan perempuan menikmati Pendidikan lebih cepat satu tahun yaitu selama 7,89 tahun atau kelas VII atau setingkat kelas 1 pada sekolah menengah pertama.
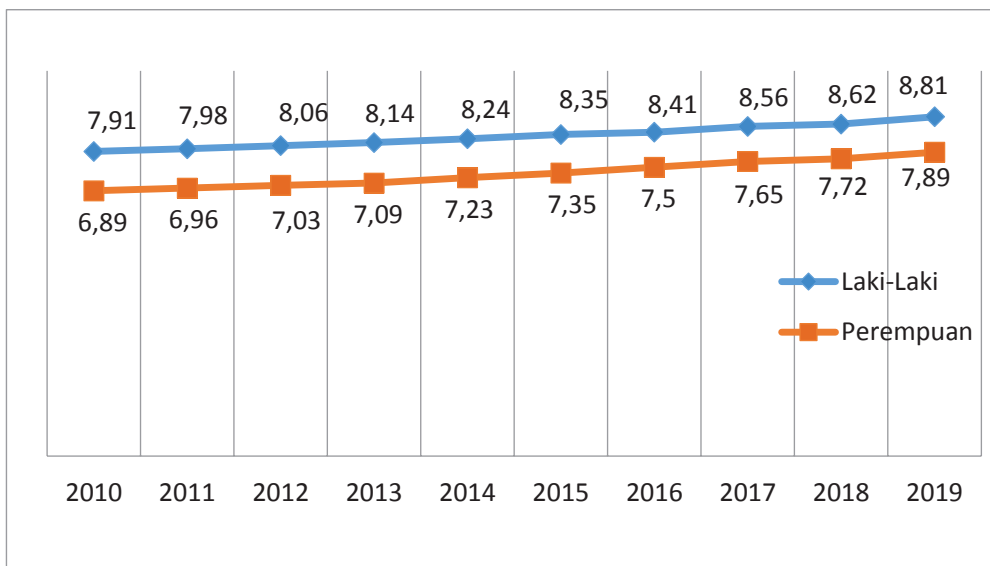
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.15. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2010-2019.

Dibandingkan tahun 2018, kenaikan RLS tahun 2019 pada perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tahun 2019, RLS perempuan meningkat sebanyak 0,17 point, sedangkan RLS laki-laki meningkat sebesar 0,19 point dibandingkan tahun 2018. Apabila melihat rentang periode tahun 2010-2019, baik laki-laki maupun perempuan mengalami tren yang sama-sama cenderung meningkat. Pada laki-laki, peningkatan RLS yang terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,9 tahun dari posisi tahun 2010, sedangkan pada perempuan peningkatan yang terjadi sebanyak 1 tahun. Peningkatan yang terjadi pada perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan peningkatan ini berkonsenkuensi pada semakin kecilnya kesenjangan yang ada antara RLS laki-laki dan perempuan (Gambar 3.15). Jika capaian lama sekolah pada perempuan terus mengalami peningkatan sehingga mendekati lama bersekolah laki-laki, maka kesenjangan RLS perempuan akan dapat ditekan menjadi lebih setara di kemudian hari.

Gambar 3.16 menunjukkan RLS di tahun 2019 masih menampilkan kesenjangan pada perempuan yang terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Satu-satunya provinsi dengan RLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki terjadi di Gorontalo. Kesenjangan RLS perempuan yang sangat lebar terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Di dua provinsi ini, kesenjangan rata-rata lama sekolah mencapai 1.62 tahun untuk Papua dan selama 3.01 tahun di Papua Barat, padahal kesenjangan angka RLS rata-rata di tingkat nasional, yaitu sebesar 0.92 tahun. Di Papua, rata-rata penduduk perempuan hanya menempuh pendidikan sampai kelas V tingkat dasar, sedangkan laki-laki sudah mencapai kelas VII SMP/ sederajat; sementara di Papua Barat, rata-rata penduduk perempuan hanya sampai kelas VII pada SMP/sederajat sedangkan rata-rata laki-laki sudah mencapai jenjang kelas X pada SMA/sederajat. Kesenjangan ini harus menjadi perhatian pemerintah di tingkat pusat dan daerah agar semua penduduk dapat menerima akses dan mendapatkan layanan pembangunan di bidang pendidikan.
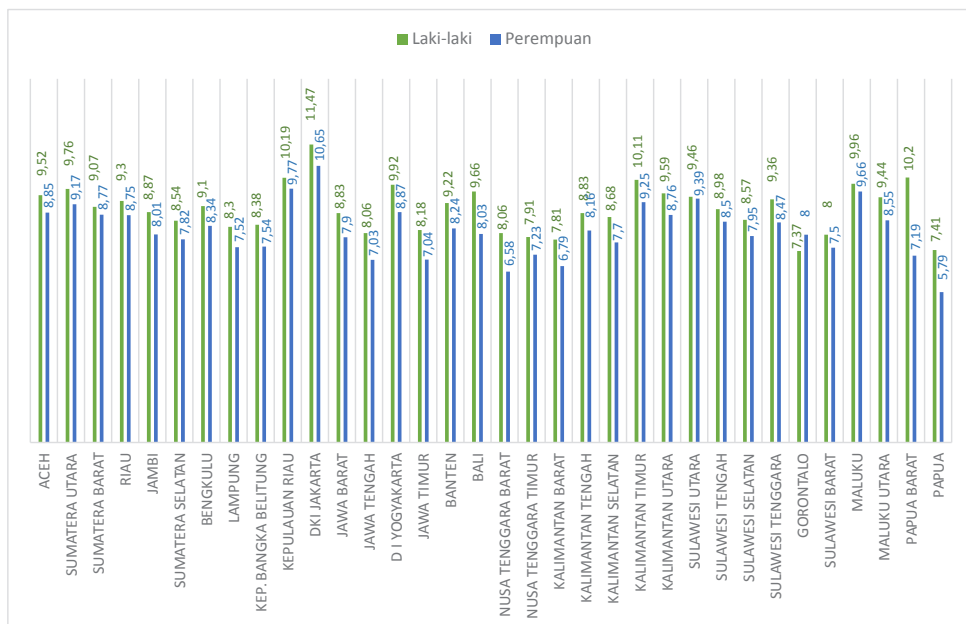
Gambar 3.16. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin, 2019.

DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi dengan RLS laki-laki mencapai 11,47 tahun atau hampir menyelesaikan jenjang SMA/sederajat, sedangkan penduduk perempuan DKI Jakarta rata-rata bersekolah selama 10,65 tahun. Terdapat 3 provinsi yang RLS laki-laki mencapai kelas X SMA/sederajat, yaitu Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur, sementara RLS perempuan yang mencapai kelas X SMA/sederajat hanya terjadi di 1 provinsi saja, yaitu DKI Jakarta. Provinsi dengan RLS terendah pada penduduk laki-laki terdapat di Gorontalo yaitu 7,37 tahun, sementara provinsi dengan RLS perempuan terendah di Papua yaitu 5,79 tahun. Terdapat 3 provinsi dengan RLS kurang dari 7 tahun pada perempuan, yaitu di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat, namun tidak dijumpai pada RLS laki-laki (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Provinsi dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tertinggi dan Terendah, 2019

Provinsi dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tertinggi, 2019			
Provinsi	**Laki-Laki**	**Provinsi**	**Perempuan**
DKI Jakarta	11,47	DKI Jakarta	10,65
Papua Barat	10,2	Kepulauan Riau	9,77
Kepulauan Riau	10,19	Maluku	9,66
Kalimantan Timur	10,11	Sulawesi Utara	9,39
Maluku	9,96	Kalimantan Timur	9,25
Provinsi dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Terendah, 2019			
Sulawesi Barat	8	Jawa Timur	7,04
Nusa Tenggara Timur	7,91	Jawa Tengah	7,03
Kalimantan Barat	7,81	Kalimantan Barat	6,79
Papua	7,41	Nusa Tenggara Barat	6,58
Gorontalo	7,37	Papua	5,79
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Nasional, 2019			
Indonesia	8,81	Indonesia	7,89

Meskipun kesenjangan RLS masih terjadi berdasarkan provinsi, namun peningkatan RLS terlihat di sejumlah provinsi. Tabel 3.4 menunjukkan tahun 2019 adanya peningkatan struktur jumlah provinsi dengan capaian RLS kearah lebih besar dibandingkan tahun 2018. Pada RLS laki-laki dan periode waktu tahun 2018-2019 pemurunan jumlah provinsi terbanyak dengan RLS antara 7-7,9 tahun sebanyak 8 provinsi (2018) menjadi 4 provinsi (2019), seiring dengan bertambahnya jumlah provinsi dengan RLS di atas 8 tahun pada tahun 2019.

Tabel 3.4. Jumlah Provinsi dengan Tingkat Rata-Rata Lama Sekolah, 2018-2019.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	2018		2019	
	Provinsi dengan RLS Laki-laki	Provinsi dengan RLS Perempuan	Provinsi dengan RLS Laki-laki	Provinsi dengan RLS Perempuan
RLS > 11	1	0	1	0
RLS > 10	2	1	3	1
RLS > 9	12	5	13	5
RLS > 8	11	11	13	14
RLS > 7	8	12	4	11
RLS > 6	0	4	0	2
RLS > 5	0	1	0	1

Peningkatan struktur jumlah provinsi dengan RLS perempuan lebih baik tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 juga terjadi. Tahun 2018, jumlah provinsi dengan RLS antara 6-6,9 tahun terdapat di 4 (empat) provinsi, mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan penurunan pada kriteria ini menjadi 2 provinsi di tahun 2019, demikian juga pada jumlah provinsi dengan RLS 7-7,9. Peningkatan ini terlihat pada provinsi dengan RLS di antara 8-8,9 tahun bertambah dari 11 provinsi di tahun 2018 menjadi 14 provinsi di tahun 2019 (Tabel 3.4). Melihat peningkatan jumlah provinsi

dengan RLS yang lebih baik di tahun 2019 merefleksikan adanya optimisme peningkatan RLS pada perempuan dan laki-laki.

Meskipun terlihat adanya peningkatan, namun penting diingat bahwa situasi lebih rendahnya RLS perempuan dibandingkan laki-laki tidak sejalan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada perempuan. Terlebih lagi, kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan ini sudah terjadi dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir. Karena itu, penting melakukan upaya melalui kebijakan dan program prioritas guna mendorong perempuan bisa lebih lama berada di bangku sekolah. Berbagai kendala yang berkonsekuensi pada tidak dilanjutkannya pendidikan formal perempuan penting diintervensi. Urgensi meningkatkan RLS pada perempuan akan berpengaruh signifikan pada rendahnya persentase penduduk miskin (Hadi, 2019) dan pengangguran terbuka (Stepanie Ayu Pradipta, 2020), serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Faritz & Soejoto, 2020). Berinvestasi pada pendidikan berdampak positif pada kapasitas individu dan masyarakat dalam menghadapi resesi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan kemajuan bangsa.

E. Perekonomian Masih Didominasi Laki-laki

Selain melihat aspek pendidikan dan kesehatan, indikator ekonomi berbasis standar hidup layak merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender. UNDP menetapkan *Human Development Index* (HDI) di bidang ekonomi menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB/GNI) perkapita dengan menggunakan tingkat konversi paritas daya beli/ *Purchasing Power Parity* (PPP). Untuk Indonesia, indikator tersebut diproksi dengan menggunakan data pengeluaran perkapita karena keterbatasan ketersediaan data PNB.

Gambar 3.17 menunjukkan adanya pertumbuhan pengeluaran per kapita pada perempuan dan laki-laki dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita laki-laki meningkat dari Rp. 13.856.000/

tahun di tahun 2010 menjadi Rp. 15.866.000/tahun di tahun 2019 atau tumbuh sebesar 14,51 persen. Pengeluaran per kapita perempuan juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp. 7.571.000/tahun menjadi Rp. 9.244.000 /tahun atau tumbuh sebesar 22,10 persen.
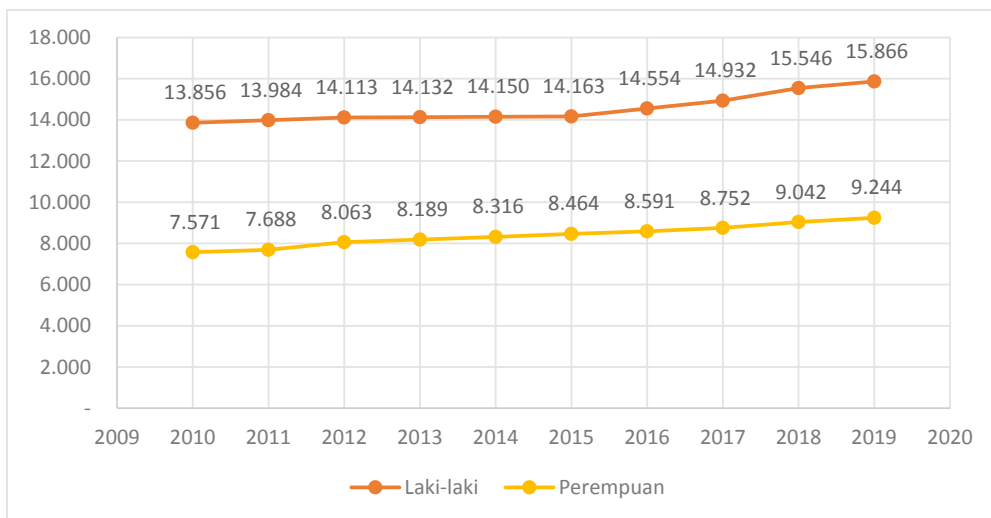
Gambar 3.17. Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (juta rupiah/ orang/tahun) menurut jenis kelamin tahun 2010-2019.

Pertumbuhan pengeluaran per kapita yang diperoleh perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki sepanjang tahun 2010 hingga saat ini. Dalam kurun waktu selama sepuluh tahun, rasio pertumbuhan pengeluaran per kapita laki-laki berkisar antara 1,5 persen sampai 4,88 persen, sedangkan rasio pertumbuhan pengeluaran perempuan berada dalam kisaran 0.09-4,11 persen. Di tahun 2019, pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan mengalami penurunan 2,23 persen pada laki-laki dan 2,06 persen pada perempuan. Di tahun 2019, meskipun sama-sama mengalami penurunan, namun kedudukan perempuan masih tetap lebih rendah ketimbang laki-laki, atau pengeluaran per kapita perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran per kapita pada perempuan dibandingkan laki-laki (Gambar 3.18).
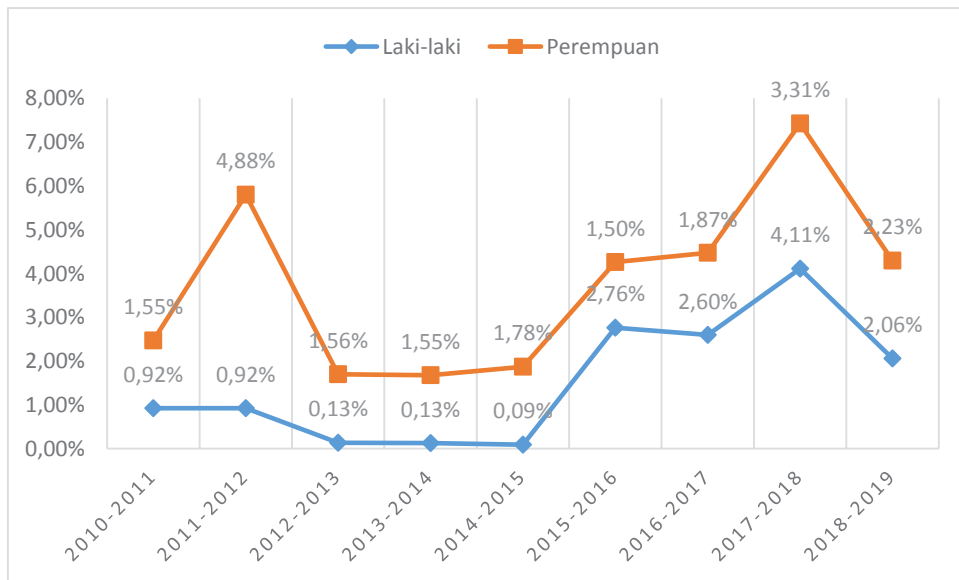
Gambar 3.18. Pertumbuhan Rasio Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Juta Rupiah/orang/tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin, tahun 2010-2019.

Jika dilihat dari rasio pengeluaran per kapita pada perempuan dan laki-laki, kesenjangan ekonomi ini semakin nyata. Dari tahun 2010 sampai 2019, rasio pengeluaran per kapita perempuan hanya dalam rentang 54,64 persen sampai 59,76 persen saja. Artinya, pengeluaran per kapita perempuan tidak lebih dari 59,76 persen dari pengeluaran per kapita laki-laki. Di tahun 2019, pengeluaran per kapita perempuan tidak mengalami perubahan, yaitu hanya sebesar 58,26 persen dari laki-laki (Gambar 3.19).

Gambar 3.19. Rasio Pengeluaran Per Kapita pada Perempuan dibandingkan Laki-laki, 2010-2019.
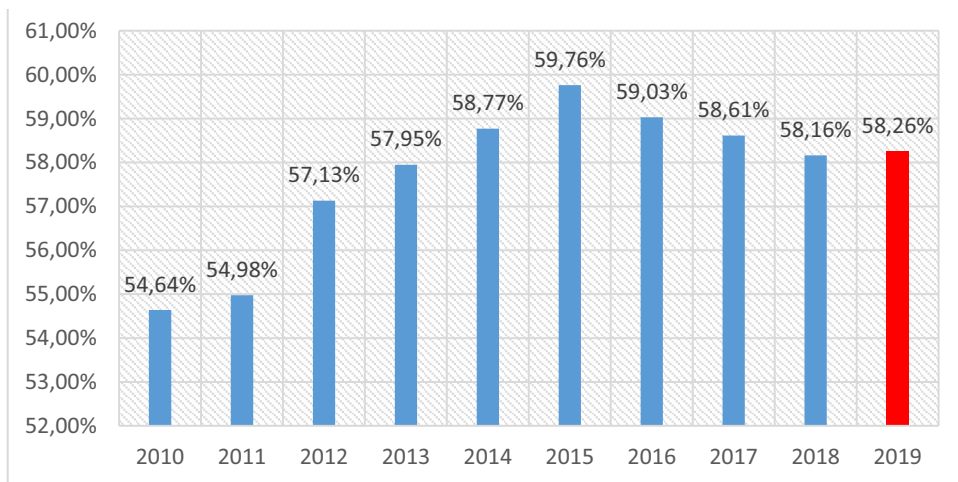
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS, 2010-2019

Ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pengeluaran per kapita pada perempuan ini, salah satu faktor utama kesenjangan ekonomi ini dapat dilihat dari perbedaan upah yang diterima. Secara umum, rata-rata upah/gaji yang diterima perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki baik dilihat berdasarkan tempat tinggal, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama dan status perkawinan. Berdasarkan tempat tinggal, pada tahun 2019 rata-rata upah/gaji pekerja perempuan di perkotaan sebesar Rp 2.722.531, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mendapatkan rata-rata upah sebesar Rp 3.503.050. Situasi yang tidak berbeda juga terjadi di perdesaan, upah rata-rata perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Gambar 3.20).
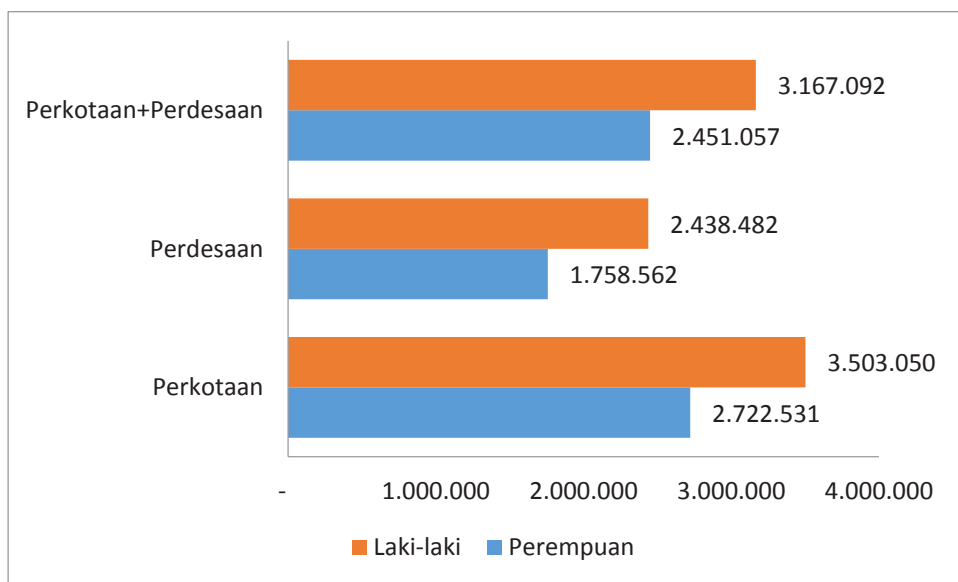
Gambar 3.20. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin

Rendahnya gaji yang diterima perempuan dibandingkan dengan laki-laki juga terlihat dari upah yang diterima berdasarkan tingkat pendidikan. Gambar 3.21 menunjukkan kesenjangan upah yang lebih rendah diterima perempuan meskipun berada pada jenjang pendidikan yang sama dengan laki-laki. Diskriminasi upah ini terlihat di semua jenjang pendidikan yang ditamatkan, yaitu nilai upah/gaji perempuan sebagai buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir. Pembedaan perlakuan atas upah/gaji ini dalam jumlah yang signifikan.
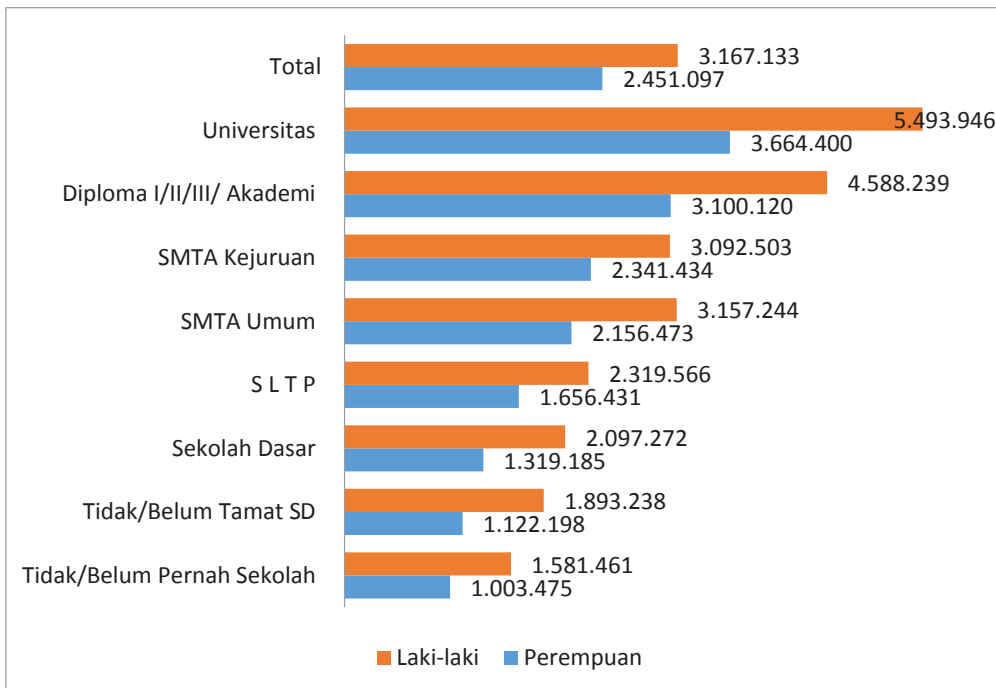
Gambar 3.21. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2019.

Jika dilihat rasio upah yang diterima berdasarkan tingkat pendidikan, perempuan hanya menerima upah dalam kisaran antara 32 persen hingga 69 persen. Rasio tertinggi pada upah yang diterima perempuan diterima oleh perempuan yang tidak/belum tamat SD dengan rasio upah 69 persen dari upah yang diterima laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama (Gamabr 3.22).
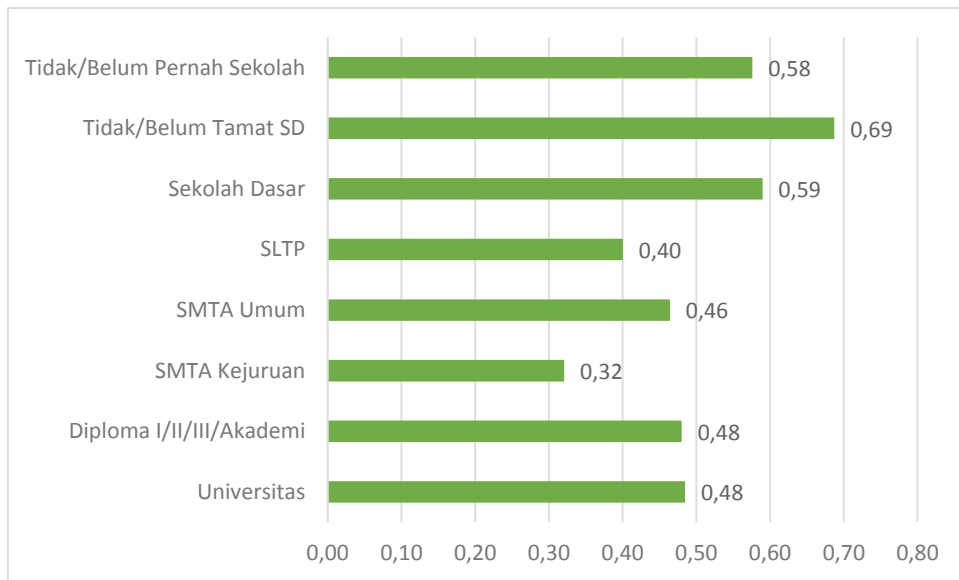
Gambar 3.22. Rasio Upah yang Diterima Perempuan dibandingkan Laki-laki Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2019.

Diskriminasi rata-rata upah/gaji yang diterima perempuan dan laki-laki juga terjadi pada pekerjaan berdasarkan lapangan pekerjaan utama. Mayoritas upah/gaji yang diterima pekerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki meskipun dalam lapangan pekerjaan yang sama. Hanya pada 4 (empat) kategori pekerjaan yang memberikan rata-rata upah/gaji lebih tinggi kepada pekerja perempuan, yaitu (1) real estate, (2) transportasi dan pergudangan, (3) konstruksi, dan (4) pengadaan listrik dan gas (Gambar 3.23).
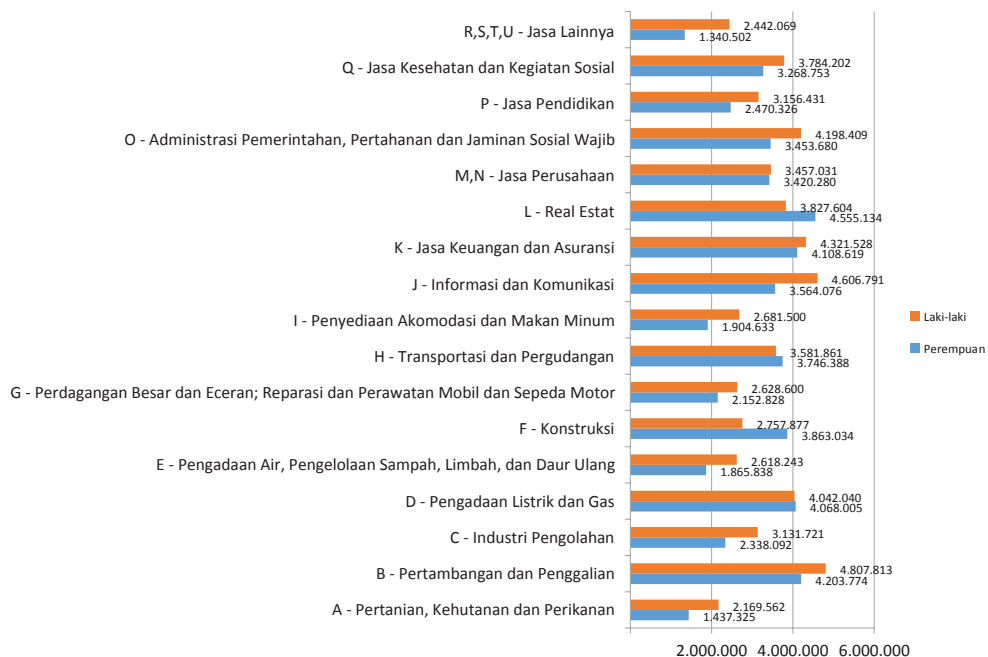
Gambar 3.23. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2019.

Pembedaan rata-rata upah/gaji bersih yang diterima pekerja perempuan juga terlihat pada pekerjaan berdasarkan status perkawinan. Gambar 3.24 menunjukkan pekerja perempuan dengan status belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati berdampak pada besaran nilai upah/gaji yang diterima perempuan.
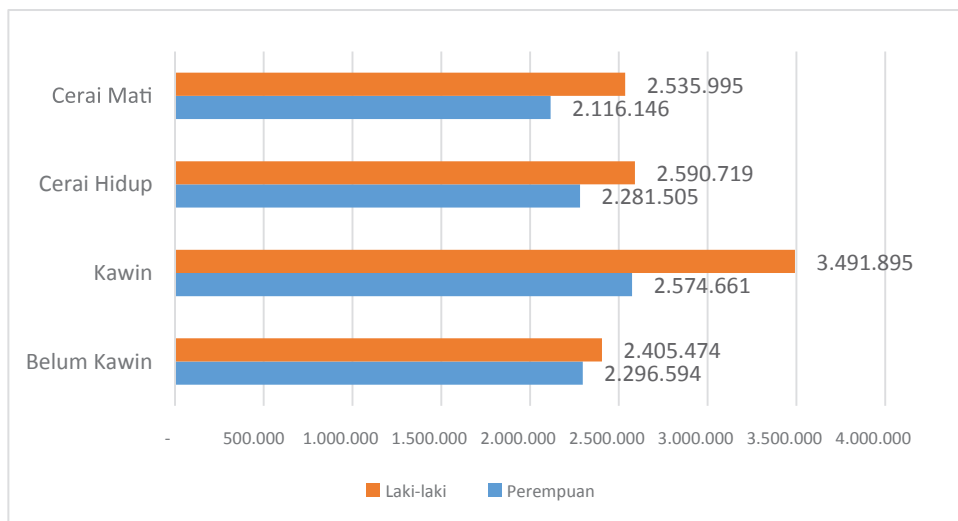
Gambar 3.24. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

Disparitas ekonomi, terutama pada besaran upah yang diterima perempuan merupakan bentuk nyata ketidakadilan gender yang berimplikasi pada pengeluaran per kapita pada perempuan. Pembedaan upah karena alasan jenis kelamin merupakan tindak subordinasi berbasis gender yang melanggar hak asasi perempuan. Memperkuat SDM perempuan dan memberdayakan perempuan melalui pendidikan formal dan non formal menjadi salah satu daya tawar perempuan di pasar tenaga kerja. Tanpa pendidikan dan keterampilan, kesenjangan ekonomi sulit dihapuskan. Dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian perempuan akan berdampak pada partisipasi dan kontribusi perempuan dalam pembangunan.

F. Pembangunan Gender di Kawasan Timur Indonesia Masih Tertinggal

Indeks Pembangunan Gender diukur berdasarkan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. Secara nasional IPM laki-laki tahun 2010 sampai dengan 2019 berada pada kategori tinggi sedangkan IPM perempuan masih pada kategori sedang. Situasi ini menginformasikan adanya kesenjangan pembangunan berbasis gender yang cukup signifikan terjadi di Indonesia. Diperlukan kebijakan dan program prioritas yang diorientasikan untuk mendorong percepatan pembangunan bagi penduduk perempuan agar dapat memperkecil atau mengurangi kesenjangan pembangunan gender di Indonesia (Gambar 3.25).
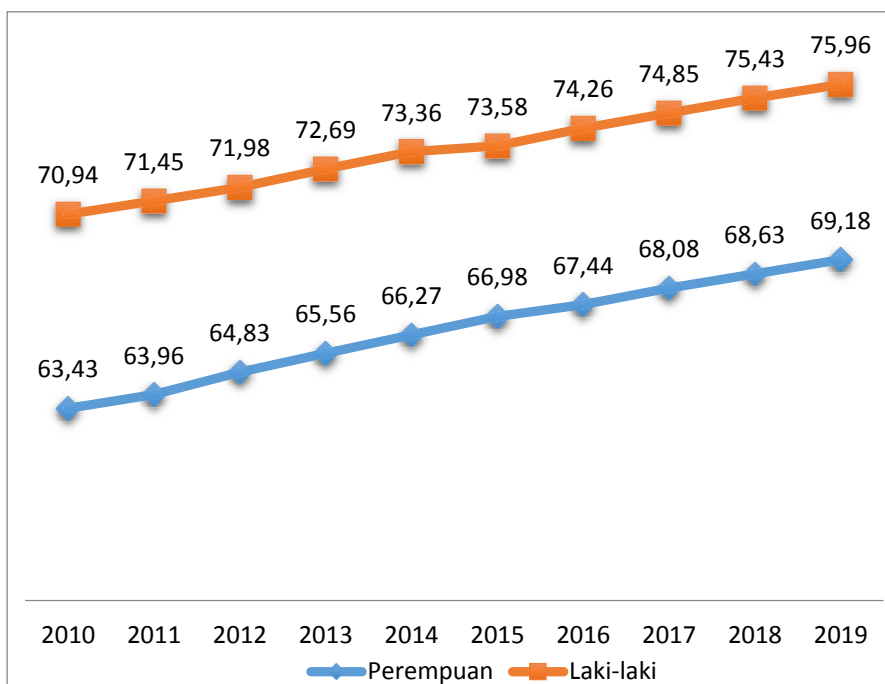
Gambar 3.25. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2010-2019.

Capaian IPM berdasarkan jenis kelamin dalam sebaran provinsi ini menunjukkan masih adanya ketidakmerataan pembangunan berdasarkan gender di Indonesia. IPM laki-laki yang selalu lebih

unggul dibandingkan perempuan mengindikasikan urgensi pengarusutamaan gender dalam pembangunan masih tetap harus dilakukan. Untuk melihat secara mendalam kesenjangan antar provinsi dan jenis kelamin terhadap capaian IPM yang berbeda dapat dilakukan dengan menelisik komponen pembentuknya.

Berdasarkan kepulauan, fenomena yang kontras terjadi di Pulau Kalimantan dan Papua. Pembangunan laki-laki di Pulau Kalimantan sudah mencapai kategori tinggi, bahkan provinsi Kalimantan Timur sudah memasuki kategori sangat tinggi yaitu 81,58. Prestasi pembangunan laki-laki di Pulau Kalimantan ini tidak dibarengi dengan kualitas pembangunan perempuan. Terbukti pembangunan perempuan di hampir seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah masih berada pada kategori sedang. Selain disebabkan oleh faktor kesehatan dan pendidikan, hal ini dapat dikaitkan dengan perekonomian Kalimantan yang dominan di pertambangan dan penggalian yang merupakan lapangan usaha dengan persentase tenaga kerja perempuan yang relatif rendah (Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, 2018).

Kesenjangan yang sangat lebar di Kalimantan juga terlihat di Pulau Papua, terutama di Papua Barat. IPM laki-laki di Provinsi Papua sudah berada di kategori sedang dengan IPM sebesar 66,38, bahkan di Provinsi Papua Barat sudah masuk status kategori tinggi dengan capaian sebesar 72,47. Sayangnya, pembangunan laki-laki di dua provinsi ini tidak diimbangi dengan pembangunan pada perempuan. IPM perempuan masih dalam kategori rendah dengan IPM 53,14 untuk Papua dan 59,96 untuk Papua Barat. Kesenjangan yang sangat lebar pada capaian IPM di Papua dan Papua Barat ini penting menjadi fokus prioritas pembangunan agar hasil pembangunan yang berkeadilan gender dapat lebih cepat dicapai.

Pemerataan pembangunan manusia berbasis gender penting dilihat berdasarkan pembagian Kawasan di Indonesia yaitu barat dan timur. Berdasarkan Tabel 3.7 menunjukkan bahwa adanya

disparitas pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari 10 (sepuluh) peringkat tertinggi dan terendah IPM baik laki-laki dan perempuan dan sebaran provinsi yang ada di dalamnya menunjukkan kesenjangan dimana sebagian besar IPM terendah berada di KTI, sedangkan IPM tertinggi sebagian besar berada pada KBI. Pada 10 (sepuluh) peringkat tertinggi IPM laki-laki, terdapat 2 provinsi berada di KTI, sedangkan 8 provinsi berada di KBI. Kondisi ini juga tampak pada 10 (sepuluh) IPM perempuan yang tertinggi yang menunjukkan 6 provinsi berada di KBI atau hanya 4 provinsi berada di KTI. Kesenjangan yang lebih lebar justru terlihat pada sebaran provinsi dengan peringkat IPM 10 (sepuluh) terendah. Pada IPM perempuan maupun IPM laki-laki, mayoritas berada di wilayah KTI. Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi di KBI yang masuk dalam kategori IPM terendah baik laki-laki maupun perempuan.

Tabel 3.5. Provinsi dengan IPM Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019.

10 Provinsi Dengan IPM Terendah					
Provinsi	**Nilai IPM Laki-Laki**	**Wilayah**	**Provinsi**	**Nilai IPM Perempuan**	**Wilayah**
Papua	66,38	KTI	Papua	53,14	KTI
Nusa Tenggara Timur	69,2	KTI	Papua Barat	59,96	KTI
Sulawesi Barat	69,74	KTI	Gorontalo	61,9	KTI
Gorontalo	71,29	KTI	Sulawesi Barat	62,6	KTI
Papua Barat	72,47	KTI	Kalimantan Barat	62,92	KTI
Kalimantan Barat	72,48	KBI	Nusa Tenggara Timur	64,16	KTI

Provinsi	Nilai IPM Laki-Laki	Wilayah	Provinsi	Nilai IPM Perempuan	Wilayah
Nusa Tenggara Barat	72,58	KTI	Nusa Tenggara Barat	65,61	KTI
Maluku	72,94	KTI	Kalimantan Utara	65,96	KTI
Sulawesi Tengah	73,19	KTI	Maluku Utara	66,21	KTI
Lampung	73,54	KBI	Lampung	66,47	KBI
10 Provinsi Dengan IPM Tertinggi					
Jawa Timur	76	KBI	Aceh	69,75	KBI
Jawa Barat	76,23	KBI	Kalimantan Timur	70,14	KTI
Sulawesi Utara	76,36	KTI	Sulawesi Selatan	70,21	KTI
Banten	76,61	KBI	Banten	70,23	KBI
Riau	77,35	KBI	Sumatera Barat	71,33	KBI
Bali	78,63	KTI	Sulawesi Utara	72,18	KTI
Kepulauan Riau	79,23	KBI	Bali	73,69	KTI
Kalimantan Timur	81,58	KBI	Kepulauan Riau	73,76	KBI
D I Yogyakarta	82,8	KBI	D I Yogyakarta	78,47	KBI
Dki Jakarta	83,58	KBI	Dki Jakarta	79,16	KBI

Sebagaimana gambaran yang terlihat pada IPM perempuan dan laki-laki, sejak tahun 2010 sampai tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan. Gambar 3.27 menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, capaian IPG Indonesia terus meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016. DI tahun 2019, IPG Indonesia mencapai 91,07, atau naik 0,08 poin dibandingkan tahun 2018.
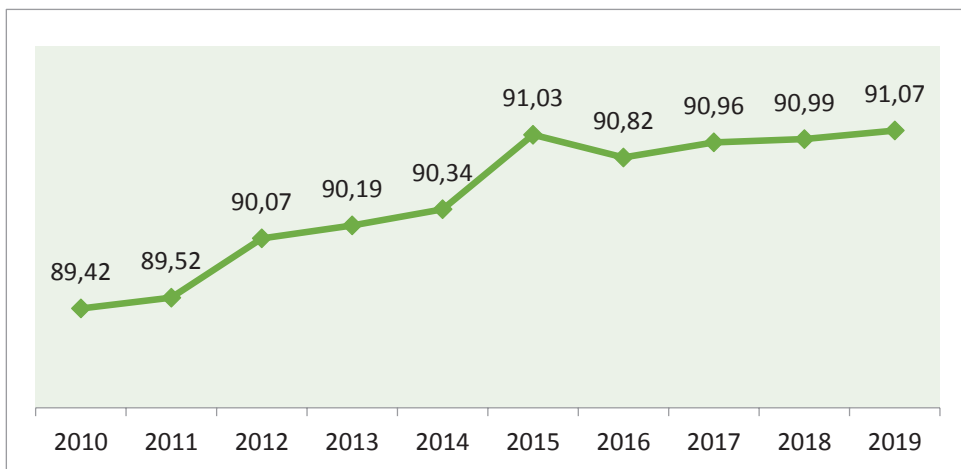
Gambar 3.27. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2010-2019

Capaian pembangunan gender di tingkat nasional ini penting ditelisik berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota. Dengan melihat sebaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) berbasis daerah, akan dapat diketahui bagaimana pembangunan di daerah telah dilakukan secara responsif gender atau belum. Dengan menggunakan IPG, kebijakan dan program pembangunan di daerah dapat dievaluasi dengan menggunakan analisis gender. Selain itu, pembangunan di daerah juga dapat dikembangkan dengan mengedepankan perspektif gender dan/atau melakukan Tindakan afirmasi guna mendorong pembangunan berbasis gender yang adil dan setara.

Berdasarkan sebaran provinsi, Gambar 3.28 menunjukkan bahwa berdasarkan sebaran provinsinya, terdapat 15 provinsi yang

mempunyai IPG di atas nilai nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan IPG tertinggi yaitu 94,77, kemudian disusul oleh DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bali, Kep. Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Aceh. IPG di sebagian besar provinsi di Indonesia sudah berada di atas level 90, tetapi masih ada provinsi dengan nilai IPG di bawah 85 yakni Papua sebesar 80,05 dan Papua Barat sebesar 82,74. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pembangunan gender antarwilayah di Indonesia.
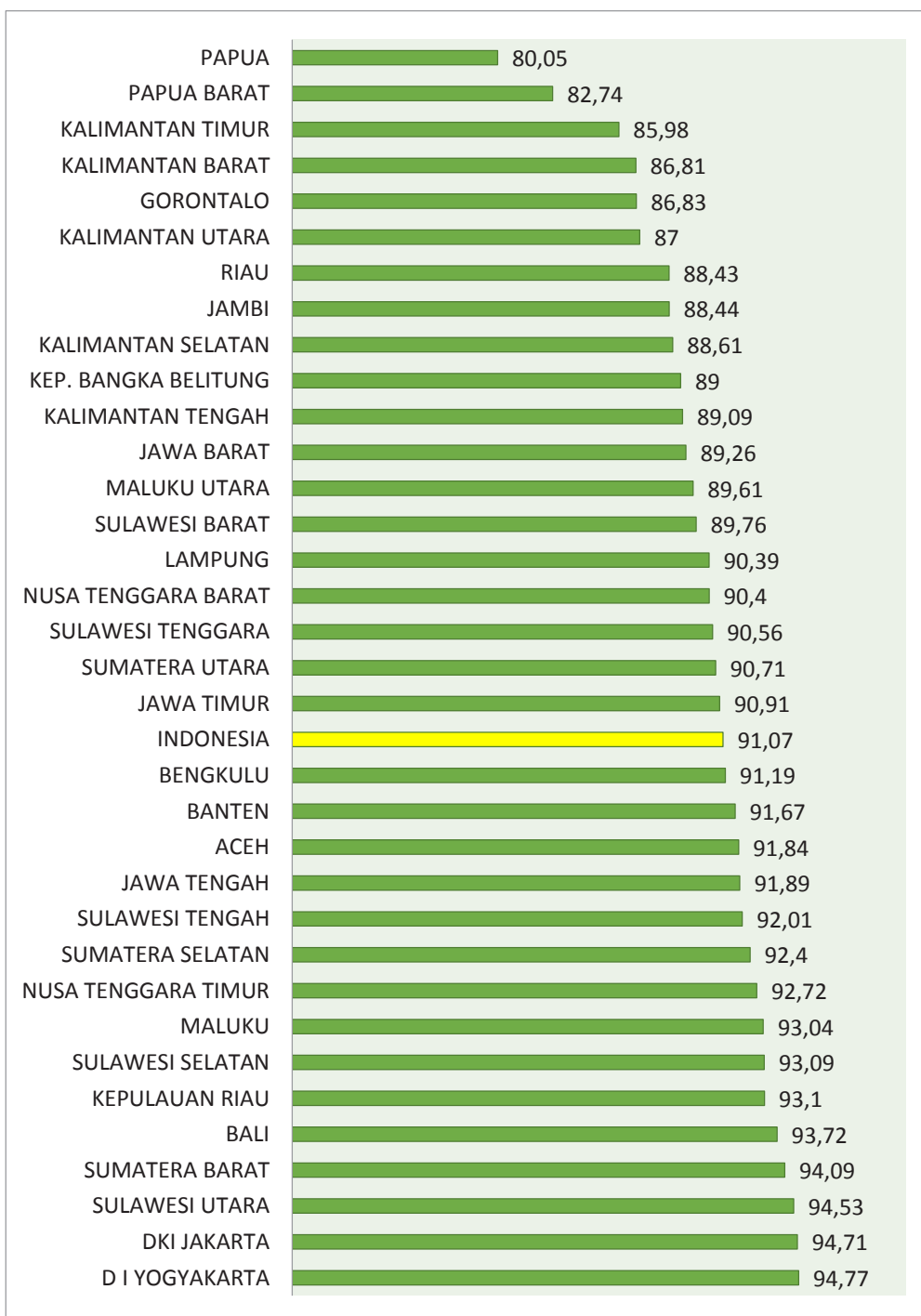
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.28. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi, 2019.

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa provinsi dengan lima besar IPG tertinggi pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hanya terjadi perubahan pada tingkat peringkatnya saja. Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2018 menduduki posisi teratas dengan nilai IPG sebesar 94,79, namun pada tahun 2019 turun menjadi peringkat ketiga dengan IPG sebesar 94,53, dengan penurunan IPG sebesar 0,26 poin. DI Yogyakarta dan DKI Jakarta yang pada tahun 2018 menduduki peringkat kedua dan ketiga, pada tahun 2019 naik menjadi peringkat pertama dan kedua, sementara Sumatera Barat dan Bali berada pada peringkat yang sama dengan peringkat yang dicapai di tahun 2018.

Tabel 3.6. IPG, IPM, dan Ranking IPG di Lima Provinsi dengan IPG Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018-2019.

Provinsi	IPG		IPM Laki-Laki		IPM Perempuan		Ranking IPG	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
IPG Tertinggi 2019								
DI Yogyakarta	94,73	94,77	82,34	82,8	78	78,47	2	1
DKI Jakarta	94,7	94,71	83,28	83,58	78,87	79,16	3	2
Sulawesi Utara	94,79	94,53	75,4	76,36	71,47	72,18	1	3
Sumatera Barat	94,17	94,09	75,12	75,81	70,74	71,33	4	4
Bali	93,71	93,72	78	78,63	73.03	73,69	5	5
IPG Terendah 2019								
Papua	80,11	80,05	65,45	66,38	52,43	53,14	1	1
Papua Barat	82,47	82,74	71,54	72,47	59	59,96	2	2
Kalimantan Timur	85,63	85,98	80,82	81,58	69,21	70,14	3	3
Kalimantan Barat	86,74	86,81	71,78	72,48	62,26	62,92	6	4
Gorontalo	86,63	86,83	70,52	71,29	61,09	61,9	4	5

Peringkat yang tidak berbeda dengan tahun 2018 terjadi pada provinsi dengan Indeks Pembangunan Gender terendah tahun 2019, yaitu Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan karena indeks pembangunan laki-laki di Papua adalah 66,38 atau masuk dalam kategori "sedang", bahkan di Papua Barat sudah masuk status pembangunan "tinggi" dengan indeks pembangunan laki-laki 72,47. Namun sayangnya, capaian pembangunan pada laki-laki yang sudah terjadi di kedua provinsi ini belum dirasakan sepenuhnya oleh perempuan. Pembangunan perempuan di kedua provinsi tersebut masih dibawah 60, atau masuk kategori rendah, dengan IPG 53,14 untuk Papua dan 59,96 untuk Papua Barat. Memperhatikan capaian ini, diperlukan perhatian khusus untuk menciptakan keadilan pembangunan gender dalam peningkatan kualitas hidup manusia di Papua dan Papua Barat. Diperlukan program dan kebijakan yang bersifat afirmasi pada pembangunan perempuan Papua dan Papua Barat di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Selain Papua dan Papua Barat, IPG terendah pada tahun 2019 juga ditempati oleh Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Walaupun IPG Provinsi Kalimantan Barat meningkat sebesar 0,07 poin yang semula pada tahun 2018 sebesar 86,74 menjadi 86,81 tahun 2019 tetapi tidak secepat provinsi lain menyebabkan provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan peringkat dari 6 terendah turun ke peringkat 4 terendah di tahun 2019. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan IPG Provinsi Gorontalo sebesar 0,2 poin dibandingkan tahun 2018 sehingga peringkat Provinsi Gorontalo meningkat dari peringkat 4 terendah menjadi 5 terendah (Tabel 3.7).

Peningkatan atau Percepatan Pembangunan manusia berbasis gender, terutama pada perempuan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) bukan semata-mata untuk tujuan kesetaraan gender. Kebijakan afirmasi untuk menekan atau mengurangi kesenjangan yang terjadi berdasarkan Kawasan di Indonesia, terutama pada wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)

menjadi prioritas yang harus dilakukan. Dengan memprioritaskan pembangunan dari wilayah 3T akan mewujudkan komitmen pemerintah yang telah tercantum dalam salah satu poin Nawa Cita Pembangunan, yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran".

G. Pembangunan Gender di Kabupaten/Kota Masih Belum Merata

Kesenjangan yang masih terlihat di tingkat provinsi dan Kawasan di Indonesia terefleksi juga pada pemerataan pembangunan di tingkat yang lebih kecil. Berdasarkan wilayah, terdapat 20 provinsi atau 58 persen provinsi di Indonesia yang sudah memiliki IPG di atas 90, sedangkan nilai IPG dibawah 80 tidak dijumpai lagi. Ketika nilai IPG mendekati angka 100, maka dapat dimaknai sebagai pembangunan yang berkesetaraan gender semakin menunjukkan keberhasilannya. Namun yang penting dicatat adalah, capaian IPG dengan angka mendekati 100 tidak serta merta bermakna pembangunan manusia telah mencapai kategori ideal atau sangat tinggi, atau angka IPG tinggi tidak selalu merefleksikan nilai IPM tinggi. Hal ini dikarenakan IPG dihitung dari persentase IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Hal ini terbukti pada capaian IPG di provinsi Papua sebesar 80,05 dan Papua Barat sebesar 82,74, namun IPM perempuan di dua provinsi tersebut masih dalam kategori rendah atau dibawah 60. Demikian juga pada contoh Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki nilai IPG sebesar 92,72, namun ternyata angka IPM perempuannya baru sebesar 64,16 dan IPM laki-laki sebesar 69,2 atau keduanya masih di bawah IPM nasional.

Di tingkat kabupaten/kota, kesenjangan pembangunan manusia masih terlihat sangat lebar. Meskipun tidak ada kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPM baik pada laki-laki maupun perempuan, namun disparitas capaian antar keduanya masih nyata terlihat. Pada Gambar 3.29 menunjukkan kesenjangan yang sangat signifikan di level Kabupaten/Kota dengan capaian IPM tertinggi

dan terendah tahun 2019. IPM laki-laki tertinggi mencapai angka 87,49, sedangkan terendah hanya di angka 34,86. Kesenjangan juga terjadi pada perempuan, dimana IPM perempuan tertinggi mencapai 85,71, sedangkan terendah sangat jauh berada di bawah, yaitu hanya mencapai 28,84.
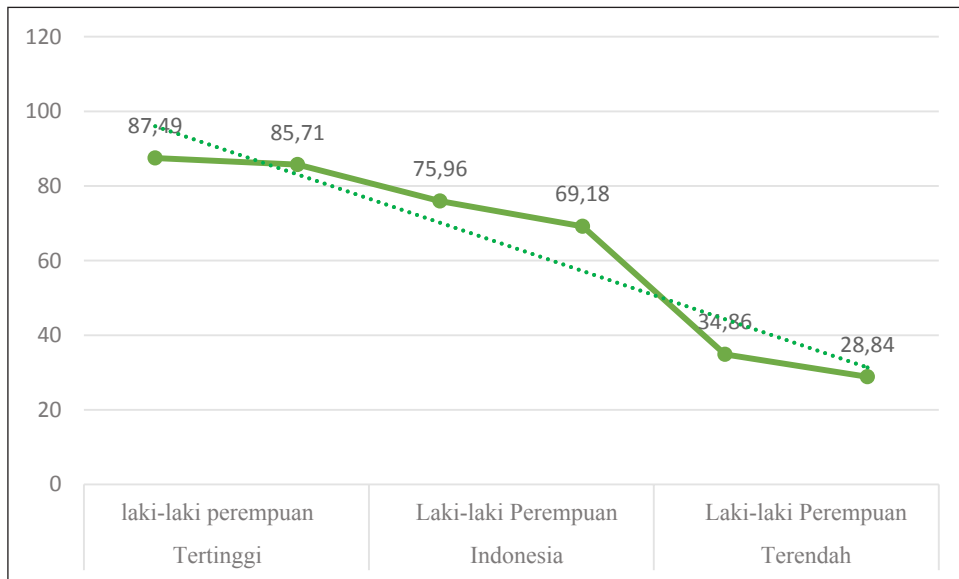
Gambar 3.29. Perbandingan IPM Laki-laki dan Perempuan Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2019.

Kesenjangan yang sangat signifikan terjadi pada kabupaten/ kota ini masih menggambarkan situasi yang sama dengan tahun 2018, dimana IPM laki-laki dan perempuan yang tertinggi berada sangat timpang dengan capaian IPM laki-laki dan perempuan yang terendah. Kesenjangan IPM laki-laki tertinggi dan terendah sebesar 53,36 di tahun 2018 dan 52,63 di tahun 2019; dan kesenjangan IPM perempuan tertinggi dan terendah sebesar 57,1 poin di tahun 2018 dan 56,87 poin di tahun 2019. Di antara jenis kelamin, IPM tertinggi antara laki-laki dan perempuan juga menunjukkan adanya kesenjangan, baik di tahun 2018 maupun 2019. Di tahun 2018, perbedaan IPM tertinggi antara laki-laki dan perempuan sebesar 1,46 poin, sedangkan di tahun 2019 1,78 poin. Pada IPM terendah, perbedaan yang ada antar-jenis kelamin sebesar 5,2 poin di tahun

2018 dan 6,02 poin di tahun 2019. Capaian di tahun 2019 ini menjadikan disparitas antar jenis kelamin menjadi semakin besar (Gambar 3.30).
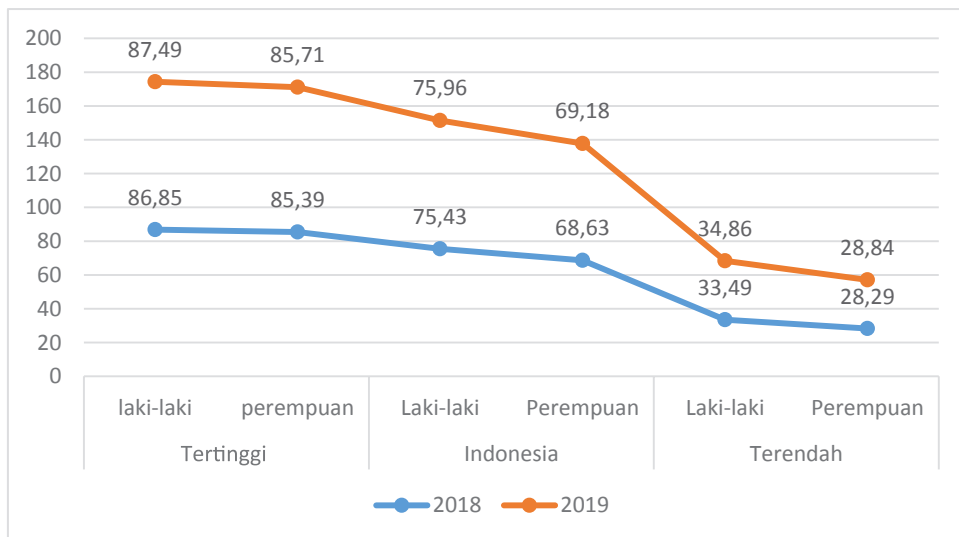
Gambar 3.30. Perbandingan IPM Laki-laki dan Perempuan Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2018-2019.

Secara nasional, dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, capaian IPM yang diperoleh di tahun 2019 sangat terlihat kesenjangan yang ada. Jika pada Gambar 3.30 menampilkan kesenjangan yang sangat lebar pada kabupaten/kota dengan nilai IPM tertinggi dan terendah, maka di Gambar 3.31 menunjukkan kesenjangan yang sangat significant dengan melihat capaian IPM berdasarkan struktur jumlah kab/kota menurut kategori IPM dan jenis kelamin. Kabupaten/kota yang capaian pembangunannya telah masuk kategori "sangat tinggi" dan "tinggi" mendominasi capaian IPM laki-laki, sedangkan pembangunan manusia dengan kategori "sedang" dan "rendah" mendominasi capaian IPM perempuan. Sebagai contoh, kabupaten/kota dengan pembangunan laki-laki yang sudah mencapai kategori "sangat tinggi" terjadi di 65 kabupaten/kota, namun pembangunan perempuan yang mencapai kategori tersebut hanya terjadi di 20 kabupaten/kota atau sepertiga dari jumlah yang dicapai pada pembangunan laki-

laki. Kondisi sebaliknya terlihat pada kabupaten/kota dengan capaian pembangunan manusia berkategori "rendah" yang ternyata mayoritas dialami perempuan. Kabupaten/kota dengan pembangunan perempuan dalam kategori "rendah" masih dalam jumlah yang sangat signifikan, yaitu berada di 79 kabupaten/kota, sementara pembangunan laki-laki dengan kategori rendah terjadi di 15 kabupaten/kota (Gambar 3.31). Dengan kata lain, jumlah kab/kota dengan IPM perempuan di kategori rendah berjumlah lima kali lipat lebih dibandingkan laki-laki.
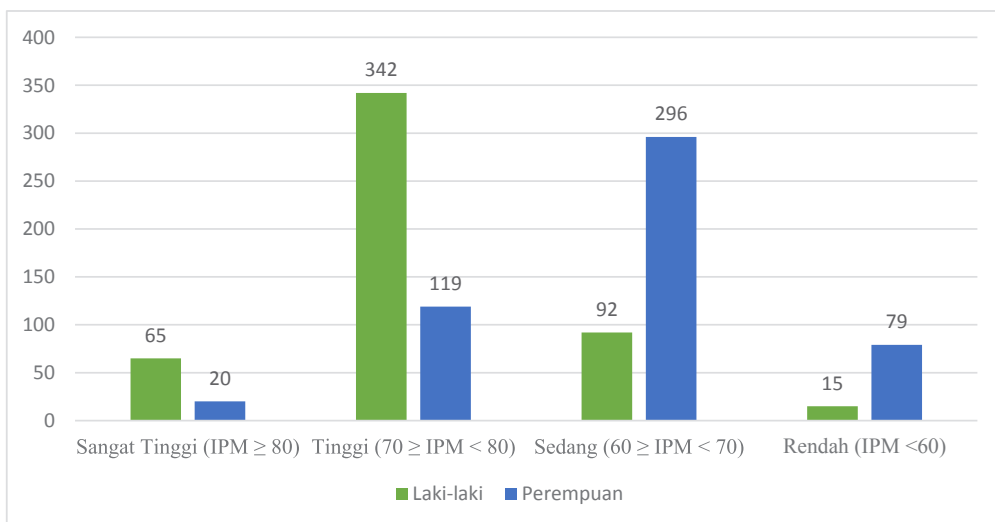
Gambar 3.31. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Jumlah Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2019.

Merujuk pada jumlah kabupaten/kota dengan capaian sesuai empat kategori yang diterapkan pada IPM, maka persentase kabupaten/kota dengan pembangunan laki-laki berada di kategori "tinggi" sebesar 66,54 persen dan kategori "sangat tinggi" 12,65 persen. Dibandingkan dengan pembangunan pada perempuan, persentase kabupaten/kota yang pembangunan perempuannya sudah mencapai kategori "sangat tinggi" hanya terdapat di 3,89 persen dan kategori "tinggi" 23,15 persen Sebaliknya pada capaian pembangunan dengan kategori sedang dan rendah persentase jumlah kabupaten/kotanya yang lebih banyak terjadi

pada pembangunan penduduk perempuan. Terdapat 57,59 persen kabupaten/kota yang pembangunan perempuannya masih berada di kategori "sedang", bahkan terdapat 15,37 persen kabupaten/kota yang pembangunan perempuannya masih dalam kategori "rendah". Sebagai perbandingan, pembangunan laki-laki dengan kategori "sedang" terjadi di 17,90 persen kabupaten/kota dan kategori "rendah" terjadi di 2,92 persen kabupaten/kota di Indonesia (Gambar 3.32).
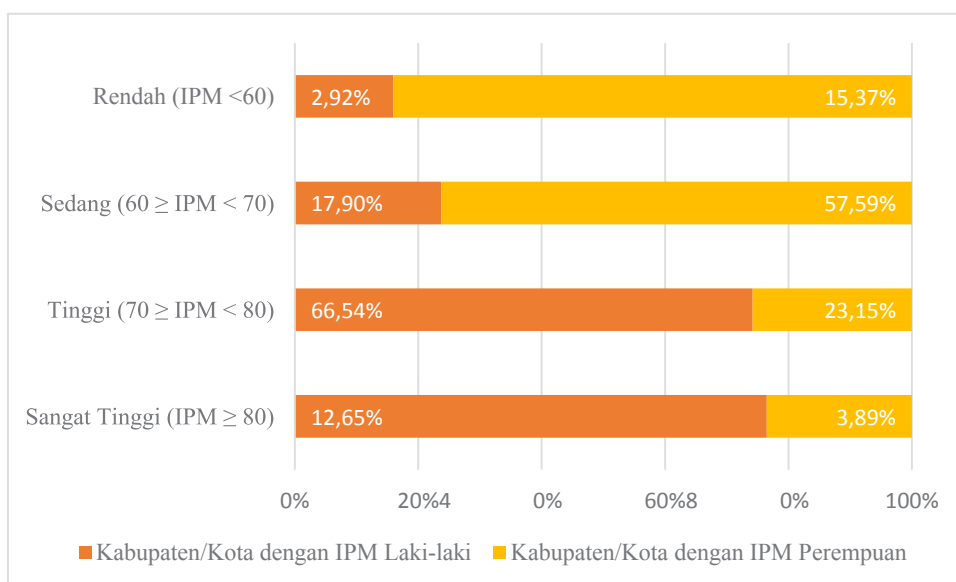
Gambar 3.32. Persentase Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan IPM Laki-laki dan Perempuan, 2019.

Pada Gambar 3.33 menyajikan sepuluh kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM laki-laki tertinggi dan terendah. IPM laki-laki tertinggi terjadi di Kota Banda Aceh yang telah mencapai kategori sangat tinggi dengan nilai IPM laki-laki sebesar 87,49. Selain Banda Aceh, kabupaten/kota yang berhasil memiliki IPM laki-laki dengan kategori sangat tinggi adalah Kota Yogyakarta (87,38), Kota Jakarta Selatan (86,98), Kota Padang (86,97), dan Kota Salatiga 86,23). Sejumlah kabupaten/kota ini merupakan beberapa contoh kabupaten/kota yang berhasil mencapai IPM laki-laki di atas angka nasional dengan kategori sangat tinggi. Kabupaten/kota dengan

capaian IPM laki-laki terendah secara nasional terjadi di Nduga (34,86), Puncak (45,14), Lanny Jaya (51,13), Mamberamo Tengah (51,43), dan Pegunungan Bintang (52,3).
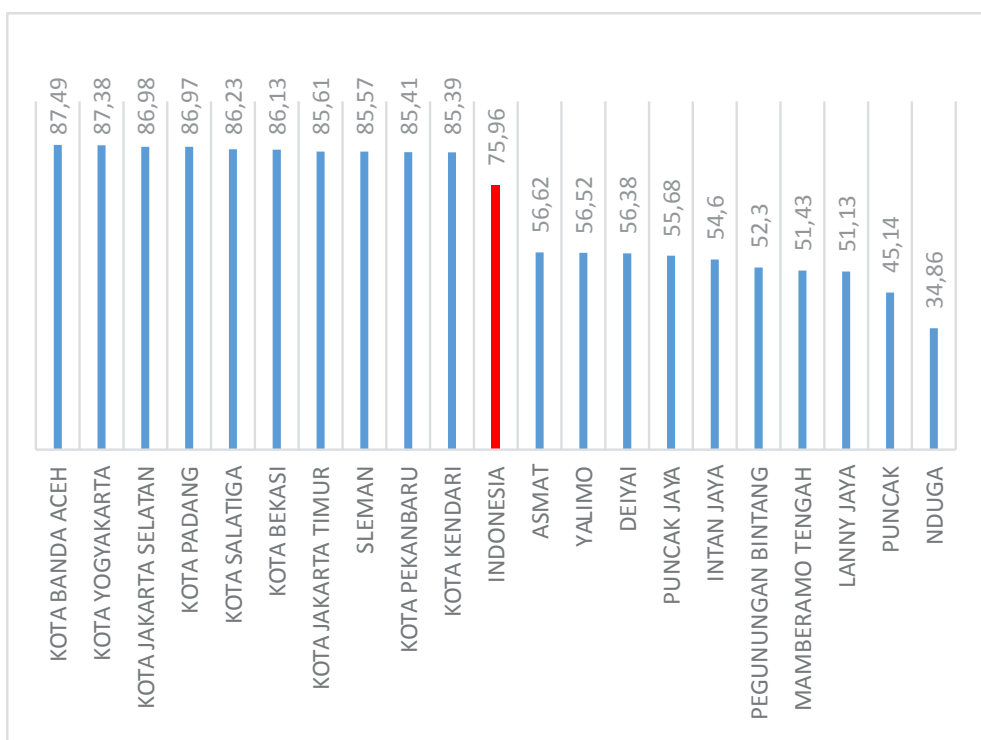
Gambar 3.33 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki di Tingkat Kabupaten/ Kota dengan Capaian IPM Tertinggi dan Terendah, 2019.

Kabupaten/kota dengan capaian IPM perempuan tertinggi terjadi di DI Yogyakarta dengan angka IPM sebesar 85,71 atau sudah masuk kategori sangat tinggi. Kabupaten/kota dengan capaian IPM perempuan tertinggi lainnya adalah Kota Jakarta Selatan (83,75), Kota Banda Aceh (83,26), Kota Denpasar (82,65) dan Sleman (82,18). Kabupaten/kota dengan capaian IPM perempuan terendah terjadi di Nduga dengan IPM perempuan hanya 28,84 atau masuk kategori rendah. Kabupaten/kota dengan capaian IPM perempuan terendah juga dijumpai di Asmat (30,41), Tolikara (34,55), Puncak Jaya (34,55), dan Puncak (37,27) (Gambar 3.34).
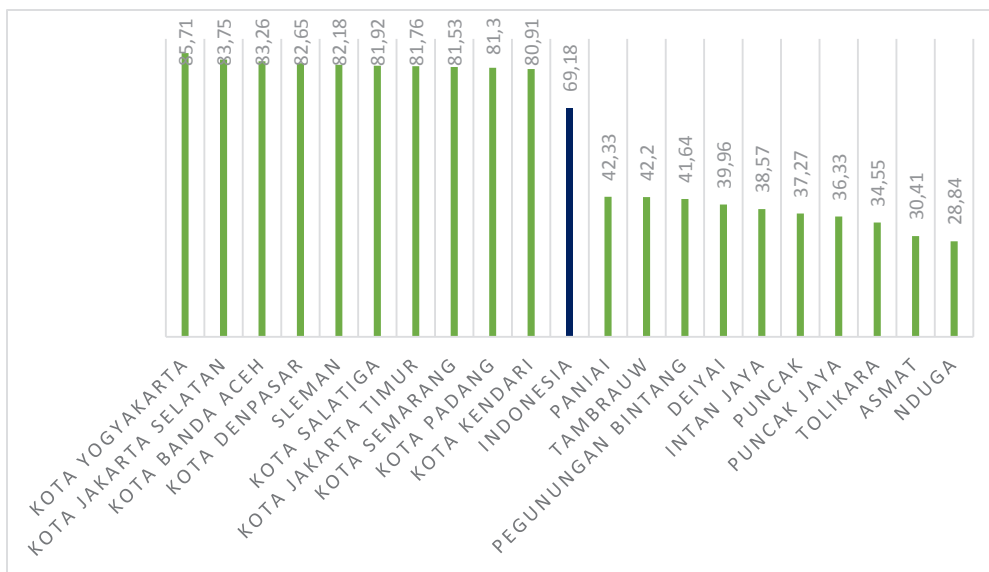
Gambar 3.34 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan di Tingkat Kabupaten/Kota dengan Capaian IPM Tertinggi dan Terendah, 2019.

Kondisi kontras yang terlihat pada pembangunan laki-laki dan perempuan merefleksikan adanya disparitas pembangunan manusia berbasis gender di tingkat kabupaten/kota. Kondisi ini penting menjadi perhatian pemerintah daerah agar melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan pada penduduk perempuan melalui program-program otonomi daerah. Dengan demikian, capaian pembangunan yang merata dan berkeadilan dapat segera diperoleh dengan tingkat kesenjangan gender yang dapat ditekan seminimal mungkin. Pembangunan berbasis gender merupakan salah satu amanat yang termaktub dalam berbagai regulasi, terutama telah menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Strategis RPJMN Tahun 2015-2019.

Dari gambaran capaian pembangunan pada perempuan dan laki-laki, maka penting melihat capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, terdapat 20 provinsi yang telah mencapai nilai IPG di atas 90, sedangkan provinsi dengan hasil pembangunan gender kurang dari 90 terjadi di 14 provinsi. Di tingkat provinsi, sudah tidak dijumpai nilai IPG

dibawah 80 atau kesenjangan pembangunan gender sudah menuju harapan setara. Untuk melihat secara lebih mendalam, capaian di tingkat provinsi ini perlu dilihat kembali di tingkat kabupaten/kota untuk menganalisis pembangunan gender di tingkat yang lebih kecil.

Berdasarkan sebaran kabupaten/kota, capaian pembangunan gender di kabupaten/kota dapat dilihat melalui distribusi IPG yang telah diperoleh. Tabel 3.8 menunjukkan bahwa capaian IPG di atas 90 terjadi di 283 kabupaten/kota yang berada di 20 provinsi, sedangkan IPG di bawah 90 terjadi di 231 kabupaten/kota yang berada di 14 provinsi. Komponen nilai IPG di bawah 90 di tingkat kabupaten/kota perlu dilihat secara lebih detail agar dapat mengukur pembangunan gender secara lebih baik di tingkat daerah.

Di tahun 2019 pembangunan gender di tingkat kabupaten/kota masih perlu diperjuangkan. Nilai IPG di tingkat kabupaten/kota masih menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar. Capaian pembangunan gender dengan nilai IPG kurang dari 70 atau dengan kesenjangan yang sangat besar terjadi di lima kabupaten/kota, yaitu di Manokwari Selatan, Puncak Jaya, Tambrauw, Paniai, dan Pulai Morotai, bahkan nilai IPG dibawah 60 masih terjadi di 2 kabupaten/kota, yaitu Asmat dan Tolikara. Kabupaten/kota yang baru mencapai nilai IPG antara 70 sampai dengan 80 terjadi di 23 kabupaten/kota, sedangkan 201 kabupaten/kota lainnya berada dalam rentang nilai IPG 80 sampai 90. Informasi ini merefleksikan persoalan yang cukup serius dalam pembangunan gender di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 3.7. Distribusi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019.

<table>
<tr><th>Indikator</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th></tr>
<tr><td>IPG ≥ 90</td><td>20</td><td>283</td></tr>
<tr><td>80 ≥ IPG <90</td><td rowspan="4">14</td><td>201</td></tr>
<tr><td>70 ≥ IPG<80</td><td>23</td></tr>
<tr><td>60 ≥ IPG <70</td><td>5</td></tr>
<tr><td>IPG < 60</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>34</td><td>514</td></tr>
</table>

Pembangunan manusia sejatinya harus sejalan seiring dengan pembangunan pada penduduk laki-laki dan perempuan secara seimbang, sehingga pembangunan gender yang tinggi seharusnya dibangun berdasarkan pembangunan yang tinggi pada perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. Hal penting yang perlu dikritisi dari capaian nilai IPG adalah formulasi IPG yang diperoleh dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Hal ini menimbulkan tafsir pada nilai IPG yang tinggi tidak selalu bermakna pembangunan manusia yang tinggi pada laki-laki dan perempuan. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang "sama-sama tinggi" dan "sama-sama rendah" (Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, 2018). Dengan demikian, menganalisis data IPG harus tetap mencermati nilai IPM secara terpilah jenis kelamin.

Tabel 3.9 membuktikan bahwa nilai IPG yang tinggi tidak selalu bermakna pembangunan laki-laki dan perempuan sama-sama tinggi. Nilai IPG yang lebih tinggi dari 90 dicapai oleh provinsi dan kabupaten/kota yang berada di empat kategori IPM, yaitu 'rendah', 'sedang', 'tinggi', dan 'sangat tinggi', bahkan pada IPM kategori 'sedang' berada dalam jumlah yang signifikan. Demikian juga pada capaian nilai IPG kurang dari 90 yang ternyata diperoleh dari IPM dengan kategori 'tinggi' dan 'sangat tinggi'. Sebagai contoh, Tabel

3.9 menunjukkan adanya dua kabupaten/kota dengan capaian IPG di atas 90 namun diperoleh dari nilai IPM yang sama-sama rendah, yaitu Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Lanny Jaya di Papua. Kabupaten Sabu Raujua memiliki nilai IPG sebesar 92,76, namun pembangunan laki-laki masih di angka 59,68 dan pembangunan perempuan di angka 55,36. Demikian juga Kabupaten Lanny Jaya yang memiliki nilai IPG 92,14 namun ternyata pembangunan perempuannya baru mencapai 47,11 dan pembangunan laki-laki baru mencapai 51,13.

Tabel 3.8. Matriks Distribusi Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Kategori IPG dan IPM, 2019

Indikator IPG	Kategori	IPM Laki-laki		IPM Perempuan	
		Provinsi	Kab/Kota	Provinsi	Kab/Kota
IPG < 90	Rendah	0	13	2	73
	Sedang	2	51	11	154
	Tinggi	11	162	1	4
	Sangat Tinggi	1	5	0	0
IPG ≥ 90	Rendah	0	2	0	6
	Sedang	1	41	12	142
	Tinggi	17	180	8	115
	Sangat Tinggi	2	60	0	20
Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota		**34**	**514**	**34**	**514**

Tabel 3.9 menunjukkan terdapat 20 kabupaten/kota yang sudah berada di kondisi yang telah diharapkan, yakni daerah dengan status IPG di atas 90 serta IPM Laki-laki dan IPM Perempuan sama-sama berstatus "sangat tinggi". Jumlah kabupaten/kota dengan prestasi pembangunan gender yang ideal ini meningkat dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017, terdapat 9 (Sembilan) kabupaten/ kota yang berhasil melakukan pembangunan manusia berbasis gender dengan ideal, yaitu di Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kota

Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kota Denpasar. Di tahun 2019, selain sembilan terdapat penambahan sebanyak 11 (sebelas) kabupaten/kota yang telah berhasil melaksanakan pembangunan berbasis gender secara ideal, yaitu Kota Kendari, Kota Palu, Kota Bandung, Kota Malang, Kota Ambon, Kota Bukittinggi, Kota Surakarta, Kota Batam, Kabupaten Badung, Kota Bekasi, dan Kota Medan (Gambar 3.35).
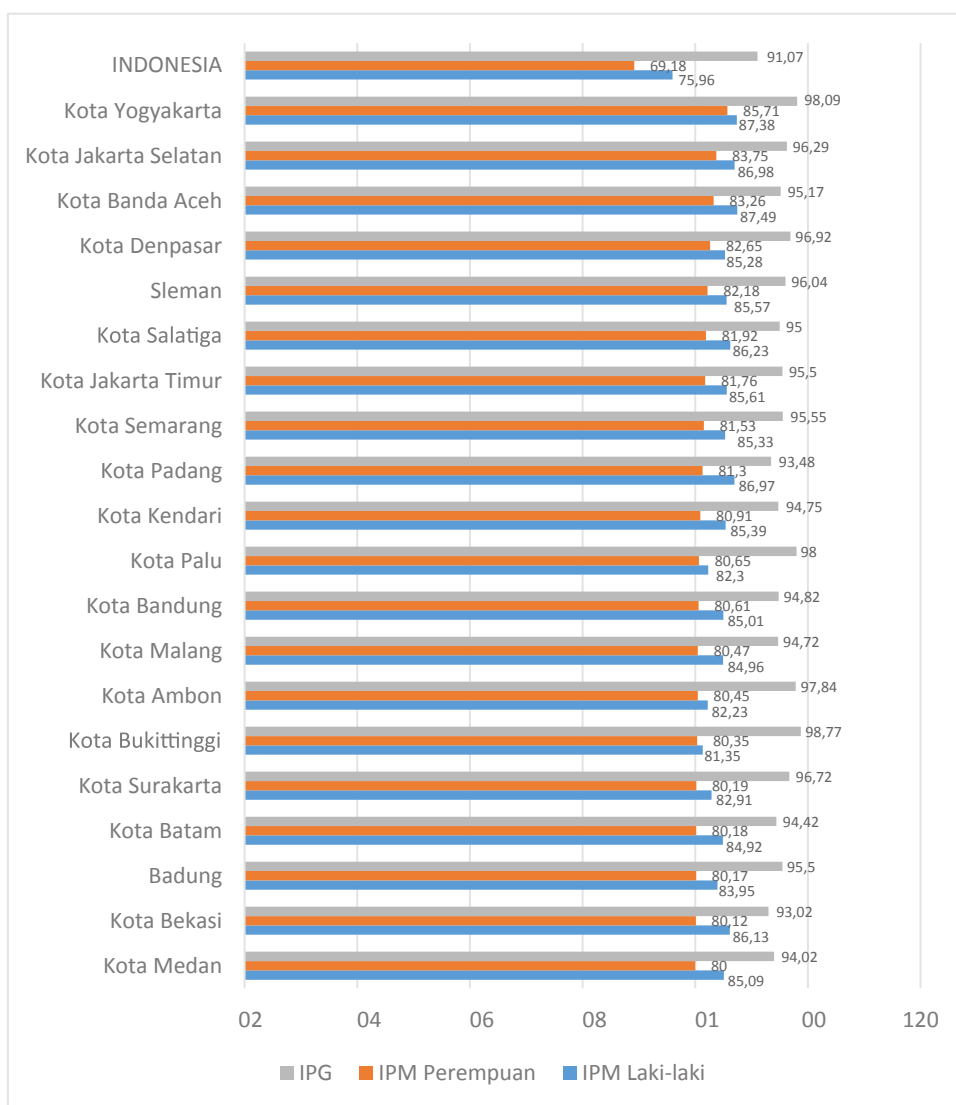
Gambar 3.35 Provinsi dengan IPM dan IPG pada Laki-laki dan Perempuan Kategori 'Sangat Tinggi', 2019.

Meskipun terdapat peningkatan pembangunan manusia berbasis gender di tingkat kabupaten/kota yang menunjukkan optimisme tinggi, namun pembangunan berbasis gender masih tetap harus menjadi prioritas pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan masih tetap penting karena masih banyak nilai IPM dalam kategori sedang dan rendah yang perlu ditingkatkan. Selain itu, masih terdapat 13 kabupaten/kota yang perlu mendapatkan tindakan afirmasi karena memiliki nilai IPG di bawah 90 dengan IPM laki-laki dan perempuan dalam kategori sama-sama rendah. Tiga belas kabupaten/kota yang semuanya berada di Papua ini adalah Kabupaten Nduga, Puncak, Mamberamo Tengah, Pengunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak Jaya, Deiyai, Yalimo, Asmat, Mamberamo Raya, Tolikara, Yahukimo dan Dogiyai.

Bab IV
PEMBERDAYAAN GENDER DI INDONESIA

A. Pemberdayaan Gender Semakin Meningkat

Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, penting menjadikan pemberdayaan berbasis gender sebagai salah satu indikator utama. Urgensi pemberdayaan perempuan sebagai landasan analisis ini didasarkan pada kontribusi perempuan terhadap Kesehatan dan produktivitas seluruh anggota keluarga yang signifikan (Yoyo Karyono, Ema Tusianti, Alvina Clarissa, 2019). Artinya, perempuan memiliki peran besar dalam meningkatkan sumber daya manusia di keluarga dikarenakan sampai saat ini konstruksi gender di Indonesia masih mayoritas menuntut tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan keluarga pada perempuan.

Peningkatan SDM yang dilakukan perempuan di keluarga akan berpengaruh secara langsung pada keberhasilan pembangunan manusia.

Sejak tahun 2010, IDG Indonesia secara nasional menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari angka 68,15 pada tahun 2010 hingga mencapai angka 75,24 pada tahun 2019. Dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun 2019 nilai IDG Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan menjadi tahun pertama yang paling menonjol kenaikannya sejak tahun 2010. Tahun 2019, IDG Indonesia meningkat sebanyak 3,14 poin atau sebesar 4,35 persen dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan IDG pada periode 2018-2019 yang menjadi periode paling cepat ini terlihat pada perbandingan kemajuan di tahun-tahun sebelumnya, misalnya saja di tahun 2017-2018, IDG Indonesia hanya meningkat 0,36 poin atau 0,50 persen (Gambar 4.1). Melihat pertumbuhan pembangunan gender di Indonesia sejak tahun 2010 menunjukkan adanya kemajuan meskipun lambat. Di tahun 2019, pemberdayaan perempuan semakin menunjukkan peningkatan dengan tingkat partisipasi dan kesadaran perempuan untuk berkiprah di ruang publik, seiring dengan keterbukaan akses bagi perempuan.
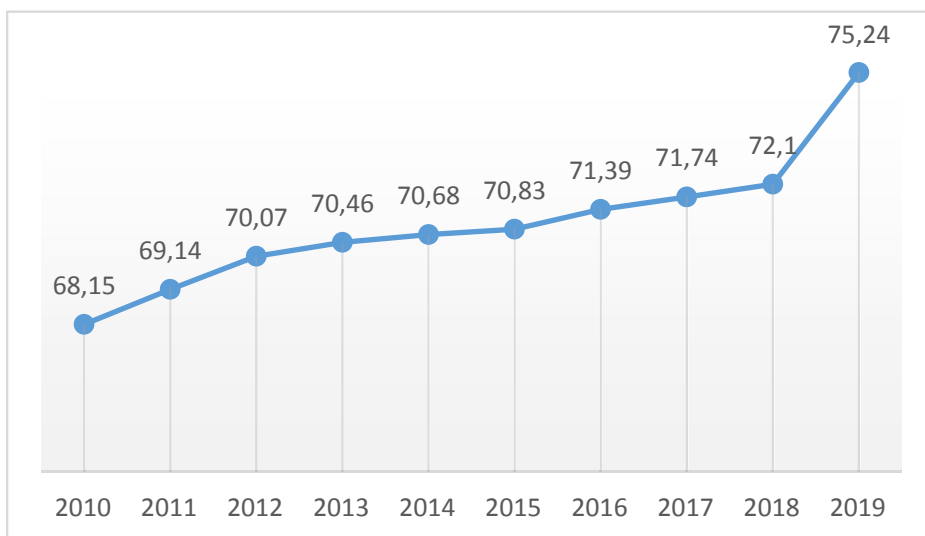
Gambar 4.1 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2010-2019

Dari ketiga indikator pembentuk IDG yang dicapai di tahun 2019, menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan pemberdayaan gender dibandingkan tahun 2018 disebabkan adanya peningkatan secara tajam pada indikator keterlibatan perempuan di parlemen. Persentase keterwakilan perempuan meningkat menjadi 20,52 persen (2019) dari 17,32 persen (2018). Pada kedua indikator pembentuk IDG lainnya, yaitu perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan juga mengalami peningkatan, meskipun kecil. Kenaikan persentase perempuan sebagai tenaga professional sebanyak 0.44 persen dan kenaikan persentase pada sumbangan pendapatan perempuan sebanyak 0.4 persen (Gambar 4.2). Dengan melihat peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen yang cukup signifikan ditambah dengan adanya kenaikan pada dua indikator lainnya inilah yang menyebabkan angka IDG tahun 2019 meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemberdayaan gender di Indonesia secara bertahap terlihat mengalami kemajuan.
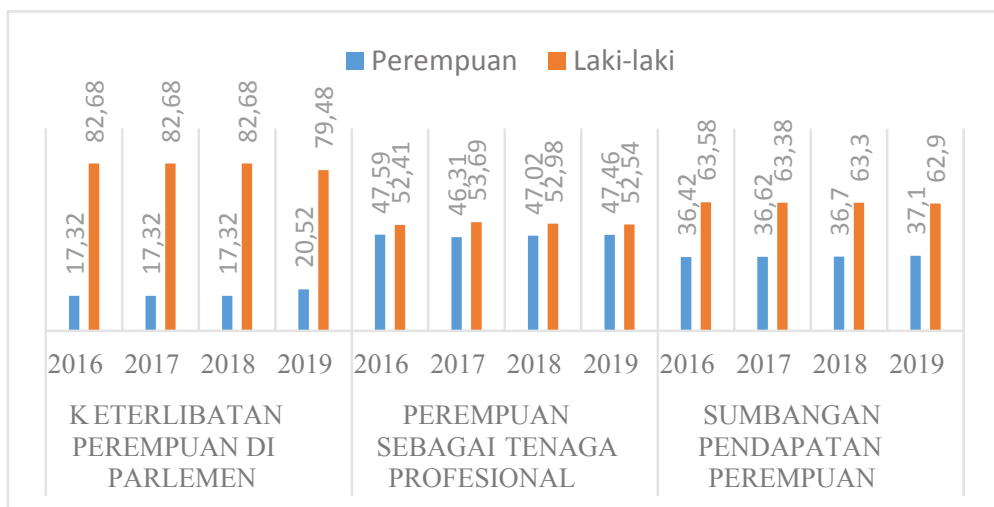
Gambar 4.2 Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2018 dan 2019

Kenaikan partisipasi perempuan di parlemen pada periode tahun 2018-2019 terjadi karena Indonesia menjalani pemilihan umum. Kejadian politik ini mengakibatkan adanya perubahan persentase pada salah satu indikator IDG, dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan data, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen hanya sebanyak 17,32 persen (Gambar 4.2). Meskipun belum mencapai persentase yang diharapkan dengan capaian minimal 30 persen, namun kenaikan yang diperoleh pada tahun ini menunjukkan adanya optimis yang tinggi untuk bisa meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen.

Optimisme pada partisipasi perempuan di parlemen yang berdampak pada IDG di tingkat nasional ini tidak berimbang dengan sebaran capaian IDG di tingkat provinsi. Secara nasional, hanya ada lima provinsi yang mempunyai nilai IDG di atas angka nasional, yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku. Nilai IDG paling tinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian sebesar 83,2 persen, sedangkan empat provinsi lain yang berada di atas capaian nasional masih berada di bawah 80 persen, yaitu antara 75,77 sampai 79,1 persen. Provinsi dengan capaian nilai IDG di bawah rata-rata nasional namun sudah berada di atas nilai 70 terjadi di 11 provinsi, di antaranya di DKI Jakarta (75,14), Kalimantan Selatan (74.6), dan Sulawesi Tengah (74,49) (Gambar 4.3)
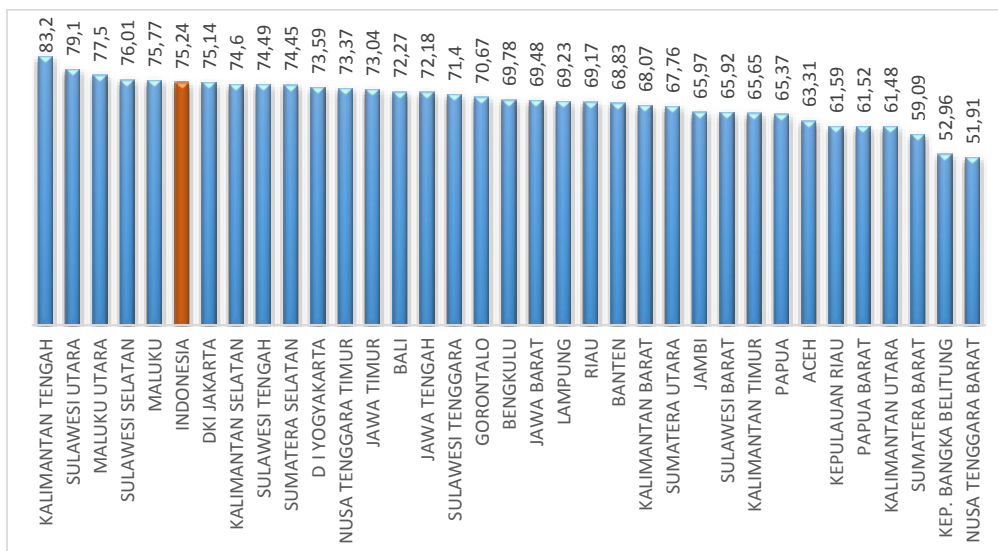
Gambar 4.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut provinsi tahun 2019

Gambar 4.3. menunjukkan lebih dari separoh atau delapan belas provinsi masih berada pada capaian IDG di bawah angka 70, di antaranya adalah Bengkulu, Jawa Barat, Lampung, Riau dan Banten. Rendahnya IDG ini lebih memprihatinkan karena tiga provinsi di antaranya masih di bawah angka 60. Capaian pembangunan pemberdayaan gender terendah terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi dengan pemberdayaan gender terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan capaian hanya 51,91 (Gambar 4.3). Masih banyaknya provinsi dengan capaian IDG kurang dari 70 menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan gender di Indonesia sudah mulai terlihat, namun ternyata masih harus diperjuangkan. Perlu ada upaya peningkatan pemberdayaan gender pada sejumlah provinsi dengan capaian IDG di bawah angka nasional. Meski demikian, peningkatan secara signifikan pada angka IDG di tahun 2019 memberi harapan pemberdayaan gender di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan yang positif.

B. Perempuan dalam Dunia Politik Masih Perlu Diperjuangkan

Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik sangat penting karena akan memberi peluang dipertimbangkannya suara, kepentingan, dan kebutuhan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Aspirasi perempuan dapat terwakili dan menjadi landasan dalam penyusunan dan pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender. Urgensi keterwakilan perempuan di politik pada akhirnya berdampak pada akses, peluang, kesempatan, partisipasi, perlindungan dan penikmatan manfaat pembangunan yang adil dan merata. Tanpa adanya kontribusi perempuan di bidang politik, maka proses-proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik lebih sulit dicapai karena pengalaman dan kebutuhan perempuan lebih mudah disuarakan dan diperjuangkan oleh wakil dari perempuan. Dengan demikian, persentase perempuan di parlemen menunjukkan adanya kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan dan dapat dimaknai sebagai bukti adanya keberdayaan perempuan di bidang politik.

Keterlibatan perempuan di dunia politik Indonesia sudah didorong sejak lama. Kebijakan *affirmative action* dengan ketentuan wajib mengikutsertakan paling sedikit 30 persen calon perempuan sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dan Undang-undang No 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan melibatkan minimal 30 persen perempuan tidak hanya dalam daftar calon anggota dewan, namun juga dalam kepengurusan partai. Secara khusus pada Pasal 55 Undang-Undang No. 10 tahun 2008 menegaskan pentingnya mengatur *zipper system*, yaitu dalam tiga calon anggota dewan yang didaftarkan, terdapat satu orang perempuan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD, 2003; Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan

Umum DPR, DPD, Dan DPRD, 2008; Undang-Undang No 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, Dan DPRD, 2012).

Dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik, pemerintah telah mencantumkan agenda peningkatan keterwakilan perempuan dalam RPJMN 2015-2019. Dari 9 sasaran utama RPJMN 2015-2019 pada sub-agenda ketiga dinyatakan adanya agenda "Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan". Agenda ini merupakan bukti adanya komitmen pemerintah dalam mendorong peran perempuan di ranah politik. Upaya yang telah dikuatkan oleh sejumlah regulasi ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Pada tahun 2019, jumlah anggota DPR perempuan masih jauh dari target minimal keterwakilan 30 persen. Dunia politik Indonesia masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 79,13 persen, sementara perempuan baru berhasil mencapai angka 20,87 persen (Gambar 4.4).
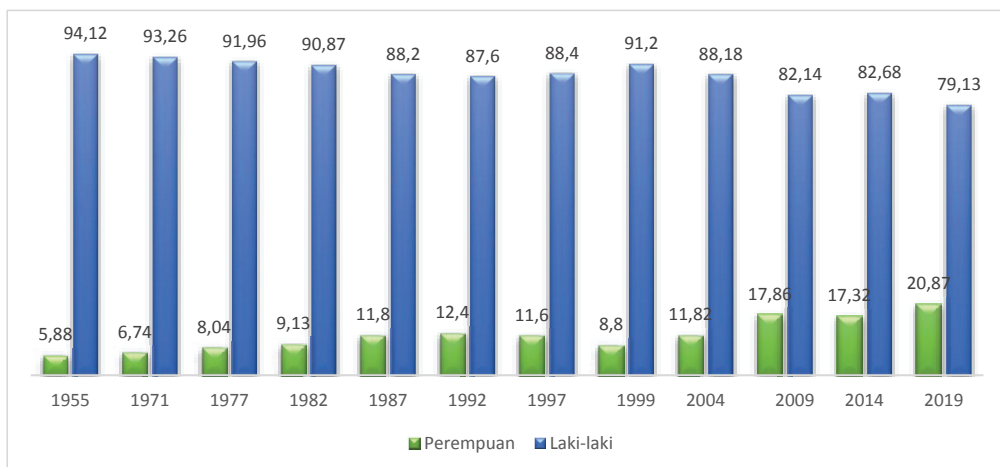
Gambar 4.4 Persentase anggota DPR berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 1955-2019

Jika dilihat pada hasil pemilu di sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, persentase perempuan sebagai anggota dewan sangat sedikit. Secara khusus, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perkembangan peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen tidak terlalu agresif yaitu 17,49 persen pada tahun 2010

dan 20,52 persen pada tahun 2019 (Gambar 4.5). Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dapat disebabkan oleh faktor budaya, sistem politik, media, dan diri perempuan sendiri. Dalam konteks budaya, hambatan perempuan berani mengambil peran di ranah politik dikarenakan budaya Indonesia yang masih memosisikan politik sebagai ranah laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak diperhitungkan dan tidak dianggap penting sehingga tidak mendapat dukungan yang baik secara sosial politik. Hal ini merefleksikan adanya budaya patriakhi yang masih kuat mengakar cara pandang kebanyakan masyarakat Indonesia.

Dalam sistem partai, selain sistem multipartai, dukungan partai terhadap perempuan masih rendah karena ditopang oleh kebijakan partai yang bias gender dan pengambilan keputusan yang masih didominasi laki-laki. Situasi ini semakin dilemahkan oleh pendidikan publik yang dilakukan media untuk mendorong representasi perempuan di parlemen masih belum maksimal. Akibatnya, pengetahuan masyarakat tentang urgensi memilih calon perempuan masih belum banyak disadari karena pemberitaan masih belum sepenuhnya menguatkan keberpihakan pada keterwakilan perempuan. Faktor lain yang dinilai menjadi penghambat adalah kemiskinan, kontrol terhadap sumber dana kampanye di dalam keluarga (Parawansa, 2002), dan relasi gender antara perempuan dengan suaminya. Terkadang, perempuan masih dijumpai memiliki keragu-raguan untuk ikut serta sebagai calon anggota dewan dan berjuang agar dapat terpilih karena adanya kekhawatiran dapat terjebak pada tindakan tidak bermoral dan melanggar hukum seperti korupsi atau lainnya (Umagapi, 2020).

UNDP menjelaskan hubungan antara dominasi laki-laki sebagai elit politik, partisipasi perempuan di dunia politik, dan struktur partai. Marjinalisasi yang dialami perempuan dalam struktur partai beresiko pada semakin rendahknya keberhasilan perempuan dalam memengaruhi agenda-agenda politik yang diusung partai. Marginalisasi perempuan juga berdampak pada sulitnya

kebijakan-kebijakan yang mendorong upaya pembangunan dan pemberdayaan perempuan menjadi agenda prioritas. Dengan relasi perempuan yang terpinggirkan dan subordinat dalam sistem partai, maka meningkatkan representasi perempuan di parlemen dan dunia politik semakin jauh dari harapan.
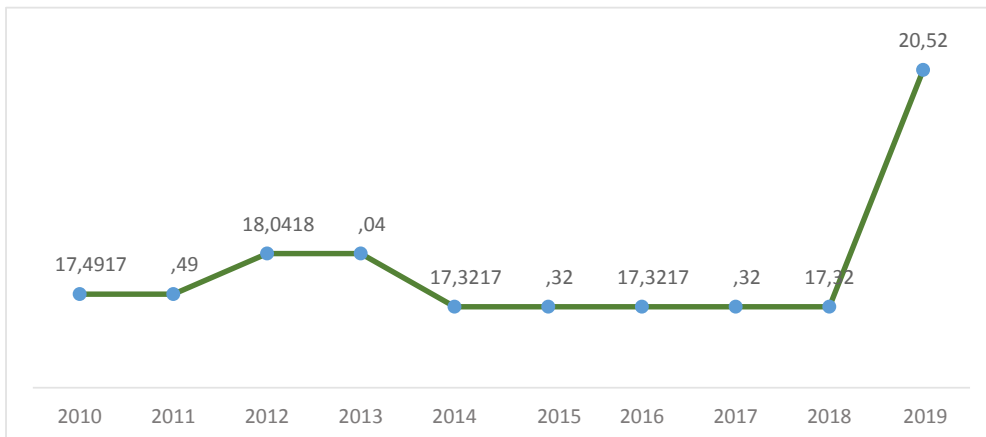
Gambar 4.5 Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2010-2019

Keterwakilan perempuan di politik memang tidak secara otomatis melahirkan berbagai kebijakan yang sensitif gender, apalagi dengan persentase yang tidak signifikan. Selain karena proses pengambilan keputusan di parlemen yang terkadang dipengaruhi kekuatan kuantitas, namun anggota dewan perempuan yang tidak memiliki perspektif keadilan gender juga dapat menjadi resiko yang dilematis. Itu artinya, meskipun pada tahun 2019 terdapat kenaikan persentase perempuan di politik tetapi dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro perempuan belum tentu terjamin. Apalagi, jumlah perempuan yang sedikit di parlemen ternyata tidak menempati posisi-posisi strategis, seperti menjadi ketua atau wakil ketua. Pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan ketua dan wakil ketua di Gedung Permusyawaratan Rakyat masih sangat sedikit.

Tabel 4.1. Pimpinan di MPR, DPR dan DPD Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2019-2024

Jabatan	Jumlah Jabatan	Laki-laki	Perempuan
Ketua MPR	1	1	0
Wakil Ketua MPR	9	8	1
Ketua DPR	1	0	1
Wakli Ketua DPR	4	4	0
Ketua DPD	1	1	0
Wakil Ketua DPD	3	3	0
Jumlah	**19**	**17**	**2**

Sumber: http://www.dpr.go.id

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa di tahun 2019, pimpinan lembaga legislatif masih didominasi laki-laki. Dari 19 posisi pimpinan yang ada, hanya ada dua perempuan yang menduduki jabatan pimpinan, yaitu satu orang ketua DPR dan satu orang wakil ketua MPR yang mewakili fraksi Nasional Demokrat. Jika dipersentase, maka perempuan pemimpin di Lembaga legislatif di tingkat pusat hanya 10,53 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 89,47 persen. Jabatan pimpinan sebagai ketua DPR di tahun 2019 ini merupakan sejarah pertama kali terjadi, dimana ketua DPR RI dipimpin seorang perempuan. Informasi ini mengingatkan agar penguatan perempuan di lembaga legislatif masih harus ditingkatkan, sehingga di masa yang akan datang perempuan lebih diperhitungkan sebagai salah satu pimpinan. Kedudukan sebagai pimpinan sangat penting karena memiliki posisi yang lebih kuat dalam melakukan negosiasi, advokasi, dan peran penting lain demi terwujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan yang diputuskan.

Berdasarkan distribusi provinsi, hanya terdapat 9 provinsi yang persentase keterlibatan perempuan di parlemen lebih tinggi dari

angka nasional, yaitu di atas 20,52 persen. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan satu-satunya provinsi yang telah mencapai persentase keterwakilan perempuan lebih dari minimal 30 persen, yaitu sebesar 35,56 persen. Tiga provinsi dengan persentase keterlibatan perempuan di parlemen yang terendah adalah Nusa Tenggara Barat yang hanya diwakili oleh 1,54 persen perempuan, Kepulauan Bangka Belitung yang hanya direpresentasikan 4.44 persen perempuan, dan Sumatera Barat yang hanya diwakili 4.62 persen perempuan (Gambar 4.6).
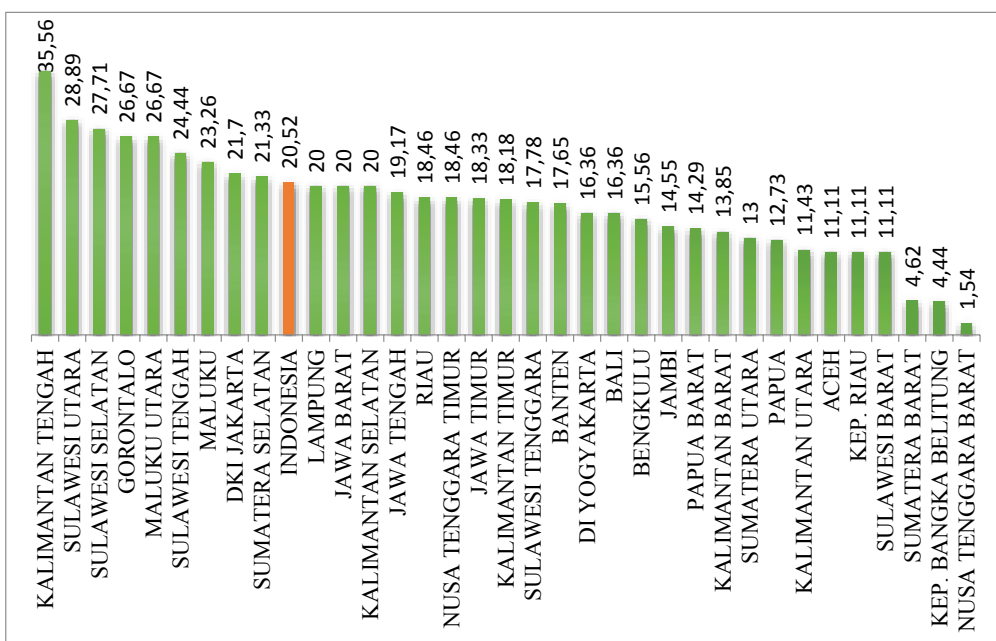
Gambar 4.6. Persentase Perempuan di Parlemen Berdasarkan Provinsi, 2019.

Persentase perempuan di parlemen masih mencapai 20,87 persen atau masih jauh dari harapan mencapai kuota minimal 30 persen, namun keterwakilan perempuan di DPD telah menunjukkan capaian minimal yang diharapkan. Secara nasional di tahun 2019, anggota DPD perempuan sudah mencapai 30,88 persen. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai persentase anggota DPD Perempuan

tertinggi yaitu 100 persen, sedangkan Maluku mencapai 75 persen. Terdapat 11 provinsi yang memiliki anggota DPD dalam jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan atau masing-masing jenis kelamin sama-sama mencapai 50 persen, di antaranya Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian, masih didapatkan 8 provinsi yang tidak ada anggota DPD perempuan atau 0 persen, yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua Barat (Gambar 4.7).
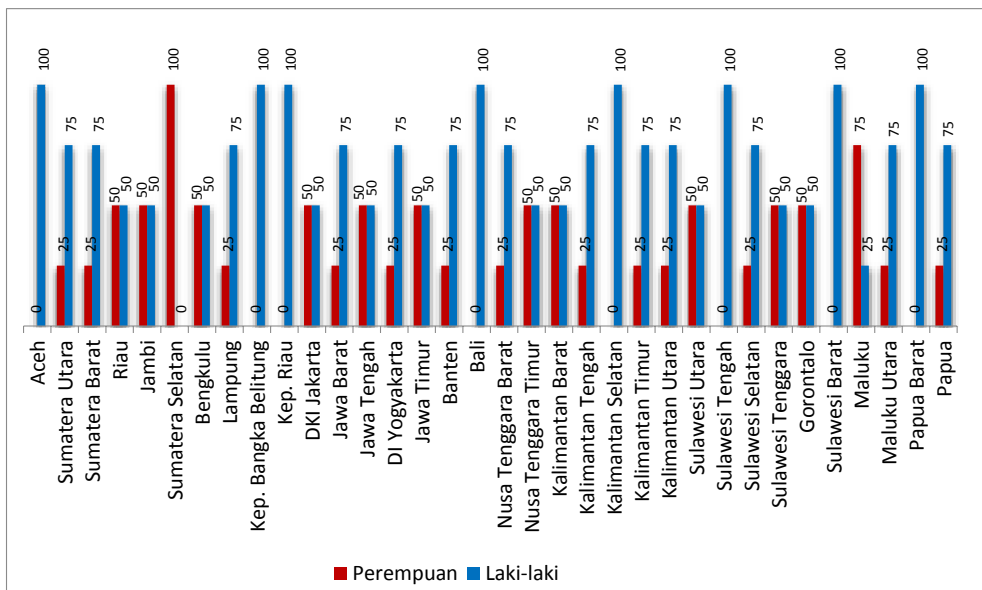
Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Gambar 4.7. Persentase Anggota DPD Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Perempuan aktif di bidang politik sejatinya tidak hanya menguntungkan perempuan semata. Partisipasi perempuan di bidang politik bermanfaat bagi pembangunan manusia seutuhnya. Penelitian Beer (2009) menunjukkan bahwa negara dengan partisipasi politik perempuan yang lebih tinggi memiliki rasio Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan yang lebih besar dibanding AHH laki-laki, tingkat fertilitas yang lebih rendah, dan TPAK perempuan yang lebih besar (Yoyo Karyono, Ema Tusianti, Alvina Clarissa,

2019). Dengan demikian, tidak ada alasan lain kecuali tetap terus mendorong dan memperjuangkan perempuan agar lebih banyak berperan di bidang politik, salah satunya melalui keterwakilan perempuan di parlemen.

C. Profesionalisme Pekerja Perempuan Semakin Diperhitungkan

Konstruksi budaya telah membagi peran perempuan dan laki-laki dalam ranah yang berbeda secara baku. Perempuan dituntut bertanggung jawab penuh di ranah domestik, mengerjakan kerja-kerja pengasuhan dan pelayanan pada keluarga serta perawatan seluruh rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki secara budaya dituntut untuk mengambil peran maksimal di ranah publik guna memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Konstruksi budaya semacam ini sejatinya merugikan kedua belah pihak, baik pada laki-laki, terutama pada perempuan. Tuntutan yang baku pada laki-laki untuk sepenuhnya berada di ranah publik dapat meningkatkan kerentanan pelecehan pada laki-laki yang tidak melakukan peran-peran yang diharapkan, seperti laki-laki yang mengambil peran di ranah domestik, belum mendapatkan pekerjaan, atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi dengan kerentanan yang lebih buruk juga dialami perempuan karena perempuan terjebak pada batas ruang domestik sehingga dapat kehilangan banyak peluang dan kesempatan yang baik bagi kehidupan dan penghidupannya. Akibatnya, domestikasi perempuan mengurangi atau menghilangkan akses dan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan memarginalkan perempuan dari penikmatan manfaat pembangunan.

Meskipun sudah dilakukan sosialisasi untuk menyadari bahwa konstruksi gender tersebut tidak sepenuhnya tepat, namun internalisasi konstruksi gender ini masih cukup mempengaruhi cara pandang kebanyakan perempuan dan laki-laki. Salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk membuktikan

fakta ini adalah jenis pekerjaan yang menjadi pilihan perempuan dan laki-laki masih menunjukkan adanya segregasi jenis kelamin tersebut. Banyak dijumpai perempuan yang berstatus belum menikah dan bekerja berubah menjadi status menikah dan tidak bekerja dalam durasi yang tidak lama dari tanggal pernikahannya. Dalam situasi yang lain masih banyak dijumpai perempuan memilih keluar atau berhenti dari pekerjaannya setelah mengetahui dirinya hamil atau dalam rangka akan melahirkan. Situasi sulit bagi perempuan tersebut tidak banyak dijumpai pada pengalaman laki-laki saat berubah status dari lajang menjadi menikah dan atau saat menjelang memiliki anak karena istrinya hamil.

Kebanyakan perempuan yang memutuskan berkiprah di ranah publik dan masuk di dunia kerja memilih jenis pekerjaan yang berhubungan dengan jenis pekerjaan domestik, seperti pengasuhan, perawatan, dan pendidikan (Kemen. PPPA, 2020a). Banyak perempuan juga memiliki kecenderungan bekerja di sektor informal ketimbang dunia kerja formal (Kemen. PPPA, 2020a). Padahal partisipasi perempuan di sektor formal menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Ketika perempuan sudah mandiri dan berdaya, maka perempuan dapat lebih otonom dan mampu meningkatkan relasi dirinya dengan lingkungan sekitarnya secara lebih setara dalam pengambilan keputusan. Partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi dan pengambilan keputusan mampu memperkuat kondisi perekonomian, meningkatkan capaian pembangunan nasional dan memperbaiki kualitas hidup tidak hanya bagi perempuan, namun juga bagi laki-laki, keluarga dan komunitas (Yoyo Karyono, Ema Tusianti, Alvina Clarissa, 2019). Karena itu, peran perempuan di sektor formal penting diperhitungkan karena menunjukkan pengakuan dunia kerja pada profesionalitas perempuan.
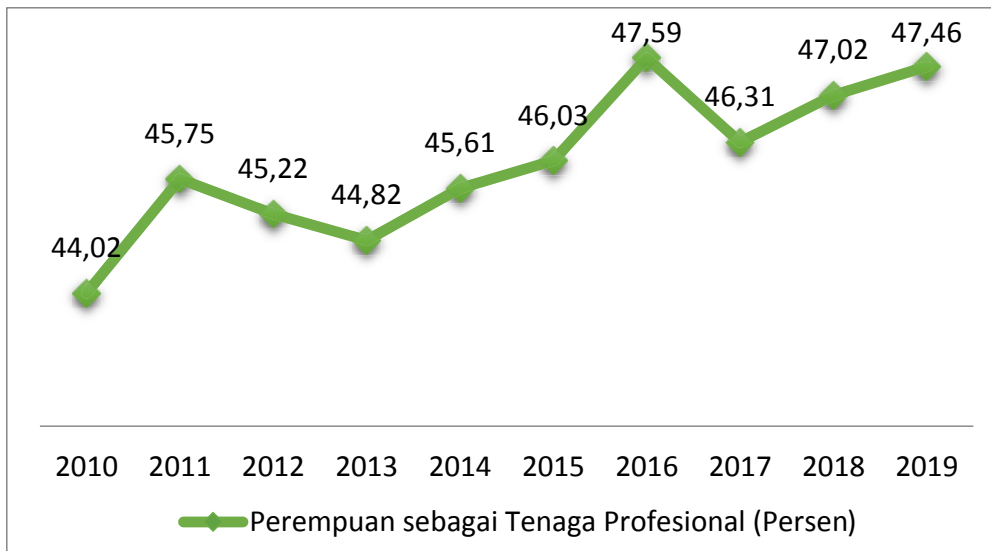
Gambar 4.8. Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, 2010-2019

Profesionalitas perempuan di dunia kerja menjadi komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan melalui persentase perempuan sebagai tenaga professional di sektor kerja formal. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2019 persentase perempuan sebagai tenaga profesional tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 47,59 persen. Pada tahun 2017, persentase perempuan sebagai tenaga professional menurun tajam sehingga mencapai angka 46,31 persen.

Pada tahun 2019, persentase pekerja profesional perempuan meningkat menjadi 47,46, meskipun belum memulihkan kondisi capaian di tahun 2016. Capaian pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebanyak 0,44 persen dibandingkan tahun 2018. Kesetaraan perempuan sebagai tenaga professional dinilai sudah tercapai jika persentase yang diperoleh telah menyentuh angka 50 persen. Berdasarkan capaian tahun 2019, pemberdayaan gender di

bidang tenaga professional masih perlu ditingkatkan sebanyak 2,54 persen untuk menyentuh angka setara dengan laki-laki. Informasi ini menunjukkan bahwa meskipun lambat, namun dalam tiga tahun terakhir profesinalitas perempuan terus mengalami peningkatan. Meskipun capaian perempuan sebagai tenaga professional masih di bawah 50 persen, namun kecenderungan meningkat pada persentase yang dicapai mengindikasikan pengakuan terhadap profesionalitas perempuan terus membaik.

Berdasarkan distribusinya, sekitar 65 persen provinsi di Indonesia menunjukkan persentase perempuan sebagai tenaga professional di atas nilai rata-rata nasional. Terdapat 14 provinsi dengan persentase perempuan sebagai tenaga professional lebih dari 50 persen telah terjadi. Artinya, terdapat sekitar 41 persen provinsi di Indonesia telah menunjukkan kesetaraan di bidang pengambilan keputusan. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan persentase perempuan sebagai tenaga professional tertinggi yaitu 56,33 persen, sedangkan Papua menunjukkan persentase terendah yaitu 35,04 persen (Gambar 4.9).
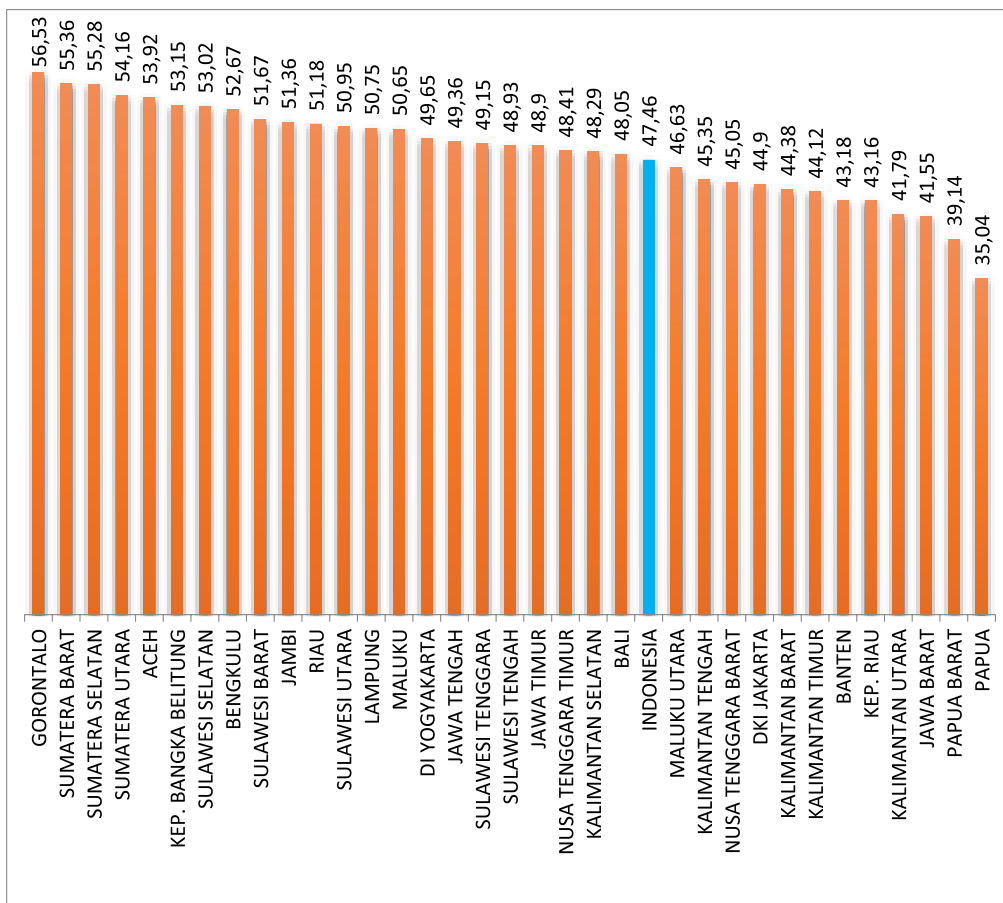
Sumber: BPS, 2020

Gambar 4.9. Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Berdasarkan Provinsi Tahun 2019

Sebagai tenaga professional, distribusi jabatan manajer di tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase perempuan yang menjabat sebagai manajer masih mengalami kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan laki-laki. Jabatan manajer pada laki-laki sebesar 69,37 persen, sedangkan perempuan hanya 30,63 persen, atau terdapat kesenjangan sebesar 38,74 persen atau 44 persen. Untuk mencapai setara, persentase jabatan manajer perempuan harus mampu meningkat sebanyak 19,37 persen.

Meskipun masih berada dalam posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun terjadi peningkatan persentase jabatan manajer

perempuan tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2019, persentase perempuan yang menjabat sebagai manajer sebesar 30,63 persen, atau lebih tinggi 1,66 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 28,97 persen dan tahun 2017 sebesar 26,63 persen (Gambar 4.10). Hal ini menunjukkan adanya kemajuan terhadap kompetensi perempuan terutama pada kepemimpinan dan manajemen di ranah publik dan peningkatan yang dicapai perempuan akan berkontribusi mengurangi kesenjangan terhadap laki-laki dalam jabatan sebagai manajer.
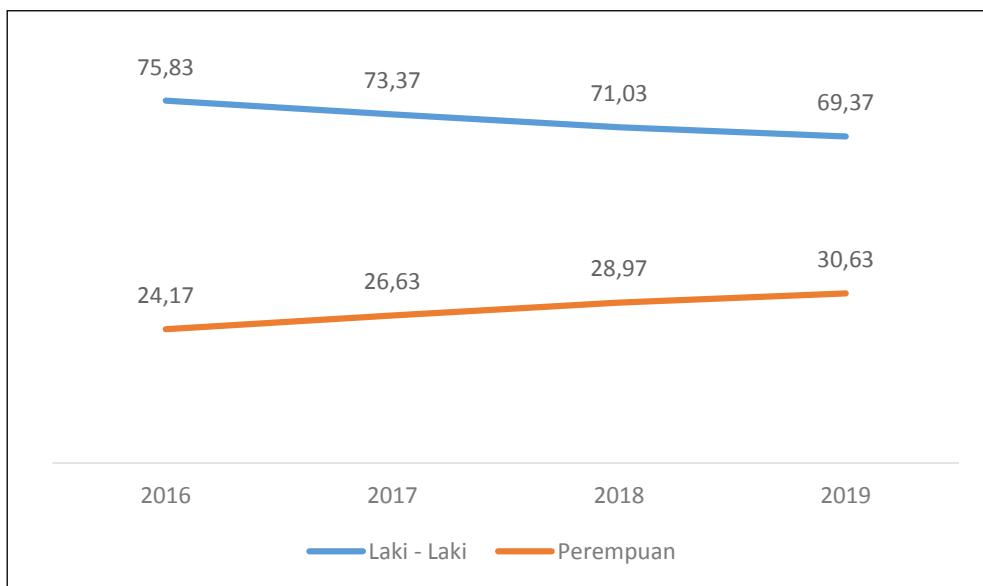
Sumber: BPS, sakernas 2020

Gambar 4.10. Persentase Pertumbuhan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Tahun 2016-2019

Trend peningkatan persentase jabatan manajer perempuan yang diiringi penurunan persentase jabatan manajer laki-laki mengindikasikan daya saing perempuan terus meningkat. Secara bertahap profesionalitas perempuan semakin diperhitungkan seiring dengan pengakuan terhadap kualitas perempuan. Peningkatan persentase jabatan manajer pada perempuan juga mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan pendidikan. Seseorang dapat menduduki

jabatan sebagai manajer membutuhkan kemampuan manajerial dan keahlian di bidang tertentu. Semua ini dapat dicapai melalui pendidikan, baik pendidikan formal, maupun non formal. Selain itu, peluang menjadi manajer hanyalah dapat diperoleh melalui partisipasi seseorang di ranah publik dan di bidang pekerjaan formal. Dengan kata lain, untuk mendorong peningkatan persentase perempuan sebagai manajer, maka penguatan pendidikan pada perempuan harus ditingkatkan melalui berbagai ranah pendidikan, terutama pada tingkat partisipasi sekolah dan lama sekolah perempuan.

Profesionalitas perempuan di pemerintahan dapat dilihat dari komposisi pegawai negeri sipil (PNS). Persentase perempuan yang menjadi PNS di Indonesia mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, bahkan sejak tahun 2017 jumlah PNS perempuan melebihi angka 50 persen. Di tahun 2019, PNS perempuan telah mencapai jumlah sebesar 51,51 persen, atau meningkat 0,95 persen dari tahun sebelumnya (Gambar 4.11).
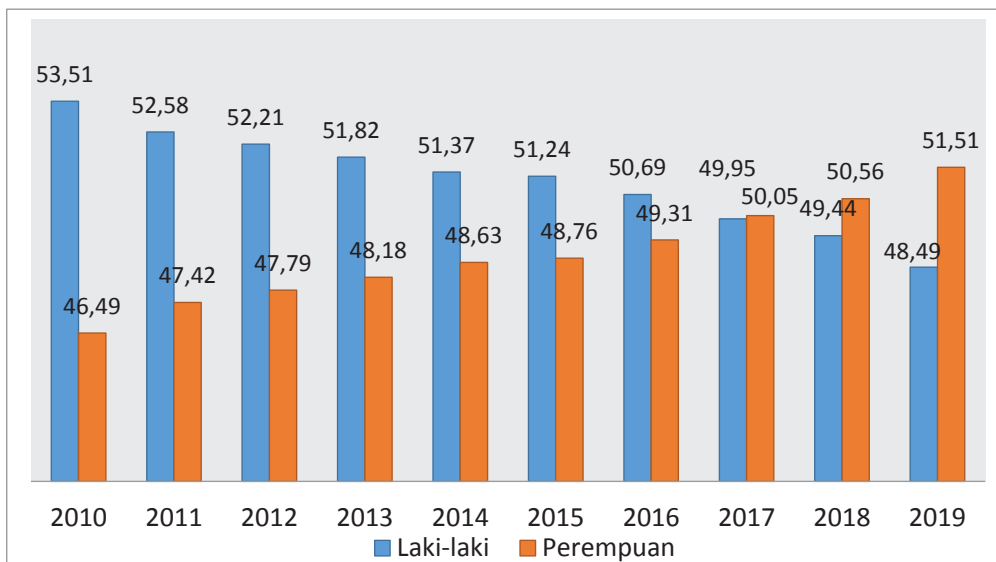
Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 4.11 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin, 2010-2017

Pada kelompok perempuan, terdapat peningkatan jumlah PNS perempuan sebanyak 45.515 pegawai atau sekitar 0,95 persen, demikian juga pada PNS laki-laki, terdapat peningkatan jumlah sebanyak 34.458 PNS namun persentase di tahun 2019 menurun sebesar 0.95 persen jika dibandingkan tahun 2018 (Gambar 4.12)
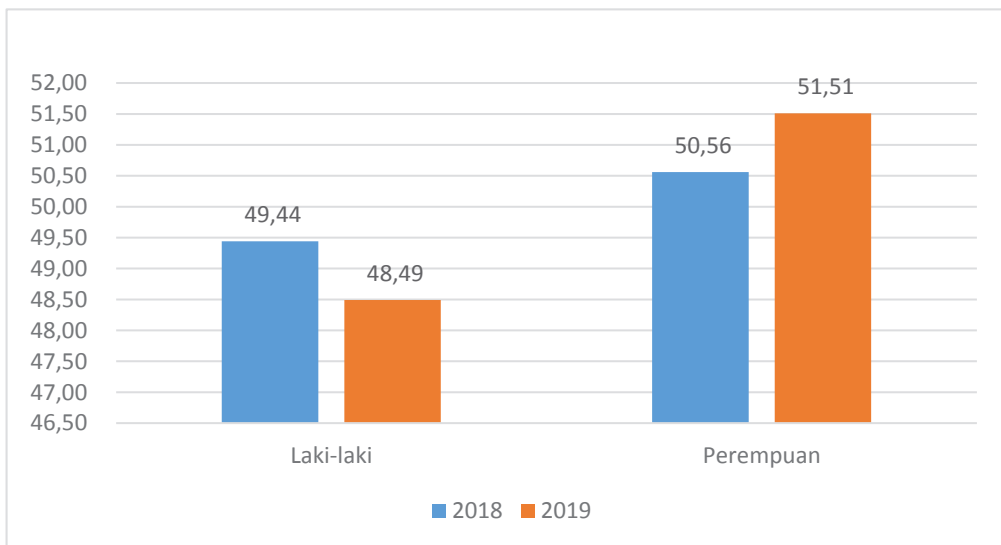
Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 4.12. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019

Berdasarkan provinsi pada kelompok perempuan, Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah PNS perempuan tertinggi di Indonesia yaitu 63,07 persen. Selain Sumatera Barat, provinsi lain yang memiliki jumlah persentase PNS perempuan di atas rata-rata nasional terdapat di 15 provinsi, diantaranya Provinsi Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Aceh dan Sumatera Selatan. PNS perempuan dengan jumlah dibawah rata-rata nasional terjadi di 18 provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan jumlah PNS perempuan yang paling sedikit, yaitu 40,43 persen. (Gambar 4.13).
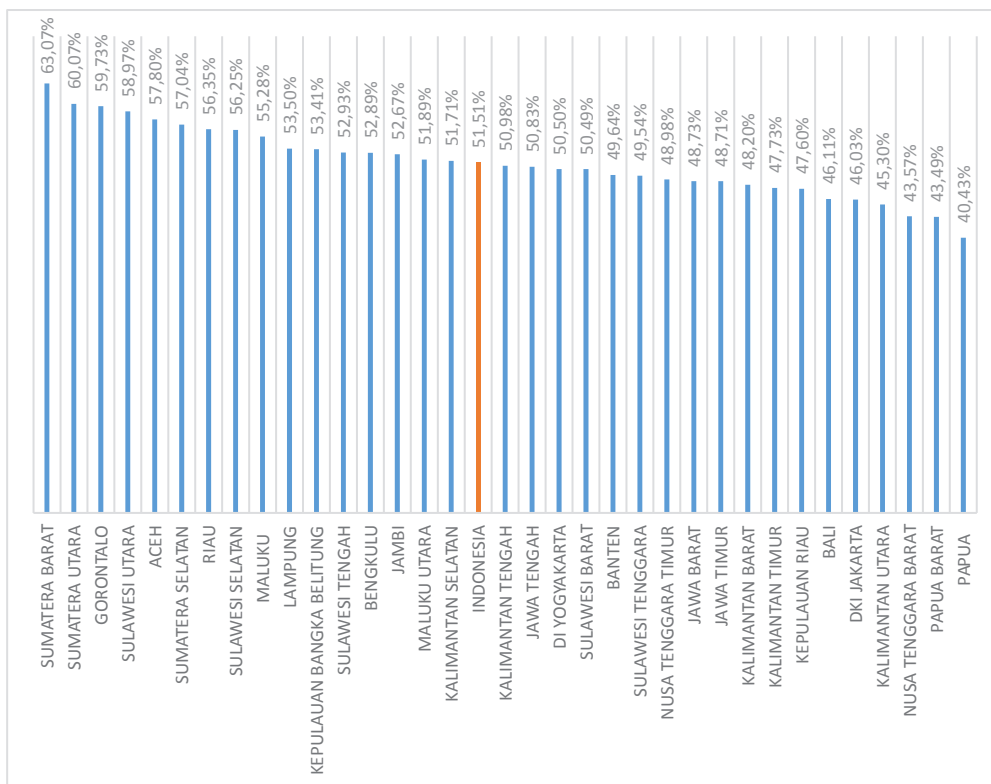
Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 4.13 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan menurut Provinsi Tahun 2019

Lebih banyaknya jumlah persentase PNS perempuan tidak diimbangi dengan jabatan yang diemban pada tiga jenis jabatan di lingkungan PNS. Berdasarkan jabatannya, pada tahun 2019 PNS perempuan lebih banyak mempunyai jabatan sebagai fungsional tertentu, sebanyak 62,07 persen lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 37,93 persen. Pada dua jenis jabatan lainnya, yaitu jabatan fungsional umum dan struktural, persentase jumlah perempuan yang memiliki jabatan tersebut lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Persentase PNS Perempuan yang mempunyai jabatan struktural paling sedikit hanya 33,97 persen dibandingkan laki-laki (37,93). (Gambar 5.6).
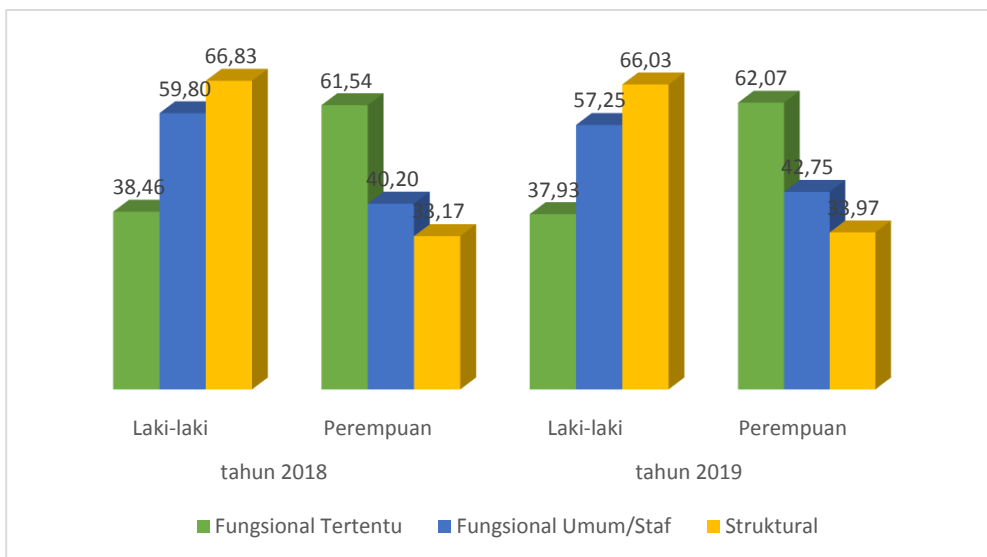
Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 4.14 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Dan Jabatan 2019

Lebih rendahnya jabatan fungsional umum dan jabatan structural ini tidak berbanding dengan tingkat pendidikan pada PNS perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, hanya 7,81 persen PNS perempuan yang tingkat pendidikannya sampai dengan SD, jauh sangat sedikit dibandingkan dengan PNS laki-laki yang mencapai 91,19 persen. Tingkat pendidikan PNS perempuan juga signifikan sedikit pada tingkat dasar dan menengah, yang hanya mencapai 11,16 persen di tingkat SMP/sederajat dan 35,87 persen di tingkat SMA/sederajat. Untuk tingkat pendidikan tinggi, baik di tingkat diploma dan sarjana, perempuan justru mencapai persentase lebih tinggi dibandingkan PNS laki-laki. Pada tingkat Diploma III atau setingkat sarjana muda, tingkat pendidikan PNS perempuan mencapai 70,92 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 29,08 persen. Situasi yang sama juga terlihat pada jenjang pendidikan tertinggi, yaitu tingkat sarjana/doctor/Ph.D., PNS perempuan mencapai jumlah lebih dari separoh PNS laki-laki, yaitu sebesar 53,88 persen (Gambar 4.15).
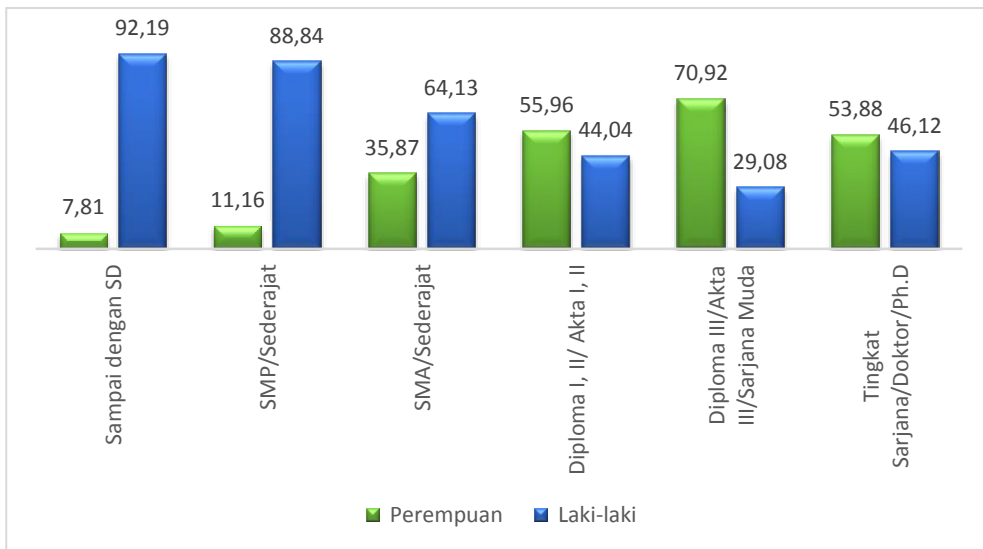
Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 4.15 Persentase jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dan tingkat Pendidikan 2019

Secara lebih spesifik, pada jabatan struktural, semakin tinggi tingkat jabatan structural, maka semakin kecil jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan tersebut. Kesenjangan ini terjadi di tahun 2019 dan tidak mengubah kondisi PNS perempuan yang menjadi pejabat struktural pada tahun 2018. Di tingkat eselon IV, jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan ini sebanyak 126.999 pegawai, jauh lebih sedikit dibandingkan PNS laki-laki yang mencapai jumlah 204.104 pegawai. Demikian juga pada eselon III, jumlah pejabat perempuan hanya berjumlah 24.286, sementara laki-laki mencapai jumlah 76,469. Di tingkat eselon II, pejabat laki-laki berjumlah 16.737, sementara perempuan hanya berjumlah 2.608, dan di tingkat eselon 1, pejabat Perempuan hanya berjumlah 113, sedangkan laki-laki berjumlah 512 (Tabel 4.2).

Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menjadi Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019.

Jabatan Struktural	2018			2019			Kenaikan Jumlah Pejabat Prmp 2018-2019	Persentase Kenaikan Pejabat Perempuan
	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah		
Eselon V	10.290	4.489	14.779	10.356	4.533	14.889	44	0,30%
Eselon IV	208.670	125.149	333.819	204.104	126.999	331.103	1.850	0,56%
Eselon III	77.536	23.745	101.281	76.469	24.286	100.755	541	0,54%
Eselon II	17.649	2.660	20.309	16.737	2.608	19.345	-52	-0,27%
Eselon I	518	103	621	512	113	625	10	1,60%
Jumlah	**314.663**	**156.146**	**470.809**	**308.178**	**158.539**	**466.717**	**2.393**	**2,72%**

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural perempuan di tahun 2019 mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu sebanyak 2.393 orang atau 2,72 persen dibandingkan tahun 2018. Itu artinya, meskipun masih jauh di bawah jumlah pejabat stuktural laki-laki, namun terdapat peningkatan jumlah pejabat struktural perempuan di tahun 2019 berjumlah dibandingkan tahun 2018. Kenaikan jumlah pejabat struktural perempuan terbanyak terjadi di tingkat eselon IV dengan kenaikan jumlah pejabat sebanyak 1.850 perempuan atau bertambah sebanyak 0,56 persen. Kenaikan jumlah pejabat struktural perempuan paling sedikit terjadi di tingkat Eselon I dengan peningkatan jumlah pejabat sebanyak 10 perempuan atau 1,60 persen. Namun sayangnya, pada jabatan Eselon II, jumlah pejabat perempuan justru mengalami penurunan sebanyak 52 perempuan atau 0,27 persen, padahal di level Eselon II-lah, pengambilan keputusan untuk berbagai program/kebijakan di tingkat kementerian dilakukan bersama-sama dengan Eselon I.
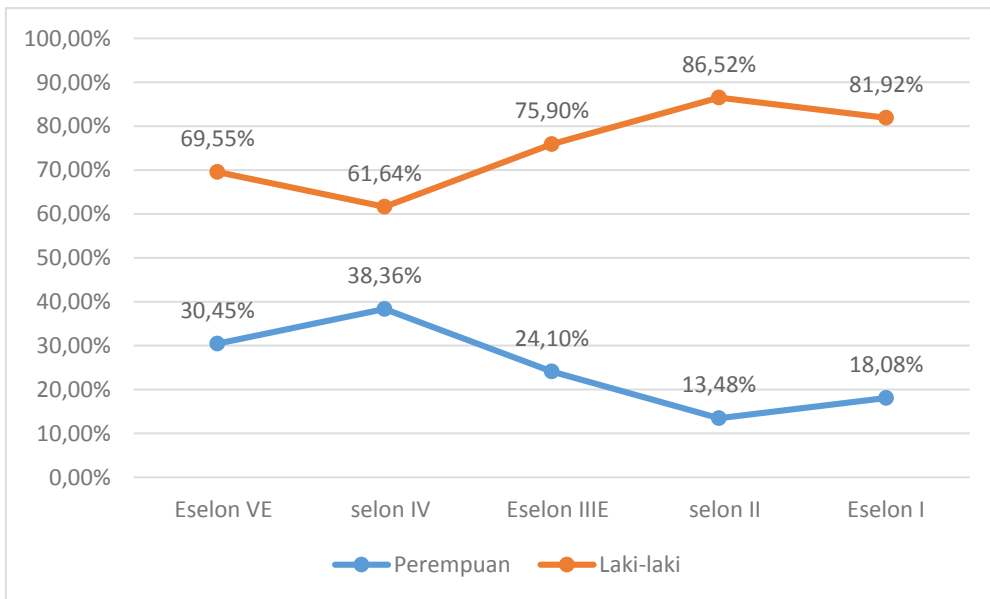
Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Gambar 4.16. Persentase PNS yang Menjabat Jabatan Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Jabatan, Tahun 2019

Pada Gambar 4.16 menyajikan lebarnya tingkat kesenjangan kedudukan perempuan sebagai pejabat structural dibandingkan laki-laki. PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural dengan tingkat kesenjangan yang paling lebar terjadi di tingkat eselon II, karena pejabat perempuan hanya berjumlah 13,48 persen sementara laki-laki sebanyak 86,52 persen. Jabatan structural dengan tingkat kesenjangan kedua terjadi di tingkat Eselon 1 dengan jumlah pejabat perempuan hanya 18,08 persen dibandingkan pejabat laki-laki yang mencapai jumlah 81,92 persen (Gambar 4.16). Pejabat Eselon I dan II merupakan tingkat jabatan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan pembangunan manusia di Indonesia. Itu artinya, kepentingan dan suara perempuan perlu lebih diperjuangkan agar pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat didorong lebih maksimal terutama di level Eselon I dan II.

Selain mendorong perempuan untuk lebih banyak mengisi jabatan structural yang strategis, upaya lain yang bisa dilakukan adalah memperkuat kesadaran dan analisis para pejabat dalam mengarusutamakan gender. Dua agenda yang penting dilakukan adalah menekankan pada 1) pembangunan sensitivitas gender bagi seluruh pejabat struktural di semua tingkat, terutama Eselon I dan II dan untuk memiliki sensitifitas dan analisis gender dengan baik, dan 2) menguatkan kemampuan analisis dengan alat analisis gender dalam seluruh siklus program, mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Upaya ini dapat mendorong para pejabat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki perspektif kesetaraan dan keadilan gender yang terefleksi dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. Dengan demikian, kebijakan dan program yang disahkan merupakan kebijakan dan program yang responsif gender, bukan kebijakan dan program yang bias gender.

D. Sumbangan Pendapatan Perempuan Semakin Meningkat

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menetapkan faktor ekonomi sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur pembangunan pemberdayaan gender di suatu negara. Aspek ekonomi dalam IDG diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan yang dapat menunjukkan bagaimana perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial. Sumbangan pendapatan perempuan juga merefleksikan kedudukan perempuan di pasar dunia kerja dan bagaimana perempuan telah atau belum diperhitungkan dalam dunia kerja. Sumbangan pendapatan perempuan juga mengindikasikan adanya kemandirian perempuan secara ekonomi yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara dan kemampuan kontrol yang otonom.

Sumbangan pendapatan perempuan kerapkali berada dalam capaian yang rendah. Situasi ini dapat disebabkan berbagai factor, namun aspek ketidaksetaraan gender menjadi salah satu factor determinan yang memperkuat ketimpangan gender di bidang

ekonomi. Otonomi ekonomi merupakan salah satu komponen yang dapat memperkuat keberdayaan seseorang. Semakin mandiri secara ekonomi seseorang, maka peluang untuk mampu mengambil keputusan yang ideal menjadi lebih memungkinkan. Kekuatan ekonomi juga dapat membuka akses terhadap adanya pilihan-pilihan yang bisa digunakan guna mendapatkan peluang terbaik bagi hidupnya. Oleh karena itu, urgensi mengukur sumbangan pendapatan perempuan dinilai tepat karena indikator ini merefleksikan tingkat pembangunan pemberdayaan gender (IDG).

Meskipun sejumlah capaian yang diperoleh perempuan di bidang ekonomi dan tenaga kerja masih rendah, namun partisipasi perempuan dalam penciptaan pendapatan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan gambar 4.17, sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami peningkatan dalam sembilan tahun terakhir. Pada tahun 2019, sumbangan pendapatan perempuan mencapai 37,1 persen. Angka ini meningkat 0,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Walaupun masih terpaut cukup jauh dari laki-laki, namun peningkatan yang terus terjadi pada indikator ini memberi sinyal positif akan terjadinya peningkatan partisipasi dan otonomi perempuan di bidang ekonomi.
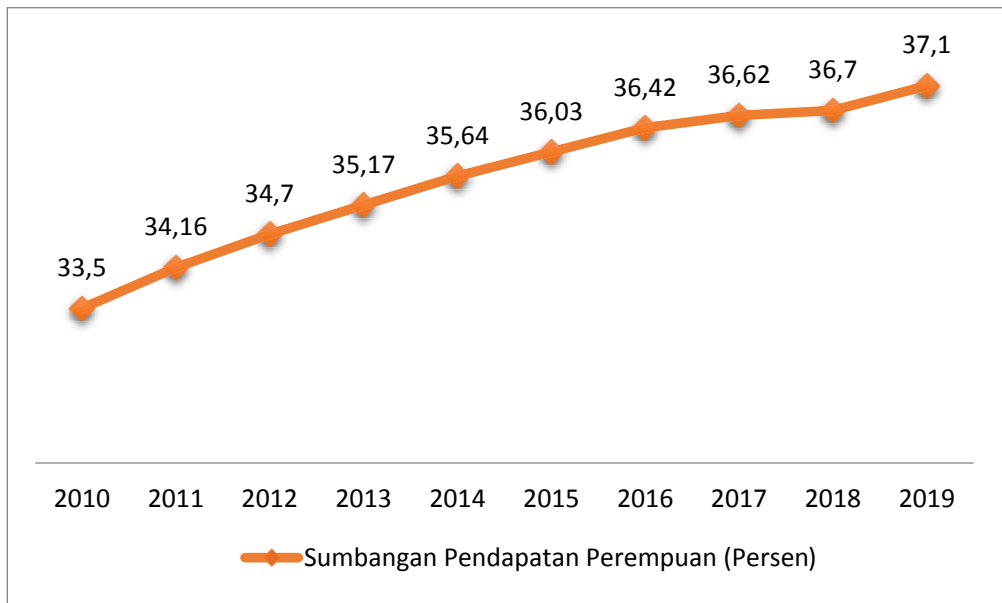
Gambar 4.17. Perkembangan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2010-2019

Sumbangan pendapatan perempuan yang semakin meningkat merupakan indikasi kualitas pekerja perempuan yang semakin diperhitungkan dalam pasar tenaga kerja. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kualitas pendidikan perempuan yang dimana persentase perempuan yang memiliki ijazah tinggi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019, pekerja perempuan yang tamat di jenjang pendidikan SD ke bawah mencapai 42 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 16,53 persen. Pekerja perempuan yang tamat SMA ke atas mencapai 41,47 persen atau mampu mengisi pasar tenaga kerja dengan persentase yang tidak terlalu berbeda dibandingkan laki-laki (Gambar 4.18).
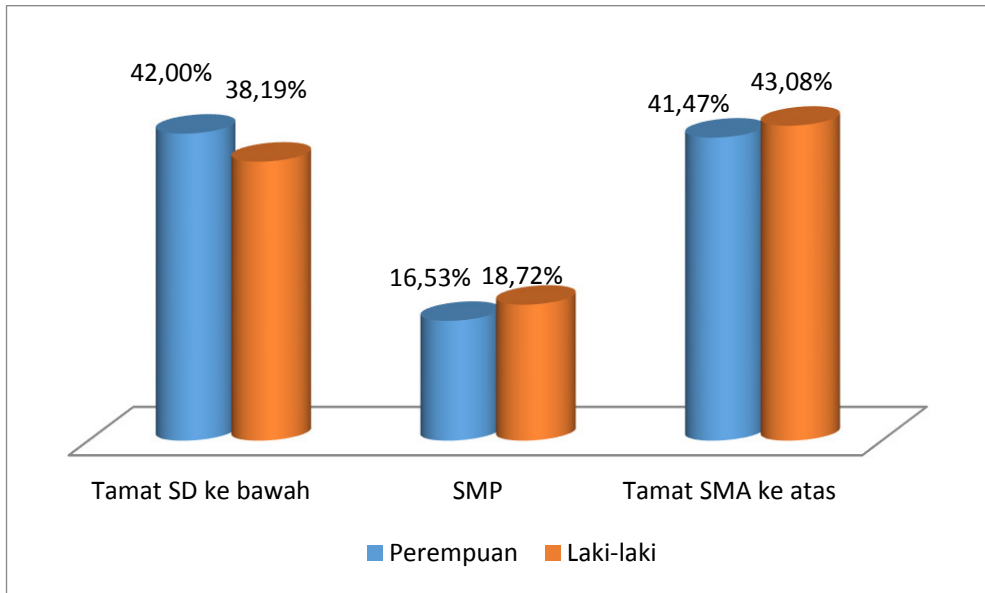
Sumber: BPS, Sakernas 2019

Gambar 4.18. Persentase Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, kesenjangan antara pekerja laki-laki dan perempuan di tahun 2019 lebih kecil. Sebagai contoh, pada jenjang SMP, kesenjangan menurut jenis kelamin yang terjadi di tahun 2019 sebesar 2,2 persen, sedangkan di tahun 2017 kesenjangan yang terjadi sebesar 4,23 persen. Demikian juga dengan jenjang SMA ke atas, kesenjangan yang terjadi di tahun 2017 sebesar 7,84 persen sedangkan di tahun 2019 hanya sebesar 1,61 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi pekerja perempuan yang mengisi pasar tenaga kerja di seluruh level Pendidikan menyebabkan tahun 2019 memiliki-tingkat kesenjangan yang lebih kecil dibandingkan tahun 2017. Kondisi ini juga terlihat bila dibandingkan di tahun 2010 (Gambar 4.19). atau dengan kata lain, kesenjangan yang terjadi pada pekerja laki-laki dan perempuan yang mengisi dunia kerja sudah lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
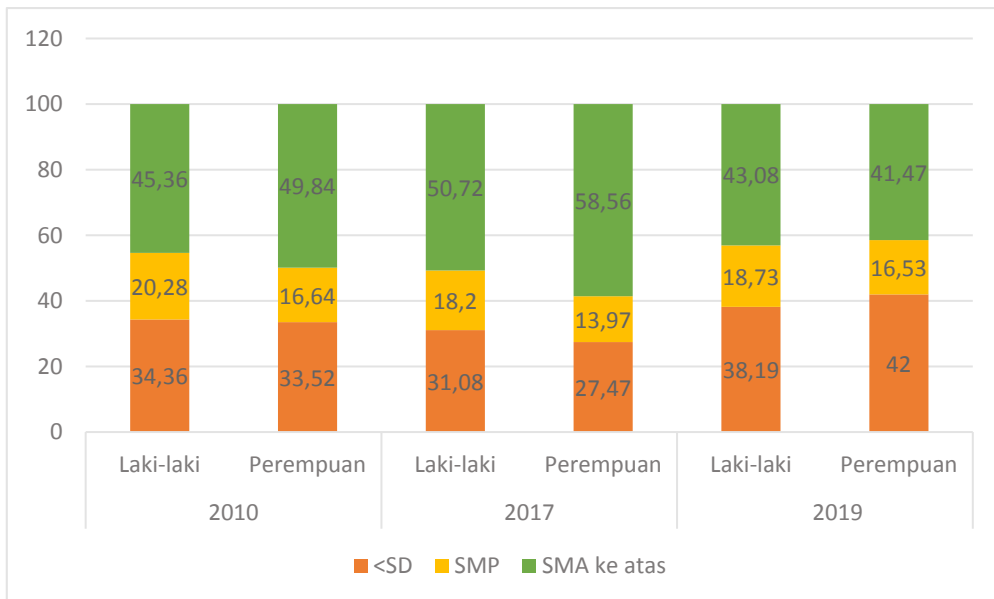
Sumber: BPS, Sakernas 2010-2019

Gambar 4.19. Persentase Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2010, 2017 dan 2019.

Peningkatan Persentase partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang terlihat pada tahun 2019 tersebut ternyata tidak selalu mengindikasikan kontribusi pendapatan perempuan akan menuju setara. Meskipun persentase kesenjangan partisipasi antara pekerja laki-laki dan perempuan tidak terlalu lebar, namun dalam dunia kerja masih dijumpai diskriminasi berbasis gender. Terdapat dua hal yang penting dianalisis, pertama, beban budaya di masyarakat yang mengkonstruksi perempuan harus bertanggung jawab penuh di ranah domestik mengakibatkan kebanyakan pekerja perempuan lebih memilih bekerja dengan status pekerjaan informal daripada formal. Kedua, upah/pendapatan pekerja perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki. Hal ini menjadi faktor utama yang dapat menjelaskan mengapa sumbangan pendapatan perempuan masih rendah dibandingkan laki-laki.

Gambar 4.20 menunjukkan hasil bahwa persentase laki-laki yang bekerja di sektor formal lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Sebaliknya persentase Pekerja perempuan tinggi bekerja di sektor informal lebih tinggi dibanding dibandingkan laki-laki. Di tahun 2019, persentase perempuan yang menjadi pekerja formal hanya mencapai 39,31 persen, sedangkan di sektor informal mencapai 60,69 persen. Berbeda dengan pekerja laki-laki, persentase yang bekerja di sector informal (52,61 persen) dan formal (47,39 persen) berada dalam persentase tidak jauh berbeda.
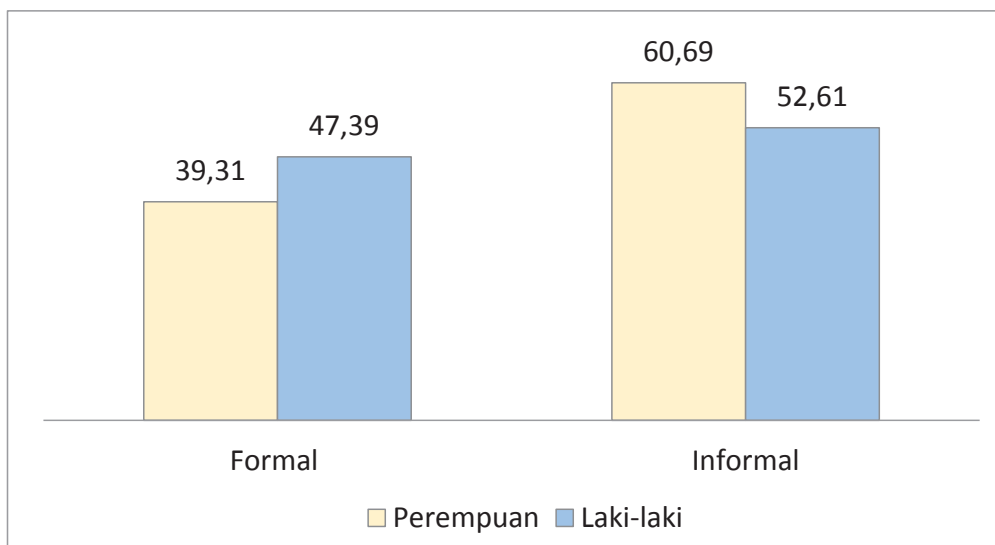
Gambar 4.20 Persentase Pekerja Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2019

Secara umum, terdapat perbedaan upah yang diterima antara pekerja laki-laki dan perempuan, meskipun berada dalam jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang ditamatkan yang sama. Rata-rata upah/gaji pekerja perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kondisi ini tidak berbeda dengan tahun 2018 (Kemen. PPPA & BPS, 2019). Di perkotaan, tahun 2019 menunjukkan rata-rata upah/gaji pekerja perempuan sebesar Rp 2.722.531, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mendapatkan rata-rata upah sebesar Rp 3.503.050. Situasi yang tidak berbeda juga terjadi di perdesaan, upah rata-rata perempuan lebih rendah dibandingkan

laki-laki. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan rata-rata upah yang dialami perempuan. Jika melihat pada nilai rata-rata upah yang diterima laki-laki dan perempuan di perkotaan dan perdesaan, maka kesenjangan upah yang dialami perempuan sebesar Rp 780.519 di perkotaan dan sebesar Rp 679.920 di perdesaan (Gambar 4.21).
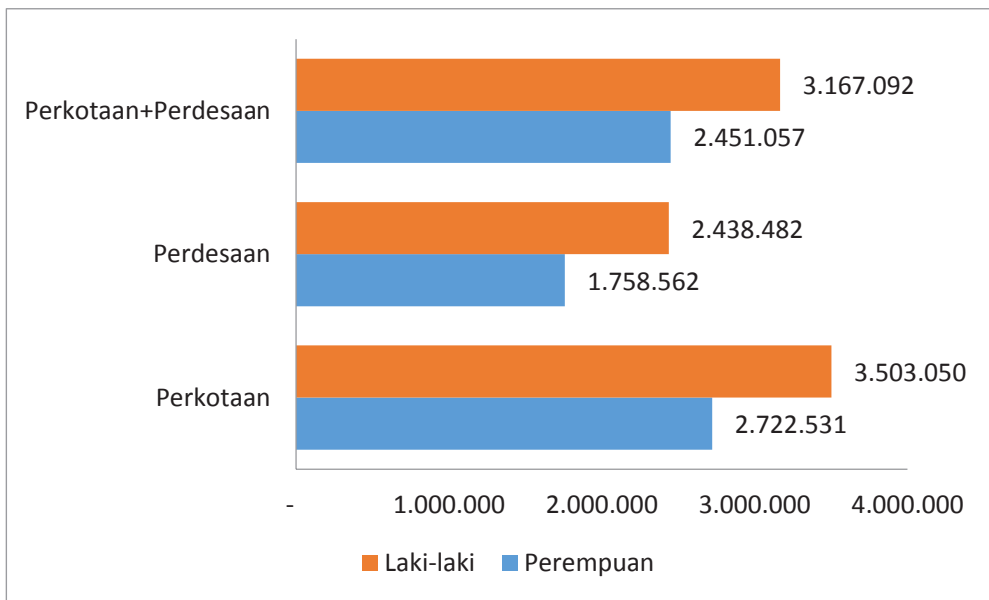
Gambar 4.21 Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2019

Diskriminasi upah pada pekerja perempuan tidak hanya terjadi berdasarkan wilayah kota dan desa, namun juga terjadi pada jenjang pendidikan. Gambar 4.22 menunjukkan terdapat kesenjangan upah yang diterima antara perempuan dan laki-laki walaupun memiliki jenjang pendidikan yang sama. Di semua jenjang pendidikan yang ditamatkan, nilai upah/gaji pekerja perempuan sebagai buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir mengalami pembedaan perlakuan atas nilai upah yang diterima perempuan secara signifikan. Perbedaan yang cukup besar terlihat pada tingkat pendidikan tidak/belum tamat SD, dimana rasio upah yang

ada mencapai 59,27 persen. Hal ini bermakna upah/gaji yang diterima pekerja perempuan hanya 59,27 persen dari upah/gaji yang diterima laki-laki. Rasio upah/gaji yang diperoleh perempuan dengan laki-laki dengan perbedaan yang paling sedikit paling kecil adalah pada kelompok pendidikan SMTA Kejuruan yaitu dengan rasio 75,71 persen (Tabel 4.3).

Tabel 4.3. Rasio Upah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2019.

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1.003.475	1.581.461	63,45
Tidak/Belum Tamat SD	1.122.198	1.893.238	59,27
Sekolah Dasar	1.319.185	2.097.272	62,90
S L T P	1.656.431	2.319.566	71,41
SMTA Umum	2.156.473	3.157.244	68,30
SMTA Kejuruan	2.341.434	3.092.503	75,71
Diploma I/II/III/ Akademi	3.100.120	4.588.239	67,57
Universitas	3.664.400	5.493.946	66,70
Total	**2.451.097**	**3.167.133**	**77,39**

Pembedaan rata-rata upah/gaji antara pekerja perempuan dan laki-laki juga terjadi pada pekerjaan berdasarkan lapangan pekerjaan utama. Rata-rata upah/gaji pekerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki pada kategori pekerjaan (1) real estate, (2) transportasi dan pergudangan, (3) konstruksi, dan (4) pengadaan listrik dan gas. Selain empat lapangan pekerjaan utama tersebut, rata-rata upah/gaji pekerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki (Gambar 4.23).
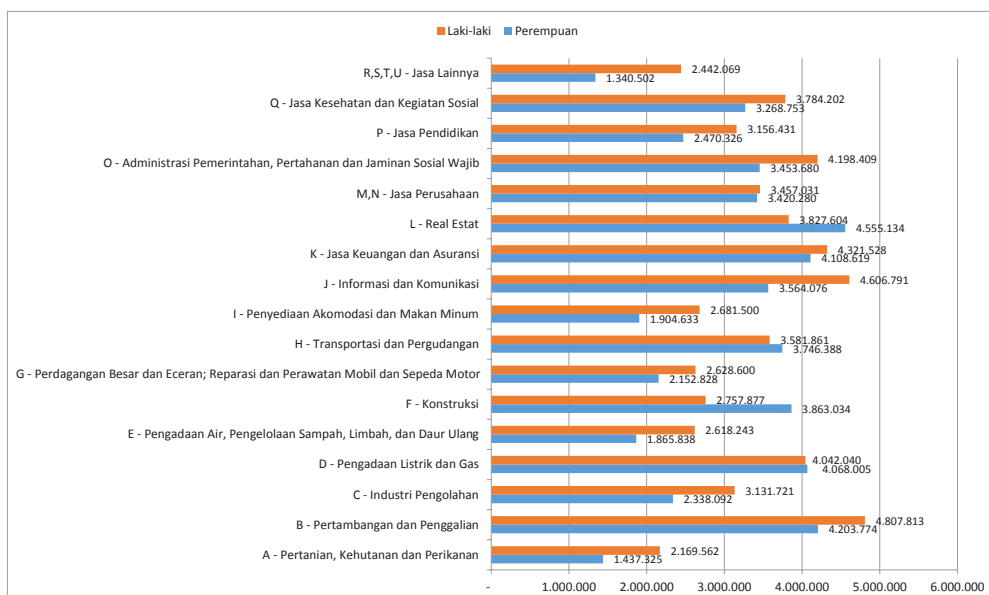
Sumber: BPS RI, Sakernas 2019

Gambar 4.22. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2019.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, Tabel 4.4. menunjukkan rasio gaji/upah perempuan hanya sebesar 77,39 persen dibandingkan laki-laki. Kesenjangan upah/gaji yang diterima antara laki-laki dan perempuan ini cukup lebar dan merefleksikan penghargaan terhadap kerja perempuan masih dilihat subordinat dibandingkan laki-laki. Kesamaan upah/gaji menjadi agenda advokasi yang penting bagi keadilan perempuan di bidang tenaga kerja. Dengan demikian, pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan pekerja perempuan dapat lebih dirasakan keadilannya.

Tabel 4.4. Persentase Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2019.

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Rasio Upah
	Perempuan	Laki-laki	
(1)	(2)	(3)	(4)
A - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.437.325	2.169.562	66,25
B - Pertambangan dan Penggalian	4.203.774	4.807.813	87,44
C - Industri Pengolahan	2.338.092	3.131.721	74,66
D - Pengadaan Listrik dan Gas	4.068.005	4.042.040	100,64
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.865.838	2.618.243	71,26
F – Konstruksi	3.863.034	2.757.877	140,07
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.152.828	2.628.600	81,90
H - Transportasi dan Pergudangan	3.746.388	3.581.861	104,59
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.904.633	2.681.500	71,03
J - Informasi dan Komunikasi	3.564.076	4.606.791	77,37
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	4.108.619	4.321.528	95,07
L - Real Estat	4.555.134	3.827.604	119,01
M,N - Jasa Perusahaan	3.420.280	3.457.031	98,94
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.453.680	4.198.409	82,26
P - Jasa Pendidikan	2.470.326	3.156.431	78,26
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.268.753	3.784.202	86,38
R,S,T,U - Jasa Lainnya	1.340.502	2.442.069	54,89
Total	**2.451.097**	**3.167.133**	**77,39**

Pada table 4.4 menunjukkan rasio yang berbeda pada perempuan dan laki-laki karena jenis lapangan pekerjaan utama. Rasio upah dengan angka diatas 100 menunjukkan bahwa rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Terdapat 4 lapangan pekerjaan utama dengan rasio diatas 100 pada perempuan. Sebagai contoh, jenis pekerjaan pengadaan listrik dan gas memiliki rasio upah sebesar 100,64 persen pada perempuan. Hal tersebut mengandung arti bahwa upah/gaji bersih pekerja perempuan lebih tinggi 0,64 persen dibandingkan dengan upah/gaji bersih pekerja laki-laki. Selain pengadaan listrik dan gas, lapangan pekerjaan utama lainnya dengan rasio upah diatas 100 adalah konstruksi sebesar 140,07, transportasi dan pergudangan sebesar 104,59 persen dan real estate sebesar 119,01 persen. Namun demikian, pada jenis lapangan pekerjaan selain 4 macam di atas, rasio rata-rata upah/gaji perempuan berada di bawah laki-laki dengan varian yang berbeda-beda. Rasio upah terendah terdapat pada jasa lainnya sebesar 54,89 persen. Hal tersebut mengandung arti bahwa upah/gaji bersih pekerja perempuan hanya sebesar 54,89 persen dari upah/gaji yang diterima laki-laki (Tabel 4.4).

E. Disparitas Pemberdayaan Gender Antarwilayah

Capaian pemberdayaan gender di Indonesia semakin menunjukkan harapan yang mengarah pada situasi lebih baik. Pemberdayaan gender yang sudah menunjukkan perkembangan yang progresif ini ternyata masih belum terjadi secara merata di seluruh provinsi. Berdasarkan sebaran provinsi, nilai IDG antar provinsi tahun 2019 masih menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan pemberdayaan gender antar wilayah di Indonesia. Disparitas ini semakin memprihatinkan karena sebagian besar atau 85,29 persen provinsi di Indonesia justru mempunyai nilai pemberdayaan gender di bawah nilai nasional.

Adanya kesenjangan capaoan yang tidak merata berdasarkan provinsi di Indonesia ini terkait dengan adanya ketimpangan terhadap unsur-unssur penyusunnya, terutama pada keterwakilan perempuan di parlemen. Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa perubahan urutan nilai IDG berkaitan dengan peningkatan atau penurunan angka keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk komponen perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan perubahan angkanya tidak terlalu bermakna dalam mempengaruhi peringkat IDG.

Tabel 4.5 Capaian IDG di Lima Provinsi dengan IPG Tertinggi dan Terendah beserta komponen pembentuknya 2018-2019

Provinsi	IDG		Keterwakilan Perempuan di Parlemen		Perempuan sebagai Tenaga Profesional		Sumbangan Pendapatan Perempuan		Ranking IDG	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
IDG tertinggi 2019										
Kalimantan Tengah	77,03	83,52	24,44	35,56	44,24	45,35	33,39	33,4	3	1
Sulawesi Utara	80,91	79,1	33,33	28,89	51,34	50,59	32,35	32,39	1	2
Maluku Utara	77,81	77,5	20,45	26,67	47,98	46,63	36,46	36,49	9	3
Sulawesi Selatan	69,14	76,01	19,05	27,71	52,91	53,02	31,83	32,44	21	4
Maluku	77,77	75,77	26,67	23,26	50,33	50,65	37,14	37,15	2	5
IDG terendah 2019										
Nusa Tenggara Barat	60,56	51,91	9,23	1,54	45,66	45,05	32,81	32,91	4	1
Kep. Bangka Belitung	52,57	52,96	4,44	4,44	48,94	53,15	26,38	2684	2	2
Sumatera Barat	65,7	59,09	10,77	4,62	55,48	55,36	37,48	37,51	8	3
Kalimantan Utara	69,53	61,48	20	11.43	44,36	41,79	26,16	26,33	15	4
Papua Barat	51,04	61,52	5,36	14,29	38,62	39,14	27,31	27,65	1	5

Pada tahun 2019, peringkat pertama tertinggi IDG adalah Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya di peringkat tiga. Hal ini terjadi karena ada peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen di provisi Kalimantan Tengah dari angka 24,44 tahun

2018 menjadi 35,56 atau naik sebesar 11,12 poin atau 45,49 persen. Penurunan angka keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Sulawesi Utara sebesar 4,44 poin atau 13,32 persen menyebabkan penurunan angka IDG dan peringkat dari yang tertinggi pertama menjadi kedua. Hal menarik adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang posisinya melonjak dari urutan 21 menjadi posisi tertinggi ke empat yang disebabkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 8,66 poin atau 45,45 persen dan peningkatan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 0,61 persen atau 1,92 persen.

Peningkatan angka keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Papua Barat sebesar 8,93 poin atau 16,6 persen dapat mendongkrak nilai IDG sebesar 10,48 poin atau 20,53 persen. Capaian ini menjadikan Papua Barat yang sebelumnya sebagai provinsi dengan nilai IDG terendah se Indonesia naik menjadi peringkat ke lima terendah. Demikian juga sebaliknya, penurunan angka keterwakilan perempuan di parlemen menyebabkan turunnya nilai IDG dan peringkatnya. Hal ini terjadi pada Provinsi Kalimantan Utara. Keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Kalimantan Utara turun 8,57 poin atau 42,85 persen dan penurunan angka persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional 2,57 poin atau 5,79 persen sehingga mempengaruhi nilai IDG Provinsi Kalimantan Utara menjadi turun 8.05 poin atau 11,58 persen. Konsekwensi dari penurunan IDG ini adalah penurunan peringkat Kalimantan Utara yang sebelumnya urutan ke 15 menjadi peringkat 4 terendah. Demikian juga dengan Provinsi Sumatera Barat yang peringkatnya turun dari urutan 8 menjadi urutan 3 terendah dikaitkan dengan penurunan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 6,15 poin atau 57,1 persen. Dengan kata lain, partisipasi perempuan di parlemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capaian IDG di tingkat provinsi dan nasional.

Perbedaan karakteristik penduduk, kondisi social budaya, ekonomi dan implementasi kebijakan pada setiap daerah dapat

menjadi unsur lain yang turut mempengaruhi capaian IDG antar provinsi. Penguatan pendidikan politik bagi perempuan dan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan politik perempuan masih perlu ditingkatkan. Selain di bidang politik, persamaan penghargaan atas upah pekerja perempuan harus dilakukan melalui intervensi kebijakan yang kongkrit, sehingga praktik diskriminatif pada upah pekerja berbasis gender tidak lagi terjadi. Partisipasi pendidikan pada perempuan harus menjadi prioritas sehingga Angka Harapan Sekolah (AHS) pada perempuan dapat terwujud melalui peningkatan yang signfikan pada tingkat partisipasi sekolah perempuan. dengan demikian, peluang perempuan lebih diperhitungkan sebagai tenaga professional akan semakin terbuka lebar.

Tidak hanya kepada perempuan, upaya pemberdayaan gender juga harus dilakukan bersamaan dengan penguatan kesadaran laki-laki. Keterlibatan laki-laki terutama laki-laki yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan sangat penting. Selain agar laki-laki juga turut mempertimbangkan, memberi kesempatan dan peluang, serta mengikutsertakan perempuan dalam berbagai pembangunan, pelibatan laki-laki juga dapat memperkuat pengetahuan dan pemahaman laki-laki tentang kontribusi perempuan dalam pembangunan. Dengan demikian, kesetaraan kerjasama antara laki-laki dan perempuan di semua sector pembangunan akan semakin nyata yang pada akhirnya akan meningkatkan pemberdayaan pembangunan di Indonesia.

F. Ketimpangan Pemberdayaan Gender Antarkabupaten/kota Masih Tinggi

Di tingkat provinsi, ketimpangan pemberdayaan gender terlihat tidak merata, bahkan mayoritas provinsi masih berada di bawah nilai nasional. Disparitas pemberdayaan gender di tingkat provinsi ini juga terjadi di level kabupaten/kota bahkan di satu provinsi yang sama. Terdapat berbagai factor yang mempengaruhi capaian

IDG yang bervariasi di level kabupaten/kota dalam satu provinsi maupun antar-provinsi. Kesenjangan ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik penduduk, sosial, ekonomi dan budaya, namun terutama dipengaruhi juga oleh kebijakan yang ada dan implementasi kebijakan pada setiap daerah. Capaian IDG di kabupaten/kota juga dapat menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemberdayaan gender di wilayah pemerintahannya dibangun.

Dari 519 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 451 kabupaten/kota yang masih memiliki nilai IDG di bawah angka nasional. Itu artinya, terdapat 86,90 persen atau mayoritas kabupaten/kota masih berada di bawah nilai IDG nasional. Kabupaten/kota yang telah mencapai nilai di atas IDG nasional hanya berjumlah 68 kabupaten/kota atau 13,10 persen saja. Itu artinya, disparitas pemberdayaan gender di level kabupaten/kota di Indonesia masih sangat tajam. Capaian IDG ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah secara sungguh-sungguh karena keberhasilan pembangunan manusia hanya dapat dicapai secara maksimal jika diserta dengan pemberdayaan gender yang setara terutama pada penduduk perempuan.

Gambar 4.24 menunjukkan bagaimana kesenjangan antar kabupaten/kota sangat nyata. Didasarkan pada nilai IDG nasional sebesar 75,24, terlihat sepuluh kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata nasional berada dalam nilai IDG antara 82,67 sampai dengan 88,91. Dibandingkan dengan sepuluh kabupaten/kota dengan nilai pemberdayaan gender terendah, capaian IDG di kabupaten/kota tersebut berkisar antara nilai 31,57 sampai dengan 43,96. Dari titik nilai IDG nasional, disparitas antara yang tertinggi dan terendah sangat nyata, dimana kabupaten/kota yang berada di atas nilai nasional tidak melampaui 10 poin dari nilai nasional, namun kabupaten/kota dengan IDG terendah memiliki kesenjangan hingga 40 poin dari nilai nasional.
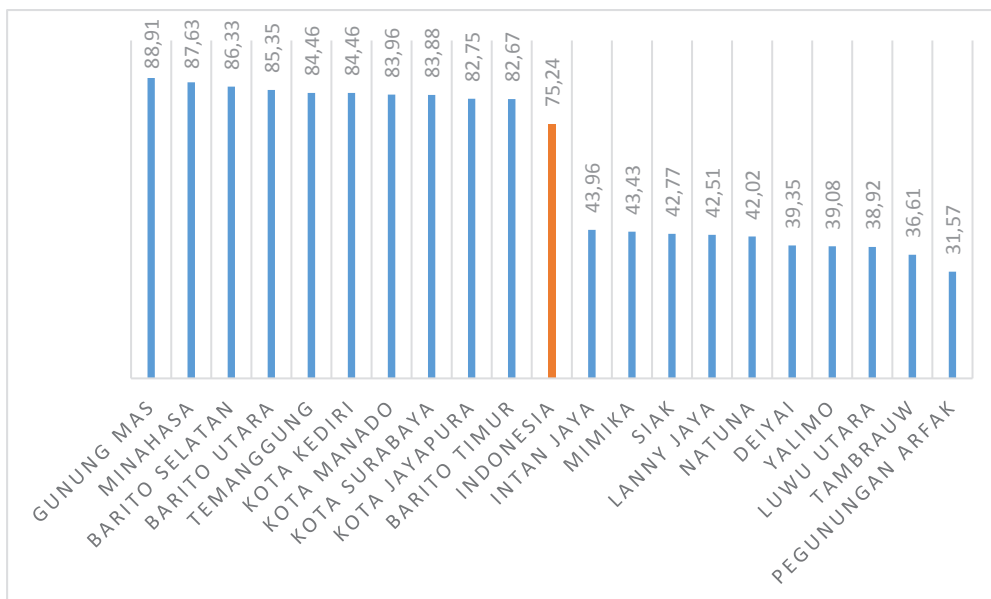
Gambar 4.23 Nilai IDG Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2019

Pada Tabel 4.6 menunjukkan komponen IDG pada sepuluh kabupaten/kota dengan nilai pemberdayaan gender tertinggi dan terendah. Sepuluh kabupaten/kota yang berhasil mencapai pemberdayaan gender tertinggi terjadi di Kabupaten Gunung Mas, Minahasa, Barito Selatan, Barito Utara, Temanggung, Kota Kediri, Kota Manado, Kota Surabaya, Kota Jayapura, dan Barito Timur. Sedangkan lima kabupaten/kota dengan capaian IDG terendah terjadi di Pegunungan Arfak, tambrau, Luwu Utara, Yalimo, dan Deiyai. Kebanyakan kabupaten/kota yang mencapai IDG terendah berada di Wilayah Timur Indonesia, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 4.6 Nilai IDG Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah Beserta Komponen Pembentuknya, 2019

Provinsi/Kab/Kota	Nilai IDG	Komponen IDG		
		Keterlibatan Perempuan Di Parlemen	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan
Kabupaten Kota dengan IDG Tertinggi				
Gunung Mas	88,91	48	47,86	49,83
Minahasa	87,63	48,57	50,48	39,09
Barito Selatan	86,33	40	50,18	38,16
Barito Utara	85,35	32	47,14	43,76
Temanggung	84,46	33,33	50,78	40,86
Kota Kediri	84,46	36,67	49,31	35,66
Kota Manado	83,96	37,5	48,2	35,18
Kota Surabaya	83,88	34	51,02	35,78
Kota Jayapura	82,75	27,5	47,21	34,99
Barito Timur	82,67	28	49,9	43,46
Kabupaten/Kota Dengan IDG Terendah				
Intan Jaya	43,96	0,01	23,39	48,49
Mimika	43,43	2,86	27,16	23,68
Siak	42,77	2,5	48,62	19,82
Lanny Jaya	42,51	4	16,75	43,84
Natuna	42,02	0,01	39,47	24,51
Deiyai	39,35	0,01	19,83	58,92
Yalimo	39,08	4	12,27	46,58
Luwu Utara	38,92	0,01	58,2	20,71
Tambrauw	36,61	0,01	35,77	35,86
Pegunungan Arfak	31,57	5	19,26	24,14
INDONESIA	**75,24**	**20,52**	**47,46**	**37,1**

Perhatian negara dalam melakukan pemberdayaan gender sejatinya merupakan amanah konstitusi. Terjadinya kesenjangan gender dengan disparitas antar daerah yang sangat tajam menunjukkan adanya kebijakan pembangunan di daerah yang bervariasi namun mayoritas masih bias gender. Pembangunan di Indonesia kerapkali masih dihadapkan pada tantangan perspektif kepala daerah yang masih belum melihat kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi. Meskipun prinsip kesetaraan gender dan anti diskriminasi termaktub dalam sejumlah dokumen negara, namun ternyata belum cukup kuat mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pemberdayaan gender. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta masyarakat untuk tetap terus mendorong dan memantau kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah untuk dapat terimplementasi secara adil dan responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Gender (IPG)*. Https://Sirusa.Bps.Go.Id/Sirusa/Index.Php/Indikator/14. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/14

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019. *No. 21/02/Th. XXIII, 17 Februari 2020*. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/1670/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2019-mencapai-71-92.html

Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025, (2005). https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025

Bappenas, S. W. P. R. dan K. P. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024*. Sekertariat Wakil Presiden RI, TNP2K dan Bappenas.

Beltekian, E. O.-O. and D. (2018). *Why do Women Live Longer than Men?* Oxford Martin School. https://ourworldindata.org/why-do-women-live-longer-than-men

BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia*. Https://Www.Bps.Go.Id/Subject/26/Indeks-Pembangunan-Manusia.Html. https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#:~:text=IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat,Human Development Report (HDR).

Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, A. P. R. (2018). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018*. Kemen. PPPA dan BPS.

Elissa Kennedy, Gerda Binder, Karen Humphries-Waa, Tom Tidhar, Karly Cini, Liz Comrie-Thomson, Cathy Vaughan, Kate Francis, N. S., & Nisaa Wulan, George Patton, P. A. (2020). Gender Inequalities in Health and Wellbeing Across the First Two Decades of Life: An

Analysis of 40 Low-Income and Middle-Income Countries in the Asia-Pacific Region. *Lancet Glob Health*, *8*, *e1473–8*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/ S2214-109X(20)30354-5

Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *8*(1), 15–21. https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21

Hadi, A. (2019). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Persentase Pen-duduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. *Media Tren: Berkala Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *14 No. 2*. https://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/4504/pdf

Kemen. PPPA. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak 2015-2019 (revisi)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/985ba-renstra-kpppa-2015-2019-revisi-.pdf

Kemen. PPPA. (2019). *Sistem Data Gender dan Anak KPPPA*. Https://Siga.Kemenpppa.Go.Id/. https://siga.kemenpppa.go.id/

Kemen. PPPA. (2020a). *Profil Perempuan Indonesia Tahun 2019*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kemen. PPPA. (2020b). *SIMFONI PPA*. Https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Register/Login. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login

Kemen. PPPA & BPS. (2019). *Profil Perempuan Indonesia 2019*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Parawansa, K. I. (2002). Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia,. In *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. International IDEA.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, (2003).

Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, (2008).

Undang-Undang No 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, (2012).

Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, (2015).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (2017).

Presiden RI. (2015). *Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Buku 1*.

Stepanie Ayu Pradipta, R. M. D. (2020). Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPE)*, *08 Nomor 3*. https://doi.org/ https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p109-115

Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, *25*(1), 19–34.

UNDP. (2015). *Gender Equality in Human Development – Measurement Revisited*.

UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report*. http://hdr.undp.org/en/data

Virginia Zarulli, Julia A. Barthhold Jones, Anna Oksuzyan, Rune Lindahl-Jacobsen, Kaare Christensen, J. W. V. (2017). Women Live Longer than Men Even During Severe Famines and Epidemics. *PNAS*. https://doi.org/10.1073/pnas.1701535115

www.un.org. (2020). *Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls*. Https://Www.Un.Org/Sustainabledevelopment/

Gender-Equality/. https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

www.undp.org. (2020a). *Background on the Goals*. Https://Www.Undp.Org/Content/Undp/En/Home/Sustainable-Development-Goals/Background/. https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background/

www.undp.org. (2020b). *Gender Equality*. Https://Www.Undp.Org/Content/Undp/En/Home/Sustainable-Development-Goals/Goal-5-Gender-Equality.Html. https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html

Yoyo Karyono, Ema Tusianti, Alvina Clarissa, D. N. R. (2019). *Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018 (Kajian Lanjutan 2)* (E. T. Wisnu Winardi (ed.); 1st ed.). Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/download.html

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ACEH	69,64	69,87	14,27	14,30	9,09	9,18	9.186	9.603	71,19	71,90
Simeulue	65,00	65,22	13,25	13,51	9,07	9,08	6.824	7.210	64,74	65,70
Aceh Singkil	67,16	67,36	14,29	14,30	8,05	8,52	8.506	8.715	68,02	68,91
Aceh Selatan	64,02	64,27	14,15	14,41	8,38	8,59	7.891	8.187	65,92	66,90
Aceh Tenggara	67,77	68,04	13,98	13,99	9,64	9,65	7.685	8.067	68,67	69,36
Aceh Timur	68,44	68,67	13,01	13,02	7,85	7,86	8.252	8.600	66,82	67,39
Aceh Tengah	68,62	68,82	14,25	14,26	9,68	9,69	10.394	10.782	72,64	73,14
Aceh Barat	67,72	67,93	14,58	14,59	9,08	9,09	9.134	9.692	70,47	71,22
Aceh Besar	69,59	69,77	14,70	14,71	10,14	10,31	9.192	9.661	72,73	73,55
Pidie	66,68	66,89	14,44	14,45	8,81	8,82	9.492	9.824	69,93	70,41
Bireuen	70,92	71,16	14,81	14,82	9,17	9,27	8.378	8.889	71,37	72,27
Aceh Utara	68,61	68,79	14,68	14,69	8,11	8,46	7.919	8.189	68,36	69,22
Aceh Barat Daya	64,65	64,91	13,56	13,57	8,13	8,35	8.093	8.491	65,67	66,56
Gayo Lues	65,12	65,38	13,49	13,73	7,69	7,91	8.529	8.845	65,88	66,87
Aceh Tamiang	69,28	69,52	13,57	13,58	8,70	8,89	8.032	8.362	68,45	69,23
Nagan Raya	68,89	69,14	14,11	14,12	8,26	8,50	7.936	8.348	68,15	69,11
Aceh Jaya	66,88	67,11	13,96	13,97	8,37	8,66	9.262	9.682	68,83	69,74
Bener Meriah	68,99	69,19	13,44	13,45	9,56	9,78	10.626	11.124	72,14	72,97
Pidie Jaya	69,81	70,06	14,53	14,54	8,86	9,04	9.967	10.364	72,12	72,87
Kota Banda Aceh	71,10	71,36	17,26	17,39	12,60	12,64	16.234	16.892	84,37	85,07
Kota Sabang	70,21	70,45	13,66	13,81	10,97	11,13	10.899	11.444	74,82	75,77
Kota Langsa	69,16	69,37	15,19	15,34	11,06	11,10	11.497	12.099	76,34	77,16
Kota Lhokseumawe	71,27	71,52	15,18	15,19	10,89	10,90	10.863	11.421	76,62	77,30
Kota Subulussalam	63,69	63,94	14,20	14,21	7,39	7,58	7.039	7.463	63,48	64,46

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SUMATERA UTARA	68,61	68,95	13,14	13,15	9,34	9,45	10.391	10.649	71,18	71,74
Nias	69,43	69,68	12,13	12,39	4,94	5,15	6.941	7.042	60,82	61,65
Mandailing Natal	62,24	62,51	13,15	13,17	8,11	8,36	9.653	9.900	65,83	66,52
Tapanuli Selatan	64,55	64,82	13,10	13,12	8,70	8,97	11.209	11.410	69,10	69,75
Tapanuli Tengah	66,82	67,08	12,66	12,79	8,29	8,48	10.067	10.175	68,27	68,86
Tapanuli Utara	68,11	68,46	13,66	13,68	9,65	9,71	11.607	11.791	72,91	73,33
Toba Samosir	69,59	69,93	13,26	13,28	10,34	10,36	12.095	12.375	74,48	74,92
Labuhan Batu	69,60	69,86	12,60	12,67	9,04	9,23	11.053	11.193	71,39	71,94
Asahan	67,79	68,11	12,56	12,59	8,47	8,49	10.735	10.983	69,49	69,92
Simalungun	70,75	71,07	12,75	12,77	9,18	9,36	11.311	11.422	72,49	72,98
Dairi	68,41	68,79	13,07	13,09	9,15	9,34	10.492	10.602	70,89	71,42
Karo	70,97	71,27	12,73	12,75	9,55	9,62	12.367	12.474	73,91	74,25
Deli Serdang	71,31	71,61	13,32	13,34	9,92	10,08	12.132	12.317	74,92	75,43
Langkat	68,22	68,59	12,75	12,81	8,52	8,64	11.088	11.208	70,27	70,76
Nias Selatan	68,24	68,58	12,20	12,22	5,20	5,53	6.941	7.105	60,75	61,59
Humbang Hasundutan	68,69	69,06	13,25	13,27	9,28	9,53	7.630	7.902	67,96	68,83
Pakpak Bharat	65,27	65,59	13,83	13,85	8,48	8,73	8.099	8.402	66,63	67,47
Samosir	70,87	71,16	13,44	13,46	9,14	9,15	8.348	8.654	69,99	70,55
Serdang Bedagai	68,08	68,46	12,57	12,59	8,51	8,53	10.737	11.061	69,69	70,21
Batu Bara	66,38	66,75	12,52	12,62	7,84	8,02	10.385	10.575	67,67	68,35
Padang Lawas Utara	66,77	67,06	12,42	12,47	9,06	9,10	9.912	10.194	68,77	69,29
Padang Lawas	66,69	66,98	13,00	13,02	8,67	8,69	8.772	9.100	67,59	68,16
Labuhan Batu Selatan	68,39	68,64	12,97	12,99	8,71	8,74	11.280	11.553	70,98	71,39

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Labuhan Batu Utara	69,09	69,37	12,80	12,82	8,35	8,36	11.730	11.957	71,08	71,43
Nias Utara	68,98	69,29	12,58	12,78	6,09	6,25	6.041	6.245	61,08	61,98
Nias Barat	68,50	68,82	12,66	12,71	6,00	6,14	5.817	6.009	60,42	61,14
Kota Sibolga	68,36	68,77	13,13	13,15	9,91	10,18	11.405	11.656	72,65	73,41
Kota Tanjung Balai	62,60	63,02	12,47	12,49	9,24	9,26	11.102	11.383	68,00	68,51
Kota Pematang Siantar	72,93	73,33	14,02	14,21	11,08	11,15	12.290	12.571	77,88	78,57
Kota Tebing Tinggi	70,47	70,76	12,68	12,71	10,24	10,28	12.434	12.895	74,50	75,08
Kota Medan	72,64	72,98	14,72	14,73	11,37	11,38	14.845	15.033	80,65	80,97
Kota Binjai	71,95	72,25	13,59	13,61	10,75	10,77	10.750	11.260	75,21	75,89
Kota Padangsidimpuan	68,73	69,15	14,51	14,53	10,63	10,70	10.795	11.181	74,38	75,06
Kota Gunungsitoli	70,67	71,02	13,71	13,73	8,41	8,58	7.639	8.058	68,33	69,30
SUMATERA BARAT	69,01	69,31	13,95	14,01	8,76	8,92	10.638	10.925	71,73	72,39
Kepulauan Mentawai	64,49	64,68	12,39	12,76	6,95	7,08	6.211	6.429	60,28	61,26
Pesisir Selatan	70,45	70,73	13,30	13,31	8,14	8,25	9.089	9.444	69,40	70,08
Solok	67,95	68,34	13,02	13,03	7,84	7,85	10.035	10.309	68,60	69,08
Sijunjung	65,69	66,02	12,35	12,36	7,77	8,10	10.277	10.395	66,97	67,66
Tanah Datar	69,38	69,73	13,88	14,32	8,44	8,45	10.417	10.709	71,25	72,14
Padang Pariaman	68,23	68,58	13,57	13,62	7,50	7,86	10.919	11.158	69,71	70,59
Agam	71,83	72,17	13,85	13,86	8,69	8,85	9.489	9.780	71,70	72,37
Lima Puluh Kota	69,47	69,70	13,27	13,28	7,97	7,98	9.500	9.842	69,17	69,67
Pasaman	66,82	67,18	12,78	12,79	7,66	7,86	8.238	8.599	65,60	66,46
Solok Selatan	67,21	67,58	12,69	12,70	8,15	8,16	10.199	10.505	68,45	68,94
Dharmasraya	70,73	71,10	12,41	12,42	8,25	8,46	11.189	11.431	70,86	71,52

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pasaman Barat	67,37	67,67	13,22	13,40	7,86	8,06	8.979	9.180	67,43	68,21
Kota Padang	73,35	73,57	16,50	16,51	11,33	11,34	14.312	14.728	82,25	82,68
Kota Solok	73,14	73,45	14,30	14,31	11,01	11,02	11.968	12.337	77,89	78,38
Kota Sawah Lunto	69,59	69,87	13,15	13,16	9,94	9,97	9.765	10.238	71,72	72,39
Kota Padang Panjang	72,58	72,77	15,04	15,05	11,44	11,45	10.440	11.013	77,30	78,00
Kota Bukittinggi	73,91	74,22	14,95	14,96	11,31	11,32	13.035	13.586	80,11	80,71
Kota Payakumbuh	73,33	73,61	14,24	14,25	10,46	10,72	13.114	13.464	78,23	78,95
Kota Pariaman	69,87	70,15	14,52	14,53	10,36	10,37	12.611	12.958	76,26	76,70
RIAU	71,19	71,48	13,11	13,14	8,92	9,03	10.968	11.255	72,44	73,00
Kuantan Singingi	68,17	68,44	13,27	13,32	8,31	8,58	10.476	10.820	69,96	70,78
Indragiri Hulu	69,97	70,20	12,32	12,35	8,16	8,17	10.481	10.738	69,66	70,05
Indragiri Hilir	67,32	67,66	11,89	11,90	7,19	7,22	10.254	10.382	66,51	66,84
Pelalawan	70,74	71,03	12,16	12,17	8,44	8,49	11.894	12.149	71,44	71,85
Siak	70,79	71,03	12,73	12,75	9,64	9,65	12.119	12.347	73,73	74,07
Kampar	70,35	70,64	13,21	13,45	9,10	9,25	11.128	11.232	72,50	73,15
Rokan Hulu	69,55	69,89	12,82	12,83	8,37	8,38	9.608	9.979	69,36	69,93
Bengkalis	70,85	71,11	12,83	12,86	9,21	9,41	11.640	11.753	72,94	73,44
Rokan Hilir	69,87	70,17	12,63	12,67	8,15	8,24	9.316	9.672	68,73	69,40
Kepulauan Meranti	67,21	67,53	12,78	12,81	7,48	7,51	7.978	8.358	65,23	65,93
Kota Pekanbaru	71,94	72,22	15,34	15,37	11,22	11,43	14.778	15.206	80,66	81,35
Kota Dumai	70,55	70,82	12,98	13,10	9,84	9,85	12.063	12.453	74,06	74,64
JAMBI	70,89	71,06	12,90	12,93	8,23	8,45	10.357	10.592	70,65	71,26
Kerinci	69,65	69,82	13,85	13,86	8,20	8,21	9.951	10.198	70,59	70,95
Merangin	71,04	71,18	11,97	11,98	7,67	7,68	10.133	10.312	68,81	69,07

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sarolangun	68,94	69,09	12,25	12,26	7,63	7,76	11.609	11.679	69,41	69,72
Batang Hari	70,26	70,44	12,90	12,91	7,82	7,85	9.833	10.038	69,33	69,67
Muaro Jambi	71,02	71,18	12,81	12,82	8,09	8,33	8.456	8.697	68,34	69,01
Tanjung Jabung Timur	65,86	66,08	11,85	12,01	6,34	6,35	8.904	9.192	63,32	63,92
Tanjung Jabung Barat	67,87	68,03	12,60	12,61	7,56	7,70	9.395	9.539	67,13	67,54
Tebo	69,77	69,91	12,38	12,39	7,56	7,57	10.273	10.555	68,67	69,02
Bungo	67,42	67,61	12,60	12,61	8,09	8,15	11.352	11.662	69,42	69,86
Kota Jambi	72,43	72,57	14,62	14,90	10,67	10,91	11.912	12.205	77,41	78,26
Kota Sungai Penuh	71,84	72,01	14,77	14,78	9,84	10,08	10.186	10.510	74,67	75,36
SUMATERA SELATAN	69,41	69,65	12,36	12,39	8,00	8,18	10.652	10.937	69,39	70,02
Ogan Komering Ulu	67,83	68,01	12,57	12,59	8,68	8,69	9.940	10.261	69,01	69,45
Ogan Komering Ilir	68,22	68,41	11,40	11,41	7,02	7,03	10.706	11.032	66,57	66,96
Muara Enim	68,38	68,63	11,95	11,96	7,60	7,78	11.012	11.285	68,28	68,88
Lahat	65,50	65,76	12,32	12,33	8,44	8,45	9.600	10.071	66,99	67,62
Musi Rawas	67,59	67,86	11,99	12,07	7,28	7,51	9.562	9.795	66,18	66,92
Musi Banyuasin	68,33	68,54	11,98	11,99	7,60	7,61	10.212	10.364	67,57	67,83
Banyu Asin	68,55	68,76	11,73	11,74	7,17	7,19	9.760	10.135	66,40	66,90
Ogan Komering Ulu Selatan	66,49	66,76	11,73	11,74	7,82	7,83	8.445	8.830	64,84	65,43
Ogan Komering Ulu Timur	68,65	68,87	12,04	12,22	7,27	7,54	11.612	11.753	68,58	69,34
Ogan Ilir	64,96	65,21	12,28	12,29	7,58	7,85	10.412	10.777	66,43	67,22
Empat Lawang	64,56	64,81	12,04	12,05	7,38	7,39	9.450	9.594	64,81	65,10

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penukal Abab Lematang Ilir	67,88	68,07	11,70	11,90	6,58	6,75	8.136	8.400	63,49	64,33
Musi Rawas Utara	65,21	65,43	11,55	11,56	6,45	6,50	9.795	10.223	63,75	64,32
Kota Palembang	70,32	70,54	14,39	14,40	10,37	10,52	14.697	15.087	77,89	78,44
Kota Prabumulih	69,88	70,09	12,89	12,90	9,71	9,72	12.765	3.072	74,04	74,40
Kota Pagar Alam	66,14	66,41	12,83	12,84	9,08	9,14	8.758	9.291	67,62	68,44
Kota Lubuklinggau	68,83	69,04	13,31	13,36	9,51	9,81	13.288	13.586	74,09	74,81
BENGKULU	68,84	69,21	13,58	13,59	8,61	8,73	10.162	10.409	70,64	71,21
Bengkulu Selatan	67,45	67,79	13,59	13,60	9,01	9,02	9.592	9.813	69,85	70,27
Rejang Lebong	67,95	68,37	13,55	13,68	8,05	8,26	10.045	10.162	69,40	70,10
Bengkulu Utara	67,67	68,04	12,84	12,86	7,85	7,86	10.098	10.336	68,36	68,80
Kaur	66,15	66,50	12,96	12,98	8,24	8,25	8.284	8.594	66,20	66,78
Seluma	67,14	67,56	13,26	13,27	7,90	7,91	7.844	8.209	65,99	66,69
Mukomuko	66,16	66,51	12,71	12,72	7,88	7,99	10.036	10.381	67,47	68,12
Lebong	62,73	63,12	12,30	12,56	7,89	7,90	11.071	11.177	66,28	66,84
Kepahiang	67,39	67,78	12,68	12,89	7,92	7,93	9.135	9.243	67,14	67,67
Bengkulu Tengah	67,82	68,12	12,97	13,02	7,14	7,22	9.102	9.435	66,65	67,30
Kota Bengkulu	69,72	70,04	16,00	16,01	11,58	11,78	13.633	14.030	79,67	80,35
LAMPUNG	70,18	70,51	12,61	12,63	7,82	7,92	9.858	10.114	69,02	69,57
Lampung Barat	67,09	67,43	12,19	12,24	7,60	7,85	9.741	9.970	66,74	67,50
Tanggamus	68,04	68,40	12,15	12,17	6,96	7,21	9.107	9.294	65,67	66,37
Lampung Selatan	68,87	69,20	12,17	12,33	7,67	7,68	9.781	9.978	67,68	68,22
Lampung Timur	70,31	70,61	12,83	12,84	7,57	7,59	9.908	10.028	69,04	69,34
Lampung Tengah	69,46	69,75	12,90	12,91	7,51	7,57	11.052	11.154	69,73	70,04
Lampung Utara	68,71	69,05	12,44	12,47	8,19	8,20	8.559	8.779	67,17	67,63

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Way Kanan	68,95	69,27	12,33	12,35	7,35	7,39	8.979	9.292	66,63	67,19
Tulangbawang	69,59	69,88	11,73	11,88	7,22	7,23	10.553	10.797	67,70	68,23
Pesawaran	68,53	68,88	12,28	12,29	7,47	7,60	7.724	8.059	64,97	65,75
Pringsewu	69,44	69,85	12,78	12,82	8,01	8,19	10.190	10.289	69,42	69,97
Mesuji	67,71	68,04	11,61	11,62	6,60	6,61	7.774	8.144	62,88	63,52
Tulang Bawang Barat	69,56	69,88	11,99	12,04	7,10	7,13	8.205	8.532	65,30	65,93
Pesisir Barat	62,85	63,27	11,97	11,98	7,59	7,82	8.355	8.652	62,96	63,79
Kota Bandar Lampung	71,01	71,28	14,23	14,53	10,90	10,92	11.952	12.255	76,63	77,33
Kota Metro	71,29	71,55	14,29	14,34	10,61	10,64	11.636	12.017	76,22	76,77
KEP. BANGKA BELITUNG	70,18	70,50	11,87	11,94	7,84	7,98	12.666	12.959	70,67	71,30
Bangka	70,73	70,99	12,68	12,76	8,20	8,23	12.043	12.480	71,80	72,39
Belitung	70,64	70,94	11,83	11,84	8,15	8,41	13.281	13.662	71,70	72,46
Bangka Barat	69,73	69,99	11,51	11,52	7,18	7,21	12.011	12.275	68,68	69,05
Bangka Tengah	70,78	71,16	11,75	11,76	6,80	7,13	12.836	13.070	69,52	70,33
Bangka Selatan	67,47	67,90	11,35	11,36	6,36	6,42	11.573	11.910	65,98	66,54
Belitung Timur	71,59	71,90	11,49	11,51	8,14	8,15	11.302	11.831	70,22	70,84
Kota Pangkal Pinang	72,86	73,17	12,83	12,99	9,78	9,80	15.560	15.883	77,43	77,97
KEPULAUAN RIAU	69,64	69,80	12,82	12,83	9,81	9,99	13.976	14.466	74,84	75,48
Karimun	70,52	70,71	12,16	12,30	7,81	7,92	11.945	12.136	70,56	71,10
Bintan	70,21	70,30	12,75	12,95	8,35	8,36	14.256	14.730	73,41	73,98
Natuna	64,57	64,81	13,88	13,89	8,71	8,72	14.217	14.821	72,10	72,63
Lingga	61,44	61,75	12,43	12,44	6,27	6,51	11.499	12.091	64,06	64,98
Kepulauan Anambas	66,91	67,06	12,32	12,75	6,70	6,91	11.894	12.065	67,53	68,48

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Batam	73,24	73,29	12,95	13,15	11,12	11,13	17.560	18.146	80,54	81,09
Kota Tanjung Pinang	71,93	72,02	14,08	14,09	9,98	9,99	15.292	15.838	78,33	78,73
DKI JAKARTA	72,67	72,79	12,95	12,97	11,05	11,06	18.128	18.527	80,47	80,76
Kep. Seribu	68,27	68,51	12,48	12,56	8,46	8,47	12.264	12.623	70,91	71,40
Kota Jakarta Selatan	73,93	74,03	13,31	13,32	11,57	11,62	23.363	23.851	84,44	84,75
Kota Jakarta Timur	74,27	74,37	13,43	13,82	11,64	11,65	17.339	17.662	82,06	82,69
Kota Jakarta Pusat	73,92	74,02	13,23	13,24	11,24	11,25	16.994	17.285	81,01	81,24
Kota Jakarta Barat	73,45	73,54	12,78	12,79	10,38	10,40	20.298	20.875	80,88	81,21
Kota Jakarta Utara	73,08	73,18	12,61	12,62	10,69	10,70	18.121	18.566	79,87	80,17
JAWA BARAT	72,66	72,85	12,45	12,48	8,15	8,37	10.790	11.152	71,30	72,03
Bogor	70,86	71,01	12,44	12,47	7,88	8,29	10.323	10.683	69,69	70,65
Sukabumi	70,49	70,73	12,20	12,22	6,80	7,02	8.618	8.973	66,05	66,87
Cianjur	69,70	69,91	11,90	11,98	6,93	6,97	7.874	8.290	64,62	65,38
Bandung	73,26	73,40	12,64	12,68	8,58	8,79	10.203	10.502	71,75	72,41
Garut	71,03	71,22	11,80	11,82	7,50	7,51	7.597	8.099	65,42	66,22
Tasikmalaya	68,96	69,21	12,48	12,52	7,13	7,17	7.761	8.092	65,00	65,64
Ciamis	71,32	71,57	13,67	13,79	7,60	7,69	9.190	9.557	69,63	70,39
Kuningan	73,11	73,35	12,07	12,10	7,36	7,38	9.297	9.673	68,55	69,12
Cirebon	71,66	71,82	12,22	12,24	6,62	6,71	10.212	10.670	68,05	68,69
Majalengka	69,68	69,97	12,19	12,21	6,91	7,09	9.416	9.822	66,72	67,52
Sumedang	72,14	72,29	12,94	12,96	8,17	8,27	10.153	10.406	70,99	71,46
Indramayu	71,11	71,37	12,22	12,24	5,98	5,99	9.633	10.090	66,36	66,97
Subang	71,92	72,13	11,68	11,69	6,84	6,85	10.715	11.012	68,31	68,69
Purwakarta	70,61	70,80	12,09	12,10	7,75	7,92	11.372	11.819	69,98	70,67
Karawang	71,81	71,98	12,07	12,08	7,35	7,65	11.277	11.856	69,89	70,86

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bekasi	73,43	73,56	13,05	13,08	8,84	8,84	11.155	11.610	73,49	73,99
Bandung Barat	72,03	72,18	11,83	11,86	7,97	8,18	8.329	8.684	67,46	68,27
Pangandaran	70,84	71,12	12,04	12,06	7,58	7,67	8.968	9.423	67,44	68,21
Kota Bogor	73,21	73,41	13,38	13,40	10,30	10,32	11.348	11.825	75,66	76,23
Kota Sukabumi	72,11	72,26	13,40	13,46	9,53	9,58	10.609	11.204	73,55	74,31
Kota Bandung	74,00	74,14	14,18	14,19	10,63	10,74	16.630	17.254	81,06	81,62
Kota Cirebon	71,99	72,13	13,09	13,11	9,89	9,90	11.397	11.930	74,35	74,92
Kota Bekasi	74,76	74,89	13,76	13,99	11,09	11,10	15.755	16.157	81,04	81,59
Kota Depok	74,17	74,31	13,90	13,91	10,85	11,00	15.262	15.696	80,29	80,82
Kota Cimahi	73,75	73,89	13,77	13,79	10,94	10,95	11.921	12.448	77,56	78,11
Kota Tasikmalaya	71,70	71,93	13,42	13,44	9,04	9,13	9.855	10.414	72,03	72,84
Kota Banjar	70,59	70,79	13,20	13,22	8,60	8,62	10.329	10.705	71,25	71,75
JAWA TENGAH	74,18	74,23	12,63	12,68	7,35	7,53	10.777	11.102	71,12	71,73
Cilacap	73,39	73,52	12,48	12,49	6,92	6,93	10.274	10.639	69,56	69,98
Banyumas	73,45	73,55	12,64	12,82	7,41	7,42	11.240	11.703	71,30	71,96
Purbalingga	72,98	73,02	11,95	11,98	7,00	7,14	9.786	10.131	68,41	68,99
Banjarnegara	73,91	74,01	11,42	11,45	6,28	6,50	9.160	9.547	66,54	67,34
Kebumen	73,11	73,22	12,91	13,04	7,34	7,53	8.757	9.066	68,80	69,60
Purworejo	74,40	74,52	13,48	13,49	7,70	7,91	10.048	10.342	71,87	72,50
Wonosobo	71,46	71,60	11,69	11,74	6,75	6,76	10.503	10.871	67,81	68,27
Magelang	73,47	73,56	12,48	12,53	7,57	7,77	9.025	9.387	69,11	69,87
Boyolali	75,79	75,83	12,16	12,43	7,55	7,56	12.758	13.079	73,22	73,80
Klaten	76,67	76,68	13,13	13,24	8,24	8,31	11.738	12.074	74,79	75,29
Sukoharjo	77,54	77,55	13,81	13,82	8,84	9,10	11.100	11.557	76,07	76,84
Wonogiri	76,05	76,07	12,45	12,48	6,88	7,04	9.117	9.426	69,37	69,98

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Karanganyar	77,36	77,38	13,66	13,67	8,51	8,52	11.223	11.569	75,54	75,89
Sragen	75,60	75,62	12,65	12,69	7,22	7,34	12.391	12.720	72,96	73,43
Grobogan	74,55	74,61	12,28	12,29	6,67	6,86	10.097	10.350	69,32	69,86
Blora	74,12	74,23	12,14	12,19	6,46	6,58	9.385	9.795	67,95	68,65
Rembang	74,39	74,43	12,05	12,10	6,95	7,15	10.191	10.551	69,46	70,15
Pati	75,93	76,04	12,30	12,41	7,18	7,19	10.190	10.660	70,71	71,35
Kudus	76,47	76,50	13,21	13,22	8,62	8,63	10.979	11.318	74,58	74,94
Jepara	75,71	75,74	12,71	12,74	7,43	7,44	10.169	10.609	71,38	71,88
Demak	75,29	75,31	12,86	13,01	7,48	7,55	10.001	10.344	71,26	71,87
Semarang	75,62	75,63	12,85	12,94	7,88	8,01	11.807	12.116	73,61	74,14
Temanggung	75,47	75,48	12,08	12,13	6,94	7,15	9.142	9.489	68,83	69,56
Kendal	74,30	74,33	12,70	12,80	7,05	7,25	11.257	11.597	71,28	71,97
Batang	74,56	74,59	11,88	12,00	6,62	6,63	9.203	9.573	67,86	68,42
Pekalongan	73,53	73,57	12,17	12,40	6,74	6,88	10.221	10.508	68,97	69,71
Pemalang	73,11	73,22	11,91	11,94	6,32	6,41	8.186	8.546	65,67	66,32
Tegal	71,28	71,40	12,34	12,58	6,70	6,86	9.433	9.798	67,33	68,24
Brebes	68,84	69,04	12,02	12,03	6,19	6,20	9.890	10.238	65,68	66,12
Kota Magelang	76,72	76,75	13,80	13,81	10,31	10,33	11.994	12.514	78,31	78,80
Kota Surakarta	77,11	77,12	14,52	14,55	10,53	10,54	14.528	15.049	81,46	81,86
Kota Salatiga	77,11	77,22	15,00	15,34	10,40	10,41	15.464	15.944	82,41	83,12
Kota Semarang	77,23	77,25	15,50	15,51	10,51	10,52	14.895	15.550	82,72	83,19
Kota Pekalongan	74,25	74,28	12,79	12,83	8,57	8,71	12.312	12.680	74,24	74,77
Kota Tegal	74,30	74,34	12,90	13,04	8,30	8,31	12.830	13.250	74,44	74,93
D I YOGYAKARTA	74,82	74,92	15,56	15,58	9,32	9,38	13.946	14.394	79,53	79,99
Kulon Progo	75,12	75,20	14,24	14,25	8,65	8,66	9.698	10.275	73,76	74,44

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bantul	73,66	73,77	15,03	15,15	9,35	9,54	15.386	15.636	79,45	80,01
Gunung Kidul	73,92	74,03	12,95	12,96	7,00	7,13	9.163	9.612	69,24	69,96
Sleman	74,69	74,77	16,71	16,72	10,66	10,67	15.844	16.434	83,42	83,85
Kota Yogyakarta	74,45	74,56	17,05	17,28	11,44	11,45	18.629	19.125	86,11	86,65
JAWA TIMUR	70,97	71,18	13,10	13,16	7,39	7,59	11.380	11.739	70,77	71,50
Pacitan	71,52	71,77	12,61	12,62	7,19	7,28	8.527	9.033	67,33	68,16
Ponorogo	72,43	72,65	13,71	13,72	7,17	7,21	9.426	9.883	69,91	70,56
Trenggalek	73,35	73,59	12,12	12,25	7,27	7,28	9.400	9.865	68,71	69,46
Tulungagung	73,74	73,95	13,05	13,15	8,06	8,07	10.455	10.891	71,99	72,62
Blitar	73,16	73,39	12,44	12,45	7,27	7,29	10.327	10.861	69,93	70,57
Kediri	72,37	72,54	12,87	12,88	7,68	8,01	10.853	11.146	71,07	71,85
Malang	72,26	72,45	12,87	13,17	7,18	7,27	9.844	10.270	69,40	70,35
Lumajang	69,70	69,94	11,79	11,80	6,21	6,22	8.931	9.274	64,83	65,33
Jember	68,74	68,99	13,21	13,22	6,07	6,18	9.090	9.525	65,96	66,69
Banyuwangi	70,34	70,54	12,69	12,78	7,12	7,13	11.828	12.264	70,06	70,60
Bondowoso	66,27	66,55	12,95	13,27	5,62	5,71	10.429	10.665	65,27	66,09
Situbondo	68,73	68,97	13,01	13,14	6,11	6,12	9.692	10.097	66,42	67,09
Probolinggo	66,71	67,00	12,07	12,34	5,71	5,77	10.700	10.972	64,85	65,60
Pasuruan	70,01	70,17	12,30	12,31	6,83	7,11	9.933	10.381	67,41	68,29
Sidoarjo	73,82	73,98	14,75	14,91	10,24	10,25	14.168	14.609	79,50	80,05
Mojokerto	72,24	72,43	12,53	12,61	8,18	8,49	12.454	12.860	72,64	73,53
Jombang	72,04	72,27	12,99	13,00	8,21	8,53	10.999	11.533	71,86	72,85
Nganjuk	71,25	71,44	12,84	12,85	7,61	7,63	11.768	12.200	71,23	71,71
Madiun	70,97	71,22	13,13	13,14	7,57	7,80	11.351	11.650	71,01	71,69
Magetan	72,30	72,49	13,73	14,00	7,95	7,96	11.539	11.779	72,91	73,49

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ngawi	71,92	72,16	12,68	12,69	6,88	6,98	11.187	11.468	69,91	70,41
Bojonegoro	71,07	71,36	12,35	12,36	6,77	7,09	9.926	10.265	67,85	68,75
Tuban	71,01	71,26	12,19	12,20	6,52	6,81	10.048	10.499	67,43	68,37
Lamongan	72,04	72,27	13,46	13,47	7,83	7,89	11.108	11.572	71,97	72,57
Gresik	72,46	72,61	13,71	13,72	8,96	9,29	12.845	13.295	75,28	76,10
Bangkalan	69,94	70,11	11,58	11,59	5,33	5,66	8.393	8.718	62,87	63,79
Sampang	67,79	67,96	11,76	12,08	4,36	4,55	8.569	8.760	61,00	61,94
Pamekasan	67,22	67,45	13,62	13,63	6,35	6,40	8.536	8.834	65,41	65,94
Sumenep	70,94	71,22	13,07	13,19	5,23	5,46	8.722	9.082	65,25	66,22
Kota Kediri	73,80	73,96	14,96	14,97	9,91	9,92	11.976	12.440	77,58	78,08
Kota Blitar	73,36	73,60	14,02	14,31	9,90	10,10	13.391	13.851	77,58	78,56
Kota Malang	72,93	73,15	15,40	15,41	10,16	10,17	16.158	16.666	80,89	81,32
Kota Probolinggo	70,00	70,19	13,56	13,57	8,49	8,69	11.796	12.280	72,53	73,27
Kota Pasuruan	71,18	71,40	13,59	13,60	9,10	9,11	12.931	13.393	74,78	75,25
Kota Mojokerto	73,01	73,21	13,82	13,83	9,99	10,24	13.155	13.710	77,14	77,96
Kota Madiun	72,59	72,75	14,21	14,39	11,11	11,13	15.616	16.040	80,33	80,88
Kota Surabaya	73,98	74,13	14,78	14,79	10,46	10,47	17.157	17.854	81,74	82,22
Kota Batu	72,37	72,54	14,04	14,12	8,77	9,06	12.466	12.870	75,04	75,88
BANTEN	69,64	69,84	12,85	12,88	8,62	8,74	11.994	12.267	71,95	72,44
Pandeglang	64,24	64,49	13,42	13,46	6,72	6,96	8.613	8.719	64,34	64,91
Lebak	66,79	67,04	11,93	11,96	6,21	6,31	8.634	8.850	63,37	63,88
Tangerang	69,61	69,79	12,80	12,81	8,27	8,28	12.179	12.476	71,59	71,93
Serang	64,22	64,47	12,39	12,43	7,18	7,33	10.693	10.802	65,93	66,38
Kota Tangerang	71,45	71,57	13,83	13,84	10,51	10,65	14.443	14.860	77,92	78,43
Kota Cilegon	66,43	66,60	13,13	13,15	9,73	9,74	12.900	13.230	72,65	73,01

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Serang	67,58	67,83	12,65	12,77	8,62	8,67	13.261	13.418	71,68	72,10
Kota Tangerang Selatan	72,26	72,41	14,42	14,43	11,78	11,80	15.672	15.988	81,17	81,48
BALI	71,68	71,99	13,23	13,27	8,65	8,84	13.886	14.146	74,77	75,38
Jembrana	71,91	72,21	12,61	12,63	7,95	8,22	11.666	11.902	71,65	72,35
Tabanan	73,23	73,53	12,96	12,99	8,64	8,87	14.245	14.608	75,45	76,16
Badung	74,71	74,99	13,95	13,97	10,06	10,38	17.325	17.628	80,87	81,59
Gianyar	73,26	73,56	13,71	13,80	8,92	8,94	14.376	14.623	76,71	77,14
Klungkung	70,70	71,06	12,95	12,98	7,75	8,12	11.318	11.484	70,90	71,71
Bangli	70,05	70,37	12,31	12,33	7,13	7,16	11.160	11.369	68,96	69,35
Karangasem	70,05	70,35	12,39	12,40	5,97	6,31	10.050	10.302	66,49	67,34
Buleleng	71,36	71,68	12,89	12,91	7,04	7,08	13.235	13.780	71,70	72,30
Kota Denpasar	74,38	74,68	13,98	13,99	11,16	11,23	19.698	19.992	83,30	83,68
NUSA TENGGARA BARAT	65,87	66,28	13,47	13,48	7,03	7,27	10.284	10.640	67,30	68,14
Lombok Barat	66,16	66,64	13,36	13,48	6,16	6,37	11.367	11.647	67,18	68,03
Lombok Tengah	65,59	65,99	13,47	13,50	5,96	6,27	9.796	10.196	65,36	66,36
Lombok Timur	65,33	65,74	13,50	13,51	6,45	6,69	9.268	9.639	65,35	66,23
Sumbawa	66,90	67,31	12,90	12,97	7,72	7,91	9.028	9.336	66,77	67,60
Dompu	66,20	66,60	13,30	13,31	8,12	8,40	8.743	9.027	66,97	67,83
Bima	65,71	66,11	13,27	13,28	7,59	7,77	8.354	8.631	65,62	66,37
Sumbawa Barat	67,34	67,80	13,60	13,61	8,24	8,53	11.496	11.766	70,71	71,52
Lombok Utara	66,50	66,92	12,70	12,71	5,81	5,84	8.888	9.279	63,83	64,49
Kota Mataram	71,24	71,59	15,52	15,58	9,43	9,45	14.797	15.426	78,43	79,10
Kota Bima	69,84	70,20	14,98	14,99	10,30	10,38	10.825	11.334	75,04	75,80

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NUSA TENGGARA TIMUR	66,38	66,85	13,10	13,15	7,30	7,55	7.566	7.769	64,39	65,23
Sumba Barat	66,58	66,98	12,88	12,89	6,52	6,53	7.275	7.586	62,91	63,56
Sumba Timur	64,45	64,94	12,80	12,81	6,74	6,86	9.351	9.640	64,65	65,34
Kupang	63,86	64,39	13,83	13,84	7,11	7,37	7.472	7.698	63,55	64,43
Timor Tengah Selatan	65,91	66,32	12,55	12,56	6,47	6,72	6.855	6.955	61,58	62,23
Timor Tengah Utara	66,45	66,86	13,29	13,30	7,26	7,51	6.357	6.479	62,65	63,34
Belu	63,81	64,35	12,25	12,26	7,08	7,11	7.403	7.677	61,86	62,54
Alor	60,80	61,29	12,09	12,11	7,81	8,09	6.750	6.958	60,14	61,03
Lembata	66,57	66,97	12,26	12,40	7,95	8,21	7.253	7.474	63,96	64,91
Flores Timur	64,70	65,10	12,89	12,90	7,42	7,70	7.573	7.770	63,55	64,34
Sikka	66,61	67,07	12,70	12,87	6,69	6,71	7.958	8.313	63,89	64,75
Ende	64,75	65,17	13,76	13,77	7,79	7,80	8.995	9.315	66,62	67,20
Ngada	67,59	67,96	12,68	12,69	8,07	8,37	8.857	8.961	67,10	67,76
Manggarai	66,23	66,77	12,71	13,14	7,26	7,27	7.175	7.276	63,32	64,15
Rote Ndao	63,80	64,34	13,16	13,17	7,24	7,29	6.484	6.720	61,51	62,22
Manggarai Barat	66,58	67,12	11,55	11,96	7,18	7,19	7.426	7.602	62,58	63,50
Sumba Tengah	67,96	68,32	12,32	12,66	5,76	5,96	6.093	6.198	60,07	61,01
Sumba Barat Daya	68,02	68,43	13,04	13,05	6,32	6,33	6.298	6.594	61,89	62,60
Nagekeo	66,62	67,03	12,46	12,47	7,82	7,83	8.219	8.469	65,35	65,88
Manggarai Timur	67,62	67,98	11,34	11,69	6,65	6,87	5.809	5.919	59,49	60,47
Sabu Raijua	59,53	60,23	13,12	13,13	6,06	6,33	5.245	5.354	55,79	56,66
Malaka	64,52	64,89	12,76	12,77	6,60	6,86	5.894	5.998	59,66	60,34
Kota Kupang	68,90	69,37	16,08	16,24	11,46	11,47	13.199	13.592	78,84	79,55

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KALIMANTAN BARAT	70,18	70,56	12,55	12,58	7,12	7,31	8.860	9.055	66,98	67,65
Sambas	68,50	68,83	12,52	12,60	6,68	6,70	9.774	9.924	66,61	67,02
Bengkayang	73,28	73,67	12,01	12,08	6,27	6,53	9.072	9.182	66,85	67,57
Landak	72,34	72,70	12,37	12,39	7,09	7,10	7.183	7.403	65,45	65,96
Mempawah	70,54	70,90	12,31	12,33	6,63	6,82	7.779	7.913	64,90	65,50
Sanggau	71,05	71,35	11,54	11,56	6,94	6,95	8.126	8.410	65,15	65,67
Ketapang	70,69	71,01	11,77	11,79	7,04	7,26	8.988	9.259	66,41	67,16
Sintang	71,29	71,62	11,98	12,02	6,73	6,89	8.624	8.823	66,07	66,70
Kapuas Hulu	72,12	72,44	12,03	12,04	7,25	7,47	7.074	7.206	65,03	65,65
Sekadau	71,24	71,65	11,56	11,57	6,58	6,60	7.326	7.640	63,69	64,34
Melawi	72,56	72,88	11,13	11,15	6,66	6,67	8.202	8.465	65,05	65,54
Kayong Utara	67,71	68,11	11,79	11,81	5,86	6,00	7.552	7.905	61,82	62,66
Kubu Raya	70,04	70,43	13,59	13,64	6,81	6,82	8.532	8.773	67,23	67,76
Kota Pontianak	72,41	72,80	14,81	14,99	9,90	10,14	14.322	14.515	78,56	79,35
Kota Singkawang	71,41	71,85	12,87	12,89	7,57	7,72	11.514	11.789	71,08	71,72
KALIMANTAN TENGAH	69,64	69,69	12,55	12,57	8,37	8,51	10.931	11.236	70,42	70,91
Kotawaringin Barat	70,43	70,51	12,70	12,71	8,36	8,41	12.788	13.175	72,46	72,85
Kotawaringin Timur	69,75	69,80	12,68	12,69	7,90	8,12	11.556	11.905	70,56	71,16
Kapuas	68,64	68,69	12,54	12,90	7,51	7,52	10.738	11.063	68,68	69,38
Barito Selatan	66,89	66,99	12,53	12,54	8,69	8,71	11.242	11.582	69,73	70,10
Barito Utara	71,28	71,29	12,40	12,48	8,59	8,60	9.357	10.010	69,72	70,52
Sukamara	71,45	71,49	12,10	12,11	7,84	7,91	8.482	8.738	67,52	67,95
Lamandau	69,31	69,34	12,46	12,47	7,95	8,38	10.996	11.278	69,70	70,51

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Seruyan	69,24	69,25	11,97	11,98	7,76	7,93	9.110	9.385	67,04	67,57
Katingan	65,62	65,70	12,21	12,51	8,65	8,66	10.327	10.639	67,91	68,55
Pulang Pisau	67,92	67,98	12,39	12,40	7,70	8,08	9.807	10.104	67,54	68,34
Gunung Mas	70,24	70,32	11,76	11,77	8,97	9,03	10.504	10.822	70,23	70,65
Barito Timur	68,06	68,14	12,81	12,82	9,05	9,20	11.000	11.333	70,82	71,34
Murung Raya	69,43	69,47	11,73	11,74	7,45	7,46	10.164	10.471	67,56	67,89
Kota Palangka Raya	73,16	73,19	14,93	14,94	11,42	11,51	13.677	14.091	80,34	80,77
KALIMANTAN SELATAN	68,23	68,49	12,50	12,52	8,00	8,20	12.062	12.253	70,17	70,72
Tanah Laut	69,08	69,31	11,95	11,96	7,38	7,64	11.209	11.318	68,49	69,04
Kota Baru	68,89	69,10	11,83	11,92	7,19	7,42	11.579	11.731	68,32	68,95
Banjar	66,66	66,97	11,99	12,28	7,29	7,34	12.571	12.681	68,32	68,94
Barito Kuala	65,59	65,88	12,37	12,38	7,32	7,33	9.780	9.952	65,91	66,24
Tapin	69,98	70,23	11,85	11,86	7,54	7,75	11.847	12.088	69,53	70,13
Hulu Sungai Selatan	65,59	65,82	12,07	12,10	7,72	7,74	12.535	12.835	68,41	68,80
Hulu Sungai Tengah	65,54	65,82	12,18	12,19	7,80	7,99	12.138	12.257	68,32	68,80
Hulu Sungai Utara	63,24	63,58	12,83	12,88	7,36	7,37	9.567	9.772	65,06	65,49
Tabalong	70,12	70,33	12,53	12,59	8,57	8,78	11.227	11.476	71,14	71,78
Tanah Bumbu	69,74	70,08	12,33	12,36	7,70	7,71	11.710	12.025	70,05	70,50
Balangan	67,37	67,59	12,36	12,37	7,04	7,27	11.442	11.557	67,88	68,39
Kota Banjarmasin	70,75	70,98	13,91	13,92	9,93	9,94	14.256	14.547	76,83	77,16
Kota Banjar Baru	71,67	71,87	14,79	14,80	10,93	10,94	13.590	13.949	78,83	79,22
KALIMANTAN TIMUR	73,96	74,22	13,67	13,69	9,48	9,70	11.917	12.359	75,83	76,61
Paser	72,28	72,52	12,99	13,00	8,22	8,54	10.605	10.767	71,61	72,29

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kutai Barat	72,57	72,79	12,88	12,89	8,07	8,34	9.849	10.338	70,69	71,63
Kutai Kartanegara	71,93	72,21	13,57	13,58	8,84	9,10	10.959	11.152	73,15	73,78
Kutai Timur	72,76	73,03	12,65	12,78	9,08	9,18	10.614	11.196	72,56	73,49
Berau	71,68	71,94	13,30	13,31	8,98	9,25	12.207	12.726	74,01	74,88
Penajam Paser Utara	71,05	71,30	12,54	12,55	8,03	8,16	11.492	11.750	71,13	71,64
Mahakam Ulu	71,56	71,90	12,48	12,50	7,69	7,89	7.653	8.008	66,67	67,58
Kota Balikpapan	74,18	74,41	14,12	14,13	10,65	10,67	14.557	14.791	79,81	80,11
Kota Samarinda	73,93	74,17	14,66	14,70	10,46	10,47	14.466	14.613	79,93	80,20
Kota Bontang	73,94	74,18	12,89	12,90	10,72	10,73	16.698	16.843	79,86	80,09
KALIMANTAN UTARA	72,50	72,54	12,82	12,84	8,87	8,94	8.943	9.343	70,56	71,15
Malinau	71,40	71,42	13,27	13,29	9,04	9,05	9.853	10.121	71,74	72,06
Bulungan	72,55	72,60	12,98	12,99	8,92	8,93	9.310	9.648	71,23	71,66
Tana Tidung	71,35	71,38	12,19	12,20	8,49	8,53	7.511	7.981	67,05	67,79
Nunukan	71,27	71,30	12,62	12,63	7,73	7,81	6.956	7.290	65,67	66,32
Kota Tarakan	73,88	73,92	13,70	13,73	9,94	9,96	11.153	11.509	75,69	76,09
SULAWESI UTARA	71,26	71,58	12,68	12,73	9,24	9,43	10.731	11.115	72,20	72,99
Bolaang Mongondow	68,86	69,22	11,30	11,41	7,59	7,77	10.054	10.470	66,91	67,82
Minahasa	70,67	70,98	13,96	13,97	9,56	9,58	12.319	12.720	74,97	75,47
Kepulauan Sangihe	69,60	69,96	12,04	12,31	7,90	8,04	11.397	11.663	69,67	70,53
Kepulauan Talaud	69,71	70,04	12,20	12,27	9,00	9,25	8.525	8.638	68,32	68,97
Minahasa Selatan	69,47	69,80	12,08	12,43	8,84	8,85	11.410	11.760	70,86	71,68
Minahasa Utara	71,03	71,31	12,65	12,69	9,61	9,93	11.318	11.712	73,05	73,95

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bolaang Mongondow Utara	67,21	67,54	11,88	11,90	8,11	8,12	8.992	9.366	66,32	66,91
Siau Tagulandang Biaro	70,14	70,54	11,51	11,64	8,57	8,75	8.097	8.252	66,75	67,48
Minahasa Tenggara	69,77	70,07	11,74	12,04	8,82	8,87	10.354	10.665	69,66	70,47
Bolaang Mongondow Selatan	64,19	64,45	12,23	12,28	7,73	7,80	8.743	9.229	64,49	65,28
Bolaang Mongondow Timur	67,51	67,81	11,48	11,50	7,57	7,59	8.856	9.483	65,21	66,08
Kota Manado	71,52	71,80	14,12	14,14	11,04	11,26	13.814	14.232	78,41	79,12
Kota Bitung	70,72	71,00	12,26	12,60	9,65	9,87	12.168	12.383	73,27	74,20
Kota Tomohon	71,43	71,79	14,17	14,19	10,25	10,48	11.647	12.152	75,78	76,67
Kota Kotamobagu	69,97	70,33	12,75	12,78	10,04	10,09	10.663	11.098	72,55	73,22
SULAWESI TENGAH	67,78	68,23	13,13	13,14	8,52	8,75	9.488	9.604	68,88	69,50
Banggai Kepulauan	65,12	65,71	13,04	13,05	8,14	8,19	7.545	7.619	64,68	65,13
Banggai	70,32	70,61	13,22	13,23	8,06	8,24	9.712	9.842	69,85	70,36
Morowali	68,45	68,82	12,89	13,33	8,98	9,11	11.159	11.277	71,14	72,02
Poso	70,51	70,85	13,68	13,69	9,04	9,36	8.936	9.084	70,68	71,40
Donggala	66,37	66,85	12,47	12,48	7,85	7,86	8.106	8.189	65,14	65,49
Toli-Toli	64,71	65,30	12,71	12,72	7,96	8,26	8.017	8.156	64,60	65,42
Buol	67,59	68,17	13,07	13,08	8,74	8,75	8.079	8.151	67,30	67,69
Parigi Moutong	63,57	63,94	12,45	12,46	7,18	7,47	9.808	9.878	64,85	65,47
Tojo Una-Una	64,61	65,14	11,82	12,25	8,16	8,38	7.608	7.765	63,38	64,52
Sigi	69,15	69,57	12,85	12,86	8,43	8,53	8.236	8.375	67,66	68,16
Banggai Laut	64,21	64,79	12,88	12,89	8,44	8,51	7.810	7.888	64,80	65,27
Morowali Utara	68,77	69,19	12,22	12,23	8,58	8,70	8.985	9.109	67,95	68,45

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Palu	70,31	70,68	16,20	16,22	11,33	11,60	15.074	15.205	80,91	81,50
SULAWESI SELATAN	70,08	70,43	13,34	13,36	8,02	8,26	10.814	11.118	70,90	71,66
Kepulauan Selayar	68,03	68,34	12,46	12,48	7,40	7,63	8.666	9.028	66,04	66,91
Bulukumba	67,27	67,69	12,79	12,91	7,34	7,43	10.331	10.480	67,70	68,28
Bantaeng	70,11	70,42	12,01	12,03	6,47	6,48	11.153	11.592	67,76	68,30
Jeneponto	65,89	66,24	11,95	11,97	6,21	6,48	8.957	9.078	63,33	64,00
Takalar	66,64	67,01	12,22	12,25	6,91	7,18	10.134	10.474	66,07	66,94
Gowa	70,11	70,37	13,29	13,48	7,75	7,97	9.179	9.369	68,87	69,66
Sinjai	66,83	67,17	12,85	12,87	7,29	7,48	9.098	9.465	66,24	67,05
Maros	68,74	68,98	12,99	13,02	7,43	7,46	10.558	10.981	68,94	69,50
Pangkajene dan Kepulauan	66,12	66,49	12,41	12,51	7,49	7,60	11.197	11.392	67,71	68,29
Barru	68,60	68,91	13,56	13,57	7,86	7,96	10.622	10.911	70,05	70,60
Bone	66,50	66,88	12,67	12,80	6,97	6,98	8.686	8.954	65,04	65,67
Soppeng	69,02	69,43	12,57	12,73	7,63	7,74	9.291	9.444	67,60	68,26
Wajo	66,79	67,17	13,11	13,13	6,79	6,80	12.057	12.399	68,57	69,05
Sidenreng Rappang	69,15	69,59	12,91	12,93	7,79	7,83	11.834	2.039	70,60	71,05
Pinrang	68,98	69,39	13,20	13,22	7,84	7,85	11.508	11.828	70,62	71,12
Enrekang	70,55	70,83	13,68	13,69	8,68	8,89	10.683	10.800	72,15	72,66
Luwu	69,84	70,19	13,30	13,32	7,97	8,15	9.705	10.085	69,60	70,39
Tana Toraja	72,80	73,15	13,50	13,58	7,94	8,02	7.087	7.253	67,66	68,25
Luwu Utara	67,90	68,31	12,39	12,42	7,53	7,78	11.429	11.583	68,79	69,46
Luwu Timur	70,03	70,38	12,81	12,82	8,45	8,54	12.346	12.802	72,16	72,80
Toraja Utara	73,09	73,35	13,35	13,37	7,76	7,92	7.783	8.083	68,49	69,23
Kota Makasar	71,70	72,00	15,55	15,56	11,09	11,20	16.597	16.989	81,73	82,25

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Parepare	70,88	71,18	14,47	14,49	10,29	10,30	13.303	13.648	77,19	77,62
Kota Palopo	70,49	70,79	15,06	15,07	10,51	10,75	12.662	12.986	77,30	77,98
SULAWESI TENGGARA	70,72	70,97	13,53	13,55	8,69	8,91	9.262	9.436	70,61	71,20
Buton	67,60	67,92	13,53	13,74	7,50	7,51	7.209	7.366	65,08	65,67
Muna	69,97	70,18	13,77	13,78	8,19	8,35	8.098	8.253	68,47	68,97
Konawe	69,76	70,02	12,98	12,99	8,94	9,14	10.004	10.200	70,72	71,29
Kolaka	70,38	70,72	12,39	12,80	8,57	8,76	12.384	12.525	72,07	73,01
Konawe Selatan	70,24	70,52	12,23	12,24	7,73	7,74	8.914	9.115	67,51	67,88
Bombana	68,17	68,54	11,82	11,83	7,54	7,74	8.190	8.344	65,04	65,65
Wakatobi	69,85	70,13	13,15	13,20	7,72	7,73	9.136	9.388	68,52	68,99
Kolaka Utara	69,94	70,15	12,09	12,10	7,67	7,86	10.133	10.258	68,44	68,91
Buton Utara	70,56	70,75	12,74	12,75	8,54	8,75	7.393	7.534	67,13	67,68
Konawe Utara	68,95	69,23	12,33	12,54	8,81	8,97	9.050	9.215	68,50	69,22
Kolaka Timur	71,99	72,33	11,89	12,15	7,18	7,35	7.606	7.832	65,53	66,49
Konawe Kepulauan	68,06	68,25	11,59	11,81	9,17	9,18	6.601	6.832	64,36	65,05
Muna Barat	69,97	70,16	12,13	12,20	6,76	6,77	7.405	7.526	64,11	64,45
Buton Tengah	67,33	67,50	12,35	12,70	7,28	7,29	7.160	7.264	63,46	64,06
Buton Selatan	67,33	67,50	12,56	12,94	7,07	7,32	7.192	7.293	63,47	64,37
Kota Kendari	73,26	73,52	16,20	16,28	11,69	11,94	14.168	14.392	82,22	82,86
Kota Baubau	70,72	70,95	14,80	14,81	10,13	10,37	10.374	10.523	74,67	75,21
GORONTALO	67,45	67,93	13,03	13,06	7,46	7,69	9.839	10.075	67,71	68,49
Boalemo	68,25	68,83	12,42	12,43	6,53	6,54	8.654	8.874	64,99	65,53
Gorontalo	66,98	67,45	12,91	12,94	6,83	7,11	9.071	9.361	65,78	66,69
Pohuwato	63,25	63,83	12,35	12,36	6,85	7,10	10.076	10.316	64,44	65,27

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bone Bolango	67,95	68,38	13,44	13,45	8,04	8,07	9.827	10.147	69,06	69,63
Gorontalo Utara	65,36	65,79	12,43	12,44	6,72	6,74	8.780	8.982	64,06	64,52
Kota Gorontalo	72,02	72,42	14,31	14,32	10,34	10,35	11.908	12.298	76,53	77,08
SULAWESI BARAT	64,58	64,82	12,59	12,62	7,50	7,73	9.051	9.235	65,10	65,73
Majene	61,05	61,30	13,58	13,60	8,25	8,52	9.904	10.029	66,01	66,59
Polewali Mandar	61,97	62,18	13,02	13,05	7,24	7,40	8.355	8.598	63,14	63,74
Mamasa	70,62	70,75	11,58	11,74	7,22	7,37	7.597	7.769	64,66	65,32
Mamuju	66,94	67,23	13,14	13,18	7,53	7,69	9.308	9.535	67,11	67,72
Mamuju Utara	65,62	65,91	11,59	11,66	7,68	7,92	10.915	11.094	66,60	67,27
Mamuju Tengah	67,79	68,06	11,71	11,92	7,23	7,24	8.243	8.501	64,43	65,10
MALUKU	65,59	65,82	13,92	13,94	9,58	9,81	8.721	8.887	68,87	69,45
Maluku Tenggara Barat	63,19	63,34	12,27	12,28	9,39	9,55	6.275	6.396	62,39	62,86
Maluku Tenggara	64,77	64,95	12,62	12,63	9,49	9,50	7.481	7.625	65,53	65,85
Maluku Tengah	66,19	66,34	14,14	14,15	9,30	9,64	10.106	10.298	70,60	71,25
Buru	66,16	66,32	12,79	13,02	8,32	8,46	10.203	10.400	68,25	68,91
Kepulauan Aru	62,52	62,73	12,09	12,29	8,70	8,71	7.518	7.678	63,12	63,64
Seram Bagian Barat	61,20	61,48	13,41	13,42	8,85	8,86	8.543	8.704	65,14	65,49
Seram Bagian Timur	58,84	59,16	12,57	12,75	8,02	8,22	9.268	9.452	62,98	63,74
Maluku Barat Daya	61,87	62,16	11,89	12,26	8,00	8,14	6.721	6.888	60,64	61,55
Buru Selatan	65,92	66,13	12,48	12,68	7,42	7,70	7.506	7.627	63,62	64,42
Kota Ambon	70,12	70,35	16,01	16,02	11,66	11,91	13.993	14.233	80,24	80,81
Kota Tual	64,89	65,21	13,89	13,90	10,18	10,26	7.323	7.506	67,21	67,74
MALUKU UTARA	67,80	68,18	13,62	13,63	8,72	9,00	7.980	8.308	67,76	68,70
Halmahera Barat	65,78	66,13	13,07	13,08	7,88	8,12	7.418	7.660	64,54	65,34

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Halmahera Tengah	63,16	63,65	12,93	12,94	8,65	8,79	7.885	8.258	64,66	65,55
Kepulauan Sula	62,83	63,18	12,66	12,73	8,57	8,73	7.044	7.221	62,96	63,64
Halmahera Selatan	65,42	65,75	12,76	12,77	7,62	7,92	7.156	7.298	63,39	64,11
Halmahera Utara	69,15	69,47	13,58	13,59	8,37	8,38	7.519	7.713	67,30	67,75
Halmahera Timur	68,19	68,64	12,73	12,74	7,97	8,06	7.969	8.127	66,20	66,74
Pulau Morotai	66,58	66,99	12,41	12,43	6,96	7,10	6.294	6.655	61,39	62,38
Pulau Taliabu	61,58	61,95	12,14	12,58	7,44	7,46	6.455	6.659	59,67	60,62
Kota Ternate	70,50	70,85	15,72	15,73	11,26	11,58	13.166	13.632	79,13	80,03
Kota Tidore Kepulauan	68,87	69,22	13,91	14,20	9,63	9,64	8.232	8.608	69,89	70,83
PAPUA BARAT	65,55	65,90	12,53	12,72	7,27	7,44	7.816	8.125	63,74	64,70
Fakfak	68,12	68,41	13,85	14,09	8,51	8,64	7.357	7.608	66,99	67,87
Kaimana	64,25	64,64	11,76	11,98	8,09	8,28	8.071	8.304	63,67	64,59
Teluk Wondama	59,53	59,93	11,05	11,34	6,75	6,87	7.927	8.198	58,86	59,82
Teluk Bintuni	60,15	60,60	11,94	12,17	7,77	7,95	9.622	9.821	63,13	64,00
Manokwari	68,22	68,56	13,63	13,64	8,04	8,16	11.789	11.994	71,17	71,67
Sorong Selatan	65,83	66,15	12,56	12,88	7,15	7,26	6.062	6.252	61,01	61,93
Sorong	65,71	66,02	13,21	13,43	7,83	8,02	7.240	7.507	64,32	65,29
Raja Ampat	64,42	64,70	11,80	12,02	7,63	7,80	7.760	7.958	62,84	63,66
Tambrauw	59,56	59,96	11,32	11,62	4,94	5,07	4.859	5.001	51,95	52,90
Maybrat	64,93	65,17	12,67	12,91	6,53	6,67	5.168	5.391	58,16	59,15
Manokwari Selatan	67,16	67,48	12,32	12,33	6,48	6,57	5.225	5.511	58,84	59,72
Pegunungan Arfak	66,89	67,18	11,33	11,62	4,97	5,08	4.979	5.102	55,31	56,15
Kota Sorong	70,00	70,46	14,21	14,22	10,93	11,05	13.484	13.815	77,35	77,98

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PAPUA	65,36	65,65	10,83	11,05	6,52	6,65	7.159	7.336	60,06	60,84
Merauke	66,71	66,93	13,24	13,59	8,49	8,56	10.430	10.498	69,38	69,98
Jayawijaya	58,99	59,39	11,58	11,93	5,17	5,30	7.637	7.835	56,82	57,79
Jayapura	66,66	66,93	14,17	14,19	9,60	9,79	10.160	10.375	71,25	71,84
Nabire	67,72	67,97	11,14	11,59	9,53	9,70	9.143	9.195	67,70	68,53
Kepulauan Yapen	68,85	69,06	12,24	12,72	9,07	9,19	7.739	7.785	67,00	67,76
Biak Numfor	68,00	68,20	13,94	13,95	10,00	10,22	9.969	10.211	71,96	72,57
Paniai	65,94	66,27	10,47	10,48	4,20	4,38	6.535	6.767	55,83	56,58
Puncak Jaya	64,65	64,98	6,59	6,96	3,51	3,61	5.459	5.523	47,39	48,33
Mimika	72,06	72,27	11,77	12,17	9,76	9,91	11.700	12.035	73,15	74,13
Boven Digoel	59,16	59,64	10,99	11,06	8,32	8,55	8.211	8.300	60,83	61,51
Mappi	64,56	64,91	10,53	10,54	6,29	6,30	6.268	6.513	57,72	58,30
Asmat	56,88	57,53	8,47	8,74	4,74	4,82	5.882	6.066	49,37	50,37
Yahukimo	65,52	65,80	7,59	7,60	4,01	4,02	4.737	5.030	48,51	49,25
Pegunungan Bintang	64,08	64,34	5,79	6,14	2,49	2,61	5.578	5.633	44,22	45,21
Tolikara	65,30	65,58	8,04	8,28	3,62	3,63	4.946	5.142	48,85	49,68
Sarmi	66,00	66,26	11,55	11,81	8,52	8,53	6.814	6.860	63,00	63,45
Keerom	66,35	66,60	12,14	12,41	7,83	8,00	8.918	9.136	65,75	66,59
Waropen	65,99	66,24	12,77	12,78	8,87	9,18	6.978	7.018	64,80	65,34
Supiori	65,53	65,81	12,72	12,73	8,39	8,60	5.769	5.820	61,84	62,30
Mamberamo Raya	57,18	57,55	11,30	11,78	5,46	5,65	4.755	4.807	51,24	52,20
Nduga	54,82	55,12	2,95	3,29	0,85	0,97	4.131	4.181	29,42	30,75
Lanny Jaya	65,79	66,00	8,01	8,35	3,18	3,19	4.517	4.569	47,34	48,00

Lampiran 1. IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mamberamo Tengah	63,14	63,44	8,33	8,63	2,78	2,90	4.609	4.671	46,41	47,23
Yalimo	65,10	65,34	8,46	8,83	2,44	2,58	4.799	4.860	47,13	48,08
Puncak	65,33	65,61	4,93	5,19	1,95	1,96	5.506	5.702	41,81	42,70
Dogiyai	65,32	65,60	10,13	10,57	4,91	4,92	5.522	5.709	54,44	55,41
Intan Jaya	65,26	65,51	7,11	7,36	2,51	2,64	5.440	5.593	46,55	47,51
Deiyai	64,83	65,11	9,79	9,80	2,99	3,00	4.761	4.958	49,55	50,11
Kota Jayapura	70,15	70,38	14,99	15,00	11,30	11,55	14.922	15.176	79,58	80,16
INDONESIA	71,20	71,34	12,91	12,95	8,17	8,34	11.059	11.299	71,39	71,92

Sumber: www.bps.go.id, 2020

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ACEH	67,98	71,85	14,19	14,47	9,52	8,85	13.496	8.212	75,95	69,75	91,84
Simeulue	63,24	67,10	13,40	13,91	9,66	8,49	11.556	3.441	71,41	55,66	77,94
Aceh Singkil	65,34	69,28	14,34	14,07	8,94	7,94	14.936	5.893	75,02	63,38	84,48
Aceh Selatan	62,31	66,12	14,22	14,41	9,07	8,10	11.087	7.174	70,63	64,62	91,49
Aceh Tenggara	66,00	69,97	13,66	14,55	10,20	9,12	11.784	7.858	73,89	68,73	93,02
Aceh Timur	66,63	70,59	12,83	13,07	8,30	7,51	13.496	5.648	72,40	62,06	85,72
Aceh Tengah	66,79	70,74	13,87	14,80	9,85	9,64	11.563	9.569	73,90	72,04	97,48
Aceh Barat	65,89	69,87	14,54	14,84	9,46	8,84	14.460	5.792	75,82	65,06	85,81
Aceh Besar	67,74	71,68	14,62	15,34	10,51	10,10	12.558	8.999	76,67	72,82	94,98
Pidie	64,88	68,79	14,16	14,84	9,38	8,36	12.753	8.823	73,63	68,84	93,49
Bireuen	69,15	73,05	14,77	15,08	9,31	9,25	11.940	8.567	75,63	71,79	94,92
Aceh Utara	66,75	70,72	14,39	15,09	8,83	7,97	10.870	7.019	72,57	67,04	92,38
Aceh Barat Daya	62,94	66,77	13,56	14,73	8,59	8,30	14.654	6.998	72,38	65,16	90,02
Gayo Lues	63,40	67,25	13,76	13,69	8,79	7,15	13.489	7.652	72,31	64,14	88,70
Aceh Tamiang	67,49	71,44	13,24	13,96	9,13	8,66	15.650	4.663	75,67	62,01	81,95
Nagan Raya	67,10	71,06	13,89	14,44	8,91	8,22	12.874	7.006	74,03	66,86	90,31
Aceh Jaya	65,08	69,01	13,94	14,14	8,88	8,41	15.163	7.471	74,55	66,56	89,28
Bener Meriah	67,16	71,11	13,25	13,64	9,81	9,62	13.599	10.934	75,03	72,55	96,69
Pidie Jaya	68,03	71,97	14,35	15,10	9,41	8,71	13.684	10.060	76,14	72,42	95,11
Kota Banda Aceh	69,36	73,25	17,53	17,22	13,09	12,36	19.740	15.244	87,49	83,26	95,17
Kota Sabang	68,42	72,36	13,80	13,88	11,21	10,98	13.995	10.611	78,12	74,58	95,47
Kota Langsa	67,34	71,30	14,55	16,04	11,35	10,85	15.723	11.010	79,57	76,22	95,79
Kota Lhokseumawe	69,52	73,40	15,07	15,61	11,32	10,79	14.883	10.799	80,63	76,65	95,06
Kota Subulussalam	61,98	65,79	14,04	14,44	8,27	7,31	12.041	5.085	70,16	59,67	85,05
SUMATERA UTARA	67,07	70,92	12,97	13,40	9,76	9,17	15.471	8.315	75,85	68,80	90,71
Nias	67,65	71,59	12,40	12,23	6,43	4,21	8.034	6.566	64,91	59,22	91,23
Mandailing Natal	60,58	64,33	12,93	13,57	8,54	8,19	15.160	9.746	70,71	66,20	93,62
Tapanuli Selatan	62,85	66,68	13,10	14,06	9,28	8,84	17.215	8.913	74,13	67,70	91,33

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tapanuli Tengah	65,06	68,98	12,48	13,30	8,93	8,17	13.505	9.750	72,04	68,28	94,78
Tapanuli Utara	66,42	70,39	13,62	14,12	10,00	9,43	12.695	11.749	74,57	73,11	98,04
Toba Samosir	67,90	71,84	13,13	13,60	10,60	10,02	12.968	12.135	75,75	74,34	98,14
Labuhan Batu	67,83	71,77	12,29	13,22	9,45	9,06	17.583	8.763	76,30	69,47	91,05
Asahan	66,07	70,04	12,55	13,15	8,83	8,26	16.622	8.927	74,38	67,85	91,22
Simalungun	69,07	72,97	12,73	13,29	9,51	9,23	16.573	9.881	76,93	71,57	93,03
Dairi	66,75	70,71	12,77	13,09	9,71	9,10	10.973	10.243	72,12	70,51	97,77
Karo	69,27	73,16	12,44	13,32	9,61	9,62	14.246	10.373	75,44	72,66	96,31
Deli Serdang	69,61	73,49	13,13	13,88	10,60	9,73	18.466	9.941	79,98	73,03	91,31
Langkat	66,55	70,52	12,49	13,41	8,91	8,17	16.719	7.875	74,72	66,89	89,52
Nias Selatan	66,54	70,50	12,33	12,09	6,60	4,65	10.830	6.529	67,53	59,15	87,59
Humbang Hasundutan	67,03	70,98	13,26	14,40	10,08	9,19	8.341	7.236	70,25	68,21	97,10
Pakpak Bharat	63,61	67,47	12,48	15,01	9,22	8,29	9.321	8.152	68,07	67,42	99,05
Samosir	69,15	73,05	13,22	14,45	9,77	8,46	9.956	8.516	72,77	70,25	96,54
Serdang Bedagai	66,42	70,39	12,17	12,72	8,87	8,22	17.295	7.847	74,55	66,19	88,79
Batu Bara	64,74	68,65	12,46	13,06	8,36	7,68	17.056	5.338	73,22	60,72	82,93
Padang Lawas Utara	65,04	68,96	12,46	12,73	9,33	8,90	16.316	6.997	74,23	65,05	87,63
Padang Lawas	64,96	68,88	12,91	13,32	8,89	8,45	13.942	5.499	72,68	62,24	85,64
Labuhan Batu Selatan	66,60	70,56	12,82	13,40	9,27	8,57	19.119	7.685	76,74	67,09	87,43
Labuhan Batu Utara	67,33	71,28	12,71	13,25	8,75	8,15	18.113	8.833	75,85	68,29	90,03
Nias Utara	67,26	71,21	13,17	12,42	7,46	5,27	9.998	3.945	69,10	54,60	79,02
Nias Barat	66,78	70,74	13,09	12,54	7,64	5,16	8.890	5.496	67,82	58,50	86,26
Kota Sibolga	66,73	70,69	12,74	13,52	10,23	10,13	13.621	11.153	74,82	72,97	97,53
Kota Tanjung Balai	61,08	64,85	12,14	12,95	9,48	9,23	18.292	8.182	72,94	65,29	89,51
Kota Pematang Siantar	71,38	75,16	14,92	14,05	11,48	10,99	14.342	12.150	81,24	77,55	95,46

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota Tebing Tinggi	68,74	72,66	12,36	12,73	10,70	10,22	18.245	11.583	78,75	73,67	93,55
Kota Medan	71,02	74,83	14,59	14,92	11,61	11,23	22.155	14.102	85,09	80,00	94,02
Kota Binjai	70,27	74,12	13,56	13,82	10,95	10,23	16.881	9.023	80,34	72,79	90,60
Kota Padangsidimpuan	67,12	71,08	13,68	15,03	11,09	10,56	13.274	10.928	76,68	74,83	97,59
Kota Gunungsitoli	69,01	72,92	13,68	13,77	9,91	7,59	11.915	7.485	75,18	67,10	89,25
SUMATERA BARAT	67,42	71,29	13,68	14,40	9,07	8,77	15.311	9.899	75,81	71,33	94,09
Kepulauan Mentawai	62,71	66,54	13,10	12,40	7,56	6,79	9.415	5.883	66,38	59,30	89,33
Pesisir Selatan	68,71	72,63	13,25	13,89	8,56	8,21	12.447	9.030	73,40	69,85	95,16
Solok	66,29	70,26	12,35	13,63	7,88	7,83	14.485	9.987	71,81	69,06	96,17
Sijunjung	64,02	67,90	12,17	13,07	8,38	7,93	15.866	9.425	71,93	66,90	93,01
Tanah Datar	67,70	71,64	13,42	14,63	8,46	8,44	12.957	10.108	73,35	71,55	97,55
Padang Pariaman	66,54	70,50	13,23	14,32	8,30	7,46	16.654	9.961	74,69	69,40	92,92
Agam	70,19	74,04	13,23	14,57	8,88	8,82	12.388	9.208	74,44	72,09	96,84
Lima Puluh Kota	67,67	71,62	12,91	13,60	8,26	7,98	13.639	9.376	73,04	69,22	94,77
Pasaman	65,16	69,09	12,51	13,44	8,05	7,86	12.388	7.262	70,22	65,02	92,59
Solok Selatan	65,55	69,50	12,39	13,33	8,22	8,12	14.081	9.388	71,68	68,12	95,03
Dharmasraya	69,09	72,99	12,34	12,52	8,82	8,44	17.554	7.708	76,14	67,23	88,30
Pasaman Barat	65,63	69,59	12,72	13,94	8,23	7,88	13.571	6.570	71,75	64,62	90,06
Kota Padang	71,64	75,40	16,30	16,69	11,64	11,28	21.783	13.214	86,97	81,30	93,48
Kota Solok	71,50	75,28	13,96	14,75	10,80	11,47	15.728	11.466	80,50	78,19	97,13
Kota Sawah Lunto	67,84	71,78	13,14	13,74	9,91	10,14	14.068	9.720	75,70	72,30	95,51
Kota Padang Panjang	70,81	74,63	14,70	16,00	11,51	11,44	11.536	9.243	78,51	76,55	97,50
Kota Bukittinggi	72,30	76,02	14,47	15,40	11,41	11,13	14.562	13.306	81,35	80,35	98,77
Kota Payakumbuh	71,67	75,43	14,04	14,64	10,53	10,80	15.346	13.241	80,10	78,91	98,51
Kota Pariaman	68,12	72,06	14,43	15,40	10,46	10,28	14.423	12.326	78,01	76,60	98,19

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
RIAU	69,62	73,43	12,99	13,40	9,30	8,75	16.833	7.542	77,35	68,40	88,43
Kuantan Singingi	66,40	70,37	12,87	13,57	8,82	8,34	16.072	8.155	74,58	67,55	90,57
Indragiri Hulu	68,17	72,12	12,10	12,85	8,34	7,90	16.876	6.724	74,43	65,00	87,33
Indragiri Hilir	65,63	69,58	11,90	12,29	7,50	6,94	17.021	5.243	71,88	59,35	82,57
Pelalawan	69,02	72,93	11,96	12,21	8,91	8,15	19.196	8.652	76,58	67,78	88,51
Siak	69,02	72,93	12,89	12,75	9,83	9,45	19.173	8.595	78,80	69,80	88,58
Kampar	68,62	72,56	13,15	13,61	9,54	8,96	16.995	8.326	77,42	69,55	89,83
Rokan Hulu	67,86	71,80	13,36	12,82	8,74	8,10	17.459	5.558	76,48	62,81	82,13
Bengkalis	69,10	73,01	12,80	13,75	9,74	9,08	17.582	8.408	77,85	70,13	90,08
Rokan Hilir	68,14	72,08	12,35	13,22	8,62	7,88	15.244	5.620	74,15	63,19	85,22
Kepulauan Meranti	65,50	69,44	12,78	12,96	8,09	7,04	12.708	5.763	70,96	61,17	86,20
Kota Pekanbaru	70,24	74,09	15,37	15,30	11,68	11,22	21.887	13.503	85,41	79,53	93,12
Kota Dumai	68,81	72,73	12,90	13,25	10,06	9,62	18.062	9.346	78,46	71,29	90,86
JAMBI	69,11	72,97	12,88	13,16	8,87	8,01	15.776	7.523	75,84	67,07	88,44
Kerinci	67,79	71,74	14,02	13,82	8,97	7,66	15.670	7.194	76,44	66,26	86,68
Merangin	69,18	73,08	11,98	12,19	8,27	7,22	14.490	7.089	73,32	64,53	88,01
Sarolangun	67,05	71,00	12,35	12,24	8,36	7,35	16.810	9.831	74,15	67,23	90,67
Batang Hari	68,42	72,35	12,91	13,29	8,28	7,72	16.005	5.901	74,90	63,79	85,17
Muaro Jambi	69,17	73,07	12,67	13,33	8,64	8,05	13.814	4.034	74,11	59,50	80,29
Tanjung Jabung Timur	64,08	67,97	11,50	12,67	6,85	6,03	14.872	6.387	68,61	60,21	87,76
Tanjung Jabung Barat	65,99	69,96	12,28	12,87	8,12	7,19	14.092	5.722	71,66	61,40	85,68
Tebo	67,88	71,83	12,39	12,59	8,20	7,24	15.362	8.529	73,59	66,40	90,23
Bungo	65,58	69,53	12,61	12,73	8,68	7,67	17.915	8.658	74,66	66,17	88,63
Kota Jambi	70,60	74,43	14,95	14,89	11,21	10,58	16.074	11.480	81,71	76,92	94,14
Kota Sungai Penuh	70,02	73,88	15,12	14,77	10,87	9,99	12.953	10.204	79,02	74,63	94,44
SUMATERA SELATAN	67,78	71,63	12,32	12,61	8,54	7,82	15.154	9.507	73,78	68,17	92,40

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Ogan Komering Ulu	65,97	69,93	12,12	12,81	8,91	8,37	15.159	9.952	73,15	68,70	93,92
Ogan Komering Ilir	66,37	70,35	11,38	11,73	7,45	6,50	16.436	9.567	71,27	65,01	91,22
Muara Enim	67,08	70,57	11,75	12,13	8,23	7,32	16.298	8.586	73,05	65,52	89,69
Lahat	63,77	67,64	12,15	12,97	8,88	8,05	13.493	9.895	70,98	67,30	94,82
Musi Rawas	65,82	69,78	12,01	12,10	7,82	7,12	15.272	6.125	71,60	61,28	85,59
Musi Banyuasin	66,50	70,47	11,98	12,07	7,88	7,33	16.294	5.308	72,55	60,11	82,85
Banyu Asin	66,72	70,69	11,50	11,95	7,63	6,87	14.983	7.435	71,03	63,33	89,16
Ogan Komering Ulu Selatan	64,75	68,66	11,49	12,12	7,90	7,75	12.544	7.583	68,85	63,88	92,78
Ogan Komering Ulu Timur	66,83	70,79	12,16	12,34	8,04	7,05	15.473	11.502	72,67	68,36	94,07
Ogan Ilir	63,23	67,08	12,25	12,53	8,16	7,56	10.776	11.148	67,82	67,11	98,95
Empat Lawang	62,84	66,67	11,80	12,50	8,05	7,22	13.600	9.000	69,15	64,42	93,16
Penukal Abab Lematang Ilir	66,03	70,00	10,65	11,91	7,46	6,25	11.807	7.874	67,37	62,79	93,20
Musi Rawas Utara	63,45	67,31	11,33	12,33	7,12	6,09	14.773	9.556	68,42	63,70	93,10
Kota Palembang	68,52	72,45	14,44	14,26	10,82	9,96	17.341	14.716	80,41	77,11	95,90
Kota Prabumulih	68,06	72,00	12,74	12,99	10,14	9,42	19.137	12.293	78,53	73,24	93,26
Kota Pagar Alam	64,41	68,30	12,78	13,27	9,42	8,97	12.332	8.717	71,76	67,69	94,33
Kota Lubuklinggau	67,00	70,96	13,29	14,11	10,18	9,63	17.696	13.158	77,89	74,73	95,94
BENGKULU	67,28	71,13	13,38	13,99	9,10	8,34	14.538	8.207	74,99	68,38	91,19
Bengkulu Selatan	65,75	69,71	13,60	14,15	9,46	8,56	13.353	9.511	74,07	69,66	94,05
Rejang Lebong	66,33	70,30	13,30	14,24	8,55	7,98	14.088	9.312	73,45	69,15	94,15
Bengkulu Utara	66,00	69,97	12,48	13,17	8,35	7,46	15.154	8.566	72,83	66,46	91,25
Kaur	64,50	68,40	13,18	12,84	8,85	8,03	12.411	6.101	71,58	62,37	87,13
Seluma	65,52	69,47	12,96	13,31	8,40	7,40	12.833	5.391	71,64	61,12	85,32
Mukomuko	64,51	68,41	12,74	12,66	8,51	7,55	16.300	5.986	73,20	61,45	83,95
Lebong	61,18	64,96	11,97	12,86	8,32	7,50	17.296	9.563	70,88	64,85	91,49

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kepahiang	65,75	69,71	12,78	13,58	8,55	7,72	11.513	8.868	70,72	67,41	95,32
Bengkulu Tengah	66,08	70,05	13,05	13,02	7,71	6,62	14.134	6.481	72,03	62,34	86,55
Kota Bengkulu	68,01	71,95	15,79	16,42	12,07	11,50	17.319	13.206	82,82	79,48	95,97
LAMPUNG	68,64	72,48	12,43	12,87	8,30	7,52	14.399	7.863	73,54	66,47	90,39
Lampung Barat	65,40	69,34	12,15	12,48	8,25	7,48	13.092	8.534	70,72	65,45	92,55
Tanggamus	66,36	70,32	11,73	12,68	7,56	6,71	13.749	7.525	70,26	63,85	90,88
Lampung Selatan	67,17	71,11	12,16	12,45	8,00	7,38	14.340	7.368	72,10	64,56	89,54
Lampung Timur	68,59	72,52	13,13	12,82	7,99	7,18	14.748	7.691	74,09	65,78	88,78
Lampung Tengah	67,72	71,66	12,81	12,92	8,04	7,32	15.826	8.346	74,03	66,54	89,88
Lampung Utara	67,02	70,97	12,47	12,99	8,40	8,00	12.867	6.478	71,88	64,32	89,48
Way Kanan	67,24	71,19	12,17	12,72	7,79	6,76	13.995	6.778	71,65	63,21	88,22
Tulangbawang	67,85	71,79	11,61	12,21	8,18	7,19	16.004	7.905	73,04	65,13	89,17
Pesawaran	66,84	70,80	12,06	12,59	8,16	7,22	12.706	5.917	70,93	61,92	87,30
Pringsewu	67,82	71,76	12,71	13,01	8,49	7,88	15.926	9.701	74,61	68,92	92,37
Mesuji	66,00	69,97	11,48	11,84	6,90	6,28	12.229	4.766	67,86	57,15	84,22
Tulang Bawang Barat	67,85	71,79	11,90	12,51	7,51	6,77	12.125	5.987	69,94	61,86	88,45
Pesisir Barat	61,32	65,10	12,03	11,78	8,25	7,67	10.731	7.908	66,71	62,19	93,22
Kota Bandar Lampung	69,28	73,17	14,24	14,74	11,36	10,58	17.119	11.547	81,12	76,22	93,96
Kota Metro	69,56	73,44	14,62	14,34	11,14	10,57	14.803	11.574	79,97	75,99	95,02
KEP. BANGKA BELITUNG	68,63	72,46	11,78	12,13	8,38	7,54	19.364	9.085	75,54	67,23	89,00
Bangka	68,98	72,89	12,67	13,08	8,69	7,98	18.469	8.223	76,73	67,90	88,49
Belitung	68,92	72,84	11,64	12,04	8,82	8,06	20.345	8.968	76,55	67,83	88,61
Bangka Barat	67,96	71,91	11,50	11,82	7,80	7,18	18.328	9.175	73,60	66,29	90,07
Bangka Tengah	69,15	73,05	11,74	12,19	7,61	6,73	19.106	10.438	74,55	67,88	91,05
Bangka Selatan	65,86	69,82	11,32	11,70	6,94	5,98	18.633	6.283	71,27	59,77	83,86
Belitung Timur	69,91	73,78	11,51	11,67	8,39	7,86	18.391	7.026	75,42	64,99	86,17
Kota Pangkal Pinang	71,22	75,01	13,14	12,98	10,25	9,42	22.169	14.344	82,02	76,19	92,89

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
KEPULAUAN RIAU	67,92	71,73	12,83	12,90	10,19	9,77	20.541	12.712	79,23	73,76	93,10
Karimun	68,69	72,62	12,18	12,73	8,36	7,52	18.707	9.939	75,70	68,82	90,91
Bintan	68,27	72,21	12,79	13,70	8,89	8,20	21.880	12.627	78,23	72,83	93,10
Natuna	62,84	66,67	13,74	13,98	9,03	8,62	21.397	11.626	76,33	70,01	91,72
Lingga	59,84	63,55	12,85	12,10	7,04	6,28	17.934	9.949	69,73	62,24	89,26
Kepulauan Anambas	65,04	68,97	12,60	12,91	7,30	6,39	17.403	9.255	72,29	65,18	90,16
Kota Batam	71,34	75,13	13,04	13,17	11,32	10,96	26.536	17.398	84,92	80,18	94,42
Kota Tanjung Pinang	70,03	73,89	13,98	14,30	10,24	9,96	19.074	15.383	80,92	78,31	96,77
DKI JAKARTA	70,96	74,68	13,00	12,93	11,47	10,65	22.912	17.087	83,58	79,16	94,71
Kep. Seribu	66,47	70,46	13,11	12,51	8,73	8,38	17.331	12.130	75,43	70,59	93,58
Kota Jakarta Selatan	72,11	75,95	13,76	13,25	12,03	11,29	27.656	23.276	86,98	83,75	96,29
Kota Jakarta Timur	72,46	76,17	13,67	13,83	12,19	11,31	22.379	17.335	85,61	81,76	95,50
Kota Jakarta Pusat	72,10	75,83	13,46	13,16	11,77	10,78	19.492	16.697	83,52	79,91	95,68
Kota Jakarta Barat	71,60	75,37	13,21	12,74	10,88	10,00	24.107	19.805	83,83	79,83	95,23
Kota Jakarta Utara	71,22	75,02	12,84	12,54	11,16	10,25	26.367	18.212	84,38	79,01	93,64
JAWA BARAT	71,03	74,81	12,45	12,55	8,83	7,90	15.760	8.173	76,23	68,04	89,26
Bogor	69,01	72,91	12,74	12,41	8,92	7,70	15.218	8.607	75,37	67,37	89,39
Sukabumi	68,71	72,63	12,60	12,05	7,71	6,80	13.254	6.744	72,21	63,13	87,43
Cianjur	67,89	71,83	12,26	11,63	7,27	6,52	11.938	5.171	69,89	58,96	84,36
Bandung	71,45	75,23	12,14	13,06	9,00	8,49	14.166	9.224	75,32	70,77	93,96
Garut	69,21	73,11	11,98	11,76	7,88	7,05	11.609	4.464	70,73	58,38	82,54
Tasikmalaya	67,18	71,13	12,69	12,48	7,50	6,86	12.024	5.462	70,40	60,58	86,05
Ciamis	69,58	73,46	14,62	13,77	7,94	7,51	14.535	6.538	75,96	65,70	86,49
Kuningan	71,40	75,18	12,77	12,09	7,81	7,10	14.343	6.851	74,53	64,78	86,92

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Cirebon	69,83	73,70	12,22	12,61	7,26	6,36	16.099	5.546	73,46	61,34	83,50
Majalengka	67,94	71,88	12,42	11,92	7,55	6,54	14.349	6.467	72,17	61,89	85,76
Sumedang	70,31	74,15	12,94	13,61	8,51	8,04	13.828	9.916	74,78	71,05	95,01
Indramayu	69,37	73,26	11,70	12,42	6,69	5,28	14.948	7.439	71,17	62,88	88,35
Subang	70,15	74,00	11,66	12,08	7,32	6,27	15.157	8.631	72,50	65,67	90,58
Purwakarta	68,78	72,70	12,10	12,18	8,59	7,64	18.016	7.601	75,64	65,64	86,78
Karawang	69,99	73,85	11,96	12,13	8,29	6,77	15.944	9.565	74,57	67,36	90,33
Bekasi	71,62	75,39	13,01	13,10	9,48	8,34	17.380	8.601	78,88	69,95	88,68
Bandung Barat	70,20	74,05	11,88	11,85	8,70	7,81	13.213	4.001	73,39	58,19	79,29
Pangandaran	69,11	73,01	12,05	12,22	8,18	7,40	13.326	7.410	72,47	65,24	90,02
Kota Bogor	71,47	75,25	13,15	13,44	10,72	9,92	17.617	9.771	80,65	73,48	91,11
Kota Sukabumi	70,28	74,13	14,37	13,22	10,10	9,22	15.557	10.400	79,36	72,57	91,44
Kota Bandung	72,22	75,95	14,18	14,44	11,09	10,39	22.996	16.390	85,01	80,61	94,82
Kota Cirebon	70,14	74,00	12,78	13,40	10,47	9,31	15.749	11.497	78,24	73,82	94,35
Kota Bekasi	73,01	76,67	14,29	13,99	11,85	10,86	22.181	14.845	86,13	80,12	93,02
Kota Depok	72,40	76,29	13,90	14,01	11,59	10,39	22.370	14.310	85,18	79,03	92,78
Kota Cimahi	71,96	75,71	14,21	13,67	11,03	10,62	17.146	10.693	82,09	75,69	92,20
Kota Tasikmalaya	69,94	73,80	13,37	13,75	9,48	8,74	13.627	8.070	76,14	69,65	91,48
Kota Banjar	68,78	72,69	13,54	12,94	8,95	8,18	16.049	7.412	76,64	66,77	87,12
JAWA TENGAH	72,33	76,16	12,69	12,66	8,06	7,03	15.279	9.895	75,79	69,64	91,89
Cilacap	71,58	75,35	12,93	12,48	7,42	6,47	15.697	7.242	75,09	65,08	86,67
Banyumas	71,59	75,37	12,90	12,82	7,95	7,14	16.865	8.027	76,44	67,42	88,20
Purbalingga	71,06	74,87	12,19	11,78	7,47	6,76	13.665	9.632	72,80	67,47	92,68
Banjarnegara	72,09	75,82	11,42	11,68	6,66	6,32	10.863	8.468	69,04	65,85	95,38
Kebumen	71,26	75,06	13,01	13,48	7,97	7,09	11.904	8.305	73,15	68,28	93,34
Purworejo	72,62	76,31	13,63	13,32	8,64	7,49	11.539	10.028	74,96	71,15	94,92
Wonosobo	69,61	73,48	11,71	11,77	7,01	6,51	14.835	9.570	71,68	66,46	92,72
Magelang	71,62	75,38	12,52	12,94	8,30	7,28	13.537	8.493	74,46	68,34	91,78
Boyolali	73,98	77,73	12,17	12,77	8,46	6,94	17.580	12.630	77,79	72,73	93,50
Klaten	74,88	78,60	13,08	13,46	8,94	7,77	13.298	11.588	77,21	74,15	96,04

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sukoharjo	75,77	79,52	13,81	14,21	9,72	8,67	12.499	11.104	78,74	76,05	96,58
Wonogiri	74,22	77,93	12,49	12,22	7,61	6,71	12.995	8.492	74,26	67,88	91,41
Karanganyar	75,59	79,23	13,32	13,75	9,32	7,93	12.124	11.217	77,33	74,61	96,48
Sragen	73,76	77,45	12,82	12,66	8,12	6,61	17.164	11.422	77,75	71,06	91,40
Grobogan	72,71	76,40	13,75	12,29	7,35	6,34	15.464	7.566	76,31	65,61	85,98
Blora	72,32	76,03	12,92	12,19	7,14	6,06	14.382	5.968	74,23	62,32	83,96
Rembang	72,53	76,22	12,13	11,92	7,71	6,61	15.762	7.351	75,04	65,17	86,85
Pati	74,09	77,82	12,68	12,41	7,78	6,69	14.893	9.861	75,96	69,58	91,60
Kudus	74,67	78,47	13,18	13,26	9,20	8,10	15.433	10.618	79,02	73,41	92,90
Jepara	73,89	77,71	12,70	13,06	7,89	6,81	14.569	8.566	75,83	68,94	90,91
Demak	73,46	77,20	12,87	13,24	8,27	6,91	14.919	8.807	76,57	69,35	90,57
Semarang	73,78	77,52	13,11	12,94	8,44	7,62	13.031	11.892	75,90	73,17	96,40
Temanggung	73,63	77,40	12,10	12,29	7,52	6,80	11.102	8.913	71,89	68,37	95,10
Kendal	72,43	76,16	12,80	12,92	7,91	6,63	15.077	10.738	75,63	70,22	92,85
Batang	72,69	76,48	11,93	12,06	7,33	6,17	13.084	8.295	72,62	66,14	91,08
Pekalongan	71,63	75,40	12,08	12,97	7,21	6,56	14.758	8.798	73,27	67,83	92,58
Pemalang	71,26	75,06	12,18	11,78	6,94	5,92	12.640	5.947	71,41	61,28	85,81
Tegal	69,40	73,29	13,22	12,04	7,44	6,31	14.795	7.615	73,88	64,08	86,74
Brebes	67,01	70,96	12,13	12,00	6,76	5,38	15.121	7.108	70,77	61,11	86,35
Kota Magelang	74,91	78,64	14,07	13,81	11,05	9,96	13.946	12.076	81,35	77,70	95,51
Kota Surakarta	75,32	79,03	14,47	14,59	11,10	10,09	15.229	13.783	82,91	80,19	96,72
Kota Salatiga	75,32	79,07	15,24	15,35	10,99	9,94	19.965	15.419	86,23	81,92	95,00
Kota Semarang	75,45	79,17	15,71	15,22	11,41	10,15	16.437	14.590	85,33	81,53	95,55
Kota Pekalongan	72,37	76,08	12,69	12,85	8,95	8,50	16.697	12.275	77,83	73,88	94,92
Kota Tegal	72,44	76,26	12,81	13,22	8,70	7,82	18.512	12.167	78,60	73,39	93,37
D I YOGYAKARTA	73,13	76,76	15,58	15,62	9,92	8,87	17.302	13.520	82,80	78,47	94,77
Kulon Progo	73,33	77,11	14,13	15,22	9,14	8,24	13.383	9.743	77,93	74,07	95,05
Bantul	71,84	75,59	15,31	15,11	10,07	9,04	18.255	14.971	82,58	78,60	95,18
Gunung Kidul	72,11	75,84	13,14	12,74	7,88	6,46	15.803	6.624	76,27	64,54	84,62
Sleman	72,88	76,65	16,74	16,53	11,32	10,19	17.537	15.433	85,57	82,18	96,04

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota Yogyakarta	72,67	76,35	17,21	17,29	11,87	10,95	19.136	19.094	87,38	85,71	98,09
JAWA TIMUR	69,30	73,15	13,23	13,15	8,18	7,04	16.837	10.137	76,00	69,09	90,91
Pacitan	69,78	73,65	12,86	12,42	7,67	6,93	14.025	5.894	73,48	62,55	85,13
Ponorogo	70,68	74,50	13,59	13,72	7,68	6,77	13.111	9.348	74,07	69,14	93,34
Trenggalek	71,65	75,42	12,22	12,41	7,62	7,07	14.746	9.456	74,01	68,64	92,74
Tulungagung	72,03	75,77	12,91	13,58	8,47	7,86	13.610	10.430	75,35	72,06	95,63
Blitar	71,44	75,22	12,14	12,88	7,70	7,09	15.927	9.575	74,64	69,21	92,73
Kediri	70,57	74,40	12,87	13,11	8,37	7,60	16.084	10.320	76,06	70,51	92,70
Malang	70,48	74,32	12,82	13,21	7,65	6,89	15.290	7.334	74,53	66,08	88,66
Lumajang	67,91	71,85	11,98	11,70	6,83	5,66	14.210	7.539	70,57	62,13	88,04
Jember	66,96	70,91	13,56	12,90	6,87	5,61	14.732	6.242	72,29	60,94	84,30
Banyuwangi	68,52	72,45	12,72	12,87	7,54	6,54	19.421	8.047	75,43	65,48	86,81
Bondowoso	64,54	68,45	13,50	13,27	6,54	4,99	14.685	9.540	70,57	63,81	90,42
Situbondo	66,94	70,89	13,46	13,12	6,93	5,44	15.457	7.776	72,68	63,31	87,11
Probolinggo	64,98	68,90	12,63	12,13	6,65	5,09	17.320	7.573	71,37	60,63	84,95
Pasuruan	68,14	72,08	12,47	12,28	7,78	6,68	14.058	8.707	72,44	65,69	90,68
Sidoarjo	72,06	75,79	14,81	15,04	10,79	9,72	20.289	14.064	84,05	78,83	93,79
Mojokerto	70,46	74,30	12,96	12,61	9,11	7,89	18.428	11.051	78,31	70,99	90,65
Jombang	70,29	74,13	12,74	13,22	9,00	8,08	16.917	8.969	77,07	69,65	90,37
Nganjuk	69,44	73,33	12,82	13,15	8,19	7,26	17.471	11.679	75,96	70,85	93,27
Madiun	69,22	73,11	12,96	13,65	8,42	7,30	16.265	9.694	75,67	69,47	91,81
Magetan	70,52	74,35	14,13	13,99	8,58	7,31	15.681	11.501	77,43	72,13	93,16
Ngawi	70,18	74,03	12,55	13,23	7,46	6,57	15.978	9.839	74,22	68,67	92,52
Bojonegoro	69,35	73,25	12,28	12,41	7,72	6,51	15.125	8.634	73,38	66,03	89,98
Tuban	69,26	73,15	12,21	12,18	7,40	6,27	16.160	7.765	73,41	64,33	87,63
Lamongan	70,29	74,13	13,61	13,46	8,49	7,42	17.301	8.543	77,56	68,56	88,40
Gresik	70,64	74,47	13,95	13,72	9,74	8,87	20.211	10.628	81,11	73,04	90,05
Bangkalan	68,08	72,02	11,85	11,46	6,40	4,97	12.962	6.876	69,07	60,04	86,93
Sampang	65,92	69,88	12,34	11,58	5,29	3,90	13.422	6.438	67,39	57,14	84,79
Pamekasan	65,42	69,36	13,87	13,38	7,27	5,54	12.998	6.596	71,24	61,30	86,05

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sumenep	69,21	73,11	13,39	12,91	6,60	4,63	13.949	5.144	72,32	58,38	80,72
Kota Kediri	72,04	75,77	14,65	15,08	10,79	9,36	15.838	12.257	81,51	77,05	94,53
Kota Blitar	71,66	75,43	13,97	14,60	10,34	9,91	15.155	13.342	79,67	77,92	97,80
Kota Malang	71,19	74,99	15,80	15,26	10,97	9,98	20.642	16.415	84,96	80,47	94,72
Kota Probolinggo	68,17	72,10	13,89	13,56	9,46	8,11	12.638	11.914	75,03	71,96	95,91
Kota Pasuruan	69,40	73,28	13,51	13,81	9,98	8,45	13.980	12.845	76,88	73,94	96,18
Kota Mojokerto	71,26	75,06	14,28	13,83	10,98	9,70	18.042	13.218	82,24	76,63	93,18
Kota Madiun	70,78	74,60	14,33	14,57	11,67	10,66	22.300	15.419	84,84	79,79	94,05
Kota Surabaya	72,21	75,93	15,06	14,44	11,00	9,87	21.800	16.158	85,30	79,84	93,60
Kota Batu	70,56	74,40	14,24	14,11	9,42	8,79	18.881	9.472	80,35	72,08	89,71
BANTEN	67,97	71,81	12,82	12,98	9,22	8,24	17.532	10.593	76,61	70,23	91,67
Pandeglang	62,52	66,35	13,18	13,88	7,45	6,47	14.131	6.124	70,03	60,70	86,68
Lebak	65,02	68,94	12,11	11,79	6,76	5,76	13.255	4.250	68,64	54,66	79,63
Tangerang	67,76	71,70	12,82	12,75	8,77	7,57	18.036	10.802	76,18	69,30	90,97
Serang	62,50	66,33	12,23	12,86	7,84	6,83	15.405	9.751	70,26	64,92	92,40
Kota Tangerang	69,57	73,45	13,83	13,85	11,01	10,27	19.369	14.500	81,61	77,44	94,89
Kota Cilegon	64,59	68,49	13,14	14,64	10,36	8,94	20.837	7.985	78,10	68,07	87,16
Kota Serang	65,79	69,76	12,90	12,68	9,41	8,17	19.223	12.535	76,62	70,46	91,96
Kota Tangerang Selatan	70,43	74,27	14,41	14,50	12,07	11,09	22.479	15.019	85,28	79,79	93,56
BALI	70,11	73,89	13,38	13,22	9,66	8,03	17.139	13.689	78,63	73,69	93,72
Jembrana	70,23	74,08	12,66	12,49	9,24	7,38	13.941	11.607	75,46	70,57	93,52
Tabanan	71,59	75,36	13,27	12,90	9,75	8,23	14.923	13.853	78,05	74,42	95,35
Badung	73,11	76,77	14,25	13,92	10,92	9,69	19.795	17.350	83,95	80,17	95,50
Gianyar	71,62	75,38	13,94	13,74	9,77	8,16	16.640	13.863	79,83	75,25	94,26
Klungkung	69,05	72,95	13,89	12,90	9,21	7,12	14.571	11.117	76,55	69,74	91,10
Bangli	68,34	72,29	12,57	12,07	8,09	6,31	15.103	10.916	73,71	67,26	91,25
Karangasem	68,32	72,26	12,57	12,39	7,34	5,24	14.595	9.030	72,39	64,33	88,87
Buleleng	69,68	73,56	12,90	13,02	7,95	6,29	18.994	12.835	76,58	70,41	91,94
Kota Denpasar	72,79	76,47	14,03	13,96	11,62	10,90	21.722	19.496	85,28	82,65	96,92

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NUSA TENGGARA BARAT	64,32	68,16	13,71	13,38	8,06	6,58	14.616	9.334	72,58	65,61	90,40
Lombok Barat	64,63	68,53	13,68	13,03	7,22	5,58	17.399	10.390	73,17	65,16	89,05
Lombok Tengah	63,99	67,87	14,04	13,21	7,10	5,40	14.520	8.067	71,49	62,38	87,26
Lombok Timur	63,75	67,62	13,83	13,42	7,43	6,04	12.362	8.580	70,10	63,90	91,16
Sumbawa	65,28	69,22	13,26	12,91	8,30	7,54	11.561	8.803	70,71	66,22	93,65
Dompu	64,59	68,49	13,30	13,86	8,94	7,87	13.421	7.971	72,60	66,15	91,12
Bima	64,11	67,99	13,34	12,82	8,34	7,45	11.403	7.765	70,12	64,15	91,49
Sumbawa Barat	65,76	69,72	13,97	13,20	9,06	8,00	15.438	11.222	75,32	69,72	92,57
Lombok Utara	64,90	68,82	13,15	12,54	6,67	5,09	13.413	6.554	69,73	59,56	85,42
Kota Mataram	69,60	73,48	15,61	15,23	10,49	9,16	19.447	13.515	82,81	76,82	92,77
Kota Bima	68,18	72,11	14,82	15,63	10,89	9,93	12.747	10.571	77,66	74,86	96,39
NUSA TENGGARA TIMUR	64,98	68,81	13,07	13,28	7,91	7,23	10.763	7.362	69,20	64,16	92,72
Sumba Barat	64,96	68,88	13,05	12,87	6,84	6,23	9.243	7.425	66,34	62,67	94,47
Sumba Timur	62,96	66,80	12,67	12,87	6,83	6,94	11.965	9.480	67,43	65,02	96,43
Kupang	62,43	66,25	13,79	13,88	7,76	7,22	10.997	5.665	68,68	60,59	88,22
Timor Tengah Selatan	64,31	68,20	12,27	14,75	7,05	6,33	9.241	6.083	65,49	62,13	94,87
Timor Tengah Utara	64,84	68,76	12,93	13,96	7,79	7,27	7.691	5.977	65,42	62,49	95,52
Belu	62,39	66,21	11,95	12,60	7,46	6,79	8.558	7.535	64,00	62,00	96,88
Alor	59,38	63,08	12,03	12,29	8,56	7,68	9.348	6.600	64,77	59,83	92,37
Lembata	64,95	68,87	12,40	12,74	9,06	7,56	10.248	6.912	69,42	63,36	91,27
Flores Timur	63,12	66,96	12,94	12,73	8,27	7,04	10.609	7.329	68,45	62,49	91,29
Sikka	65,05	68,98	12,57	13,44	7,03	6,51	12.664	6.369	69,12	61,96	89,64
Ende	63,19	67,03	14,03	13,76	8,34	7,38	10.094	8.958	69,14	65,99	95,44
Ngada	65,92	69,89	12,38	12,97	8,60	8,24	11.267	8.747	70,24	67,37	95,91
Manggarai	64,76	68,67	13,04	13,14	7,76	7,01	10.636	5.596	68,76	60,62	88,16
Rote Ndao	62,38	66,20	13,18	12,86	7,66	7,06	10.254	4.586	67,26	56,93	84,64

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manggarai Barat	65,10	69,03	12,26	11,67	7,71	6,77	11.650	6.116	68,92	60,08	87,17
Sumba Tengah	66,28	70,26	12,32	13,21	6,26	5,88	8.450	5.075	64,53	58,90	91,28
Sumba Barat Daya	66,39	70,35	13,00	13,23	6,42	6,00	6.917	6.392	63,39	61,79	97,48
Nagekeo	65,01	68,93	12,77	12,45	7,82	7,83	8.469	8.615	66,39	65,75	99,04
Manggarai Timur	65,94	69,90	11,68	12,01	7,22	6,65	8.154	5.158	64,56	58,68	90,89
Sabu Raijua	58,35	61,99	13,13	13,34	6,06	6,51	7.103	4.772	59,68	55,36	92,76
Malaka	62,92	66,75	12,37	12,94	7,19	6,47	8.593	4.968	64,39	57,58	89,42
Kota Kupang	67,34	71,29	16,38	16,24	11,99	11,07	16.194	13.215	82,24	78,52	95,48
KALIMANTAN BARAT	68,67	72,55	12,56	12,72	7,81	6,79	13.540	6.256	72,48	62,92	86,81
Sambas	66,79	70,75	12,66	12,50	7,34	6,09	14.736	7.112	71,84	62,48	86,97
Bengkayang	71,73	75,49	11,80	12,26	6,90	5,91	13.315	4.781	71,60	59,30	82,82
Landak	70,74	74,56	12,34	12,56	7,98	6,56	10.164	5.644	70,62	62,09	87,92
Mempawah	68,89	72,81	12,17	12,43	7,20	6,44	12.091	5.927	70,27	61,68	87,78
Sanggau	69,35	73,24	11,59	11,53	7,52	6,33	12.877	4.457	70,85	57,33	80,92
Ketapang	69,00	72,92	11,81	11,75	7,73	6,74	13.041	6.925	71,34	63,15	88,52
Sintang	69,62	73,50	11,91	12,10	7,35	6,30	12.872	5.951	71,10	61,50	86,50
Kapuas Hulu	70,46	74,30	12,69	12,03	7,95	6,78	10.307	4.961	70,97	60,14	84,74
Sekadau	69,66	73,54	11,56	11,88	7,29	6,01	11.780	4.494	69,81	57,52	82,40
Melawi	70,92	74,73	10,95	11,42	7,31	6,11	13.879	4.293	71,20	57,02	80,08
Kayong Utara	66,07	70,04	11,98	11,66	6,59	5,34	11.163	5.538	67,20	57,61	85,73
Kubu Raya	68,40	72,34	13,39	13,73	7,54	6,63	13.921	5.405	73,16	61,89	84,60
Kota Pontianak	70,83	74,65	15,26	14,79	10,44	9,84	19.743	13.886	83,19	78,04	93,81
Kota Singkawang	69,86	73,73	12,85	13,28	8,08	7,46	16.833	9.932	75,72	69,82	92,21
KALIMANTAN TENGAH	67,79	71,60	12,57	12,65	8,83	8,16	16.238	8.050	75,06	66,87	89,09
Kotawaringin Barat	68,48	72,41	12,82	12,71	8,84	7,88	19.164	11.692	77,16	70,75	91,69
Kotawaringin Timur	67,77	71,72	12,88	12,63	8,51	7,67	18.420	8.499	76,09	66,89	87,91

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kapuas	66,65	70,61	12,83	12,94	7,83	7,39	13.318	10.477	71,68	68,46	95,51
Barito Selatan	64,97	68,89	12,84	12,46	9,14	8,45	15.944	10.259	74,14	68,24	92,04
Barito Utara	69,29	73,18	12,98	12,08	8,95	8,20	14.504	7.098	75,35	65,67	87,15
Sukamara	69,49	73,38	12,40	12,11	8,47	7,22	11.580	7.683	72,05	65,45	90,84
Lamandau	67,31	71,26	12,16	12,49	8,68	8,00	15.859	9.402	73,97	67,98	91,90
Seruyan	67,38	71,17	11,62	12,16	8,28	7,51	14.143	7.235	71,85	64,26	89,44
Katingan	63,71	67,57	12,30	12,67	8,97	8,21	16.315	6.296	72,91	62,39	85,57
Pulang Pisau	65,94	69,91	12,36	12,81	8,26	7,92	13.960	8.188	71,81	66,15	92,12
Gunung Mas	68,29	72,23	11,65	12,40	9,10	8,89	15.331	8.435	74,14	68,28	92,10
Barito Timur	66,09	70,06	13,12	12,32	9,66	8,92	16.712	8.682	76,08	67,53	88,76
Murung Raya	67,44	71,39	11,92	11,73	8,38	7,09	16.378	6.063	73,66	61,44	83,41
Kota Palangka Raya	71,23	75,03	15,07	14,75	11,64	11,39	18.823	13.838	84,18	79,94	94,96
KALIMANTAN SELATAN	66,55	70,45	12,70	12,51	8,68	7,70	18.204	8.986	75,39	66,80	88,61
Tanah Laut	67,28	71,23	12,18	11,89	8,21	7,04	17.067	7.892	74,00	64,35	86,96
Kota Baru	67,06	71,02	11,85	11,97	7,97	6,91	18.138	6.450	73,72	62,00	84,10
Banjar	64,96	68,88	12,35	12,08	8,02	6,81	18.719	11.292	73,56	66,68	90,65
Barito Kuala	63,89	67,76	12,62	12,37	7,68	6,72	14.461	7.894	70,63	62,88	89,03
Tapin	68,21	72,15	11,84	11,99	8,51	7,37	18.353	6.662	75,12	63,43	84,44
Hulu Sungai Selatan	63,83	67,70	12,03	12,61	8,09	7,48	18.864	8.664	72,77	64,92	89,21
Hulu Sungai Tengah	63,83	67,69	11,92	12,19	8,47	7,69	13.509	11.954	70,26	67,87	96,60
Hulu Sungai Utara	61,62	65,42	12,76	13,36	8,15	7,11	13.995	8.558	69,91	64,03	91,59
Tabalong	68,30	72,25	12,55	12,86	9,27	8,28	18.147	6.815	76,86	65,66	85,43
Tanah Bumbu	68,05	71,99	12,68	11,94	8,31	7,20	19.272	7.370	76,13	64,21	84,34
Balangan	65,56	69,51	12,42	12,35	8,04	6,71	16.351	11.208	72,81	67,07	92,12
Kota Banjarmasin	68,97	72,88	13,92	14,02	11,08	9,36	18.482	13.588	81,04	75,61	93,30
Kota Banjar Baru	69,87	73,75	15,68	14,77	11,38	10,48	20.012	13.398	84,33	77,95	92,43

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
KALIMANTAN TIMUR	72,41	76,13	13,68	13,86	10,11	9,25	18.937	7.255	81,58	70,14	85,98
Paser	70,55	74,39	12,88	13,45	8,82	8,12	17.761	2.968	77,55	55,38	71,41
Kutai Barat	70,83	74,64	13,07	12,88	9,06	7,87	15.848	5.983	77,17	64,70	83,84
Kutai Kartanegara	70,23	74,08	13,52	13,64	9,43	8,52	18.272	4.646	79,14	62,63	79,14
Kutai Timur	71,08	74,88	12,75	12,79	9,62	8,68	18.089	4.027	78,89	60,36	76,51
Berau	69,96	73,81	12,91	14,20	9,62	8,90	19.791	7.705	79,31	69,74	87,93
Penajam Paser Utara	69,76	73,56	12,41	12,61	8,64	7,63	17.818	7.246	76,44	65,91	86,22
Mahakam Ulu	69,91	73,78	13,00	12,48	8,90	7,57	12.941	4.593	74,52	60,28	80,89
Kota Balikpapan	72,51	76,21	14,13	14,29	11,18	10,34	22.993	10.950	85,22	76,45	89,71
Kota Samarinda	72,26	75,98	14,46	14,77	10,85	9,97	21.525	10.081	84,42	75,48	89,41
Kota Bontang	72,27	75,99	13,22	12,89	11,07	10,42	26.174	9.752	85,15	73,84	86,72
KALIMANTAN UTARA	70,57	74,40	12,83	13,24	9,59	8,76	13.348	5.990	75,82	65,96	87,00
Malinau	71,20	71,64	13,17	13,71	9,21	8,37	15.190	5.238	77,24	63,11	81,71
Bulungan	71,53	73,58	13,18	12,76	9,49	8,60	14.811	6.633	77,53	66,20	85,39
Tana Tidung	70,62	71,46	12,40	12,18	9,05	7,92	12.026	3.966	73,69	57,49	78,02
Nunukan	70,52	72,17	12,62	12,69	8,34	7,73	10.681	4.385	71,79	59,40	82,74
Kota Tarakan	73,32	74,44	13,12	14,43	10,52	9,89	16.187	9.918	80,47	74,16	92,16
SULAWESI UTARA	69,71	73,55	12,58	13,06	9,46	9,39	15.429	10.239	76,36	72,18	94,53
Bolaang Mongondow	67,18	71,15	11,18	12,10	7,78	7,64	15.508	6.458	71,39	63,08	88,36
Minahasa	68,97	72,88	13,83	14,22	9,45	9,73	15.730	11.941	77,47	74,96	96,76
Kepulauan Sangihe	67,93	71,87	12,01	12,92	7,75	8,14	15.282	9.670	72,53	69,16	95,35
Kepulauan Talaud	68,01	71,95	12,15	12,61	9,42	9,20	9.260	8.176	70,01	68,38	97,67
Minahasa Selatan	67,77	71,71	11,95	12,90	9,26	8,85	17.101	7.343	75,40	66,96	88,81
Minahasa Utara	69,31	73,20	12,33	13,14	9,94	9,80	14.706	11.023	76,06	73,34	96,42

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bolaang Mongondow Utara	65,51	69,45	11,82	12,50	7,85	8,27	15.787	5.797	71,56	62,20	86,92
Siau Tagulandang Biaro	68,52	72,45	11,42	12,08	8,70	8,95	12.786	5.624	71,80	63,49	88,43
Minahasa Tenggara	68,04	71,98	12,00	12,15	8,74	8,97	15.467	8.414	74,01	67,99	91,87
Bolaang Mongondow Selatan	62,48	66,30	12,18	12,41	8,01	7,78	15.091	4.165	70,24	56,10	79,87
Bolaang Mongondow Timur	65,77	69,73	11,42	12,34	7,79	7,32	13.630	7.122	69,86	63,40	90,75
Kota Manado	69,81	73,68	14,06	14,51	11,60	11,12	16.677	13.186	81,25	78,23	96,28
Kota Bitung	68,99	72,90	11,96	12,78	9,87	9,74	17.044	10.584	76,78	72,35	94,23
Kota Tomohon	69,80	73,67	13,69	14,41	10,41	10,68	13.205	11.694	77,20	76,41	98,98
Kota Kotamobagu	68,30	72,24	12,42	13,56	10,16	9,88	15.005	10.257	76,12	72,63	95,42
SULAWESI TENGAH	66,32	70,26	12,95	13,50	8,98	8,50	13.456	7.951	73,19	67,34	92,01
Banggai Kepulauan	63,72	67,59	13,07	12,85	8,39	7,99	11.247	7.428	69,59	64,15	92,18
Banggai	68,58	72,51	12,73	13,57	8,57	7,82	14.668	7.930	74,36	67,63	90,95
Morowali	66,78	70,75	13,57	13,04	9,57	8,91	17.396	6.518	77,16	65,36	84,71
Poso	68,83	72,75	13,45	14,02	9,55	9,30	10.398	8.436	73,05	70,55	96,58
Donggala	64,84	68,75	12,25	12,78	8,48	7,45	11.500	5.911	69,63	61,46	88,27
Toli-Toli	63,32	67,17	12,72	13,04	8,36	8,02	11.797	6.320	69,45	62,38	89,82
Buol	66,13	70,10	13,05	14,40	8,90	8,59	12.084	5.731	72,07	64,39	89,34
Parigi Moutong	61,98	65,79	12,02	12,97	7,76	7,36	12.949	7.613	68,14	62,93	92,35
Tojo Una-Una	63,16	67,00	12,25	12,69	8,38	8,37	11.635	6.555	68,78	62,78	91,28
Sigi	67,54	71,49	12,65	13,08	8,73	8,17	11.371	7.699	71,55	66,77	93,32
Banggai Laut	62,82	66,65	13,01	12,27	9,11	8,01	10.898	7.577	69,62	63,38	91,04
Morowali Utara	67,16	71,11	11,98	12,78	9,17	8,20	10.774	8.821	70,69	67,79	95,90
Kota Palu	68,66	72,58	15,94	16,23	11,91	11,22	15.912	15.016	82,30	80,65	98,00

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SULAWESI SELATAN	68,54	72,42	13,03	13,73	8,57	7,95	15.928	9.868	75,42	70,21	93,09
Kepulauan Selayar	66,30	70,27	12,41	13,57	7,94	7,43	14.420	7.905	71,92	66,11	91,92
Bulukumba	65,66	69,61	12,38	13,40	7,67	7,39	13.546	10.261	70,66	68,25	96,59
Bantaeng	68,40	72,33	11,81	12,37	7,17	6,41	11.937	9.315	69,48	66,22	95,31
Jeneponto	64,24	68,13	12,02	11,96	6,61	6,48	13.977	8.191	68,42	62,70	91,64
Takalar	64,99	68,91	12,23	12,56	7,37	7,02	16.353	6.772	71,42	62,34	87,29
Gowa	68,35	72,28	13,32	13,74	8,31	7,68	14.563	6.312	74,48	64,94	87,19
Sinjai	65,15	69,08	12,87	13,57	7,59	7,37	10.193	9.078	68,15	66,92	98,20
Maros	66,95	70,90	13,02	13,14	7,98	7,20	16.740	8.283	74,29	66,19	89,10
Pangkajene dan Kepulauan	64,48	68,38	12,39	12,89	8,08	7,15	17.985	9.318	73,09	65,90	90,16
Barru	66,87	70,83	13,48	13,81	8,16	7,79	14.109	10.612	73,44	70,08	95,42
Bone	64,87	68,79	12,42	13,47	7,20	6,86	12.827	7.816	69,21	64,54	93,25
Soppeng	67,40	71,35	12,73	13,05	7,80	7,69	10.764	9.043	69,86	67,82	97,08
Wajo	65,15	69,08	12,85	13,64	7,14	6,40	20.277	9.647	73,69	66,42	90,13
Sidenreng Rappang	67,56	71,50	12,53	13,27	8,13	7,60	18.310	10.077	75,04	69,10	92,08
Pinrang	67,36	71,31	12,34	13,99	8,34	7,52	15.404	10.512	73,49	70,07	95,35
Enrekang	68,82	72,74	13,64	14,17	9,25	8,31	11.128	10.215	73,57	71,59	97,31
Luwu	68,17	72,10	12,83	13,71	8,56	7,91	14.397	8.279	74,08	68,15	92,00
Tana Toraja	71,20	75,00	13,24	14,09	8,51	7,94	10.714	5.227	72,99	64,36	88,18
Luwu Utara	66,27	70,23	12,53	12,36	7,92	7,34	16.230	8.214	73,06	65,18	89,21
Luwu Timur	68,36	72,29	12,75	13,21	8,88	8,20	19.710	9.272	77,32	69,29	89,61
Toraja Utara	71,40	75,18	12,94	13,67	8,42	7,69	11.512	5.188	73,38	63,68	86,78
Kota Makasar	70,01	73,87	15,38	16,06	11,52	10,89	20.432	13.591	84,47	79,81	94,48
Kota Parepare	69,17	73,07	14,11	14,65	10,66	9,92	15.856	13.379	79,39	76,83	96,78
Kota Palopo	68,77	72,69	14,10	15,77	10,90	10,49	15.740	12.069	79,38	77,28	97,35
SULAWESI TENGGARA	69,20	73,12	13,49	13,70	9,36	8,47	13.445	7.714	75,62	68,48	90,56

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Buton	65,88	69,85	14,09	13,73	9,33	6,66	12.188	4.549	73,57	58,72	79,82
Muna	68,15	72,09	13,69	14,09	9,30	7,73	12.306	6.230	74,37	65,08	87,51
Konawe	67,99	71,93	12,61	13,33	9,76	8,53	14.563	9.433	75,38	69,81	92,61
Kolaka	68,70	72,62	12,78	13,30	8,99	8,68	18.049	8.444	76,90	69,11	89,87
Konawe Selatan	68,50	72,43	12,24	12,81	8,28	7,22	13.393	6.253	72,57	63,46	87,45
Bombana	66,50	70,46	11,71	12,35	8,13	7,27	12.506	4.972	70,20	59,51	84,77
Wakatobi	68,10	72,04	13,31	13,17	8,35	7,19	13.488	7.242	73,68	65,28	88,60
Kolaka Utara	68,12	72,06	12,09	12,11	8,20	7,80	10.892	9.941	70,14	68,26	97,32
Buton Utara	68,73	72,66	12,72	12,87	9,44	8,06	9.959	6.976	71,70	65,86	91,85
Konawe Utara	67,20	71,16	12,49	12,60	9,60	8,45	13.565	5.884	74,00	63,41	85,69
Kolaka Timur	70,35	74,19	12,38	12,11	7,49	6,72	7.830	8.477	67,12	66,20	98,63
Konawe Kepulauan	66,21	70,17	11,81	11,38	9,78	8,68	10.542	4.791	70,58	59,59	84,43
Muna Barat	68,13	72,07	12,35	12,19	7,36	6,20	10.381	6.101	68,87	61,17	88,82
Buton Tengah	65,47	69,41	13,08	12,70	7,68	5,28	11.573	4.538	69,86	55,99	80,15
Buton Selatan	65,47	69,41	12,95	12,94	7,79	6,44	13.342	2.955	71,20	51,46	72,28
Kota Kendari	71,58	75,35	16,27	16,38	12,41	11,47	17.065	12.844	85,39	80,91	94,75
Kota Baubau	68,94	72,85	14,49	15,21	11,01	9,97	15.168	8.258	79,61	72,17	90,65
GORONTALO	66,01	69,94	12,78	13,54	7,37	8,00	14.186	5.271	71,29	61,90	86,83
Boalemo	66,79	70,75	11,87	12,88	6,06	6,57	13.470	3.714	68,36	55,47	81,14
Gorontalo	65,42	69,37	12,71	13,35	6,60	7,33	14.166	3.902	69,88	56,83	81,33
Pohuwato	61,87	65,67	12,02	12,75	7,02	7,31	13.100	6.847	67,23	61,49	91,46
Bone Bolango	66,34	70,30	13,10	14,33	7,59	8,57	14.280	5.241	72,15	63,28	87,71
Gorontalo Utara	63,80	67,67	11,98	13,07	6,49	7,13	13.671	3.735	67,80	55,09	81,25
Kota Gorontalo	70,45	74,29	14,10	14,68	10,30	10,41	17.915	6.333	80,75	69,65	86,25
SULAWESI BARAT	62,96	66,78	12,46	12,98	8,00	7,50	13.424	6.940	69,74	62,60	89,76
Majene	59,40	63,10	13,49	13,60	8,77	8,39	12.290	9.137	69,01	65,16	94,42
Polewali Mandar	60,25	63,99	12,77	13,41	7,61	7,01	12.242	7.314	67,34	61,66	91,57
Mamasa	68,73	72,66	11,33	12,37	7,96	7,24	8.457	7.539	66,74	65,24	97,75

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mamuju	65,21	69,14	12,57	13,65	7,97	7,50	12.681	6.637	70,42	63,83	90,64
Mamuju Utara	63,92	67,79	11,92	11,64	8,23	7,77	17.041	6.179	72,03	60,81	84,42
Mamuju Tengah	66,02	69,99	11,71	12,88	7,55	7,03	13.091	5.315	69,62	60,36	86,70
MALUKU	63,95	67,79	13,73	14,27	9,96	9,66	12.160	7.773	72,94	67,86	93,04
Maluku Tenggara Barat	61,39	65,18	11,82	12,78	9,70	9,41	8.614	4.044	66,08	57,13	86,46
Maluku Tenggara	62,98	66,83	12,04	13,29	10,10	9,30	8.650	7.255	67,57	65,38	96,76
Maluku Tengah	64,34	68,23	13,89	14,81	9,66	9,63	11.337	9.885	72,26	71,11	98,41
Buru	64,32	68,21	12,65	13,20	8,89	8,00	16.413	8.650	73,55	66,39	90,27
Kepulauan Aru	60,79	64,55	12,06	12,35	8,89	8,47	11.409	5.699	67,81	59,84	88,25
Seram Bagian Barat	59,56	63,27	12,94	13,74	9,06	8,67	8.784	8.340	65,67	64,77	98,63
Seram Bagian Timur	57,31	60,90	12,66	12,77	8,65	7,18	13.004	6.911	67,41	59,11	87,69
Maluku Barat Daya	60,24	63,97	12,25	12,36	8,23	8,06	9.792	5.546	65,47	58,80	89,81
Buru Selatan	64,13	68,02	12,61	12,81	8,26	7,19	13.208	5.930	70,67	60,90	86,18
Kota Ambon	68,33	72,26	15,60	16,64	11,99	11,84	16.458	13.530	82,23	80,45	97,84
Kota Tual	63,23	67,08	13,83	14,75	10,87	9,98	10.872	5.307	72,54	63,71	87,83
MALUKU UTARA	66,25	70,17	13,71	13,63	9,44	8,55	12.662	7.094	73,89	66,21	89,61
Halmahera Barat	64,13	68,02	12,96	13,09	8,86	7,83	11.152	5.932	70,16	61,88	88,20
Halmahera Tengah	61,69	65,49	13,11	12,69	9,30	8,58	11.308	6.656	69,70	62,46	89,61
Kepulauan Sula	61,24	65,02	12,95	12,72	9,13	8,44	9.664	6.762	67,59	62,28	92,14
Halmahera Selatan	63,77	67,63	12,80	12,47	8,49	7,34	10.985	5.617	69,23	59,95	86,60
Halmahera Utara	67,44	71,38	13,68	13,22	8,96	7,90	11.650	6.873	73,06	65,28	89,35
Halmahera Timur	66,61	70,57	13,06	12,61	8,65	7,61	12.632	4.526	72,44	58,97	81,41
Pulau Morotai	64,98	68,90	11,85	12,43	7,65	6,53	11.291	2.417	68,05	47,54	69,86
Pulau Taliabu	60,04	63,76	12,16	12,58	7,86	7,07	11.764	4.588	66,55	55,62	83,58
Kota Ternate	68,84	72,75	15,61	15,86	12,02	11,26	18.184	10.683	83,52	76,92	92,10

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota Tidore Kepulauan	67,20	71,14	14,15	14,24	10,28	9,42	10.170	8.294	73,52	69,94	95,13
PAPUA BARAT	64,01	67,78	13,39	12,41	10,20	7,19	11.621	5.701	72,47	59,96	82,74
Fakfak	66,37	70,33	14,05	15,18	10,34	7,83	11.457	4.790	74,40	62,09	83,45
Kaimana	62,67	66,50	12,28	11,77	10,00	7,08	11.997	5.594	70,79	58,44	82,55
Teluk Wondama	58,06	61,69	11,32	11,74	9,39	6,80	12.699	4.406	67,18	53,17	79,15
Teluk Bintuni	58,72	62,38	12,52	12,12	9,19	7,93	13.892	6.558	69,29	59,53	85,91
Manokwari	66,53	70,49	13,81	13,00	11,10	8,04	17.587	7.699	79,24	66,14	83,47
Sorong Selatan	64,15	68,04	13,53	12,14	9,61	7,16	8.082	4.125	68,25	55,81	81,77
Sorong	64,02	67,90	13,69	13,26	8,89	7,52	10.740	5.364	70,49	60,45	85,76
Raja Ampat	62,73	66,55	12,15	11,83	9,24	7,22	12.021	3.895	69,92	54,22	77,55
Tambrauw	58,09	61,72	12,34	10,61	7,37	4,52	8.493	2.516	62,09	42,20	67,97
Maybrat	63,19	67,06	14,32	12,50	9,03	6,00	7.877	3.454	67,66	52,08	76,97
Manokwari Selatan	65,45	69,40	12,29	12,62	9,67	5,68	9.419	2.115	69,41	44,53	64,16
Pegunungan Arfak	65,16	69,08	11,63	8,71	9,02	4,35	7.029	4.298	64,75	49,72	76,79
Kota Sorong	68,44	72,37	14,15	14,61	11,32	10,96	20.019	10.885	82,09	75,50	91,97
PAPUA	63,87	67,51	11,29	10,72	7,41	5,79	11.026	4.273	66,38	53,14	80,05
Merauke	65,17	68,84	13,60	12,67	8,87	8,23	16.717	8.193	75,12	65,88	87,70
Jayawijaya	57,54	61,14	13,08	10,79	6,88	4,55	8.825	5.528	62,33	51,87	83,22
Jayapura	64,91	68,83	14,19	14,19	10,19	8,91	14.927	9.225	76,11	69,34	91,10
Nabire	65,93	69,90	11,59	11,56	10,49	8,89	14.467	8.767	74,13	66,77	90,07
Kepulauan Yapen	67,03	70,98	12,44	12,75	9,93	8,14	11.448	6.733	72,61	64,70	89,11
Biak Numfor	66,16	70,14	14,07	13,64	10,67	9,27	14.997	8.938	77,26	69,54	90,01
Paniai	64,27	68,16	11,00	10,12	4,55	3,12	10.853	2.521	62,06	42,33	68,21
Puncak Jaya	63,00	66,84	7,05	6,94	5,36	3,29	8.693	2.156	55,68	36,33	65,25
Mimika	70,29	74,13	12,08	12,25	10,36	9,41	19.799	4.266	79,54	61,19	76,93
Boven Digoel	57,78	61,39	11,65	10,72	8,99	7,81	12.642	4.321	66,84	52,97	79,25
Mappi	62,94	66,77	10,63	10,52	6,90	5,57	10.286	4.664	63,88	53,42	83,63
Asmat	55,74	59,23	8,74	8,32	5,76	4,05	10.278	1.572	56,62	30,41	53,71

Lampiran 2. IPG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Yahukimo	63,81	67,68	8,38	7,57	5,77	2,30	9.456	3.599	59,18	42,65	72,07
Pegunungan Bintang	62,37	66,19	6,27	5,60	4,37	2,31	8.394	4.568	52,30	41,64	79,62
Tolikara	63,60	67,45	8,87	7,92	4,79	2,29	8.989	1.946	57,75	34,55	59,83
Sarmi	64,26	68,15	13,01	11,52	9,27	7,67	10.013	4.599	69,69	57,25	82,15
Keerom	64,59	68,49	12,66	11,99	8,94	7,11	13.441	6.991	71,96	62,04	86,21
Waropen	64,24	68,12	12,97	12,58	9,81	8,46	11.154	2.580	71,34	50,31	70,52
Supiori	63,82	67,69	13,76	12,34	9,18	7,52	8.674	3.154	68,59	52,40	76,40
Mamberamo Raya	55,76	59,25	11,94	11,12	5,93	4,09	7.190	3.824	57,20	46,82	81,85
Nduga	53,42	56,74	4,28	2,56	1,72	0,83	4.181	4.554	34,86	28,84	82,73
Lanny Jaya	64,01	67,89	9,24	8,13	4,43	1,56	4.569	5.878	51,13	47,11	92,14
Mamberamo Tengah	61,49	65,28	9,63	7,84	4,84	1,70	4.671	4.833	51,43	44,23	86,00
Yalimo	63,35	67,20	9,68	8,47	4,47	2,54	7.474	4.646	56,52	46,84	82,87
Puncak	63,99	67,48	5,51	4,88	2,50	0,83	5.976	4.513	45,14	37,27	82,57
Dogiyai	63,62	67,47	10,12	10,84	5,40	4,08	8.557	3.519	59,80	48,71	81,45
Intan Jaya	63,52	67,38	8,09	6,38	4,19	1,50	7.939	3.333	54,60	38,57	70,64
Deiyai	63,13	66,98	10,78	9,49	3,95	1,72	6.998	2.606	56,38	39,96	70,88
Kota Jayapura	68,35	72,29	15,45	14,51	11,75	11,30	18.572	13.833	83,00	78,20	94,22
INDONESIA	69,44	73,33	12,87	13,03	8,81	7,89	15.866	9.244	75,96	69,18	91,07

Sumber: www.bps.go.id, 2020

Lampiran 3. IPG Menurut Provinsi, 2010-2019

Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ACEH	89,05	89,30	90,32	90,61	91,50	92,07	91,89	91,67	91,67	91,84
SUMATERA UTARA	89,43	89,57	90,04	90,07	90,26	90,96	90,82	90,65	90,66	90,71
SUMATERA BARAT	91,98	92,82	92,98	93,02	94,04	94,74	94,42	94,16	94,17	94,09
RIAU	85,17	85,74	86,29	86,74	87,62	87,75	88,04	88,17	88,37	88,43
JAMBI	83,04	83,94	85,91	87,69	87,88	88,44	88,29	88,13	88,44	88,44
SUMATERA SELATAN	89,73	89,92	90,79	91,25	91,64	92,22	92,08	92,43	92,62	92,40
BENGKULU	88,88	89,47	90,51	90,55	91,02	91,38	91,06	91,34	91,37	91,19
LAMPUNG	87,18	88,23	88,49	88,84	89,62	89,89	90,30	90,49	90,57	90,39
KEP. BANGKA BELITUNG	86,87	87,10	87,54	87,73	87,74	88,37	88,90	88,93	89,15	89,00
KEPULAUAN RIAU	92,05	92,11	92,23	92,81	93,20	93,22	93,13	92,96	92,97	93,10
DKI JAKARTA	93,76	93,76	94,11	94,26	94,60	94,72	94,98	94,70	94,70	94,71
JAWA BARAT	86,94	87,12	87,79	88,21	88,35	89,11	89,56	89,18	89,19	89,26
JAWA TENGAH	90,32	90,92	91,12	91,50	91,89	v92,21	92,22	91,94	91,95	91,89
D I YOGYAKARTA	92,82	93,56	93,73	94,15	94,31	94,41	94,27	94,39	94,73	94,77
JAWA TIMUR	88,80	89,28	89,36	90,22	90,83	91,07	90,72	90,76	90,77	90,91
BANTEN	90,22	90,22	90,28	90,31	90,99	91,11	90,97	91,14	91,30	91,67
BALI	90,90	91,67	92,78	93,00	93,32	92,71	93,20	93,70	93,71	93,72
NUSA TENGGARA BARAT	86,53	87,60	88,85	89,44	90,02	90,23	90,05	90,36	90,37	90,40
NUSA TENGGARA TIMUR	90,06	90,66	91,47	91,74	92,76	92,91	92,72	92,44	92,57	92,72
KALIMANTAN BARAT	84,09	84,10	84,28	84,39	84,72	85,61	85,77	86,28	86,74	86,81
KALIMANTAN TENGAH	88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	89,25	89,07	88,91	89,13	89,09
KALIMANTAN SELATAN	88,00	88,09	88,33	88,33	88,46	88,55	88,86	88,60	88,61	88,61
KALIMANTAN TIMUR	83,00	83,18	84,33	84,69	84,75	85,07	85,60	85,62	85,63	85,98
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	85,63	85,67	85,68	86,34	85,96	86,74	87,00
SULAWESI UTARA	93,10	93,29	93,38	93,75	94,58	94,64	95,04	94,78	94,79	94,53
SULAWESI TENGAH	91,23	91,70	91,77	91,84	92,69	92,25	91,91	91,66	92,08	92,01
SULAWESI SELATAN	91,54	91,79	91,96	92,34	92,60	92,92	92,79	92,84	93,15	93,09
SULAWESI TENGGARA	87,90	88,06	88,42	89,24	89,56	90,30	90,23	90,24	90,24	90,56
GORONTALO	83,26	84,19	84,54	84,57	85,09	85,87	86,12	86,64	86,63	86,83
SULAWESI BARAT	87,53	87,60	87,90	88,56	89,18	89,52	89,35	89,44	90,05	89,76
MALUKU	91,79	92,36	92,38	92,46	92,55	92,54	92,38	92,75	93,03	93,04

Lampiran 3. IPG Menurut Provinsi, 2010-2019

Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MALUKU UTARA	85,29	85,31	87,06	87,96	88,79	88,86	89,15	89,15	89,50	89,61
PAPUA BARAT	81,15	81,34	81,57	81,72	81,95	81,99	82,34	82,42	82,47	82,74
PAPUA	73,93	74,99	76,42	77,61	78,57	78,52	79,09	79,38	80,11	80,05
INDONESIA	89,42	89,52	90,07	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07

Sumber: www.bps.go.id, 2020

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ACEH	89,05	89,30	90,32	90,61	91,50	92,07	91,89	91,67	91,67	91,84
Simeulue	68,59	71,22	72,51	74,55	75,55	76,19	-	76,72	77,52	77,94
Aceh Singkil	76,53	77,85	79,75	81,52	82,80	82,91	-	83,98	84,02	84,48
Aceh Selatan	88,87	89,15	90,10	90,57	90,82	91,01	-	91,46	91,54	91,49
Aceh Tenggara	89,55	89,74	90,27	90,64	91,52	91,65	-	92,77	93,01	93,02
Aceh Timur	83,20	84,67	84,75	84,77	84,92	85,42	-	86,03	85,64	85,72
Aceh Tengah	95,66	96,73	97,03	97,04	97,19	97,81	-	97,69	97,75	97,48
Aceh Barat	83,16	83,23	83,25	83,36	83,50	84,58	-	84,92	85,41	85,81
Aceh Besar	93,77	93,79	94,10	94,59	94,65	95,23	-	95,09	95,19	94,98
Pidie	92,76	93,39	93,72	93,77	94,33	94,54	-	94,03	93,50	93,49
Bireuen	91,41	91,44	91,63	93,56	94,86	95,63	-	95,15	94,64	94,92
Aceh Utara	89,99	90,21	90,92	92,23	92,41	92,52	-	92,77	92,21	92,38
Aceh Barat Daya	85,90	86,64	87,38	88,59	89,39	89,54	-	89,49	89,86	90,02
Gayo Lues	85,27	85,88	86,31	86,70	87,03	87,04	-	87,77	88,39	88,70
Aceh Tamiang	76,76	77,56	78,39	78,90	80,37	81,12	-	81,28	81,43	81,95
Nagan Raya	80,25	81,16	82,63	86,35	90,40	89,62	-	89,80	89,92	90,31
Aceh Jaya	77,12	79,42	83,31	85,59	88,06	88,08	-	88,46	89,26	89,28
Bener Meriah	91,68	94,14	95,31	96,36	96,44	96,46	-	96,35	96,53	96,69
Pidie Jaya	93,66	93,96	94,01	94,11	94,70	94,98	-	95,19	95,35	95,11
Kota Banda Aceh	93,49	94,22	94,79	94,94	95,30	95,83	-	95,40	95,46	95,17
Kota Sabang	93,32	93,95	94,09	94,60	96,31	96,05	-	95,83	95,97	95,47
Kota Langsa	94,92	95,01	95,16	96,03	96,31	96,34	-	95,70	95,89	95,79
Kota Lhokseumawe	91,72	92,11	92,36	93,15	93,76	94,62	-	94,60	94,98	95,06
Kota Subulussalam	81,59	81,66	81,74	81,80	81,93	82,94	-	83,96	84,53	85,05
SUMATERA UTARA	89,43	89,57	90,04	90,07	90,26	90,96	90,82	90,65	90,66	90,71
Nias	75,89	80,71	83,10	86,63	88,66	89,01	-	90,33	90,86	91,23
Mandailing Natal	91,53	91,64	91,88	92,28	92,34	92,61	-	93,23	93,48	93,62
Tapanuli Selatan	88,26	88,69	89,33	90,83	91,14	91,42	-	91,07	91,21	91,33
Tapanuli Tengah	93,76	93,84	93,98	94,52	95,30	95,29	-	94,16	94,27	94,78
Tapanuli Utara	96,94	97,13	98,82	98,99	99,01	98,68	-	97,51	97,87	98,04
Toba Samosir	96,74	97,34	97,52	97,89	98,11	97,43	-	97,40	97,93	98,14
Labuhan Batu	85,25	85,56	87,55	88,02	90,84	90,73	-	90,79	91,02	91,05
Asahan	85,07	85,33	86,17	87,13	90,42	90,82	-	91,07	91,21	91,22
Simalungun	88,37	89,29	90,48	91,06	92,78	92,84	-	92,59	92,80	93,03

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dairi	96,22	96,31	97,36	97,64	97,86	98,23	-	97,68	97,44	97,77
Karo	94,79	94,98	95,05	95,33	95,70	95,95	-	96,08	96,27	96,31
Deli Serdang	89,44	89,81	90,16	90,21	90,60	90,75	-	90,78	91,18	91,31
Langkat	85,11	85,92	86,75	87,03	87,80	88,42	-	88,77	89,29	89,52
Nias Selatan	84,91	85,39	85,72	86,03	86,29	86,89	-	87,38	87,51	87,59
Humbang Hasundutan	90,15	92,64	95,05	96,65	97,29	96,81	-	97,15	96,93	97,10
Pakpak Bharat	96,34	97,15	98,08	99,02	99,34	99,52	-	98,98	99,00	99,05
Samosir	95,63	96,38	96,47	96,47	96,75	96,17	-	96,07	96,43	96,54
Serdang Bedagai	86,69	86,84	87,13	87,68	87,73	87,69	-	88,03	88,61	88,79
Batu Bara	77,40	77,97	78,89	79,58	80,50	81,55	-	82,65	82,90	82,93
Padang Lawas Utara	81,22	81,93	81,96	82,02	85,86	86,24	-	86,22	86,79	87,63
Padang Lawas	83,27	83,67	84,61	85,21	85,80	85,87	-	85,21	85,11	85,64
Labuhan Batu Selatan	84,69	85,39	85,92	85,95	86,40	86,95	-	87,29	86,97	87,43
Labuhan Batu Utara	85,60	88,80	89,17	89,48	90,02	89,47	-	89,34	89,82	90,03
Nias Utara	-	72,54	74,25	76,00	78,20	78,85	-	78,86	78,61	79,02
Nias Barat	-	81,94	82,51	82,77	84,52	84,56	-	85,53	85,97	86,26
Kota Sibolga	93,13	94,30	95,09	95,89	96,84	97,46	-	97,17	97,33	97,53
Kota Tanjung Balai	82,46	85,29	87,19	88,25	88,65	88,67	-	88,94	89,37	89,51
Kota Pematang Siantar	92,80	94,17	94,84	94,98	95,04	95,18	-	95,18	95,32	95,46
Kota Tebing Tinggi	92,30	92,61	92,97	93,20	93,25	93,45	-	93,23	93,33	93,55
Kota Medan	91,87	92,34	92,40	92,91	93,10	93,16	-	93,34	93,98	94,02
Kota Binjai	87,95	89,19	89,72	89,95	90,81	90,79	-	90,76	90,57	90,60
Kota Padangsidim-puan	95,56	96,24	96,57	97,29	97,63	97,09	-	97,16	97,17	97,59
Kota Gunungsitoli	-	82,46	86,22	87,69	89,41	89,58	-	89,46	89,21	89,25
SUMATERA BARAT	91,98	92,82	92,98	93,02	94,04	94,74	94,42	94,16	94,17	94,09
Kepulauan Mentawai	86,77	87,63	88,04	88,45	89,15	89,31	-	89,13	89,45	89,33
Pesisir Selatan	93,20	93,38	93,60	93,62	95,23	95,23	-	94,98	94,62	95,16
Solok	90,27	90,73	91,17	93,44	95,45	95,73	-	95,73	96,20	96,17
Sijunjung	90,00	90,46	90,47	91,08	92,24	92,34	-	93,40	93,21	93,01
Tanah Datar	93,59	97,05	97,43	97,62	97,72	98,44	-	98,51	97,58	97,55
Padang Pariaman	92,33	92,34	92,53	92,90	93,04	93,15	-	93,79	93,07	92,92
Agam	94,54	94,89	96,38	96,68	96,69	97,04	-	97,16	96,92	96,84

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lima Puluh Kota	91,74	91,97	92,69	93,82	95,77	95,50	-	94,62	94,93	94,77
Pasaman	91,76	91,99	92,11	92,14	92,88	92,95	-	93,00	92,61	92,59
Solok Selatan	91,12	91,18	91,23	91,27	94,84	95,33	-	94,54	94,92	95,03
Dharmasraya	86,74	87,19	87,34	88,11	88,18	88,29	-	88,43	88,26	88,30
Pasaman Barat	86,20	87,33	87,55	88,09	88,41	88,44	-	88,97	89,59	90,06
Kota Padang	91,28	92,07	92,59	92,87	93,23	93,77	-	93,77	93,77	93,48
Kota Solok	96,03	96,37	96,38	96,47	96,51	96,62	-	96,70	97,24	97,13
Kota Sawah Lunto	88,20	90,98	93,52	94,84	95,40	95,52	-	95,50	95,68	95,51
Kota Padang Panjang	98,76	99,14	99,20	99,26	99,37	98,56	-	97,76	97,77	97,50
Kota Bukittinggi	97,94	98,47	98,73	98,99	99,21	99,75	-	98,78	98,80	98,77
Kota Payakumbuh	97,46	98,20	98,33	98,42	98,47	98,52	-	98,53	98,54	98,51
Kota Pariaman	96,17	97,16	97,69	98,12	98,58	98,72	-	98,95	98,61	98,19
RIAU	85,17	85,74	86,29	86,74	87,62	87,75	88,04	88,17	88,37	88,43
Kuantan Singingi	79,03	79,64	83,98	86,64	87,81	88,90	-	89,71	90,06	90,57
Indragiri Hulu	82,52	82,88	83,54	84,62	86,27	86,33	-	86,58	86,61	87,33
Indragiri Hilir	78,81	79,24	79,47	80,05	80,99	81,10	-	81,80	82,37	82,57
Pelalawan	83,07	83,52	84,59	85,06	87,83	87,81	-	88,50	88,50	88,51
Siak	87,93	88,41	88,85	89,05	89,30	89,02	-	88,41	88,52	88,58
Kampar	87,77	88,18	88,27	88,46	88,78	89,17	-	89,22	89,29	89,83
Rokan Hulu	78,25	79,00	79,15	79,35	79,36	79,79	-	81,84	81,85	82,13
Bengkalis	82,49	85,88	86,67	87,59	88,86	88,87	-	89,81	89,96	90,08
Rokan Hilir	82,29	82,73	82,79	83,93	84,30	84,29	-	84,73	84,86	85,22
Kepulauan Meranti	-	84,12	84,14	84,21	84,37	84,42	-	85,30	85,90	86,20
Kota Pekanbaru	90,63	90,76	90,77	91,00	91,83	92,36	-	92,86	92,97	93,12
Kota Dumai	84,88	88,62	88,82	89,01	89,35	89,74	-	90,52	90,82	90,86
JAMBI	83,04	83,94	85,91	87,69	87,88	88,44	88,29	88,13	88,44	88,44
Kerinci	82,06	82,59	83,77	85,36	85,77	85,72	-	85,97	86,32	86,68
Merangin	79,91	80,83	86,73	87,54	87,93	87,12	-	87,64	88,01	88,01
Sarolangun	85,35	86,08	86,65	87,87	90,28	90,62	-	90,44	90,29	90,67
Batang Hari	80,43	82,20	82,35	82,64	83,67	83,93	-	84,18	84,49	85,17
Muaro Jambi	75,97	76,28	76,89	77,45	78,01	78,41	-	79,41	80,21	80,29
Tanjung Jabung Timur	77,93	78,09	79,18	82,32	85,07	84,68	-	86,56	87,30	87,76
Tanjung Jabung Barat	80,28	80,61	83,31	83,58	83,74	84,81	-	85,44	85,87	85,68

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tebo	86,63	86,80	86,88	87,01	90,31	91,31	-	90,06	90,22	90,23
Bungo	80,72	80,74	83,84	85,63	88,10	88,15	-	88,15	88,20	88,63
Kota Jambi	88,71	90,68	91,76	93,05	94,55	94,67	-	94,45	94,46	94,14
Kota Sungai Penuh	87,72	89,42	90,41	92,70	93,44	93,82	-	93,98	94,43	94,44
SUMATERA SELATAN	89,73	89,92	90,79	91,25	91,64	92,22	92,08	92,43	92,62	92,40
Ogan Komering Ulu	86,67	86,83	87,01	89,43	93,23	93,26	-	93,46	94,01	93,92
Ogan Komering Ilir	87,34	88,38	89,01	89,22	89,70	90,25	-	91,08	91,35	91,22
Muara Enim	84,01	84,21	85,24	86,53	88,59	89,47	-	89,32	89,76	89,69
Lahat	92,04	92,17	93,05	93,90	94,67	94,68	-	94,80	95,08	94,82
Musi Rawas	83,39	83,99	84,25	84,58	85,08	85,04	-	85,12	85,17	85,59
Musi Banyuasin	74,03	74,06	78,02	78,13	81,24	81,66	-	81,97	82,68	82,85
Banyu Asin	84,63	85,22	87,24	87,37	87,84	88,69	-	88,97	89,25	89,16
Ogan Komering Ulu Selatan	86,18	87,30	87,70	89,68	91,75	91,82	-	92,12	92,80	92,78
Ogan Komering Ulu Timur	88,68	90,67	92,08	92,41	92,43	92,72	-	93,84	94,14	94,07
Ogan Ilir	94,10	95,62	98,01	98,48	98,73	98,64	-	98,15	98,45	98,95
Empat Lawang	89,87	90,02	90,29	91,01	91,59	91,71	-	92,95	93,24	93,16
Penukal Abab Lema-tang Ilir	-	-	-	89,85	92,34	92,37	-	92,19	92,79	93,20
Musi Rawas Utara	-	-	-	92,71	92,81	92,84	-	92,86	93,18	93,10
Kota Palembang	92,78	92,82	93,16	94,47	95,47	95,63	-	95,56	96,01	95,90
Kota Prabumulih	84,74	88,73	89,48	90,90	91,22	92,04	-	92,72	93,32	93,26
Kota Pagar Alam	92,30	92,80	92,83	92,98	93,23	93,43	-	93,82	94,44	94,33
Kota Lubuklinggau	91,73	92,90	94,76	95,51	95,78	95,85	-	95,74	95,83	95,94
BENGKULU	88,88	89,47	90,51	90,55	91,02	91,38	91,06	91,34	91,37	91,19
Bengkulu Selatan	91,71	91,82	92,16	93,60	94,00	94,42	-	93,74	94,08	94,05
Rejang Lebong	91,57	92,26	92,43	92,44	92,55	92,85	-	94,15	94,59	94,15
Bengkulu Utara	89,87	90,29	90,57	91,09	91,32	91,39	-	91,00	91,19	91,25
Kaur	81,63	83,15	84,39	85,34	85,66	86,21	-	86,91	87,20	87,13
Seluma	81,33	82,81	83,29	83,51	84,80	84,98	-	85,20	85,28	85,32
Mukomuko	82,58	82,95	83,13	83,84	84,25	84,28	-	83,98	84,18	83,95
Lebong	89,02	89,83	89,85	90,45	91,11	91,12	-	90,64	90,99	91,49
Kepahiang	91,11	92,42	93,73	93,75	94,99	94,66	-	94,69	95,20	95,32
Bengkulu Tengah	78,38	78,53	80,54	80,83	84,68	85,07	-	85,77	86,36	86,55

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Bengkulu	91,48	92,59	93,53	94,34	95,71	95,64	-	96,36	96,55	95,97
LAMPUNG	87,18	88,23	88,49	88,84	89,62	89,89	90,30	90,49	90,57	90,39
Lampung Barat	89,94	90,81	91,04	91,29	91,54	91,65	-	92,47	92,74	92,55
Tanggamus	88,06	88,43	88,99	89,35	89,61	89,79	-	90,71	91,14	90,88
Lampung Selatan	86,67	86,99	87,80	88,37	88,82	88,89	-	89,52	89,87	89,54
Lampung Timur	86,37	86,97	87,09	87,28	87,42	87,51	-	87,85	88,67	88,78
Lampung Tengah	87,75	87,76	87,95	88,97	88,99	89,08	-	89,23	89,57	89,88
Lampung Utara	86,72	86,98	87,19	87,48	87,69	87,85	-	88,69	89,34	89,48
Way Kanan	79,09	84,14	87,11	87,28	87,45	87,54	-	87,85	88,25	88,22
Tulangbawang	82,79	82,99	85,11	86,99	87,39	88,08	-	88,51	88,69	89,17
Pesawaran	83,33	83,87	84,19	84,70	85,33	86,13	-	87,25	87,57	87,30
Pringsewu	-	91,68	91,91	91,95	92,27	92,37	-	92,26	92,59	92,37
Mesuji	-	80,50	80,69	81,16	83,36	84,38	-	83,82	84,49	84,22
Tulang Bawang Barat	-	82,25	83,37	87,09	87,42	87,93	-	88,08	88,53	88,45
Pesisir Barat	-	-	-	90,67	92,18	92,07	-	92,84	93,40	93,22
Kota Bandar Lampung	92,25	92,59	92,78	93,00	93,25	93,69	-	93,53	93,55	93,96
Kota Metro	91,89	92,46	92,61	92,86	94,61	94,64	-	94,97	94,98	95,02
KEP. BANGKA BELITUNG	86,87	87,10	87,54	87,73	87,74	88,37	88,90	88,93	89,15	89,00
Bangka	85,32	85,86	86,03	86,77	86,92	87,17	-	88,14	88,24	88,49
Belitung	85,48	85,59	85,73	86,61	87,19	87,98	-	87,99	88,62	88,61
Bangka Barat	87,04	87,28	87,86	88,11	88,56	88,71	-	89,41	89,92	90,07
Bangka Tengah	88,50	89,26	90,06	90,28	90,60	90,61	-	90,83	91,04	91,05
Bangka Selatan	78,24	79,75	81,24	82,17	82,52	82,83	-	83,48	83,54	83,86
Belitung Timur	83,81	83,95	84,17	84,29	85,37	86,10	-	86,04	86,08	86,17
Kota Pangkal Pinang	91,92	92,05	92,08	92,30	92,47	93,09	-	92,80	92,94	92,89
KEPULAUAN RIAU	92,05	92,11	92,23	92,81	93,20	93,22	93,13	92,96	92,97	93,10
Karimun	89,80	89,90	89,95	91,14	91,16	91,18	-	91,35	91,48	90,91
Bintan	90,75	91,03	91,18	91,50	92,15	92,41	-	92,58	92,79	93,10
Natuna	89,60	90,06	90,80	90,83	90,84	90,85	-	91,31	91,62	91,72
Lingga	86,94	87,46	88,03	88,10	88,59	89,11	-	89,73	89,29	89,26
Kepulauan Anambas	87,31	87,47	87,60	87,62	89,11	89,25	-	89,97	90,12	90,16
Kota Batam	93,27	93,60	93,64	93,95	94,45	94,62	-	94,21	94,22	94,42

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Tanjung Pinang	94,45	94,89	95,43	95,57	96,54	96,58	-	96,46	96,47	96,77
DKI JAKARTA	93,76	93,76	94,11	94,26	94,60	94,72	94,98	94,70	94,70	94,71
Kep. Seribu	88,05	88,20	89,42	92,40	92,60	92,49	-	93,24	93,57	93,58
Kota Jakarta Selatan	92,75	93,02	94,27	94,73	94,99	95,08	-	95,71	96,07	96,29
Kota Jakarta Timur	93,45	93,72	93,76	93,79	94,09	94,21	-	94,59	94,79	95,50
Kota Jakarta Pusat	94,35	94,95	95,60	95,90	96,21	96,01	-	95,52	95,62	95,68
Kota Jakarta Barat	94,38	94,81	94,89	95,03	95,06	95,23	-	95,38	95,22	95,23
Kota Jakarta Utara	92,59	93,14	93,20	93,24	93,36	93,19	-	93,38	93,51	93,64
JAWA BARAT	86,94	87,12	87,79	88,21	88,35	89,11	89,56	89,18	89,19	89,26
Bogor	84,97	85,55	85,93	86,10	86,41	87,13	-	88,69	89,05	89,39
Sukabumi	81,35	82,16	83,36	85,46	86,17	86,68	-	86,90	86,95	87,43
Cianjur	77,21	77,57	79,81	82,03	82,66	82,82	-	83,56	83,72	84,36
Bandung	91,18	91,40	92,18	92,48	93,18	93,32	-	93,43	93,59	93,96
Garut	73,98	75,62	77,42	79,83	81,25	81,33	-	81,96	82,42	82,54
Tasikmalaya	77,71	78,24	79,03	82,53	84,47	84,67	-	85,63	85,98	86,05
Ciamis	80,24	82,54	83,06	84,48	85,19	85,20	-	85,60	86,00	86,49
Kuningan	81,25	81,28	84,75	85,46	85,65	85,77	-	86,34	86,62	86,92
Cirebon	68,85	79,23	79,42	80,40	81,64	81,95	-	82,51	82,92	83,50
Majalengka	81,57	82,17	82,36	83,76	84,09	84,96	-	85,43	85,93	85,76
Sumedang	82,94	83,32	83,36	83,77	94,36	94,37	-	94,60	94,88	95,01
Indramayu	85,02	85,08	85,37	85,96	86,75	87,46	-	87,91	87,97	88,35
Subang	85,25	85,79	86,49	87,08	89,68	89,71	-	90,52	90,57	90,58
Purwakarta	84,48	84,55	84,64	85,37	86,25	86,56	-	87,18	87,19	86,78
Karawang	84,83	85,40	88,53	88,89	89,69	89,60	-	90,42	90,45	90,33
Bekasi	84,70	85,37	86,32	86,50	86,55	87,40	-	88,00	88,28	88,68
Bandung Barat	74,59	74,85	75,19	76,25	77,94	78,23	-	79,11	79,18	79,29
Pangandaran	-	-	-	88,70	88,95	89,14	-	89,30	89,68	90,02
Kota Bogor	89,14	89,63	90,24	90,31	90,38	90,82	-	90,90	90,92	91,11
Kota Sukabumi	88,80	89,02	89,56	89,84	90,57	90,72	-	90,95	91,07	91,44
Kota Bandung	92,44	92,97	93,93	94,15	94,42	94,95	-	95,03	95,11	94,82
Kota Cirebon	89,46	89,74	90,61	91,83	93,23	93,76	-	93,94	93,94	94,35
Kota Bekasi	90,92	92,10	92,72	92,81	92,94	92,99	-	93,09	93,26	93,02
Kota Depok	89,47	89,93	90,76	91,46	91,94	92,56	-	93,05	93,06	92,78
Kota Cimahi	88,64	89,06	89,67	90,63	92,11	92,23	-	92,33	92,36	92,20

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Tasikmalaya	86,67	86,76	88,01	88,73	90,22	90,73	-	91,06	91,07	91,48
Kota Banjar	83,80	84,02	84,34	84,53	85,41	85,98	-	86,93	87,11	87,12
JAWA TENGAH	90,32	90,92	91,12	91,50	91,89	92,21	92,22	91,94	91,95	91,89
Cilacap	84,50	85,15	85,78	85,83	86,16	86,04	-	86,14	86,53	86,67
Banyumas	85,14	86,07	86,25	86,53	86,54	86,66	-	87,62	87,94	88,20
Purbalingga	87,61	88,51	88,93	89,12	90,12	90,74	-	92,31	92,32	92,68
Banjarnegara	90,93	91,26	91,64	92,51	94,97	94,98	-	95,02	95,18	95,38
Kebumen	91,07	91,74	92,26	92,70	92,81	93,48	-	92,68	93,09	93,34
Purworejo	92,51	92,59	93,12	93,43	93,94	94,17	-	95,26	95,11	94,92
Wonosobo	89,13	90,04	91,15	91,67	92,51	92,91	-	92,61	92,91	92,72
Magelang	89,13	91,02	92,16	92,20	92,79	92,91	-	91,95	92,23	91,78
Boyolali	91,54	91,91	92,19	92,52	92,76	93,97	-	92,96	93,24	93,50
Klaten	93,02	93,12	94,69	95,16	95,90	96,42	-	96,54	96,00	96,04
Sukoharjo	94,85	95,16	95,34	95,53	96,34	96,55	-	96,98	96,73	96,58
Wonogiri	87,71	88,10	89,47	89,81	89,87	90,30	-	90,70	91,13	91,41
Karanganyar	93,32	93,83	95,42	95,71	96,08	96,15	-	96,50	96,61	96,48
Sragen	91,38	91,91	91,93	92,04	92,13	92,29	-	91,89	92,27	91,40
Grobogan	82,83	83,85	85,04	85,28	85,44	85,50	-	85,69	85,81	85,98
Blora	80,72	81,34	82,26	82,55	82,66	83,54	-	83,55	83,79	83,96
Rembang	84,99	85,12	85,57	85,72	86,04	85,87	-	86,18	86,49	86,85
Pati	89,25	89,28	89,31	89,43	89,99	91,06	-	91,98	91,50	91,60
Kudus	88,78	89,99	90,26	90,33	90,82	91,56	-	92,68	92,89	92,90
Jepara	88,21	88,78	89,64	90,19	91,21	91,29	-	90,39	90,66	90,91
Demak	87,93	88,49	88,90	88,98	89,28	89,16	-	90,45	90,40	90,57
Semarang	93,96	94,71	94,83	95,17	95,43	95,52	-	96,48	96,35	96,40
Temanggung	91,69	92,08	92,32	94,81	94,97	94,75	-	96,00	95,62	95,10
Kendal	92,49	92,71	92,87	93,14	93,22	93,21	-	93,25	92,96	92,85
Batang	86,90	88,66	88,98	89,90	90,79	90,99	-	90,49	90,65	91,08
Pekalongan	91,04	91,12	91,45	91,65	91,88	91,84	-	92,68	92,87	92,58
Pemalang	80,08	80,51	83,13	83,51	83,85	84,46	-	85,47	85,49	85,81
Tegal	78,53	84,09	84,55	85,78	86,76	87,03	-	87,52	86,95	86,74
Brebes	84,17	84,43	84,59	85,58	85,60	85,66	-	85,86	86,24	86,35
Kota Magelang	94,16	94,83	95,14	95,36	95,45	95,81	-	96,26	96,07	95,51
Kota Surakarta	95,28	95,32	95,70	96,16	96,48	96,38	-	96,74	96,82	96,72

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Salatiga	94,31	94,64	94,81	94,91	95,53	96,02	-	95,34	95,12	95,00
Kota Semarang	92,66	93,58	94,17	95,17	95,56	95,62	-	95,69	95,82	95,55
Kota Pekalongan	93,11	93,55	94,31	94,62	94,65	94,71	-	94,43	94,59	94,92
Kota Tegal	89,10	90,24	90,89	91,26	92,10	92,81	-	92,92	93,45	93,37
D I YOGYAKARTA	92,82	93,56	93,73	94,15	94,31	94,41	94,27	94,39	94,73	94,77
Kulon Progo	91,91	92,73	93,27	94,23	94,65	94,73	-	94,93	95,03	95,05
Bantul	93,37	93,48	93,78	94,33	94,41	94,42	-	94,98	95,11	95,18
Gunung Kidul	81,29	81,33	81,42	81,76	82,27	83,10	-	84,03	84,59	84,62
Sleman	92,96	94,22	94,75	95,50	96,09	96,08	-	95,62	96,01	96,04
Kota Yogyakarta	97,91	97,92	98,16	98,48	99,27	98,78	-	98,26	98,48	98,09
JAWA TIMUR	88,80	89,28	89,36	90,22	90,83	91,07	90,72	90,76	90,77	90,91
Pacitan	72,58	76,56	79,84	82,12	83,76	84,19	-	84,41	84,44	85,13
Ponorogo	92,63	93,06	93,08	93,19	93,85	93,91	-	93,30	93,00	93,34
Trenggalek	89,78	90,79	90,83	91,04	92,58	92,22	-	91,84	92,52	92,74
Tulungagung	92,84	93,28	93,39	94,12	95,11	95,07	-	95,30	95,75	95,63
Blitar	89,30	89,77	90,04	91,14	92,81	92,96	-	92,50	92,33	92,73
Kediri	90,85	91,50	91,50	91,80	91,98	91,99	-	92,81	92,81	92,70
Malang	87,13	87,45	87,48	87,68	87,89	88,38	-	88,33	88,38	88,66
Lumajang	80,91	82,59	84,15	87,18	89,08	88,15	-	87,72	87,88	88,04
Jember	81,75	82,61	83,07	83,44	83,74	83,55	-	84,32	84,23	84,30
Banyuwangi	82,36	83,14	83,65	84,05	85,06	86,01	-	86,20	86,44	86,81
Bondowoso	85,38	87,50	87,59	88,58	88,79	89,59	-	89,48	89,89	90,42
Situbondo	81,64	83,63	83,86	84,08	86,64	87,16	-	86,78	86,69	87,11
Probolinggo	81,49	82,09	82,33	82,44	83,40	83,90	-	84,57	84,86	84,95
Pasuruan	87,46	87,82	87,92	89,88	89,95	90,11	-	90,65	90,41	90,68
Sidoarjo	90,84	91,80	92,21	93,53	94,20	94,28	-	93,33	93,33	93,79
Mojokerto	87,52	88,69	89,82	90,28	90,46	90,27	-	90,39	90,15	90,65
Jombang	86,48	87,24	87,92	88,47	89,35	89,42	-	89,91	89,94	90,37
Nganjuk	90,83	91,69	91,86	92,23	93,48	93,55	-	93,48	93,26	93,27
Madiun	90,53	90,73	90,93	90,99	91,53	91,57	-	91,61	91,13	91,81
Magetan	91,17	92,18	92,59	92,80	93,50	93,64	-	93,20	92,93	93,16
Ngawi	90,99	91,33	91,40	91,69	92,03	92,01	-	91,70	91,72	92,52
Bojonegoro	87,56	88,36	88,60	88,92	89,24	89,38	-	89,78	89,77	89,98
Tuban	86,68	86,76	87,13	87,65	87,78	87,83	-	87,32	87,34	87,63

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lamongan	81,41	82,85	84,78	85,62	87,21	87,58	-	87,98	88,00	88,40
Gresik	87,96	87,98	88,60	88,88	89,01	89,31	-	89,57	89,72	90,05
Bangkalan	80,73	81,67	83,55	84,96	85,52	86,52	-	86,92	86,38	86,93
Sampang	76,85	78,55	80,15	81,16	82,62	83,57	-	84,15	84,33	84,79
Pamekasan	80,60	82,27	82,72	83,43	84,68	85,26	-	85,68	85,50	86,05
Sumenep	70,84	73,92	75,71	77,14	78,63	78,70	-	79,65	80,11	80,72
Kota Kediri	93,26	94,14	94,64	95,05	95,15	95,29	-	94,64	94,48	94,53
Kota Blitar	97,37	97,60	97,63	97,74	98,23	98,23	-	97,91	97,60	97,80
Kota Malang	92,94	94,01	94,51	94,98	94,99	95,73	-	94,96	94,71	94,72
Kota Probolinggo	93,54	94,64	95,71	96,27	96,74	96,65	-	96,07	95,56	95,91
Kota Pasuruan	95,02	95,42	95,42	95,46	96,30	96,32	-	96,36	96,02	96,18
Kota Mojokerto	92,13	92,71	92,97	93,05	93,27	93,67	-	93,40	93,05	93,18
Kota Madiun	90,93	91,68	91,84	92,15	92,81	92,95	-	93,66	93,47	94,05
Kota Surabaya	93,27	93,35	93,49	93,64	93,65	94,20	-	93,66	93,57	93,60
Kota Batu	85,75	86,17	86,74	87,25	89,22	89,47	-	89,27	89,27	89,71
BANTEN	90,22	90,22	90,28	90,31	90,99	91,11	90,97	91,14	91,30	91,67
Pandeglang	75,94	77,66	80,82	83,42	85,84	85,88	-	86,13	86,47	86,68
Lebak	71,13	72,98	75,72	77,17	77,86	77,80	-	78,56	79,26	79,63
Tangerang	90,22	90,24	90,53	90,62	91,11	90,72	-	91,20	90,90	90,97
Serang	88,91	89,25	89,54	90,26	91,78	91,77	-	92,28	92,18	92,40
Kota Tangerang	93,48	93,55	93,64	93,77	93,90	94,03	-	94,07	94,51	94,89
Kota Cilegon	85,08	85,25	85,40	86,14	86,75	86,64	-	86,35	86,75	87,16
Kota Serang	89,66	90,94	91,11	91,28	91,29	91,40	-	91,15	91,16	91,96
Kota Tangerang Selatan	-	92,09	92,90	93,04	93,13	93,14	-	92,83	93,16	93,56
BALI	90,90	91,67	92,78	93,00	93,32	92,71	93,20	93,70	93,71	93,72
Jembrana	89,42	91,60	91,65	91,96	92,05	92,06	-	92,65	93,21	93,52
Tabanan	94,27	94,37	94,42	95,40	95,57	94,67	-	95,13	95,34	95,35
Badung	91,32	93,25	93,89	94,68	94,88	94,56	-	94,52	94,90	95,50
Gianyar	91,63	92,20	92,52	92,54	92,77	92,92	-	93,61	94,16	94,26
Klungkung	86,79	88,31	89,37	89,83	89,98	90,34	-	91,03	91,06	91,10
Bangli	86,26	88,83	89,19	91,08	91,49	91,92	-	90,72	91,23	91,25
Karangasem	84,10	86,60	87,09	88,29	88,38	88,00	-	89,02	89,22	88,87
Buleleng	88,00	89,40	90,10	90,30	90,54	90,97	-	91,40	91,92	91,94

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Denpasar	95,37	95,41	95,85	96,00	96,55	96,07	-	96,88	96,89	96,92
NUSA TENGGARA BARAT	86,53	87,60	88,85	89,44	90,02	90,23	90,05	90,36	90,37	90,40
Lombok Barat	84,31	86,01	87,24	87,85	88,18	88,18	-	88,93	88,71	89,05
Lombok Tengah	81,07	83,38	84,00	85,67	86,65	86,48	-	86,40	86,81	87,26
Lombok Timur	88,82	89,30	89,48	89,56	90,28	90,84	-	91,12	91,14	91,16
Sumbawa	86,78	90,21	92,39	93,23	93,97	94,18	-	93,40	93,76	93,65
Dompu	86,89	88,00	88,78	90,59	91,26	90,36	-	90,54	90,72	91,12
Bima	88,01	89,74	90,53	90,61	91,14	91,27	-	91,08	91,11	91,49
Sumbawa Barat	83,00	85,32	87,40	88,95	91,73	92,18	-	92,38	92,18	92,57
Lombok Utara	81,77	82,76	83,74	83,86	83,92	84,01	-	85,34	85,14	85,42
Kota Mataram	89,40	89,60	89,83	90,48	92,13	92,35	-	92,66	92,54	92,77
Kota Bima	93,62	94,14	95,74	96,93	97,47	96,62	-	96,15	96,44	96,39
NUSA TENGGARA TIMUR	90,06	90,66	91,47	91,74	92,76	92,91	92,72	92,44	92,57	92,72
Sumba Barat	92,08	92,15	94,48	94,82	95,02	94,57	-	94,12	94,13	94,47
Sumba Timur	93,09	94,05	94,38	95,08	95,40	95,97	-	96,11	96,03	96,43
Kupang	73,96	75,30	84,76	86,24	87,31	87,47	-	87,73	88,29	88,22
Timor Tengah Selatan	89,18	90,13	92,14	93,32	94,61	94,48	-	94,79	94,23	94,87
Timor Tengah Utara	86,91	89,65	93,61	94,14	96,09	96,07	-	95,87	95,44	95,52
Belu	86,50	87,77	91,65	93,80	97,68	97,95	-	97,07	96,81	96,88
Alor	88,90	89,61	90,88	91,62	92,37	92,87	-	92,67	92,34	92,37
Lembata	87,29	87,31	89,75	90,88	91,83	92,18	-	92,04	91,44	91,27
Flores Timur	88,37	89,15	89,63	89,71	90,44	90,64	-	90,49	91,28	91,29
Sikka	86,75	86,99	87,15	87,46	88,80	89,25	-	88,64	88,96	89,64
Ende	93,28	93,71	94,07	94,59	95,06	95,22	-	95,52	95,23	95,44
Ngada	93,75	94,00	94,13	94,23	95,27	95,78	-	96,06	95,76	95,91
Manggarai	84,49	85,43	86,01	86,32	86,77	86,88	-	87,38	87,70	88,16
Rote Ndao	80,74	80,91	81,27	83,48	83,51	84,38	-	83,86	84,59	84,64
Manggarai Barat	80,35	82,56	85,35	87,18	87,57	87,55	-	87,38	87,43	87,17
Sumba Tengah	90,26	90,32	90,40	90,49	90,66	90,65	-	90,25	90,78	91,28
Sumba Barat Daya	95,14	95,67	95,80	98,64	98,66	98,42	-	98,20	97,43	97,48
Nagekeo	95,54	95,94	96,67	96,77	97,48	97,32	-	98,93	99,15	99,04
Manggarai Timur	79,50	79,94	82,60	85,69	90,16	90,54	-	90,76	90,80	90,89

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sabu Raijua	-	89,77	90,83	91,52	91,71	91,79	-	92,18	92,54	92,76
Malaka	-	-	-	88,23	88,43	89,01	-	89,90	89,17	89,42
Kota Kupang	92,93	93,23	93,34	93,56	95,13	95,31	-	95,23	95,50	95,48
KALIMANTAN BARAT	84,09	84,10	84,28	84,39	84,72	85,61	85,77	86,28	86,74	86,81
Sambas	83,91	84,01	84,58	85,89	87,30	87,36	-	87,06	86,96	86,97
Bengkayang	80,84	81,19	81,40	81,61	81,89	81,81	-	82,81	82,81	82,82
Landak	84,44	85,83	86,28	86,47	86,68	87,04	-	87,87	87,90	87,92
Mempawah	82,22	83,19	84,93	85,76	86,61	87,43	-	86,98	87,76	87,78
Sanggau	65,12	65,31	65,49	65,89	79,55	80,07	-	80,38	80,59	80,92
Ketapang	78,36	80,83	81,61	82,78	86,30	86,79	-	87,84	88,41	88,52
Sintang	75,24	79,31	82,59	84,98	85,34	85,44	-	85,97	86,29	86,50
Kapuas Hulu	79,66	80,85	81,75	82,39	83,77	83,92	-	84,45	84,38	84,74
Sekadau	74,42	77,00	78,85	79,46	82,49	82,52	-	81,82	82,07	82,40
Melawi	69,43	72,76	75,75	77,90	79,20	79,80	-	79,79	79,75	80,08
Kayong Utara	70,16	76,60	81,59	83,26	84,82	84,80	-	85,14	85,19	85,73
Kubu Raya	80,70	81,50	82,48	82,72	82,74	82,90	-	84,05	84,57	84,60
Kota Pontianak	91,51	92,41	92,60	92,69	93,03	93,08	-	93,60	93,32	93,81
Kota Singkawang	88,58	88,96	90,23	90,43	91,95	92,43	-	91,98	91,91	92,21
KALIMANTAN TENGAH	88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	89,25	89,07	88,91	89,13	89,09
Kotawaringin Barat	84,75	85,39	86,63	86,87	90,04	90,04	-	91,76	91,76	91,69
Kotawaringin Timur	81,90	81,98	82,08	82,09	86,07	86,79	-	87,73	87,74	87,91
Kapuas	92,92	93,49	94,51	95,04	95,36	95,65	-	96,59	96,26	95,51
Barito Selatan	92,09	92,77	92,95	93,21	93,46	93,34	-	93,02	92,35	92,04
Barito Utara	81,73	82,02	84,83	85,22	85,50	85,62	-	85,16	85,89	87,15
Sukamara	85,95	86,55	87,91	89,61	90,14	90,09	-	91,24	91,45	90,84
Lamandau	89,66	90,33	90,74	90,87	91,06	91,55	-	91,97	91,88	91,90
Seruyan	87,83	87,93	88,13	88,13	88,87	88,42	-	88,64	89,46	89,44
Katingan	81,48	83,41	83,61	83,86	83,88	84,78	-	85,51	85,70	85,57
Pulang Pisau	85,46	85,89	86,83	88,73	90,27	90,25	-	91,70	91,72	92,12
Gunung Mas	81,57	84,90	88,16	90,99	91,80	92,00	-	91,74	91,89	92,10
Barito Timur	86,37	86,50	86,79	87,38	87,75	88,16	-	88,36	88,41	88,76
Murung Raya	79,86	80,46	80,97	80,99	81,53	82,31	-	82,92	83,23	83,41
Kota Palangka Raya	91,94	92,84	93,22	93,56	93,80	94,30	-	94,42	94,66	94,96

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KALIMANTAN SELATAN	88,00	88,09	88,33	88,33	88,46	88,55	88,86	88,60	88,61	88,61
Tanah Laut	80,63	83,41	85,49	86,88	87,68	87,50	-	87,53	87,14	86,96
Kota Baru	79,55	79,63	80,18	80,85	81,75	82,35	-	83,50	83,80	84,10
Banjar	88,73	89,33	91,06	91,28	92,17	92,11	-	91,85	91,39	90,65
Barito Kuala	82,13	82,30	86,57	88,24	88,63	88,80	-	88,63	88,91	89,03
Tapin	82,29	82,51	82,88	83,41	83,54	83,80	-	83,87	84,56	84,44
Hulu Sungai Selatan	87,10	87,52	87,67	87,93	89,34	89,36	-	89,07	89,10	89,21
Hulu Sungai Tengah	93,47	94,50	95,35	95,99	96,82	97,61	-	96,89	96,52	96,60
Hulu Sungai Utara	90,60	90,68	91,42	91,53	92,17	92,05	-	92,36	92,09	91,59
Tabalong	83,04	83,09	83,27	84,49	84,76	84,80	-	85,15	84,99	85,43
Tanah Bumbu	78,58	79,01	79,94	80,86	84,10	83,80	-	84,42	84,33	84,34
Balangan	82,16	91,40	91,52	91,66	92,25	92,56	-	92,31	92,32	92,12
Kota Banjarmasin	91,50	91,62	91,88	92,11	92,38	93,31	-	93,28	93,28	93,30
Kota Banjar Baru	90,37	90,55	91,06	91,86	92,11	92,22	-	92,17	92,42	92,43
KALIMANTAN TIMUR	83,00	83,18	84,33	84,69	84,75	85,07	85,60	85,62	85,63	85,98
Paser	65,78	66,44	66,86	67,82	68,58	68,66	-	69,78	70,64	71,41
Kutai Barat	77,91	78,28	80,91	82,87	83,01	82,51	-	83,30	83,52	83,84
Kutai Kartanegara	72,98	73,29	74,92	76,13	76,92	77,22	-	78,54	78,83	79,14
Kutai Timur	72,55	72,64	73,54	74,17	74,90	74,94	-	75,48	76,03	76,51
Berau	81,82	83,49	85,76	86,27	87,23	87,37	-	87,77	87,92	87,93
Penajam Paser Utara	82,01	82,05	82,87	84,71	85,97	86,26	-	86,31	86,34	86,22
Mahakam Ulu	-	-	-	76,65	78,04	78,31	-	79,82	80,18	80,89
Kota Balikpapan	85,81	86,22	86,72	87,14	90,05	89,97	-	89,74	89,76	89,71
Kota Samarinda	87,65	87,82	88,03	88,71	89,26	89,44	-	89,26	89,42	89,41
Kota Bontang	79,76	82,17	84,25	85,47	86,31	85,84	-	86,44	86,61	86,72
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	85,63	85,67	85,68	86,34	85,96	86,74	87,00
Malinau	78,35	79,20	79,77	80,18	80,61	80,66	-	81,02	81,53	81,71
Bulungan	73,56	73,60	76,55	78,71	85,18	84,96	-	84,74	84,98	85,39
Tana Tidung	75,06	75,12	75,20	77,04	77,51	77,71	-	77,37	77,82	78,02
Nunukan	71,81	77,04	80,24	80,99	81,43	81,50	-	82,15	82,41	82,74
Kota Tarakan	86,84	87,34	88,50	90,31	90,76	90,61	-	91,23	92,28	92,16
SULAWESI UTARA	93,10	93,29	93,38	93,75	94,58	94,64	95,04	94,78	94,79	94,53
Bolaang Mongondow	85,79	86,31	86,80	87,11	87,26	87,29	-	87,72	88,03	88,36

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Minahasa	94,04	95,17	96,21	97,11	97,14	96,75	-	96,22	96,48	96,76
Kepulauan Sangihe	97,15	97,22	97,23	97,33	97,35	97,37	-	96,10	96,10	95,35
Kepulauan Talaud	96,48	97,11	97,35	97,37	97,60	97,61	-	97,18	97,64	97,67
Minahasa Selatan	87,11	87,13	87,18	87,35	87,42	87,47	-	88,53	89,31	88,81
Minahasa Utara	95,11	95,39	95,66	95,87	97,22	97,26	-	96,26	96,80	96,42
Bolaang Mongondow Utara	74,66	78,42	81,84	84,27	85,90	85,83	-	85,46	86,19	86,92
Siau Tagulandang Biaro	86,23	86,80	87,10	87,15	87,22	87,22	-	87,64	88,28	88,43
Minahasa Tenggara	84,72	86,92	88,79	89,84	91,45	91,48	-	91,81	92,21	91,87
Bolaang Mongondow Selatan	53,49	62,63	69,23	73,91	77,81	77,97	-	78,34	79,39	79,87
Bolaang Mongondow Timur	87,66	88,96	89,82	89,87	90,55	90,28	-	90,50	90,51	90,75
Kota Manado	95,83	95,85	95,98	96,04	96,09	96,29	-	95,96	96,07	96,28
Kota Bitung	93,03	93,44	93,67	93,85	94,46	94,26	-	94,87	95,01	94,23
Kota Tomohon	98,21	98,43	98,54	98,61	99,17	99,30	-	98,98	99,20	98,98
Kota Kotamobagu	92,30	92,91	93,76	94,13	94,29	94,34	-	94,78	95,13	95,42
SULAWESI TENGAH	91,23	91,70	91,77	91,84	92,69	92,25	91,91	91,66	92,08	92,01
Banggai Kepulauan	85,64	87,61	88,20	89,97	90,60	90,90	-	91,83	92,01	92,18
Banggai	90,45	90,57	90,91	90,92	91,26	91,25	-	90,64	91,48	90,95
Morowali	83,64	83,86	84,63	84,81	84,98	84,92	-	84,83	84,88	84,71
Poso	93,35	93,51	94,11	95,75	98,93	98,25	-	97,11	96,81	96,58
Donggala	82,00	82,12	82,66	85,19	86,49	86,81	-	87,66	87,75	88,27
Toli-Toli	81,45	83,20	86,03	87,73	89,93	89,97	-	89,70	89,62	89,82
Buol	85,40	88,39	88,52	88,56	89,08	89,09	-	89,12	89,27	89,34
Parigi Moutong	88,40	89,13	90,52	90,54	91,12	91,13	-	92,46	92,48	92,35
Tojo Una-Una	90,26	91,58	91,82	92,24	92,38	92,01	-	91,47	91,72	91,28
Sigi	91,96	92,04	92,34	92,42	92,99	93,15	-	92,98	92,99	93,32
Banggai Laut	-	-	-	90,83	90,93	91,17	-	91,56	91,60	91,04
Morowali Utara	-	-	-	94,70	96,64	96,68	-	96,58	96,41	95,90
Kota Palu	96,26	97,13	97,45	97,88	98,24	97,98	-	97,69	97,94	98,00
SULAWESI SELATAN	91,54	91,79	91,96	92,34	92,60	92,92	92,79	92,84	93,15	93,09
Kepulauan Selayar	89,28	89,78	90,76	91,16	91,37	91,82	-	90,97	91,96	91,92
Bulukumba	90,09	91,14	92,62	94,46	95,74	96,08	-	96,56	96,45	96,59

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bantaeng	95,67	96,24	96,56	96,62	96,86	96,38	-	95,28	95,30	95,31
Jeneponto	87,85	88,34	88,35	88,85	90,16	90,17	-	90,94	91,30	91,64
Takalar	81,08	82,45	84,06	85,57	86,91	87,37	-	86,76	87,24	87,29
Gowa	79,63	82,37	84,36	85,24	87,85	87,92	-	87,69	87,24	87,19
Sinjai	97,77	97,94	98,48	98,51	98,52	98,61	-	98,01	98,13	98,20
Maros	86,33	86,53	87,72	88,21	88,61	88,84	-	88,91	88,93	89,10
Pangkajene dan Kepulauan	86,77	87,75	88,58	89,45	89,74	89,75	-	89,26	89,80	90,16
Barru	94,24	94,74	95,09	95,11	95,36	95,02	-	95,51	95,44	95,42
Bone	89,47	89,71	89,90	90,71	91,37	91,93	-	92,65	92,95	93,25
Soppeng	97,73	98,61	98,89	98,90	98,96	98,42	-	97,43	97,25	97,08
Wajo	87,46	87,51	88,07	88,28	88,86	89,10	-	89,90	90,04	90,13
Sidenreng Rappang	89,51	89,59	90,27	90,46	91,50	91,51	-	92,21	91,90	92,08
Pinrang	92,54	92,79	92,82	93,11	94,89	94,73	-	95,44	95,45	95,35
Enrekang	96,35	96,75	97,09	98,00	98,08	97,95	-	98,12	97,99	97,31
Luwu	90,15	90,22	91,56	91,69	91,88	91,89	-	92,52	92,28	92,00
Tana Toraja	85,22	85,45	85,79	85,98	86,38	86,57	-	87,18	87,86	88,18
Luwu Utara	87,54	87,66	87,98	88,21	88,55	88,68	-	88,87	88,94	89,21
Luwu Timur	87,35	87,79	88,01	88,61	89,02	89,31	-	89,49	89,38	89,61
Toraja Utara	83,15	84,25	84,56	84,61	85,04	85,61	-	86,03	86,38	86,78
Kota Makasar	92,94	93,32	93,33	93,40	93,58	93,96	-	94,70	94,53	94,48
Kota Parepare	96,28	96,59	96,69	97,05	97,27	97,29	-	97,47	96,87	96,78
Kota Palopo	91,05	94,07	95,48	95,66	96,81	97,20	-	97,57	97,75	97,35
SULAWESI TENGGARA	87,90	88,06	88,42	89,24	89,56	90,30	90,23	90,24	90,24	90,56
Buton	76,39	77,05	77,38	77,62	77,71	78,26	-	78,39	79,01	79,82
Muna	85,20	85,30	85,37	86,42	87,20	87,38	-	87,34	87,08	87,51
Konawe	91,12	91,25	91,44	92,39	93,07	93,08	-	93,12	92,91	92,61
Kolaka	86,21	87,13	88,37	89,16	89,17	89,55	-	89,77	89,59	89,87
Konawe Selatan	84,05	84,29	84,43	84,97	88,35	88,46	-	87,26	87,30	87,45
Bombana	82,44	82,50	82,64	82,76	82,93	82,98	-	83,71	84,02	84,77
Wakatobi	87,26	87,31	87,78	88,64	88,91	88,94	-	88,23	88,39	88,60
Kolaka Utara	95,48	95,93	95,96	96,53	97,24	97,88	-	97,55	97,84	97,32
Buton Utara	84,71	85,72	87,06	90,00	92,34	92,37	-	91,94	91,83	91,85

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Konawe Utara	84,79	85,76	86,08	86,12	86,18	85,79	-	85,44	85,58	85,69
Kolaka Timur	-	-	-	91,67	98,45	98,02	-	98,15	98,16	98,63
Konawe Kepulauan	-	-	-	80,88	82,80	82,93	-	83,71	83,76	84,43
Muna Barat	-	-	-	-	89,71	89,65	-	88,13	88,05	88,82
Buton Tengah	-	-	-	-	77,41	78,11	-	78,57	79,29	80,15
Buton Selatan	-	-	-	-	71,63	71,69	-	72,21	72,49	72,28
Kota Kendari	92,27	92,34	93,13	93,31	93,87	94,20	-	94,57	94,66	94,75
Kota Baubau	89,22	89,87	89,99	90,29	90,46	90,54	-	90,64	90,65	90,65
GORONTALO	83,26	84,19	84,54	84,57	85,09	85,87	86,12	86,64	86,63	86,83
Boalemo	69,40	72,43	75,05	77,63	78,92	79,32	-	80,36	80,82	81,14
Gorontalo	66,57	71,44	74,44	77,32	79,23	80,13	-	80,98	81,18	81,33
Pohuwato	86,14	87,88	88,72	89,32	90,32	90,57	-	91,31	91,11	91,46
Bone Bolango	78,03	80,79	82,57	84,40	85,99	86,00	-	86,71	86,96	87,71
Gorontalo Utara	68,67	72,02	74,85	77,89	79,85	79,99	-	80,44	81,16	81,25
Kota Gorontalo	80,60	82,01	82,84	84,37	85,17	85,51	-	86,09	86,06	86,25
SULAWESI BARAT	87,53	87,60	87,90	88,56	89,18	89,52	89,35	89,44	90,05	89,76
Majene	92,78	93,26	93,89	94,00	94,14	94,19	-	94,67	94,40	94,42
Polewali Mandar	89,51	89,88	89,97	90,01	90,22	90,76	-	91,22	91,87	91,57
Mamasa	91,61	93,91	96,16	97,38	97,52	97,60	-	97,92	97,78	97,75
Mamuju	86,78	87,04	87,34	88,26	89,00	89,03	-	90,37	90,37	90,64
Mamuju Utara	67,72	71,49	76,18	80,00	82,03	82,96	-	83,88	84,35	84,42
Mamuju Tengah	-	-	-	85,55	86,61	86,83	-	87,26	87,12	86,70
MALUKU	91,79	92,36	92,38	92,46	92,55	92,54	92,38	92,75	93,03	93,04
Maluku Tenggara Barat	83,11	83,98	84,59	84,85	85,59	85,72	-	85,80	86,26	86,46
Maluku Tenggara	95,46	95,53	95,67	96,21	96,33	96,31	-	96,47	96,39	96,76
Maluku Tengah	97,39	97,49	97,81	97,84	98,13	97,68	-	98,30	98,31	98,41
Buru	83,04	83,73	85,95	87,04	87,76	88,31	-	89,63	89,68	90,27
Kepulauan Aru	74,95	77,60	81,69	84,99	87,61	87,91	-	88,70	88,41	88,25
Seram Bagian Barat	95,46	96,30	97,26	97,77	98,04	97,67	-	98,35	98,68	98,63
Seram Bagian Timur	81,04	82,44	83,78	84,44	85,77	86,41	-	86,58	86,81	87,69
Maluku Barat Daya	73,38	78,00	82,01	85,03	88,82	88,74	-	89,50	89,56	89,81
Buru Selatan	72,65	76,80	79,58	81,98	84,15	84,13	-	85,42	86,08	86,18
Kota Ambon	95,10	95,71	96,32	97,00	97,22	97,48	-	97,88	97,84	97,84

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Tual	87,02	87,06	87,14	87,48	87,59	87,85	-	87,16	87,63	87,83
MALUKU UTARA	85,29	85,31	87,06	87,96	88,79	88,86	89,15	89,15	89,50	89,61
Halmahera Barat	84,07	85,43	86,81	88,13	88,71	89,23	-	88,20	87,79	88,20
Halmahera Tengah	83,83	84,68	85,22	87,47	89,30	89,44	-	89,52	89,34	89,61
Kepulauan Sula	84,27	85,71	87,32	89,66	91,33	91,83	-	92,13	92,14	92,14
Halmahera Selatan	83,89	84,35	84,70	85,10	85,15	85,37	-	85,83	86,41	86,60
Halmahera Utara	86,34	87,14	87,54	87,85	88,70	88,71	-	89,14	88,81	89,35
Halmahera Timur	69,94	72,37	75,98	78,15	80,66	80,77	-	81,29	81,30	81,41
Pulau Morotai	-	63,24	63,73	63,75	63,94	67,29	-	68,57	69,40	69,86
Pulau Taliabu	-	-	-	80,77	81,48	81,83	-	81,87	82,82	83,58
Kota Ternate	89,91	90,66	90,89	90,91	91,00	91,36	-	91,89	91,92	92,10
Kota Tidore Kepulauan	85,98	90,80	91,88	92,87	94,34	95,19	-	95,33	95,12	95,13
PAPUA BARAT	81,15	81,34	81,57	81,72	81,95	81,99	82,34	82,42	82,47	82,74
Fakfak	81,27	81,45	81,71	82,45	82,71	82,83	-	83,23	83,34	83,45
Kaimana	79,38	80,30	80,68	81,14	81,18	81,34	-	81,85	81,98	82,55
Teluk Wondama	71,33	73,33	75,96	76,27	78,34	78,55	-	78,85	78,91	79,15
Teluk Bintuni	76,04	78,12	80,15	82,26	84,08	84,91	-	85,65	85,71	85,91
Manokwari	80,99	81,18	81,26	81,34	81,52	81,65	-	82,62	83,11	83,47
Sorong Selatan	71,14	72,28	78,47	80,09	80,29	80,52	-	81,54	81,43	81,77
Sorong	71,52	75,90	79,16	82,11	84,46	84,64	-	85,33	85,58	85,76
Raja Ampat	67,37	69,68	71,23	74,32	76,34	76,50	-	76,67	77,00	77,55
Tambrauw	-	63,34	63,67	64,44	64,85	65,71	-	66,50	67,31	67,97
Maybrat	-	73,89	74,18	74,31	74,66	75,01	-	76,10	76,55	76,97
Manokwari Selatan	-	-	-	59,85	60,80	61,58	-	62,66	63,45	64,16
Pegunungan Arfak	-	-	-	61,93	74,54	75,71	-	76,07	76,15	76,79
Kota Sorong	88,57	89,34	89,51	90,06	90,65	90,78	-	90,98	91,38	91,97
PAPUA	73,93	74,99	76,42	77,61	78,57	78,52	79,09	79,38	80,11	80,05
Merauke	84,77	85,69	86,41	86,83	87,62	87,43	-	87,45	87,69	87,70
Jayawijaya	81,79	82,02	82,29	82,45	83,07	82,78	-	82,80	82,93	83,22
Jayapura	89,95	90,59	90,66	90,69	90,70	90,60	-	90,48	90,59	91,10
Nabire	86,97	86,98	87,39	88,67	89,73	89,81	-	89,97	90,27	90,07
Kepulauan Yapen	85,50	86,98	87,31	87,85	88,26	88,09	-	88,07	88,68	89,11
Biak Numfor	88,13	88,71	88,74	89,49	89,86	89,55	-	89,80	90,10	90,01

Lampiran 4. IPG Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2019

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Paniai	57,36	61,38	64,71	65,65	66,10	66,04	-	67,15	67,60	68,21
Puncak Jaya	61,88	62,09	62,29	62,43	62,50	62,36	-	64,43	65,20	65,25
Mimika	74,07	74,31	75,27	75,46	77,06	76,98	-	77,09	77,10	76,93
Boven Digoel	75,14	75,97	76,13	76,91	77,53	77,79	-	78,83	79,17	79,25
Mappi	76,45	77,71	79,95	81,82	82,92	83,15	-	83,77	83,65	83,63
Asmat	44,29	44,69	45,38	46,21	48,77	49,48	-	50,61	52,23	53,71
Yahukimo	59,43	62,42	65,02	65,70	67,88	68,13	-	70,53	71,83	72,07
Pegunungan Bintang	71,90	75,40	78,83	79,71	80,12	79,71	-	79,83	80,49	79,62
Tolikara	53,82	54,69	55,16	55,88	56,39	56,47	-	57,77	59,17	59,83
Sarmi	71,17	79,48	79,58	80,87	81,41	81,26	-	82,12	82,31	82,15
Keerom	79,40	79,64	81,86	82,25	84,15	84,46	-	85,30	85,78	86,21
Waropen	66,55	66,97	67,25	67,30	67,55	67,86	-	70,13	70,57	70,52
Supiori	64,35	66,85	69,99	72,26	74,50	75,13	-	76,16	76,31	76,40
Mamberamo Raya	71,33	72,42	75,25	77,99	80,32	80,92	-	80,64	81,47	81,85
Nduga	84,51	84,53	84,57	89,06	91,04	88,14	-	84,45	84,47	82,73
Lanny Jaya	87,31	87,76	89,22	90,50	91,33	90,82	-	91,58	91,59	92,14
Mamberamo Tengah	88,31	89,09	90,10	90,46	90,77	88,74	-	87,35	86,80	86,00
Yalimo	49,90	61,26	68,65	73,56	81,81	81,43	-	82,29	83,47	82,87
Puncak	71,71	74,92	78,68	81,53	84,62	83,95	-	82,40	82,61	82,57
Dogiyai	67,71	70,79	74,95	77,35	79,97	80,25	-	81,17	81,05	81,45
Intan Jaya	-	64,13	65,67	66,25	67,56	68,25	-	68,42	69,32	70,64
Deiyai	-	59,93	63,72	67,18	69,77	69,51	-	69,69	71,05	70,88
Kota Jayapura	94,44	94,61	94,78	94,92	94,94	94,50	-	94,12	94,33	94,22
INDONESIA	89,42	89,52	90,07	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07

Sumber: www.bps.go.id, 2020

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	11,11	53,92	34,59	63,31
Simeulue	20,00	45,22	24,21	64,51
Aceh Singkil	12,00	48,13	28,47	59,72
Aceh Selatan	10,00	56,21	27,75	55,96
Aceh Tenggara	10,00	41,72	31,43	58,10
Aceh Timur	7,50	59,74	29,88	53,21
Aceh Tengah	13,33	53,58	37,30	68,18
Aceh Barat	8,00	52,71	30,20	56,89
Aceh Besar	2,86	43,59	25,71	47,73
Pidie	17,50	60,53	31,29	64,70
Bireuen	7,50	63,06	39,23	57,90
Aceh Utara	2,22	61,05	34,07	50,65
Aceh Barat Daya	4,00	60,87	30,59	51,90
Gayo Lues	5,00	46,23	36,70	56,51
Aceh Tamiang	36,67	59,48	27,23	74,39
Nagan Raya	16,00	43,55	26,39	61,80
Aceh Jaya	5,00	54,37	38,44	58,29
Bener Meriah	4,00	55,14	29,92	52,36
Pidie Jaya	4,00	60,39	35,04	55,49
Kota Banda Aceh	13,33	48,12	28,03	63,30
Kota Sabang	25,00	50,34	33,23	76,01
Kota Langsa	20,00	51,69	26,97	65,12
Kota Lhokseumawe	16,00	60,23	23,50	58,25
Kota Subulussalam	15,00	49,42	36,86	69,01
SUMATERA UTARA	13,00	54,16	36,15	67,76
Nias	8,00	41,55	50,48	63,15
Mandailing Natal	15,00	57,40	46,90	72,70
Tapanuli Selatan	11,43	53,13	49,74	71,03
Tapanuli Tengah	5,71	63,26	44,77	60,40
Tapanuli Utara	5,71	57,52	49,74	62,81

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Toba Samosir	3,33	61,72	47,45	59,60
Labuhan Batu	20,00	57,30	32,41	71,47
Asahan	24,44	53,95	26,12	69,10
Simalungun	10,00	63,41	36,85	62,33
Dairi	5,71	56,08	49,53	62,12
Karo	20,00	61,80	49,78	75,32
Deli Serdang	6,00	54,00	28,28	54,81
Langkat	16,00	59,90	31,13	66,21
Nias Selatan	17,14	32,09	35,32	64,63
Humbang Hasundutan	16,00	56,90	50,47	72,08
Pakpak Bharat	10,00	63,43	49,48	64,93
Samosir	24,00	54,16	49,75	79,78
Serdang Bedagai	15,56	57,64	30,47	65,70
Batu Bara	8,57	61,61	37,25	61,49
Padang Lawas Utara	10,00	57,78	45,67	67,58
Padang Lawas	3,33	64,93	40,31	55,81
Labuhan Batu Selatan	8,57	53,46	32,50	60,81
Labuhan Batu Utara	2,86	55,02	24,97	47,29
Nias Utara	12,00	40,91	48,10	67,57
Nias Barat	10,00	44,00	50,18	65,80
Kota Sibolga	25,00	56,35	33,10	74,57
Kota Tanjung Balai	16,00	54,02	23,93	59,78
Kota Pematang Siantar	10,00	59,64	34,86	61,56
Kota Tebing Tinggi	4,00	48,92	30,06	53,60
Kota Medan	12,00	52,51	32,60	63,93
Kota Binjai	16,67	52,65	34,71	70,26
Kota Padangsidimpuan	16,67	56,23	31,16	65,89
Kota Gunungsitoli	12,00	44,67	41,54	66,97
SUMATERA BARAT	4,62	55,36	37,51	59,09
Kepulauan Mentawai	0,01	49,60	31,04	48,36

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pesisir Selatan	6,67	65,20	34,04	55,79
Solok	8,57	53,28	39,34	63,89
Sijunjung	13,33	64,71	28,57	59,96
Tanah Datar	8,57	62,62	34,21	58,35
Padang Pariaman	0,01	50,13	31,56	49,10
Agam	8,89	58,00	39,07	63,32
Lima Puluh Kota	5,71	65,10	29,10	50,18
Pasaman	8,57	57,93	39,39	64,22
Solok Selatan	0,01	60,41	36,68	50,23
Dharmas Raya	6,67	61,96	27,14	51,42
Pasaman Barat	7,50	58,34	36,50	60,88
Kota Padang	13,33	46,61	34,80	67,49
Kota Solok	5,00	55,94	36,43	58,47
Kota Sawah Lunto	20,00	57,59	28,29	66,18
Kota Padang Panjang	10,00	61,96	46,74	66,57
Kota Bukittinggi	8,00	64,66	37,84	60,99
Kota Payakumbuh	12,00	53,44	38,56	67,81
Kota Pariaman	5,56	57,66	31,37	54,47
RIAU	18,46	51,18	28,23	69,17
Kuantan Singingi	2,86	56,93	36,75	57,64
Indragiri Hulu	2,50	51,80	28,55	52,65
Indragiri Hilir	13,33	47,93	28,95	64,83
Pelalawan	0,01	51,43	28,21	47,45
Siak	2,50	48,62	19,82	42,77
Kampar	8,89	59,21	23,71	54,41
Rokan Hulu	4,44	53,35	26,55	52,81
Bengkalis	8,89	51,53	23,30	54,27
Rokan Hilir	17,78	54,27	23,10	62,23
Kepulauan Meranti	13,33	52,15	27,08	62,57
Kota Pekanbaru	17,78	49,67	27,21	67,79

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Dumai	10,00	52,86	23,62	56,78
JAMBI	14,55	51,36	30,23	65,97
Kerinci	3,33	48,46	43,04	59,96
Merangin	0,01	56,07	41,18	54,25
Sarolangun	8,57	52,42	30,48	60,07
Batang Hari	22,86	47,27	34,47	75,56
Muaro Jambi	8,57	48,09	35,20	63,18
Tanjung Jabung Timur	26,67	46,59	22,88	68,81
Tanjung Jabung Barat	20,00	55,58	27,04	68,31
Tebo	2,86	50,56	28,80	51,98
Bungo	14,29	52,27	23,02	59,18
Kota Jambi	17,78	51,35	29,43	68,48
Kota Sungai Penuh	0,01	51,17	34,71	52,87
SUMATERA SELATAN	21,33	55,28	34,85	74,45
Ogan Komering Ulu	5,71	58,79	24,79	50,01
Ogan Komering Ilir	15,56	51,89	24,92	61,22
Muara Enim	17,78	58,11	36,83	71,07
Lahat	15,00	63,10	37,29	67,07
Musi Rawas	12,50	61,45	25,91	56,94
Musi Banyuasin	6,67	50,43	35,14	60,06
Banyu Asin	11,11	52,07	29,35	60,70
Ogan Komering Ulu Selatan	12,50	63,28	23,56	55,33
Ogan Komering Ulu Timur	8,89	52,48	29,90	59,51
Ogan Ilir	15,00	63,29	28,14	60,19
Empat Lawang	8,57	66,11	34,63	56,93
Penukal Abab Lematang Ilir	0,01	56,02	37,27	51,04
Musi Rawas Utara	4,00	56,86	26,27	48,51

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Palembang	8,00	53,35	29,84	58,28
Kota Prabumulih	16,00	57,18	24,65	59,90
Kota Pagar Alam	16,00	58,80	22,02	57,68
Kota Lubuklinggau	10,00	48,95	27,12	56,63
BENGKULU	15,56	52,67	35,25	69,78
Bengkulu Selatan	0,01	49,71	42,74	55,20
Rejang Lebong	20,00	54,40	24,67	64,71
Bengkulu Utara	10,00	54,46	38,93	65,77
Kaur	8,00	52,77	37,98	62,13
Seluma	13,33	49,38	34,92	65,68
Mukomuko	4,00	52,63	33,62	56,78
Lebong	12,00	51,13	38,12	67,14
Kepahiang	12,00	60,68	36,09	65,09
Bengkulu Tengah	24,00	44,64	42,26	76,71
Kota Bengkulu	25,71	52,75	33,16	77,58
LAMPUNG	20,00	50,75	29,38	69,23
Lampung Barat	17,14	58,08	32,54	68,21
Tanggamus	6,67	49,50	29,52	56,97
Lampung Selatan	10,00	51,90	29,46	59,40
Lampung Timur	12,00	50,81	32,53	63,42
Lampung Tengah	12,00	57,45	31,50	62,22
Lampung Utara	13,33	60,31	34,92	64,87
Way Kanan	10,00	52,23	33,07	61,46
Tulangbawang	20,00	56,09	26,05	65,94
Pesawaran	24,44	49,13	30,01	72,59
Pringsewu	30,00	51,94	20,29	67,05
Mesuji	22,86	47,63	27,47	69,27
Tulangbawang Barat	3,33	41,75	31,43	51,46
Pesisir Barat	4,00	46,47	34,05	56,21
Kota Bandar Lampung	22,00	45,06	30,92	71,54

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Metro	28,00	47,87	33,54	77,02
Kep. Bangka Belitung	4,44	53,15	26,84	52,96
Bangka	17,14	53,96	25,37	65,18
Belitung	8,00	53,74	23,35	53,82
Bangka Barat	16,00	52,00	26,76	64,82
Bangka Tengah	12,00	51,89	22,30	57,31
Bangka Selatan	8,00	56,11	22,09	49,29
Belitung Timur	8,00	55,42	27,03	56,74
Kota Pangkal Pinang	10,00	51,22	29,90	61,88
Kep. Riau	11,11	43,16	28,61	61,59
Karimun	16,67	49,58	25,41	64,17
Bintan	24,00	52,22	24,30	69,71
Natuna	0,01	39,47	24,51	42,02
Lingga	5,00	52,38	23,15	48,96
Kepulauan Anambas	10,00	46,88	26,09	57,74
Kota Batam	8,00	41,40	29,31	58,40
Kota Tanjung Pinang	36,67	41,37	26,92	76,13
DKI JAKARTA	21,70	44,90	37,94	75,14
Kepulauan Seribu	21,70	41,33	25,44	63,03
Kodya Jakarta Selatan	21,70	45,83	36,47	75,80
Kodya Jakarta Timur	21,70	44,79	33,54	74,52
Kodya Jakarta Pusat	21,70	49,48	38,49	77,42
Kodya Jakarta Barat	21,70	48,81	34,74	75,20
Kodya Jakarta Utara	21,70	44,87	35,91	74,79
JAWA BARAT	20,00	41,55	29,94	69,48
Bogor	9,09	40,23	25,99	55,73
Sukabumi	16,00	33,71	27,68	60,70
Cianjur	18,00	48,47	21,63	60,32
Bandung	12,73	37,90	33,47	65,86
Garut	16,00	44,23	32,12	68,23

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tasikmalaya	16,00	49,74	28,23	64,30
Ciamis	12,00	38,59	38,06	65,35
Kuningan	22,00	41,18	30,66	70,58
Cirebon	30,00	49,54	27,65	75,61
Majalengka	12,00	39,13	27,78	58,90
Sumedang	18,00	44,93	34,95	70,94
Indramayu	34,00	37,09	21,65	70,10
Subang	18,00	45,02	31,66	68,83
Purwakarta	28,89	39,44	29,15	74,39
Karawang	28,00	45,82	28,47	74,80
Bekasi	16,00	37,44	24,39	60,83
Bandung Barat	12,00	39,60	33,31	64,53
Pangandaran	22,50	44,39	36,00	74,56
Kota Bogor	18,00	42,75	29,99	68,91
Kota Sukabumi	17,14	45,84	28,67	66,82
Kota Bandung	16,00	45,76	34,71	70,38
Kota Cirebon	28,57	42,85	32,65	77,86
Kota Bekasi	16,00	42,61	29,36	66,10
Kota Depok	24,00	43,76	32,34	74,82
Kota Cimahi	24,44	48,25	30,52	74,14
Kota Tasikmalaya	6,67	44,73	34,19	59,32
Kota Banjar	3,33	42,00	27,96	49,53
JAWA TENGAH	19,17	49,36	34,31	72,18
Cilacap	24,00	45,11	26,35	69,13
Banyumas	22,00	49,40	30,84	71,92
Purbalingga	22,22	47,36	30,24	70,60
Banjarnegara	26,00	56,80	28,93	72,84
Kebumen	22,00	49,12	25,67	67,15
Purworejo	17,78	52,24	34,10	70,03
Wonosobo	2,22	49,86	24,68	46,29

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Magelang	12,00	45,92	37,77	67,74
Boyolali	31,11	45,97	40,70	81,88
Klaten	18,00	55,73	37,81	72,35
Sukoharjo	22,22	50,25	41,06	78,52
Wonogiri	16,00	48,97	39,25	71,88
Karanganyar	20,00	50,04	38,14	74,76
Sragen	11,11	49,03	37,18	65,07
Grobogan	12,00	40,44	25,43	56,31
Blora	13,33	39,92	34,76	65,59
Rembang	13,33	51,01	31,82	65,79
Pati	16,00	50,69	31,42	66,99
Kudus	8,89	45,70	41,09	65,24
Jepara	14,00	47,00	23,74	58,20
Demak	12,00	53,15	38,77	67,20
Semarang	18,00	45,59	45,83	74,97
Temanggung	33,33	50,78	40,86	84,46
Kendal	24,44	48,20	35,30	77,24
Batang	15,56	52,98	28,32	63,78
Pekalongan	26,67	47,31	26,19	70,87
Pemalang	30,00	49,16	35,34	80,08
Tegal	24,00	50,45	29,05	72,58
Brebes	16,00	47,10	25,28	62,04
Kota Magelang	20,00	52,51	41,83	76,81
Kota Surakarta	20,00	50,89	43,95	77,88
Kota Salatiga	20,00	48,30	41,40	76,19
Kota Semarang	20,00	51,22	37,21	74,57
Kota Pekalongan	11,43	55,43	28,53	60,95
Kota Tegal	13,33	58,36	30,47	63,66
DI YOGYAKARTA	16,36	49,65	40,85	73,59
Kulon Progo	20,00	51,28	34,15	71,68

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bantul	8,89	51,39	38,76	65,29
Gunung Kidul	22,22	44,52	39,74	75,34
Sleman	26,00	48,41	38,52	80,40
Kota Yogyakarta	12,50	52,34	44,65	71,06
JAWA TIMUR	18,33	48,90	35,68	73,04
Pacitan	13,33	49,35	39,81	68,77
Ponorogo	13,33	50,24	35,68	67,71
Trenggalek	11,11	49,72	37,80	66,86
Tulungagung	12,00	54,59	38,22	66,36
Blitar	22,00	48,41	40,36	79,05
Kediri	22,00	49,32	31,42	72,24
Malang	14,00	47,44	36,96	69,68
Lumajang	16,00	50,39	23,72	59,16
Jember	18,00	46,60	30,86	67,65
Banyuwangi	26,00	48,20	31,01	74,52
Bondowoso	11,11	48,95	37,42	65,10
Situbondo	24,44	43,37	27,62	69,26
Probolinggo	26,00	44,11	25,42	68,22
Pasuruan	12,00	47,29	35,01	66,24
Sidoarjo	16,00	51,61	29,54	67,13
Mojokerto	28,00	46,63	34,98	79,74
Jombang	28,00	48,42	27,72	73,52
Nganjuk	24,00	53,30	25,81	68,45
Madiun	20,00	54,45	30,75	68,47
Magetan	11,11	53,40	38,79	66,63
Ngawi	24,44	49,90	32,14	72,89
Bojonegoro	10,00	43,80	26,44	55,44
Tuban	14,00	48,76	30,80	64,32
Lamongan	24,00	52,58	33,66	74,37
Gresik	18,00	47,29	31,50	69,43

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bangkalan	6,00	43,52	35,49	57,71
Sampang	6,67	42,56	31,14	55,99
Pamekasan	4,44	37,37	33,83	53,13
Sumenep	8,00	41,25	36,60	60,99
Kota Kediri	36,67	49,31	35,66	84,46
Kota Blitar	12,00	57,73	38,77	67,70
Kota Malang	26,67	47,89	34,42	78,11
Kota Probolinggo	13,33	47,80	31,38	66,02
Kota Pasuruan	3,33	48,72	31,93	55,09
Kota Mojokerto	16,00	54,44	37,08	71,51
Kota Madiun	23,33	50,19	37,86	77,07
Kota Surabaya	34,00	51,02	35,78	83,88
Kota Batu	16,67	51,53	30,62	69,13
BANTEN	17,65	43,18	31,62	68,83
Pandeglang	12,00	42,50	30,00	61,58
Lebak	10,00	38,38	31,55	60,36
Tangerang	12,00	43,60	28,28	61,54
Serang	12,00	41,46	26,68	58,87
Kota Tangerang	12,00	46,23	32,00	65,19
Kota Cilegon	10,00	47,73	20,93	52,86
Kota Serang	13,33	43,38	27,67	62,10
Kota Tangerang Selatan	32,00	42,06	26,19	74,00
BALI	16,36	48,05	38,61	72,27
Jembrana	20,00	51,91	38,73	74,60
Tabanan	25,00	51,52	38,28	78,14
Badung	20,00	50,16	36,52	75,23
Gianyar	10,00	51,80	37,94	66,22
Klungkung	20,00	46,58	46,73	78,35
Bangli	6,67	43,46	38,19	61,81
Karang Asem	4,44	37,56	44,11	60,77

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buleleng	17,78	45,50	39,29	73,13
Kota Denpasar	4,44	48,02	42,62	62,16
NUSA TENGGARA BARAT	1,54	45,05	32,91	51,91
Lombok Barat	8,89	36,77	31,61	56,32
Lombok Tengah	6,00	47,27	35,93	57,45
Lombok Timur	10,00	47,29	45,02	65,67
Sumbawa	13,33	43,07	38,19	69,26
Dompu	10,00	46,82	34,48	64,30
Bima	6,67	48,57	26,38	52,61
Sumbawa Barat	8,00	49,44	20,73	49,06
Lombok Utara	3,33	42,46	26,79	47,19
Kota Mataram	25,00	47,62	33,93	76,46
Kota Bima	16,00	49,72	37,84	69,91
NUSA TENGGARA TIMUR	18,46	48,41	43,33	73,37
Sumba Barat	16,00	46,82	35,38	69,24
Sumba Timur	10,00	49,81	42,27	64,91
Kupang	12,50	45,78	35,43	65,30
Timor Tengah Selatan	10,00	53,92	29,59	57,47
Timor Tengah Utara	0,01	55,41	40,05	51,59
Belu	23,33	50,16	38,40	75,18
Alor	6,67	53,79	43,47	60,64
Lembata	0,01	51,26	45,57	53,04
Flores Timur	3,33	45,76	43,71	57,61
Sikka	14,29	58,84	37,06	64,03
Ende	10,00	56,77	52,44	65,66
Ngada	4,00	57,56	46,80	59,22
Manggarai	11,43	40,23	46,81	65,61
Rote Ndao	0,01	41,54	35,12	48,49

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manggarai Barat	3,33	38,54	38,99	53,14
Sumba Tengah	0,01	55,78	41,53	53,09
Sumba Barat Daya	11,43	34,07	47,78	65,43
Nagekeo	0,01	58,66	49,32	52,75
Manggarai Timur	3,33	43,62	35,25	51,62
Sabu Raijua	10,00	53,61	36,39	56,04
Malaka	12,00	52,05	48,56	59,01
Kota Kupang	20,00	42,77	38,93	75,14
KALIMANTAN BARAT	13,85	44,38	35,06	68,07
Sambas	13,33	30,01	36,56	61,36
Bengkayang	20,00	53,59	37,13	72,80
Landak	14,29	38,06	36,95	67,80
Pontianak	8,57	47,05	35,32	62,22
Sanggau	17,50	48,36	32,61	69,88
Ketapang	4,44	39,42	25,53	49,32
Sintang	12,50	42,67	32,33	63,55
Kapuas Hulu	6,67	56,98	41,03	62,52
Sekadau	3,33	38,38	39,34	56,27
Melawi	13,33	43,20	34,91	66,40
Kayong Utara	0,01	42,56	30,94	47,29
Kubu Raya	20,00	41,85	34,81	72,43
Kota Pontianak	13,33	47,28	33,87	66,48
Kota Singkawang	23,33	50,72	28,97	71,58
Kalimantan Tengah	35,56	45,35	33,40	83,20
Kotawaringin Barat	16,67	44,98	23,93	64,11
Kotawaringin Timur	17,50	42,92	25,87	67,36
Kapuas	27,50	46,89	27,78	73,81
Barito Selatan	40,00	50,18	38,16	86,33
Barito Utara	32,00	47,14	43,76	85,35
Sukamara	25,00	48,68	19,98	66,33

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lamandau	20,00	53,01	27,90	71,06
Seruyan	12,00	42,16	27,12	62,83
Katingan	16,00	38,61	29,69	66,57
Pulang Pisau	28,00	42,99	23,18	70,36
Gunung Mas	48,00	47,86	49,83	88,91
Barito Timur	28,00	49,90	43,46	82,67
Murung Raya	16,00	47,43	29,37	68,10
Kota Palangka Raya	30,00	44,02	32,28	78,95
KALIMANTAN SELATAN	20,00	48,29	36,34	74,60
Tanah Laut	22,86	52,80	28,02	70,67
Kota Baru	22,86	39,77	27,17	71,21
Banjar	31,11	47,21	33,29	80,73
Barito Kuala	22,86	47,38	40,80	78,35
Tapin	8,00	49,95	48,52	65,16
Hulu Sungai Selatan	6,67	54,68	27,04	54,50
Hulu Sungai Tengah	20,00	53,95	48,62	77,69
Hulu Sungai Utara	23,33	56,62	29,79	70,36
Tabalong	23,33	43,86	29,17	72,30
Tanah Bumbu	14,29	46,13	31,17	67,05
Balangan	16,00	54,91	37,37	69,55
Kota Banjarmasin	24,44	47,44	37,99	79,56
Kota Banjar Baru	13,33	44,84	31,86	66,63
KALIMANTAN TIMUR	18,18	44,12	24,06	65,65
Pasir	20,00	46,89	23,44	66,20
Kutai Barat	12,00	41,85	26,28	61,14
Kutai Kartanegara	15,56	49,21	24,64	63,74
Kutai Timur	15,00	48,40	17,77	56,35
Berau	16,67	42,20	17,91	57,66
Malinau	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nunukan	-	-	-	-
Penajam Paser Utara	4,00	57,06	25,45	50,36
Tana Tidung	-	-	-	-
Mahakam Ulu	40,00	45,23	28,28	80,61
Kota Balikpapan	20,00	42,39	26,61	69,11
Kota Samarinda	13,64	40,49	30,87	66,29
Kota Tarakan	-	-	-	-
Kota Bontang	12,00	44,51	17,24	51,99
KALIMANTAN UTARA	11,43	41,79	26,33	61,48
Malinau	15,00	35,72	28,03	65,84
Bulongan	16,00	44,75	21,83	62,05
Tana Tidung	10,00	30,18	22,30	52,64
Nunukan	32,00	41,38	27,06	77,78
Kota Tarakan	10,00	44,93	25,84	59,34
SULAWESI UTARA	28,89	50,95	32,39	79,10
Bolaang Mongondow	33,33	54,56	28,80	78,05
Minahasa	48,57	50,48	39,09	87,63
Kepulauan Sangihe	12,00	60,33	29,27	61,38
Kepulauan Talaud	20,00	48,94	27,91	68,59
Minahasa Selatan	26,67	55,69	31,69	76,20
Minahasa Utara	13,33	47,54	33,69	67,40
Bolaang Mongondow Utara	15,00	66,20	28,62	61,99
Siau Tagulandang Biaro	25,00	57,11	34,94	74,53
Minahasa Tenggara	28,00	60,19	35,63	78,46
Bolaang Mongondow Selatan	25,00	48,67	28,22	72,22
Bolaang Mongondow Timur	30,00	52,72	24,95	73,06
Kota Manado	37,50	48,20	35,18	83,96

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Bitung	16,67	42,06	26,96	65,15
Kota Tomohon	35,00	55,09	34,10	81,86
Kota Kotamobagu	20,00	49,73	25,61	66,93
SULAWESI TENGAH	24,44	48,93	30,87	74,49
Banggai Kepulauan	16,00	48,33	43,89	72,09
Banggai	28,57	44,88	28,24	73,88
Morowali	4,00	45,17	27,08	51,09
Poso	80,00	53,73	32,01	70,77
Donggala	13,33	55,57	29,68	64,03
Toli-Toli	23,33	50,80	25,73	68,62
Buol	16,00	45,18	24,93	60,74
Parigi Moutong	15,00	52,09	24,62	60,85
Tojo Una-Una	4,00	50,13	27,06	50,73
Sigi	16,67	50,90	32,76	67,12
Banggai Laut	20,00	37,88	37,77	71,14
Morowali Utara	28,00	41,00	21,13	66,32
Kota Palu	11,43	49,20	34,34	66,15
SULAWESI SELATAN	27,71	53,02	32,44	76,01
Kepulauan Selayar	20,00	59,26	31,85	68,03
Bulukumba	20,00	57,26	34,19	69,89
Bantaeng	32,00	56,43	36,84	80,27
Jeneponto	20,00	60,70	31,89	68,04
Takalar	26,67	55,88	28,38	70,66
Gowa	28,89	48,45	34,09	78,31
Sinjai	26,67	61,92	33,83	72,48
Maros	25,71	44,49	26,70	69,93
Pangkajene Dan Kepulauan	8,57	60,08	31,82	57,03
Barru	20,00	59,63	26,12	63,41
Bone	8,89	58,84	32,13	58,55

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Soppeng	23,33	61,03	34,05	71,45
Wajo	10,00	60,87	27,01	55,09
Sidenreng Rappang	8,57	48,87	29,47	56,80
Pinrang	15,00	55,60	35,41	67,92
Enrekang	10,00	70,12	36,65	58,28
Luwu	5,71	65,50	36,80	55,89
Tana Toraja	13,33	55,23	42,67	69,32
Luwu Utara	0,01	58,20	20,71	38,92
Luwu Timur	6,67	50,68	22,89	50,76
Toraja Utara	10,00	51,39	35,01	62,58
Kota Makassar	26,53	45,26	35,36	78,32
Kota Pare-Pare	24,00	45,11	31,78	73,86
Kota Palopo	28,00	56,99	34,30	77,53
SULAWESI TENGGARA	17,78	49,15	36,10	71,40
Buton	12,00	49,31	33,00	64,49
Muna	13,33	52,81	35,56	65,49
Konawe	26,67	50,17	36,57	78,41
Kolaka	16,67	55,09	26,04	63,98
Konawe Selatan	20,00	46,36	31,32	70,02
Bombana	12,00	56,52	27,35	58,11
Wakatobi	32,00	41,83	39,95	79,01
Kolaka Utara	20,00	59,27	27,71	67,30
Buton Utara	25,00	50,72	38,09	76,46
Konawe Utara	15,00	50,97	36,14	69,52
Kolaka Timur	40,00	44,94	32,07	80,33
Konawe Kepulauan	10,00	44,49	77,63	51,17
Muna Barat	20,00	33,65	18,93	50,64
Buton Tengah	24,00	59,03	48,23	80,20
Buton Selatan	20,00	44,84	37,31	74,66
Kota Kendari	25,71	46,12	37,61	79,76

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Bau-Bau	24,00	52,02	31,08	72,28
GORONTALO	26,67	57,36	26,93	70,67
Boalemo	24,00	63,60	29,21	68,53
Gorontalo	17,14	56,53	26,81	62,91
Pohuwato	16,00	61,28	36,70	68,74
Bone Bolango	4,00	58,35	29,65	51,91
Gorontalo Utara	40,00	60,71	28,16	76,61
Kota Gorontalo	29,17	52,87	30,80	75,33
SULAWESI BARAT	11,11	51,67	36,32	65,92
Majene	20,00	53,41	39,18	75,30
Polewali Mandar	17,78	50,93	37,31	72,21
Mamasa	13,33	50,88	25,87	60,28
Mamuju	10,00	52,97	28,40	58,96
Mamuju Utara	10,00	47,20	19,26	50,46
Mamuju Tengah	24,00	54,81	22,24	65,86
MALUKU	23,26	50,65	37,15	75,77
Maluku Tenggara Barat	20,00	39,80	44,03	73,32
Maluku Tenggara	16,00	54,93	36,49	69,08
Maluku Tengah	10,00	51,12	35,33	63,23
Buru	8,00	44,05	29,31	56,39
Kepulauan Aru	8,00	45,46	42,52	62,70
Seram Bagian Barat	3,33	59,85	37,27	54,26
Seram Bagian Timur	4,00	56,02	32,51	52,79
Maluku Barat Daya	5,00	60,33	41,19	55,85
Buru Selatan	5,00	48,75	31,43	55,87
Kota Ambon	17,14	50,64	39,65	74,38
Kota Tual	10,00	50,44	26,60	58,20
MALUKU UTARA	26,67	46,63	36,49	77,50
Halmahera Barat	16,00	51,66	32,68	66,22
Halmahera Tengah	5,00	51,52	29,14	52,20

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Sula	4,00	55,52	28,21	49,87
Halmahera Selatan	6,67	47,68	21,50	47,30
Halmahera Utara	20,00	43,91	27,93	66,30
Halmahera Timur	5,00	46,16	26,29	50,74
Pulau Morotai	10,00	45,14	27,88	55,77
Pulau Taliabu	25,00	61,31	14,81	56,73
Kota Ternate	20,00	41,11	36,57	74,90
Kota Tidore Kepulauan	16,00	47,50	33,35	67,52
PAPUA BARAT	14,29	39,14	27,65	61,52
Fakfak	10,00	40,67	30,65	59,64
Kaimana	30,00	41,84	37,48	80,13
Teluk Wondama	10,00	39,21	23,04	53,75
Teluk Bintuni	10,00	38,88	24,58	56,52
Manokwari	28,00	35,85	29,95	71,75
Sorong Selatan	15,00	39,57	30,30	63,74
Sorong	16,00	42,34	22,36	59,25
Raja Ampat	10,00	39,65	24,98	52,88
Tambrauw	0,01	35,77	35,86	36,61
Maybrat	0,01	41,46	30,02	44,00
Manokwari Selatan	20,00	35,74	66,03	64,74
Pegunungan Arfak	5,00	19,26	24,14	31,57
Kota Sorong	23,33	41,13	25,36	69,55
PAPUA	12,73	35,04	36,63	65,37
Merauke	6,67	37,14	37,10	57,35
Jayawijaya	10,00	30,32	47,28	60,33
Jayapura	16,00	38,49	33,63	69,70
Nabire	12,00	41,44	34,26	65,90
Kepulauan Yapen	16,00	38,52	36,52	70,32
Biak Numfor	28,00	34,62	30,42	70,56
Paniai	8,00	19,89	48,40	51,13

Lampiran 5. Idg Dan Komponennya Menurut Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Puncak Jaya	3,33	18,43	39,32	47,90
Mimika	2,86	27,16	23,68	43,43
Boven Digoel	5,00	35,28	35,44	54,07
Mappi	8,00	28,54	41,84	55,56
Asmat	28,00	33,33	40,87	74,86
Yahukimo	2,86	20,35	46,59	44,86
Pegunungan Bintang	12,00	24,95	48,06	59,37
Tolikara	20,00	14,25	44,88	62,44
Sarmi	20,00	32,43	35,85	73,09
Keerom	5,00	36,25	35,25	58,06
Waropen	0,01	32,43	33,17	47,78
Supiori	15,00	36,53	33,10	66,33
Mamberamo Raya	21,05	13,26	39,55	58,23
Nduga	4,00	30,42	44,04	54,13
Lanny Jaya	4,00	16,75	43,84	42,51
Mamberamo Tengah	10,00	11,78	45,84	45,64
Yalimo	4,00	12,27	46,58	39,08
Puncak	4,00	30,10	32,76	48,26
Dogiyai	15,00	25,57	38,92	59,90
Intan Jaya	0,01	23,39	48,49	43,96
Deiyai	0,01	19,83	58,92	39,35
Kota Jayapura	27,50	47,21	34,99	82,75
INDONESIA	20,52	47,46	37,10	75,24

Sumber: www.bps.go.id, 2020

Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi, 2010-2019

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ACEH	53,40	52,06	54,44	59,78	65,12	65,57	67,40	66,28	66,60	63,31
SUMATERA UTARA	67,78	67,39	69,82	70,08	66,69	67,81	69,07	69,29	71,29	67,76
SUMATERA BARAT	63,04	64,62	65,22	65,40	61,86	62,42	64,51	65,01	65,70	59,09
RIAU	65,14	65,34	69,05	69,78	74,11	74,59	75,19	75,36	75,73	69,17
JAMBI	57,91	58,89	61,52	66,19	61,93	62,43	63,14	65,32	67,78	65,97
SUMATERA SELATAN	67,32	68,34	66,78	70,41	70,20	70,36	70,69	73,53	74,37	74,45
BENGKULU	68,50	69,33	69,57	73,45	68,76	68,86	71,09	71,40	69,60	69,78
LAMPUNG	65,32	65,86	67,24	65,62	62,99	62,01	61,98	63,60	63,82	69,23
KEP. BANGKA BELITUNG	55,62	56,03	56,54	57,29	56,12	56,29	51,69	54,91	52,57	52,96
KEP. RIAU	56,70	60,62	59,32	60,79	60,54	62,15	65,60	66,96	66,18	61,59
DKI JAKARTA	73,23	74,70	76,14	77,43	71,19	71,41	72,14	72,34	73,68	75,14
JAWA BARAT	67,01	68,08	68,62	67,57	68,87	69,02	71,15	70,04	70,20	69,48
JAWA TENGAH	67,96	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80	74,89	75,10	74,03	72,18
DI YOGYAKARTA	77,70	77,84	75,57	76,36	66,90	68,75	66,96	69,37	69,64	73,59
JAWA TIMUR	67,91	68,62	69,29	70,77	68,17	68,41	69,06	69,37	69,71	73,04
BANTEN	65,66	66,58	65,53	65,49	66,91	67,94	69,14	70,00	72,75	68,83
BALI	58,53	58,59	58,49	61,50	62,25	62,99	63,97	63,76	64,18	72,27
NUSA TENGGARA BARAT	54,49	56,57	57,90	58,54	57,49	58,69	60,06	59,95	60,56	51,91
NUSA TENGGARA TIMUR	57,98	58,90	59,55	59,81	63,06	64,75	65,07	63,76	65,86	73,37
KALIMANTAN BARAT	55,26	56,39	59,34	58,78	64,10	64,44	64,37	64,46	64,47	68,07
KALIMANTAN TENGAH	68,62	69,48	70,35	68,61	77,90	77,87	78,23	79,36	77,03	83,20
KALIMANTAN SELATAN	62,53	66,61	68,40	65,60	68,22	70,05	67,40	67,56	71,31	74,60
KALIMANTAN TIMUR	60,05	61,29	61,84	63,12	53,74	55,96	56,93	56,64	57,53	65,65
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	66,52	67,31	63,52	61,09	69,53	61,48

Lampiran 6. IDG Menurut Provinsi, 2010-2019

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SULAWESI UTARA	71,20	73,34	75,00	75,55	76,15	79,82	81,24	82,37	80,91	79,10
SULAWESI TENGAH	65,37	66,08	67,96	68,59	65,11	65,57	70,05	70,38	73,95	74,49
SULAWESI SELATAN	62,46	63,38	63,88	64,42	66,76	67,98	70,02	70,57	69,14	76,01
SULAWESI TENGGARA	64,26	65,26	65,86	64,49	68,13	72,14	70,51	70,76	71,54	71,40
GORONTALO	61,35	62,12	62,08	60,89	67,36	69,26	69,70	71,09	71,23	70,67
SULAWESI BARAT	63,15	63,71	64,25	64,47	67,14	69,40	71,71	73,37	71,95	65,92
MALUKU	75,94	76,51	78,72	79,93	76,99	77,15	77,36	78,87	77,77	75,77
MALUKU UTARA	58,17	59,38	59,84	59,66	61,05	65,74	68,19	70,31	72,81	77,50
PAPUA BARAT	57,97	57,54	58,46	57,01	47,97	48,19	49,56	47,88	51,04	61,52
PAPUA	55,42	57,74	57,76	57,22	64,21	63,69	64,73	61,89	68,71	65,37

Sumber: www.bps.go.id, 2020

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ACEH	53,40	52,06	54,44	59,78	65,12	65,57	67,40	66,28	66,60	63,31
Simeulue	55,36	57,91	46,02	58,30	56,79	57,82	-	58,44	54,09	64,51
Aceh Singkil	56,79	54,62	54,86	58,91	54,65	54,87	-	52,33	59,49	59,72
Aceh Selatan	40,03	41,18	42,15	41,78	47,01	47,43	-	48,07	48,35	55,96
Aceh Tenggara	53,60	58,60	58,69	63,05	58,58	59,94	-	60,98	64,75	58,10
Aceh Timur	48,64	45,59	49,72	49,95	54,83	54,39	-	54,14	59,03	53,21
Aceh Tengah	56,54	57,98	57,07	56,81	55,42	55,63	-	56,48	64,57	68,18
Aceh Barat	46,50	47,06	47,49	48,10	55,46	55,31	-	55,90	56,25	56,89
Aceh Besar	44,73	44,41	44,71	46,07	46,04	45,64	-	47,27	47,46	47,73
Pidie	47,01	47,65	46,44	45,78	61,84	63,42	-	59,61	60,90	64,70
Bireuen	51,68	51,78	50,44	54,98	50,49	51,84	-	53,02	53,07	57,90
Aceh Utara	47,19	47,39	50,01	50,77	50,09	50,74	-	51,51	54,04	50,65
Aceh Barat Daya	42,78	42,75	43,94	44,30	51,72	50,83	-	51,62	51,29	51,90
Gayo Lues	52,28	49,27	57,90	46,89	65,17	60,67	-	61,62	66,56	56,51
Aceh Tamiang	55,78	55,44	48,05	57,16	72,88	71,25	-	72,05	73,45	74,39
Nagan Raya	54,93	56,62	55,74	60,21	60,21	61,40	-	59,45	60,44	61,80
Aceh Jaya	48,65	49,20	49,59	49,81	57,53	56,37	-	57,57	51,79	58,29
Bener Meriah	48,05	48,32	47,83	52,85	49,95	49,10	-	50,06	61,02	52,36
Pidie Jaya	54,61	56,12	63,81	58,20	53,10	54,66	-	52,00	54,71	55,49
Kota Banda Aceh	46,34	46,72	47,68	48,24	51,08	50,83	-	51,48	55,82	63,30
Kota Sabang	57,92	58,45	59,40	59,26	75,62	77,48	-	78,53	78,51	76,01
Kota Langsa	69,86	70,05	59,83	59,91	51,13	51,80	-	52,72	51,57	65,12
Kota Lhokseumawe	52,11	52,14	53,48	48,98	46,91	50,29	-	50,79	51,06	58,25
Kota Subulussalam	69,54	70,67	74,89	70,47	65,87	68,11	-	68,38	68,48	69,01
SUMATERA UTARA	67,78	67,39	69,82	70,08	66,69	67,81	69,07	69,29	71,29	67,76
Nias	53,88	46,89	45,38	54,94	47,56	51,70	-	51,89	52,87	63,15
Mandailing Natal	59,53	63,16	63,49	63,47	63,63	64,80	-	64,99	62,32	72,70
Tapanuli Selatan	65,18	63,72	63,42	66,13	65,25	67,61	-	72,33	72,66	71,03
Tapanuli Tengah	68,78	73,48	74,05	69,28	73,96	60,93	-	62,07	61,60	60,40
Tapanuli Utara	58,22	64,56	65,19	64,91	65,42	65,34	-	65,87	66,11	62,81
Toba Samosir	61,87	67,76	68,05	69,14	63,71	62,75	-	63,86	63,88	59,60
Labuhan Batu	58,96	57,95	60,07	60,43	78,48	75,90	-	75,49	77,74	71,47
Asahan	51,66	53,19	53,48	53,07	59,58	61,63	-	60,44	60,71	69,10

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Simalungun	61,78	58,69	60,60	61,28	65,47	64,52	-	66,13	65,65	62,33
Dairi	65,15	65,05	65,05	66,30	60,32	61,58	-	62,16	68,70	62,12
Karo	63,37	60,29	65,41	66,57	74,39	75,59	-	76,42	76,71	75,32
Deli Serdang	60,00	61,88	62,12	62,58	59,56	60,00	-	60,54	60,89	54,81
Langkat	52,96	51,72	56,21	56,64	57,80	56,00	-	58,41	55,79	66,21
Nias Selatan	59,84	61,27	56,18	58,42	60,80	57,45	-	59,66	68,81	64,63
Humbang Hasundutan	57,28	57,67	58,51	58,18	58,76	59,22	-	58,44	59,08	72,08
Pakpak Bharat	58,88	58,88	56,64	60,07	50,23	53,91	-	54,36	55,03	64,93
Samosir	67,27	67,63	68,12	68,19	66,15	75,50	-	77,11	76,72	79,78
Serdang Bedagai	60,21	60,63	59,61	60,09	68,49	67,65	-	66,17	69,84	65,70
Batu Bara	57,20	54,62	57,55	56,64	67,84	68,33	-	68,52	68,74	61,49
Padang Lawas Utara	61,14	64,73	65,69	62,92	55,24	59,65	-	63,57	63,01	67,58
Padang Lawas	55,65	55,04	56,56	57,19	55,22	57,56	-	58,08	57,64	55,81
Labuhan Batu Selatan	69,20	55,43	70,18	67,33	57,74	58,22	-	60,47	60,93	60,81
Labuhan Batu Utara	38,61	23,59	36,05	36,98	40,48	46,77	-	47,18	44,83	47,29
Nias Utara	64,72	68,05	65,14	65,59	70,02	58,44	-	62,47	67,65	67,57
Nias Barat	60,83	61,61	67,97	65,75	68,42	70,04	-	67,88	66,02	65,80
Kota Sibolga	63,16	65,18	65,45	63,97	73,22	73,80	-	71,10	70,98	74,57
Kota Tanjung Balai	58,32	58,47	62,13	59,80	53,85	59,20	-	59,62	59,35	59,78
Kota Pematang Siantar	63,70	63,02	60,23	60,52	72,61	73,29	-	73,51	73,80	61,56
Kota Tebing Tinggi	59,33	56,67	55,50	57,47	55,90	56,82	-	57,65	61,83	53,60
Kota Medan	57,94	58,78	59,14	59,34	60,09	60,54	-	61,23	63,36	63,93
Kota Binjai	61,09	60,86	60,11	61,90	67,21	69,44	-	69,77	69,86	70,26
Kota Padangsidimpuan	64,83	65,92	66,04	66,49	61,37	61,95	-	61,10	62,55	65,89
Kota Gunungsitoli	57,42	60,76	64,48	64,75	64,37	63,67	-	66,39	67,05	66,97
SUMATERA BARAT	63,04	64,62	65,22	65,40	61,86	62,42	64,51	65,01	65,70	59,09
Kepulauan Mentawai	44,42	43,01	45,77	45,27	43,93	46,47	-	46,90	47,36	48,36
Pesisir Selatan	43,93	43,04	48,30	46,34	50,90	54,92	-	53,46	57,70	55,79
Solok	51,99	54,09	54,62	61,56	60,34	61,54	-	62,16	62,89	63,89

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sijunjung	50,24	49,03	48,99	48,55	53,18	56,21	-	56,84	55,47	59,96
Tanah Datar	54,87	57,73	56,63	60,73	58,53	58,95	-	58,41	62,47	58,35
Padang Pariaman	53,81	55,77	56,57	53,76	53,12	53,26	-	54,48	54,82	49,10
Agam	58,28	60,10	60,20	57,36	49,41	54,35	-	54,16	55,07	63,32
Lima Puluh Kota	45,92	51,90	52,37	51,10	53,46	51,68	-	46,81	46,89	50,18
Pasaman	54,17	54,84	55,31	56,24	59,24	59,70	-	63,78	63,74	64,22
Solok Selatan	56,36	57,80	57,34	57,80	47,29	49,59	-	51,17	51,40	50,23
Dharmas Raya	44,75	43,62	46,23	52,20	47,73	47,47	-	48,91	50,00	51,42
Pasaman Barat	51,46	52,62	53,76	52,66	51,18	53,57	-	54,42	53,82	60,88
Kota Padang	56,10	57,51	60,65	58,68	68,26	68,31	-	69,01	69,30	67,49
Kota Solok	54,69	61,11	61,92	56,48	63,27	57,60	-	56,20	55,76	58,47
Kota Sawah Lunto	61,08	63,03	60,95	65,68	63,45	64,59	-	65,86	65,33	66,18
Kota Padang Panjang	74,93	75,50	74,37	80,15	76,67	73,30	-	76,10	74,45	66,57
Kota Bukittinggi	73,78	69,74	69,84	69,67	61,20	60,83	-	62,11	62,19	60,99
Kota Payakumbuh	59,16	59,85	55,69	60,43	62,24	61,70	-	61,99	62,30	67,81
Kota Pariaman	56,00	47,95	56,55	57,80	52,80	52,89	-	51,34	52,11	54,47
RIAU	65,14	65,34	69,05	69,78	74,11	74,59	75,19	75,36	75,73	69,17
Kuantan Singingi	53,43	55,13	55,03	55,66	64,16	64,19	-	59,55	61,63	57,64
Indragiri Hulu	59,62	64,56	66,23	66,60	60,07	62,92	-	62,79	59,00	52,65
Indragiri Hilir	58,99	51,54	49,45	50,96	57,39	59,08	-	59,43	59,59	64,83
Pelalawan	45,50	45,71	45,76	46,92	56,14	53,06	-	53,48	54,59	47,45
Siak	48,01	48,52	47,38	48,60	44,29	45,10	-	42,02	45,58	42,77
Kampar	47,93	49,13	50,14	53,14	65,29	61,46	-	60,80	61,18	54,41
Rokan Hulu	57,82	52,46	54,78	55,53	59,03	59,36	-	60,75	62,48	52,81
Bengkalis	47,23	47,36	44,56	48,05	59,68	51,83	-	52,64	53,53	54,27
Rokan Hilir	55,76	47,18	56,13	57,66	52,78	50,83	-	49,86	49,99	62,23
Kepulauan Meranti	53,66	54,48	55,51	59,04	57,09	64,55	-	62,82	64,86	62,57
Kota Pekanbaru	62,14	62,73	61,80	63,54	64,08	64,45	-	65,83	61,05	67,79
Kota Dumai	54,95	49,89	49,78	51,13	62,56	62,45	-	59,49	59,90	56,78
JAMBI	57,91	58,89	61,52	66,19	61,93	62,43	63,14	65,32	67,78	65,97
Kerinci	59,45	52,23	54,47	57,70	70,46	66,13	-	67,20	67,44	59,96
Merangin	53,49	56,12	56,81	57,89	53,72	53,76	-	54,21	53,34	54,25

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sarolangun	58,96	59,42	55,90	56,26	55,05	55,82	-	58,35	57,30	60,07
Batang Hari	67,52	70,59	71,86	70,42	69,23	69,72	-	70,60	70,76	75,56
Muaro Jambi	68,89	63,20	67,14	66,53	68,30	67,98	-	68,67	68,81	63,18
Tanjung Jabung Timur	42,53	54,87	51,54	54,50	52,26	61,57	-	64,87	59,92	68,81
Tanjung Jabung Barat	55,54	59,54	56,45	60,51	57,71	60,93	-	61,93	63,10	68,31
Tebo	48,67	49,10	49,16	49,44	64,27	62,12	-	62,02	63,55	51,98
Bungo	46,62	46,11	47,82	48,27	61,47	59,42	-	61,15	61,27	59,18
Kota Jambi	53,55	55,35	55,34	58,67	63,75	68,07	-	69,14	69,83	68,48
Kota Sungai Penuh	52,46	60,59	61,83	61,57	50,98	51,01	-	51,32	52,41	52,87
SUMATERA SELATAN	67,32	68,34	66,78	70,41	70,20	70,36	70,69	73,53	74,37	74,45
Ogan Komering Ulu	45,82	46,48	60,54	60,83	56,02	56,77	-	56,84	57,32	50,01
Ogan Komering Ilir	48,81	46,36	49,03	50,52	53,03	53,04	-	56,08	57,47	61,22
Muara Enim	66,10	67,25	62,91	63,42	59,21	58,61	-	60,18	61,55	71,07
Lahat	57,65	58,66	56,01	54,33	60,41	60,76	-	60,87	62,77	67,07
Musi Rawas	53,32	55,88	49,72	50,70	54,03	55,23	-	55,54	49,76	56,94
Musi Banyuasin	59,94	56,75	62,33	60,62	59,90	65,17	-	72,18	73,01	60,06
Banyu Asin	57,14	58,11	65,08	65,38	57,30	59,91	-	59,89	60,00	60,70
Ogan Komering Ulu Selatan	48,27	48,75	49,54	49,70	53,23	51,17	-	54,54	54,04	55,33
Ogan Komering Ulu Timur	58,26	58,82	61,24	61,71	55,26	58,08	-	57,34	56,99	59,51
Ogan Ilir	50,07	50,94	51,96	51,88	49,21	50,81	-	51,24	49,62	60,19
Empat Lawang	68,10	70,27	64,46	73,13	60,28	62,78	-	61,15	59,70	56,93
Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	55,29	-	55,62	55,31	51,04
Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	53,10	-	53,42	52,47	48,51
Kota Palembang	63,07	64,27	63,72	67,81	69,16	65,58	-	63,41	64,28	58,28
Kota Prabumulih	48,38	49,29	49,31	52,34	55,38	54,83	-	55,75	55,94	59,90
Kota Pagar Alam	46,81	48,17	53,10	53,42	56,93	49,79	-	58,11	58,51	57,68
Kota Lubuklinggau	61,67	63,13	63,94	61,24	58,47	56,96	-	62,43	65,13	56,63
BENGKULU	68,50	69,33	69,57	73,45	68,76	68,86	71,09	71,40	69,60	69,78

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bengkulu Selatan	61,92	61,45	62,06	63,45	58,63	59,40	-	54,75	54,89	55,20
Rejang Lebong	55,81	62,42	56,69	57,23	57,76	57,63	-	61,73	61,99	64,71
Bengkulu Utara	61,43	62,30	64,38	64,81	65,15	62,88	-	65,76	65,92	65,77
Kaur	59,31	57,95	60,05	60,77	61,69	61,66	-	61,86	66,25	62,13
Seluma	58,27	58,20	58,98	68,56	66,86	66,22	-	65,15	61,95	65,68
Mukomuko	47,43	47,60	54,27	54,21	59,74	60,66	-	61,32	61,40	56,78
Lebong	68,00	73,07	69,50	69,77	77,91	79,07	-	79,39	79,68	67,14
Kepahiang	66,31	67,28	67,70	66,65	77,61	75,63	-	73,29	73,63	65,09
Bengkulu Tengah	48,95	55,81	62,70	64,50	66,22	69,09	-	70,15	73,80	76,71
Kota Bengkulu	66,03	74,63	75,21	75,64	75,97	75,96	-	76,46	76,61	77,58
LAMPUNG	65,32	65,86	67,24	65,62	62,99	62,01	61,98	63,60	63,82	69,23
Lampung Barat	69,17	67,21	70,26	68,07	49,16	59,86	-	60,47	63,84	68,21
Tanggamus	61,99	53,94	52,28	55,94	63,69	68,17	-	69,77	69,90	56,97
Lampung Selatan	59,84	60,78	60,74	61,22	58,33	56,88	-	57,66	58,14	59,40
Lampung Timur	62,02	62,49	62,15	62,92	60,86	60,71	-	60,01	60,73	63,42
Lampung Tengah	57,19	58,34	58,39	59,36	52,09	55,64	-	55,75	53,52	62,22
Lampung Utara	58,91	61,33	61,24	61,28	54,37	60,17	-	60,90	61,41	64,87
Way Kanan	59,90	58,60	59,10	66,12	65,42	66,59	-	68,46	65,30	61,46
Tulangbawang	59,97	60,22	58,43	57,88	59,96	65,43	-	62,78	62,52	65,94
Pesawaran	61,30	62,18	62,87	64,39	68,65	70,08	-	70,51	67,03	72,59
Pringsewu	43,11	59,44	60,10	60,48	62,55	62,54	-	62,95	63,81	67,05
Mesuji	67,66	67,87	69,15	67,68	47,61	61,12	-	61,40	61,71	69,27
Tulangbawang Barat	64,12	54,68	54,84	55,37	54,75	59,26	-	62,74	59,74	51,46
Pesisir Barat	-	-	-	-	57,12	67,73	-	64,34	63,90	56,21
Kota Bandar Lampung	59,54	62,82	63,42	61,53	59,53	59,05	-	62,11	62,39	71,54
Kota Metro	66,34	75,74	76,24	73,93	76,29	78,54	-	78,92	78,75	77,02
KEP. BANGKA BELITUNG	55,62	56,03	56,54	57,29	56,12	56,29	51,69	54,91	52,57	52,96
Bangka	57,39	52,85	58,07	59,40	62,01	61,32	-	62,04	62,20	65,18
Belitung	49,27	49,21	49,37	48,56	40,16	52,00	-	42,62	48,48	53,82
Bangka Barat	53,32	56,29	58,28	54,81	55,57	59,37	-	54,45	49,88	64,82
Bangka Tengah	52,92	44,54	45,08	54,93	54,29	50,71	-	55,76	56,39	57,31

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bangka Selatan	39,16	43,77	45,79	37,80	37,13	37,93	-	48,66	48,46	49,29
Belitung Timur	42,25	47,21	49,65	50,11	63,33	63,04	-	67,36	68,21	56,74
Kota Pangkal Pinang	49,60	50,01	55,20	56,10	55,44	55,22	-	56,64	57,17	61,88
Kep. Riau	56,70	60,62	59,32	60,79	60,54	62,15	65,60	66,96	66,18	61,59
Karimun	49,43	49,93	50,14	51,49	54,43	55,55	-	56,47	57,03	64,17
Bintan	49,32	61,29	63,11	62,59	65,51	65,44	-	61,24	63,41	69,71
Natuna	43,92	45,94	46,80	46,40	53,86	52,85	-	48,55	49,17	42,02
Lingga	37,88	38,59	39,29	39,98	40,40	40,75	-	47,82	46,08	48,96
Kepulauan Anambas	50,40	49,96	49,48	50,64	56,22	56,96	-	57,07	57,32	57,74
Kota Batam	59,84	65,88	69,69	69,29	54,31	57,83	-	55,28	53,29	58,40
Kota Tanjung Pinang	51,38	56,42	57,10	57,60	70,92	70,33	-	70,33	68,57	76,13
DKI JAKARTA	73,23	74,70	76,14	77,43	71,19	71,41	72,14	72,34	73,68	75,14
Kepulauan Seribu	61,47	63,35	63,75	63,73	59,84	57,06	-	61,08	59,98	63,03
Kodya Jakarta Selatan	72,47	74,70	76,01	77,68	71,89	72,27	-	73,17	74,33	75,80
Kodya Jakarta Timur	72,84	73,75	73,76	75,69	69,21	70,04	-	71,17	72,82	74,52
Kodya Jakarta Pusat	74,61	75,52	75,15	79,21	73,36	72,93	-	74,71	75,72	77,42
Kodya Jakarta Barat	73,72	74,18	75,00	77,36	71,47	71,46	-	71,66	73,32	75,20
Kodya Jakarta Utara	72,24	74,60	73,08	76,95	70,49	70,57	-	72,12	73,36	74,79
JAWA BARAT	67,01	68,08	68,62	67,57	68,87	69,02	71,15	70,04	70,20	69,48
Bogor	59,05	59,46	61,35	61,86	61,08	59,84	-	57,10	56,64	55,73
Sukabumi	58,81	58,29	56,88	60,69	57,71	55,51	-	58,33	53,07	60,70
Cianjur	53,96	48,93	52,65	50,58	56,85	58,27	-	55,95	60,36	60,32
Bandung	67,15	66,11	69,64	46,40	73,58	74,46	-	76,50	72,40	65,86
Garut	60,23	64,68	65,16	65,85	63,33	63,21	-	65,63	64,67	68,23
Tasikmalaya	55,65	57,86	57,79	62,09	61,18	60,75	-	63,04	63,15	64,30
Ciamis	56,62	57,56	58,52	58,07	63,17	62,43	-	63,67	64,54	65,35
Kuningan	55,92	55,91	58,04	59,12	71,20	69,59	-	72,39	73,05	70,58
Cirebon	56,96	57,75	55,87	52,83	67,09	71,64	-	74,27	72,39	75,61
Majalengka	52,23	52,48	55,77	57,96	60,67	59,93	-	59,15	61,67	58,90
Sumedang	62,73	65,14	62,91	64,82	72,32	68,69	-	68,08	70,57	70,94
Indramayu	55,14	56,50	54,84	60,77	61,60	64,34	-	58,94	61,12	70,10
Subang	48,31	49,80	51,75	47,25	60,05	62,56	-	65,90	68,81	68,83

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Purwakarta	66,75	64,74	64,73	65,88	69,54	70,59	-	72,25	72,04	74,39
Karawang	53,88	58,86	60,32	59,94	67,43	64,21	-	68,08	68,52	74,80
Bekasi	54,97	56,81	54,95	57,34	53,21	55,40	-	57,16	57,02	60,83
Bandung Barat	69,42	71,03	68,76	70,17	64,80	57,99	-	53,98	62,71	64,53
Pangandaran	-	-	-	-	61,27	62,15	-	65,45	69,20	74,56
Kota Bogor	62,60	64,75	66,09	65,02	63,07	64,05	-	67,37	62,04	68,91
Kota Sukabumi	52,65	53,58	52,26	58,60	62,35	59,42	-	60,20	59,55	66,82
Kota Bandung	64,53	65,76	67,77	68,06	58,22	58,06	-	58,84	63,63	70,38
Kota Cirebon	53,28	52,37	52,25	60,27	71,97	74,89	-	74,23	73,97	77,86
Kota Bekasi	59,19	59,49	64,69	63,50	65,33	64,84	-	65,68	65,96	66,10
Kota Depok	77,29	76,37	79,55	79,34	81,08	81,23	-	81,40	81,49	74,82
Kota Cimahi	66,15	66,51	69,28	53,10	72,70	73,38	-	76,97	77,21	74,14
Kota Tasikmalaya	54,97	50,60	55,23	54,04	54,28	62,46	-	63,50	62,92	59,32
Kota Banjar	53,85	55,80	51,67	48,95	47,90	49,32	-	47,96	53,80	49,53
JAWA TENGAH	67,96	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80	74,89	75,10	74,03	72,18
Cilacap	55,17	57,72	53,40	56,58	63,23	63,53	-	62,52	62,11	69,13
Banyumas	66,57	67,64	64,78	65,50	64,41	67,37	-	67,32	68,11	71,92
Purbalingga	66,33	67,47	67,26	68,66	71,03	72,08	-	73,11	75,51	70,60
Banjarnegara	57,80	59,23	61,07	61,03	67,78	65,72	-	66,44	65,12	72,84
Kebumen	63,18	65,63	66,31	67,32	67,98	68,76	-	70,13	68,09	67,15
Purworejo	59,49	58,30	60,76	67,59	68,76	68,74	-	69,56	71,61	70,03
Wonosobo	47,44	48,06	46,35	48,96	45,36	47,72	-	50,55	51,41	46,29
Magelang	60,12	60,79	61,27	58,77	65,54	68,53	-	62,43	71,21	67,74
Boyolali	68,47	68,82	69,39	69,56	65,71	65,82	-	66,28	65,61	81,88
Klaten	69,23	70,41	70,93	71,04	59,93	59,95	-	59,60	60,25	72,35
Sukoharjo	67,78	67,46	68,73	67,02	71,94	70,45	-	76,11	76,17	78,52
Wonogiri	61,93	62,71	62,80	61,10	63,34	62,63	-	64,04	63,80	71,88
Karanganyar	67,87	66,44	66,89	71,66	77,00	75,84	-	74,27	80,51	74,76
Sragen	56,06	57,18	57,58	57,92	61,75	61,80	-	62,28	62,48	65,07
Grobogan	57,65	57,45	59,40	59,76	56,95	57,54	-	56,01	53,70	56,31
Blora	74,72	75,08	74,85	75,11	67,34	69,94	-	70,52	70,72	65,59
Rembang	68,02	69,97	69,98	69,27	66,43	70,35	-	72,45	73,12	65,79
Pati	61,44	63,63	63,00	65,99	65,95	65,74	-	67,96	66,55	66,99

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kudus	67,01	66,05	68,10	67,65	60,56	62,00	-	62,02	62,07	65,24
Jepara	46,11	47,23	47,29	47,92	47,85	48,49	-	48,76	50,62	58,20
Demak	70,23	70,84	69,68	69,33	66,60	68,27	-	68,48	70,79	67,20
Semarang	75,91	76,92	75,10	77,45	75,28	75,49	-	76,15	77,41	74,97
Temanggung	70,83	72,00	71,83	72,96	81,65	82,20	-	82,49	82,01	84,46
Kendal	64,42	64,65	60,96	66,56	74,54	73,43	-	75,35	76,78	77,24
Batang	62,29	64,74	64,48	65,62	66,61	68,12	-	66,58	66,29	63,78
Pekalongan	55,20	56,81	57,35	67,03	66,84	68,09	-	68,38	73,19	70,87
Pemalang	70,26	69,95	68,20	70,21	68,41	68,73	-	70,52	68,95	80,08
Tegal	49,07	51,70	51,16	51,91	68,02	77,06	-	68,90	69,25	72,58
Brebes	53,94	53,95	53,28	51,14	61,00	59,26	-	60,72	60,94	62,04
Kota Magelang	65,29	66,78	67,29	68,03	78,82	75,83	-	76,28	76,30	76,81
Kota Surakarta	75,75	78,06	79,32	78,93	74,93	74,98	-	77,25	77,10	77,88
Kota Salatiga	76,28	81,45	81,25	80,91	80,36	80,38	-	80,83	82,16	76,19
Kota Semarang	63,46	64,48	66,61	70,62	75,58	76,53	-	75,22	75,55	74,57
Kota Pekalongan	64,69	68,44	66,22	68,67	63,88	67,44	-	65,11	68,62	60,95
Kota Tegal	67,77	69,18	68,00	65,15	76,73	76,67	-	77,52	79,57	63,66
DI YOGYAKARTA	77,70	77,84	75,57	76,36	66,90	68,75	66,96	69,37	69,64	73,59
Kulon Progo	61,18	61,15	59,23	59,26	63,68	67,26	-	68,42	68,36	71,68
Bantul	67,85	68,46	68,52	68,88	61,18	61,77	-	61,99	61,01	65,29
Gunung Kidul	59,36	62,22	64,58	66,01	68,27	64,48	-	68,70	67,45	75,34
Sleman	70,74	70,52	69,66	72,30	79,37	77,61	-	79,51	78,47	80,40
Kota Yogyakarta	69,85	70,00	70,70	71,75	79,44	79,33	-	78,94	80,65	71,06
JAWA TIMUR	67,91	68,62	69,29	70,77	68,17	68,41	69,06	69,37	69,71	73,04
Pacitan	67,87	67,61	68,38	68,70	67,29	67,42	-	69,01	69,57	68,77
Ponorogo	64,96	67,58	65,84	66,06	64,01	62,82	-	64,87	68,18	67,71
Trenggalek	63,39	64,92	66,06	70,65	63,77	65,58	-	65,21	66,12	66,86
Tulungagung	51,96	52,67	53,00	53,54	63,28	63,59	-	63,95	64,11	66,36
Blitar	66,59	63,33	66,65	63,99	75,42	75,08	-	77,15	78,02	79,05
Kediri	70,86	72,20	72,24	72,29	74,06	74,09	-	73,93	74,61	72,24
Malang	69,49	69,51	70,45	73,03	68,45	72,20	-	74,37	75,49	69,68
Lumajang	47,09	47,99	45,78	48,44	59,21	58,62	-	60,11	59,23	59,16
Jember	59,47	58,76	61,63	53,54	67,69	68,58	-	68,65	70,45	67,65

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Banyuwangi	63,52	65,50	64,81	66,89	66,45	67,58	-	69,43	69,71	74,52
Bondowoso	50,91	55,45	54,06	56,26	54,04	55,82	-	57,28	59,55	65,10
Situbondo	67,86	68,09	69,29	68,26	62,49	65,07	-	65,04	67,72	69,26
Probolinggo	51,28	57,01	58,40	56,61	65,10	65,47	-	64,86	67,06	68,22
Pasuruan	73,49	73,85	75,24	75,34	64,54	64,07	-	65,59	65,81	66,24
Sidoarjo	63,68	63,21	64,59	64,49	63,38	63,99	-	64,65	64,46	67,13
Mojokerto	70,07	70,47	71,00	72,30	68,67	75,93	-	75,72	78,33	79,74
Jombang	50,36	49,69	51,21	51,63	68,12	67,75	-	68,40	68,25	73,52
Nganjuk	57,63	57,92	56,79	58,89	66,41	62,46	-	66,56	65,00	68,45
Madiun	64,30	56,90	57,77	58,34	59,42	59,35	-	60,03	60,05	68,47
Magetan	62,33	64,65	65,87	69,89	59,96	60,50	-	61,34	61,68	66,63
Ngawi	65,66	66,39	66,71	63,39	68,00	67,75	-	68,93	70,95	72,89
Bojonegoro	57,42	58,28	59,27	60,44	55,91	58,82	-	59,30	57,62	55,44
Tuban	60,43	62,91	64,46	61,69	59,39	59,47	-	61,25	67,74	64,32
Lamongan	55,39	56,62	57,18	61,61	68,75	67,30	-	68,10	67,95	74,37
Gresik	62,56	63,56	63,44	66,21	62,26	62,79	-	63,35	65,33	69,43
Bangkalan	49,38	50,20	48,58	50,95	49,66	49,75	-	49,74	50,03	57,71
Sampang	41,13	43,26	44,18	42,09	45,41	49,86	-	48,18	49,67	55,99
Pamekasan	48,46	51,85	51,04	51,89	54,11	52,27	-	55,81	57,29	53,13
Sumenep	53,11	54,74	55,52	52,92	51,83	57,65	-	54,90	53,81	60,99
Kota Kediri	70,94	71,92	74,31	74,50	80,92	81,52	-	82,36	82,36	84,46
Kota Blitar	68,68	68,47	69,39	69,48	67,57	67,22	-	67,51	67,91	67,70
Kota Malang	73,80	78,75	74,50	75,41	74,72	74,87	-	70,76	71,05	78,11
Kota Probolinggo	75,70	76,14	77,10	77,65	67,18	66,28	-	66,69	67,76	66,02
Kota Pasuruan	51,67	56,50	57,42	57,96	53,53	57,68	-	62,03	62,01	55,09
Kota Mojokerto	63,78	64,46	65,15	65,81	76,96	76,98	-	82,00	82,10	71,51
Kota Madiun	78,69	79,21	79,96	81,49	81,11	81,48	-	82,19	82,28	77,07
Kota Surabaya	77,53	77,09	78,02	79,42	81,93	82,15	-	82,89	83,29	83,88
Kota Batu	74,31	75,01	76,10	76,11	77,35	70,02	-	73,66	70,92	69,13
BANTEN	65,66	66,58	65,53	65,49	66,91	67,94	69,14	70,00	72,75	68,83
Pandeglang	57,79	58,63	59,65	60,20	57,98	61,47	-	60,45	61,27	61,58
Lebak	60,56	59,50	63,09	60,48	63,81	62,27	-	64,38	60,85	60,36
Tangerang	52,00	52,88	55,41	53,16	61,67	62,54	-	62,43	62,25	61,54

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Serang	46,16	50,08	54,21	53,72	61,94	58,32	-	59,00	64,55	58,87
Kota Tangerang	65,03	65,17	64,60	65,30	71,40	69,16	-	71,67	71,76	65,19
Kota Cilegon	55,37	57,79	55,16	54,24	55,80	52,66	-	56,05	59,22	52,86
Kota Serang	62,44	64,04	63,50	63,88	61,83	62,88	-	63,81	62,65	62,10
Kota Tangerang Selatan	59,94	60,46	59,94	60,30	65,89	63,17	-	68,46	70,72	74,00
BALI	58,53	58,59	58,49	61,50	62,25	62,99	63,97	63,76	64,18	72,27
Jembrana	67,87	71,76	68,93	72,10	61,48	65,07	-	66,23	66,23	74,60
Tabanan	54,94	55,16	54,43	55,44	59,95	59,56	-	61,06	61,62	78,14
Badung	52,01	53,24	54,76	55,24	55,24	58,80	-	61,48	62,03	75,23
Gianyar	59,03	59,42	57,72	58,43	60,99	61,45	-	62,35	62,59	66,22
Klungkung	67,66	66,78	67,81	69,34	74,56	74,89	-	72,60	71,77	78,35
Bangli	66,23	63,39	64,22	65,60	59,01	61,12	-	59,57	61,07	61,81
Karang Asem	58,76	57,69	56,75	60,06	58,98	60,24	-	59,30	60,20	60,77
Buleleng	57,96	61,22	58,14	60,97	64,28	65,15	-	67,68	65,58	73,13
Kota Denpasar	55,98	55,74	56,28	59,66	58,25	58,50	-	58,80	59,09	62,16
NUSA TENGGARA BARAT	54,49	56,57	57,90	58,54	57,49	58,69	60,06	59,95	60,56	51,91
Lombok Barat	44,01	43,06	50,50	51,35	61,16	63,91	-	62,28	59,25	56,32
Lombok Tengah	48,56	48,39	48,65	53,04	47,07	54,18	-	55,43	57,24	57,45
Lombok Timur	57,56	59,57	59,19	58,51	54,76	57,52	-	60,23	60,79	65,67
Sumbawa	53,33	52,92	57,69	54,09	55,38	55,01	-	56,48	56,43	69,26
Dompu	58,38	60,94	62,50	60,60	63,60	63,39	-	64,00	64,03	64,30
Bima	42,72	43,00	44,79	45,28	55,41	53,30	-	60,66	61,05	52,61
Sumbawa Barat	38,85	40,01	40,23	41,43	37,14	35,74	-	38,03	38,69	49,06
Lombok Utara	39,17	41,87	39,49	39,48	45,93	48,70	-	46,33	46,66	47,19
Kota Mataram	57,75	54,40	57,60	57,99	63,49	63,87	-	64,57	65,34	76,46
Kota Bima	52,45	58,41	58,19	58,25	63,65	64,48	-	65,14	65,33	69,91
NUSA TENGGARA TIMUR	57,98	58,90	59,55	59,81	63,06	64,75	65,07	63,76	65,86	73,37
Sumba Barat	46,96	46,43	47,81	45,26	66,73	64,05	-	67,53	68,55	69,24
Sumba Timur	65,89	65,94	66,51	67,00	58,56	60,06	-	60,59	60,86	64,91
Kupang	50,62	60,53	61,49	60,23	65,61	62,01	-	64,75	65,58	65,30

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Timor Tengah Selatan	60,23	55,53	55,96	59,37	58,52	58,59	-	58,78	59,68	57,47
Timor Tengah Utara	62,71	58,78	64,21	61,04	58,30	57,54	-	59,04	59,86	51,59
Belu	68,32	68,21	67,98	68,57	79,21	80,49	-	81,57	81,28	75,18
Alor	53,67	51,94	54,80	55,39	59,50	59,24	-	60,14	60,49	60,64
Lembata	55,38	58,78	60,45	60,66	50,35	51,89	-	52,44	52,34	53,04
Flores Timur	56,43	58,48	59,15	59,81	52,17	51,17	-	53,27	53,37	57,61
Sikka	52,96	53,17	53,92	54,22	56,77	57,41	-	58,15	58,57	64,03
Ende	63,12	63,66	64,00	64,16	56,62	56,85	-	57,64	57,99	65,66
Ngada	63,02	63,06	63,46	63,78	69,89	73,76	-	71,64	72,21	59,22
Manggarai	58,75	62,38	61,24	60,36	64,90	65,17	-	65,52	65,85	65,61
Rote Ndao	59,75	58,14	65,11	63,97	51,10	52,93	-	51,60	50,47	48,49
Manggarai Barat	45,56	47,70	48,60	48,59	53,07	50,07	-	52,53	54,66	53,14
Sumba Tengah	51,54	60,78	61,37	58,97	53,31	52,72	-	53,21	52,83	53,09
Sumba Barat Daya	59,51	59,88	51,91	52,01	52,45	57,36	-	53,86	54,31	65,43
Nagekeo	49,93	49,14	51,70	51,76	52,67	52,98	-	53,14	53,11	52,75
Manggarai Timur	44,01	39,30	46,04	44,54	45,96	48,87	-	49,36	50,19	51,62
Sabu Raijua	49,81	56,64	39,42	42,05	48,36	66,95	-	49,33	49,53	56,04
Malaka	-	-	-	-	64,16	63,79	-	61,42	62,42	59,01
Kota Kupang	53,95	54,84	55,37	55,35	68,40	68,07	-	68,27	68,62	75,14
KALIMANTAN BARAT	55,26	56,39	59,34	58,78	64,10	64,44	64,37	64,46	64,47	68,07
Sambas	61,16	59,66	61,48	62,21	61,61	61,76	-	68,57	68,67	61,36
Bengkayang	60,27	62,15	60,97	62,02	63,09	62,93	-	61,55	62,71	72,80
Landak	56,45	57,65	57,42	55,90	67,77	65,59	-	64,07	64,47	67,80
Pontianak	53,14	53,73	55,00	53,56	66,56	66,17	-	62,91	61,62	62,22
Sanggau	64,46	58,12	59,20	55,54	61,08	64,08	-	61,15	62,11	69,88
Ketapang	46,49	49,29	50,00	50,26	54,28	54,40	-	58,77	55,83	49,32
Sintang	54,43	59,50	61,78	60,94	53,70	55,71	-	61,78	60,36	63,55
Kapuas Hulu	58,43	60,57	60,58	59,19	65,12	65,72	-	69,75	70,50	62,52
Sekadau	58,25	59,19	60,00	57,64	51,39	49,62	-	55,34	56,45	56,27
Melawi	42,84	39,13	45,73	44,75	53,72	58,15	-	55,70	54,62	66,40
Kayong Utara	43,97	45,86	44,43	45,10	56,59	56,44	-	50,02	48,92	47,29

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kubu Raya	53,43	53,97	54,80	54,06	63,24	63,90	-	63,33	63,57	72,43
Kota Pontianak	53,66	64,40	64,95	65,05	68,01	68,08	-	61,04	60,99	66,48
Kota Singkawang	53,41	53,34	54,19	54,63	57,95	58,05	-	56,75	56,71	71,58
KALIMANTAN TENGAH	68,62	69,48	70,35	68,61	77,90	77,87	78,23	79,36	77,03	83,20
Kotawaringin Barat	57,79	58,96	60,92	60,75	64,48	63,98	-	63,31	59,72	64,11
Kotawaringin Timur	61,51	60,82	60,27	61,34	69,91	70,23	-	67,87	67,35	67,36
Kapuas	64,28	55,99	58,94	61,90	62,46	68,21	-	71,50	75,34	73,81
Barito Selatan	75,06	76,98	76,95	77,43	84,02	83,88	-	81,67	83,19	86,33
Barito Utara	76,63	78,56	78,91	76,18	83,51	84,35	-	86,20	84,52	85,35
Sukamara	55,31	58,55	59,58	63,32	60,27	61,24	-	59,78	65,77	66,33
Lamandau	48,45	49,31	50,45	51,76	54,65	53,55	-	54,13	54,98	71,06
Seruyan	61,72	63,33	62,32	64,71	69,47	69,70	-	70,13	70,07	62,83
Katingan	64,72	64,16	64,71	69,48	62,33	60,79	-	66,87	73,32	66,57
Pulang Pisau	66,10	67,22	66,51	68,44	69,38	69,32	-	70,14	74,13	70,36
Gunung Mas	82,53	83,08	81,58	78,29	81,01	79,98	-	78,74	82,73	88,91
Barito Timur	64,68	65,23	66,16	65,70	66,01	75,80	-	76,46	76,50	82,67
Murung Raya	57,45	58,71	59,15	59,90	65,16	65,82	-	66,93	67,38	68,10
Kota Palangka Raya	60,78	62,39	63,35	67,51	79,59	79,83	-	79,94	80,61	78,95
KALIMANTAN SELATAN	62,53	66,61	68,40	65,60	68,22	70,05	67,40	67,56	71,31	74,60
Tanah Laut	63,71	63,96	64,46	61,77	65,36	68,33	-	65,99	65,96	70,67
Kota Baru	65,32	68,68	66,24	66,97	71,42	71,35	-	70,08	70,68	71,21
Banjar	68,17	70,31	71,13	71,49	72,68	73,37	-	76,49	76,51	80,73
Barito Kuala	63,81	63,39	57,41	61,62	70,00	70,29	-	73,44	73,62	78,35
Tapin	71,33	71,44	75,39	71,60	72,76	72,88	-	72,99	73,11	65,16
Hulu Sungai Selatan	54,04	54,29	54,60	55,24	60,41	60,38	-	61,10	60,48	54,50
Hulu Sungai Tengah	75,60	76,03	76,30	78,81	76,91	79,36	-	80,07	80,19	77,69
Hulu Sungai Utara	55,34	52,21	56,23	55,87	64,25	64,48	-	64,50	64,59	70,36
Tabalong	66,16	65,25	65,89	67,54	71,62	69,03	-	70,77	71,97	72,30
Tanah Bumbu	50,74	51,50	48,92	46,63	56,45	60,15	-	57,45	57,61	67,05
Balangan	57,50	58,53	58,86	59,45	63,17	65,47	-	65,79	65,97	69,55
Kota Banjarmasin	78,44	78,77	78,30	79,69	71,62	72,66	-	73,74	74,24	79,56

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Banjar Baru	61,13	61,79	61,31	61,07	72,47	72,09	-	73,83	75,08	66,63
KALIMANTAN TIMUR	60,05	61,29	61,84	63,12	53,74	55,96	56,93	56,64	57,53	65,65
Pasir	54,26	56,08	54,51	52,85	58,90	64,58	-	62,07	62,76	66,20
Kutai Barat	52,78	47,77	53,70	49,15	63,49	62,36	-	62,63	63,68	61,14
Kutai Kartanegara	46,73	45,81	46,04	45,86	52,91	53,41	-	55,07	56,44	63,74
Kutai Timur	51,67	54,92	48,56	50,52	55,13	55,20	-	53,71	55,72	56,35
Berau	46,40	49,53	50,34	50,48	49,20	47,09	-	49,85	50,55	57,66
Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penajam Paser Utara	64,45	63,69	63,98	61,74	49,42	49,92	-	50,30	50,02	50,36
Tana Tidung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mahakam Ulu	-	-	-	-	68,19	66,37	-	74,12	76,04	80,61
Kota Balikpapan	66,39	58,62	68,94	67,83	65,82	66,29	-	65,52	66,33	69,11
Kota Samarinda	62,25	57,49	55,60	56,79	70,67	73,60	-	70,84	69,61	66,29
Kota Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Bontang	46,93	59,11	59,06	59,47	44,29	45,85	-	45,44	46,36	51,99
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	66,52	67,31	63,52	61,09	69,53	61,48
Malinau	56,82	56,97	61,24	58,31	59,75	65,79	-	65,14	65,03	65,84
Bulongan	57,35	58,49	57,68	57,36	45,91	44,53	-	47,74	48,34	62,05
Tana Tidung	53,79	58,83	58,68	56,58	58,34	53,27	-	48,06	50,19	52,64
Nunukan	68,93	72,04	68,93	70,33	68,65	66,79	-	70,02	70,26	77,78
Kota Tarakan	52,93	58,05	49,79	58,82	49,78	50,65	-	51,33	52,00	59,34
SULAWESI UTARA	71,20	73,34	75,00	75,55	76,15	79,82	81,24	82,37	80,91	79,10
Bolaang Mongondow	66,62	67,75	65,26	68,23	71,03	67,77	-	69,91	70,64	78,05
Minahasa	76,66	78,27	79,21	78,40	76,91	81,15	-	82,42	82,96	87,63
Kepulauan Sangihe	65,76	60,96	62,83	62,80	67,57	71,31	-	73,01	66,00	61,38
Kepulauan Talaud	55,62	55,14	61,57	61,75	60,69	51,02	-	52,11	58,86	68,59
Minahasa Selatan	68,11	66,59	66,94	68,19	74,48	72,56	-	75,10	76,53	76,20

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Minahasa Utara	77,63	71,20	78,74	78,90	71,68	71,12	-	77,48	76,74	67,40
Bolaang Mongondow Utara	71,40	51,33	51,98	52,16	52,61	60,79	-	64,93	64,90	61,99
Siau Tagulandang Biaro	69,01	46,59	70,26	72,33	74,91	76,19	-	73,05	73,90	74,53
Minahasa Tenggara	72,19	78,75	76,88	80,08	73,00	78,85	-	79,28	79,86	78,46
Bolaang Mongondow Selatan	58,94	60,24	54,10	69,38	62,04	66,63	-	67,86	67,98	72,22
Bolaang Mongondow Timur	65,00	64,71	64,98	58,41	63,12	62,98	-	64,41	66,08	73,06
Kota Manado	70,25	63,55	71,41	72,01	82,50	80,33	-	81,00	83,18	83,96
Kota Bitung	69,64	60,46	70,62	71,15	60,48	67,15	-	73,25	73,00	65,15
Kota Tomohon	78,40	78,40	79,72	79,91	79,23	79,98	-	82,32	83,23	81,86
Kota Kotamobagu	61,48	62,75	63,97	64,28	60,36	57,28	-	57,48	69,33	66,93
SULAWESI TENGAH	65,37	66,08	67,96	68,59	65,11	65,57	70,05	70,38	73,95	74,49
Banggai Kepulauan	69,20	68,22	69,27	69,97	52,51	57,56	-	67,79	72,04	72,09
Banggai	61,90	61,65	62,84	63,55	66,88	66,96	-	70,23	69,04	73,88
Morowali	57,35	58,31	58,77	58,79	63,48	63,87	-	63,49	64,04	51,09
Poso	45,93	46,56	47,19	46,32	63,40	63,80	-	68,01	65,29	70,77
Donggala	45,15	44,38	68,29	65,92	55,28	55,95	-	56,35	56,87	64,03
Toli-Toli	61,55	61,86	62,79	63,77	65,45	67,47	-	66,45	67,42	68,62
Buol	64,13	63,20	65,01	65,51	65,70	66,03	-	66,51	63,96	60,74
Parigi Moutong	54,49	53,41	52,12	45,70	53,32	54,39	-	54,93	55,28	60,85
Tojo Una-Una	41,28	40,38	40,73	56,44	45,50	48,55	-	53,76	54,64	50,73
Sigi	60,47	61,25	65,06	65,51	65,56	59,06	-	59,65	56,60	67,12
Banggai Laut	-	-	-	-	55,49	56,03	-	56,04	57,66	71,14
Morowali Utara	-	-	-	-	59,32	59,12	-	60,50	57,68	66,32
Kota Palu	69,08	70,45	70,58	71,54	66,37	60,83	-	67,81	67,83	66,15
SULAWESI SELATAN	62,46	63,38	63,88	64,42	66,76	67,98	70,02	70,57	69,14	76,01
Kepulauan Selayar	68,14	70,30	70,56	59,61	59,67	62,75	-	64,74	64,69	68,03
Bulukumba	57,97	58,53	60,81	58,55	66,15	63,74	-	67,16	66,78	69,89
Bantaeng	74,10	74,73	74,50	75,69	78,41	79,24	-	77,74	80,53	80,27
Jeneponto	54,06	58,02	55,32	60,76	65,86	67,39	-	67,93	72,37	68,04

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Takalar	63,22	60,51	62,65	63,84	62,75	68,87	-	66,60	70,55	70,66
Gowa	73,50	73,23	74,71	75,10	67,37	67,99	-	69,01	61,06	78,31
Sinjai	56,08	59,77	56,40	59,99	70,44	69,69	-	72,56	70,24	72,48
Maros	60,00	60,54	61,10	58,85	61,62	64,55	-	65,16	65,48	69,93
Pangkajene Dan Kepulauan	55,64	58,93	56,66	59,86	57,00	57,28	-	56,96	56,20	57,03
Barru	58,98	61,67	63,12	60,63	64,35	64,62	-	63,54	69,24	63,41
Bone	65,54	65,37	60,59	60,64	62,18	62,49	-	62,75	63,16	58,55
Soppeng	59,76	59,75	60,51	60,63	63,37	65,76	-	69,35	73,75	71,45
Wajo	58,66	59,49	59,67	59,44	59,98	59,72	-	60,62	61,07	55,09
Sidenreng Rappang	55,46	47,93	47,95	52,97	48,43	49,16	-	49,02	52,71	56,80
Pinrang	61,55	62,13	62,10	61,91	59,00	59,02	-	59,61	61,73	67,92
Enrekang	61,09	57,52	61,77	61,40	57,89	58,59	-	58,68	59,36	58,28
Luwu	62,61	63,76	59,92	63,05	60,72	62,47	-	61,61	63,58	55,89
Tana Toraja	64,88	64,44	65,88	62,58	72,56	73,38	-	73,99	74,14	69,32
Luwu Utara	39,27	39,29	39,77	40,04	43,92	43,74	-	44,98	46,24	38,92
Luwu Timur	54,13	43,12	43,61	43,53	45,04	45,72	-	45,96	46,06	50,76
Toraja Utara	61,69	62,83	62,72	63,18	58,03	57,80	-	56,04	56,15	62,58
Kota Makassar	64,49	65,26	66,10	64,68	68,63	69,21	-	68,73	67,89	78,32
Kota Pare-Pare	62,60	62,80	63,70	63,85	61,22	61,86	-	61,56	66,62	73,86
Kota Palopo	61,21	68,38	69,84	70,35	69,67	70,91	-	70,85	74,87	77,53
SULAWESI TENGGARA	64,26	65,26	65,86	64,49	68,13	72,14	70,51	70,76	71,54	71,40
Buton	64,38	66,80	60,11	67,55	66,20	63,61	-	73,46	74,56	64,49
Muna	58,23	57,97	59,66	59,72	56,34	60,40	-	61,19	61,33	65,49
Konawe	63,15	64,24	64,50	64,89	74,01	72,42	-	76,76	75,90	78,41
Kolaka	57,11	57,52	55,32	57,97	57,00	59,83	-	59,45	61,12	63,98
Konawe Selatan	56,30	56,33	57,55	56,42	78,35	78,80	-	79,20	80,27	70,02
Bombana	54,41	54,67	55,19	55,80	51,91	52,38	-	53,23	54,04	58,11
Wakatobi	56,19	56,77	56,39	57,66	67,07	65,81	-	71,65	74,34	79,01
Kolaka Utara	46,06	48,81	49,14	48,95	50,26	50,82	-	51,62	46,43	67,30
Buton Utara	54,97	65,43	66,36	67,30	65,12	61,08	-	67,83	67,49	76,46
Konawe Utara	65,49	54,57	55,27	56,57	61,85	63,37	-	69,13	76,90	69,52
Kolaka Timur	-	-	-	-	60,67	60,75	-	61,70	62,27	80,33

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Konawe Kepulauan	-	-	-	-	31,31	45,84	-	49,52	48,96	51,17
Muna Barat	-	-	-	-	61,22	58,49	-	45,07	45,09	50,64
Buton Tengah	-	-	-	-	54,88	54,35	-	70,08	71,43	80,20
Buton Selatan	-	-	-	-	61,54	48,91	-	69,09	63,03	74,66
Kota Kendari	78,52	79,37	79,11	79,88	83,04	83,87	-	85,30	83,48	79,76
Kota Bau-Bau	56,70	59,10	55,38	58,77	66,31	67,23	-	67,98	68,94	72,28
Gorontalo	61,35	62,12	62,08	60,89	67,36	69,26	69,70	71,09	71,23	70,67
Boalemo	51,55	50,74	50,20	52,68	62,84	64,58	-	66,59	60,96	68,53
GORONTALO	55,67	56,02	57,38	56,75	64,08	65,71	-	65,76	66,42	62,91
Pohuwato	73,12	74,32	72,05	74,89	71,41	69,08	-	69,62	72,26	68,74
Bone Bolango	48,51	44,70	51,58	52,23	47,98	49,64	-	46,97	47,05	51,91
Gorontalo Utara	50,47	51,50	51,71	54,79	61,55	61,06	-	63,28	64,60	76,61
Kota Gorontalo	68,32	68,76	69,23	66,82	69,04	69,63	-	70,64	68,89	75,33
SULAWESI BARAT	63,15	63,71	64,25	64,47	67,14	69,40	71,71	73,37	71,95	65,92
Majene	68,38	68,38	68,04	76,18	70,54	74,24	-	74,51	74,87	75,30
Polewali Mandar	65,19	65,56	67,16	67,34	72,97	72,90	-	71,81	75,19	72,21
Mamasa	47,64	46,84	47,72	53,37	51,22	51,23	-	52,52	52,59	60,28
Mamuju	60,16	60,58	61,14	61,74	58,95	59,29	-	65,34	62,75	58,96
Mamuju Utara	50,07	51,47	51,46	52,64	44,80	45,79	-	49,23	50,12	50,46
Mamuju Tengah	-	-	-	-	61,46	64,58	-	62,73	60,88	65,86
MALUKU	75,94	76,51	78,72	79,93	76,99	77,15	77,36	78,87	77,77	75,77
Maluku Tenggara Barat	56,91	57,65	58,29	58,33	65,10	65,88	-	71,36	66,08	73,32
Maluku Tenggara	51,33	51,84	52,76	60,75	62,90	59,03	-	59,84	60,64	69,08
Maluku Tengah	61,15	59,69	60,64	64,86	59,66	59,64	-	59,99	60,06	63,23
Buru	57,25	56,68	56,24	59,11	57,39	63,58	-	60,55	64,65	56,39
Kepulauan Aru	50,39	50,22	51,03	51,03	51,55	55,75	-	57,57	62,30	62,70
Seram Bagian Barat	61,62	59,56	57,11	59,35	57,82	57,82	-	57,91	62,12	54,26
Seram Bagian Timur	42,93	44,41	44,88	45,17	56,87	54,64	-	57,60	57,89	52,79
Maluku Barat Daya	53,71	53,81	54,70	55,39	41,56	46,14	-	50,10	50,42	55,85
Buru Selatan	57,89	59,09	59,57	53,83	50,21	55,09	-	54,98	55,66	55,87
Kota Ambon	55,88	55,77	56,46	56,71	66,51	67,07	-	67,66	71,54	74,38
Kota Tual	47,43	47,80	48,96	47,17	50,47	50,92	-	51,84	45,26	58,20

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MALUKU UTARA	58,17	59,38	59,84	59,66	61,05	65,74	68,19	70,31	72,81	77,50
Halmahera Barat	45,20	64,50	62,80	64,43	65,29	64,32	-	69,15	66,01	66,22
Halmahera Tengah	55,04	65,41	65,66	65,99	55,06	57,18	-	51,79	51,42	52,20
Kepulauan Sula	46,90	47,79	48,33	48,42	40,32	43,68	-	48,59	49,51	49,87
Halmahera Selatan	35,36	40,20	40,31	45,54	38,01	38,20	-	38,52	38,54	47,30
Halmahera Utara	62,30	63,97	64,09	63,99	62,05	65,65	-	66,33	66,56	66,30
Halmahera Timur	39,66	40,64	41,56	42,04	49,36	49,49	-	49,53	50,23	50,74
Pulau Morotai	38,91	58,72	53,16	57,24	52,42	54,53	-	55,45	55,40	55,77
Pulau Taliabu	-	-	-	-	43,55	49,16	-	50,73	53,90	56,73
Kota Ternate	66,23	67,94	67,91	67,15	71,44	70,48	-	70,03	71,57	74,90
Kota Tidore Kepulauan	57,16	58,96	58,66	59,58	57,18	62,01	-	66,48	67,02	67,52
PAPUA BARAT	57,97	57,54	58,46	57,01	47,97	48,19	49,56	47,88	51,04	61,52
Fakfak	54,08	52,47	55,91	52,53	65,46	64,43	-	68,38	67,41	59,64
Kaimana	51,76	53,81	54,91	60,68	75,09	74,94	-	66,98	69,82	80,13
Teluk Wondama	39,34	39,46	51,04	57,60	46,62	50,45	-	51,90	49,54	53,75
Teluk Bintuni	30,83	38,09	34,33	36,84	47,24	48,98	-	48,80	65,47	56,52
Manokwari	45,39	40,60	42,19	46,54	59,64	62,40	-	65,39	67,47	71,75
Sorong Selatan	62,77	54,00	58,74	52,91	52,72	53,10	-	63,02	63,77	63,74
Sorong	38,27	43,35	41,67	35,17	47,50	43,72	-	50,06	54,38	59,25
Raja Ampat	44,13	48,94	40,61	43,00	67,08	66,43	-	70,35	69,55	52,88
Tambrauw	37,02	31,61	37,64	46,10	39,92	36,30	-	43,28	48,93	36,61
Maybrat	51,05	50,51	40,74	41,12	53,65	51,66	-	47,75	50,41	44,00
Manokwari Selatan	-	-	-	-	66,42	69,72	-	72,37	72,27	64,74
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	52,72	49,05	-	42,46	47,25	31,57
Kota Sorong	57,59	50,79	50,95	55,11	55,67	55,43	-	60,14	60,46	69,55
PAPUA	55,42	57,74	57,76	57,22	64,21	63,69	64,73	61,89	68,71	65,37
Merauke	69,66	71,24	69,93	69,26	60,95	60,88	-	71,65	72,18	57,35
Jayawijaya	57,93	54,87	48,48	58,39	53,25	50,57	-	51,42	53,80	60,33
Jayapura	56,70	55,88	58,73	58,21	50,06	47,25	-	61,91	61,79	69,70
Nabire	57,98	56,43	53,99	56,42	69,53	71,51	-	71,80	72,71	65,90
Kepulauan Yapen	48,10	49,99	49,29	50,88	47,20	47,47	-	49,92	55,38	70,32
Biak Numfor	44,23	47,83	49,16	49,47	57,02	56,52	-	61,88	62,01	70,56

Lampiran 7. IDG dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2019

Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Paniai	32,58	50,27	49,77	55,98	47,33	50,72	-	50,92	40,79	51,13
Puncak Jaya	62,54	68,48	67,29	56,45	58,08	55,33	-	42,76	51,17	47,90
Mimika	50,06	54,33	53,04	46,10	53,69	41,24	-	46,48	47,72	43,43
Boven Digoel	39,34	41,59	44,89	44,98	47,15	50,22	-	44,55	60,19	54,07
Mappi	60,08	61,01	54,17	60,20	54,07	58,66	-	57,51	61,61	55,56
Asmat	39,84	31,44	37,38	38,25	36,32	35,73	-	28,71	29,22	74,86
Yahukimo	57,88	38,27	50,26	49,93	51,28	42,38	-	46,01	50,71	44,86
Pegunungan Bintang	60,94	60,63	62,13	44,49	42,18	50,14	-	48,82	49,10	59,37
Tolikara	46,53	43,63	40,27	42,99	33,13	39,01	-	45,93	46,78	62,44
Sarmi	54,60	56,66	56,73	56,36	63,39	64,89	-	65,29	62,23	73,09
Keerom	59,00	62,03	60,62	63,02	52,17	52,16	-	62,34	57,71	58,06
Waropen	58,24	59,63	58,38	53,90	45,06	51,81	-	53,41	65,82	47,78
Supiori	62,62	67,63	66,73	69,64	60,14	60,77	-	63,00	63,85	66,33
Mamberamo Raya	58,77	59,74	59,98	51,49	55,51	57,36	-	36,95	53,16	58,23
Nduga	68,51	70,02	68,99	69,52	64,14	64,40	-	58,02	59,16	54,13
Lanny Jaya	62,02	62,70	63,63	64,40	45,78	45,58	-	38,86	57,80	42,51
Mamberamo Tengah	52,57	52,43	52,79	53,16	54,30	54,23	-	53,42	41,04	45,64
Yalimo	51,49	47,90	43,40	49,52	43,36	43,62	-	49,54	54,51	39,08
Puncak	48,07	49,25	48,86	49,28	27,32	33,15	-	42,95	43,57	48,26
Dogiyai	51,70	38,53	39,78	40,20	32,39	32,81	-	42,92	47,82	59,90
Intan Jaya	42,63	49,73	49,96	50,40	50,08	50,84	-	51,49	47,39	43,96
Deiyai	19,61	20,24	20,43	24,47	26,25	30,12	-	38,42	41,12	39,35
Kota Jayapura	70,54	72,63	71,45	74,02	77,93	74,98	-	78,89	83,41	82,75
Indonesia	68,15	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10	75,24

Sumber: www.bps.go.id, 2020

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA